



LAPORAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

LKj



***Papua yang Mandiri secara Sosial,
Budaya, Ekonomi dan Politik***

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua ini dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 kepada seluruh stakeholders.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026.

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2024 ini lebih diarahkan pada terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Realisasi Kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Materi LKj mengandung analisis pencapaian indikator sasaran dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua dengan mengacu pada Rencana



Pembangunan Daerah (RPD) untuk tahun yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) juga memuat informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Pemerintah Provinsi Papua dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan, juga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi Papua pada masa mendatang.

Capaian Sasaran Pemerintah Provinsi Papua yang diukur melalui indikator target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 adalah predikat “**Sangat Berhasil**”. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Papua.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan dalam rangka pengambilan kebijakan dan evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Papua.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat.

Jayapura, 5 Maret 2025


RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Rum)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	<i>Halaman</i> i
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v

**BAB
I**

PENDAHULUAN.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA.....	1
1.1.1. Kondisi Geografis	1
1.1.2. Kondisi Demografis	3
1.1.3. Kondisi Pemerintahan	6
1.1.4. Kondisi Perekonomian	9
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	11

**BAB
II**

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	13
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	13
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua 2024 - 2026..	13
2.1.2. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	20
2.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	22
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	23

**BAB
III**

AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA	33
3.2. CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA.....	36
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	192

**BAB
IV**

PENUTUP.....	202
A. SIMPULAN	202
B. UPAYA PERBAIKAN.....	205

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026;
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024;
3. REVIU LAPORAN KINERJA (LKj) PROVINSI PAPUA TAHUN 2024
OLEH INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA;
4. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DITERIMA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DI TAHUN 2024.



RINGKASAN EKSEKUTIF

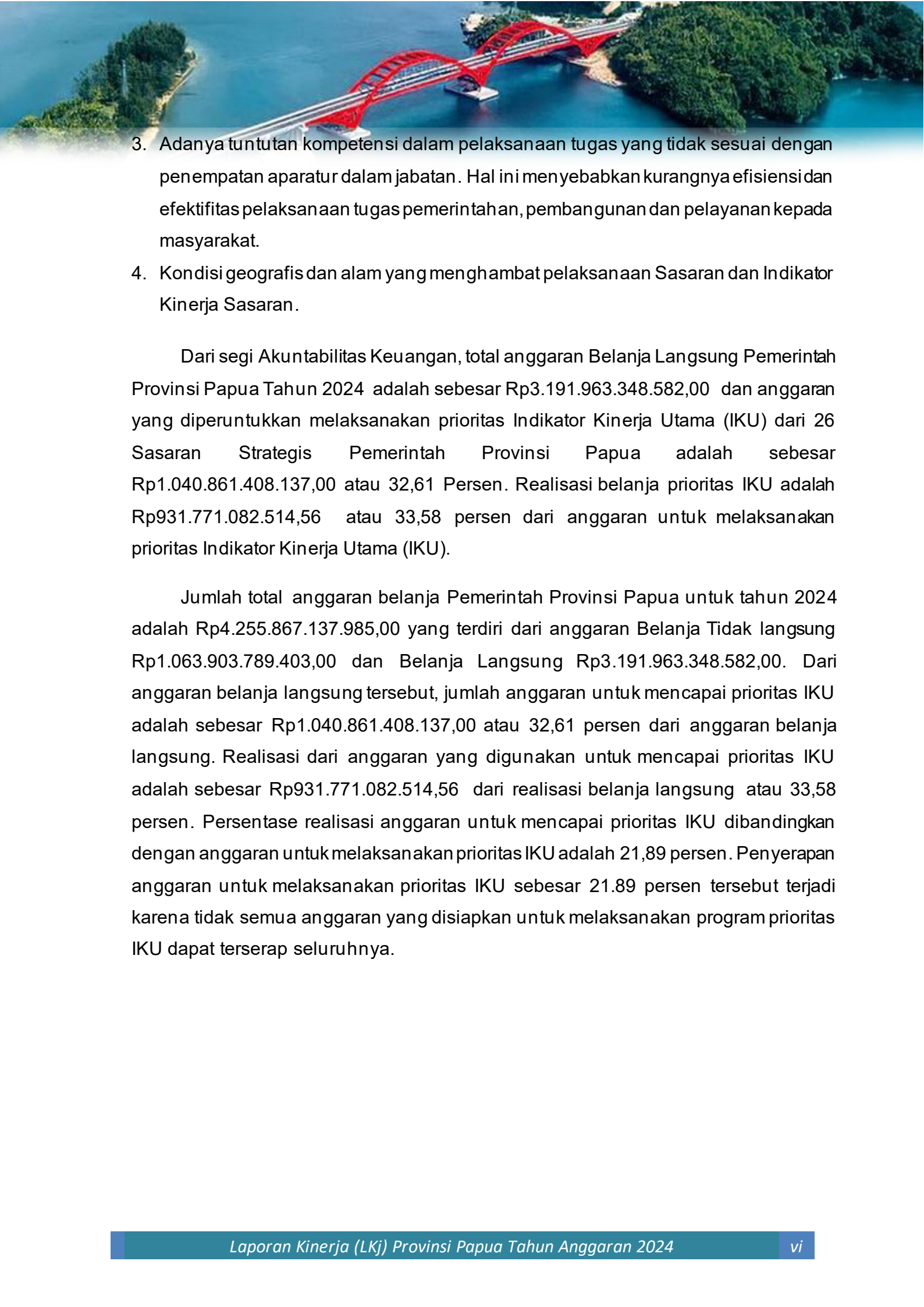
Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2024. Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 dapat dilihat dari keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran dari Target Indikator berdasarkan Rencana Kinerja 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Dari hasil pengukuran kinerja pada 26 (Dua Puluh Enam) Sasaran, dapat disimpulkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua **"Sangat Berhasil"**, hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja pelaksanaan masing-masing Sasaran sebagai berikut :

- ❖ 18 Sasaran termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil".
- ❖ 5 Sasaran termasuk dalam kategori "Berhasil".
- ❖ 1 Sasaran termasuk dalam kategori "Cukup Berhasil".
- ❖ 0 Sasaran termasuk dalam kategori "Kurang Berhasil".
- ❖ 2 Sasaran termasuk dalam kategori "Tidak Berhasil".

Secara umum masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan Target Kinerja, pengukuran dan evaluasi IKU yang belum dilaksanakan secara baik.
2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
 - 1) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024.
 - 2) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan.



3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Dari segi Akuntabilitas Keuangan, total anggaran Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.191.963.348.582,00 dan anggaran yang diperuntukkan melaksanakan prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 26 Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar Rp1.040.861.408.137,00 atau 32,61 Persen. Realisasi belanja prioritas IKU adalah Rp931.771.082.514,56 atau 33,58 persen dari anggaran untuk melaksanakan prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU).

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2024 adalah Rp4.255.867.137.985,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp1.063.903.789.403,00 dan Belanja Langsung Rp3.191.963.348.582,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp1.040.861.408.137,00 atau 32,61 persen dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp931.771.082.514,56 dari realisasi belanja langsung atau 33,58 persen. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 21,89 persen. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 21.89 persen tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.



BAB I





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA

1.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Papua secara geografis berada di antara garis koordinat 1° 8' 20.8752" LU - 4° 6' 58.626" LS dan 134° 5' 58.8444" - 141° 0' 37.5912" BT. Batas wilayah Provinsi Papua secara administratif meliputi:

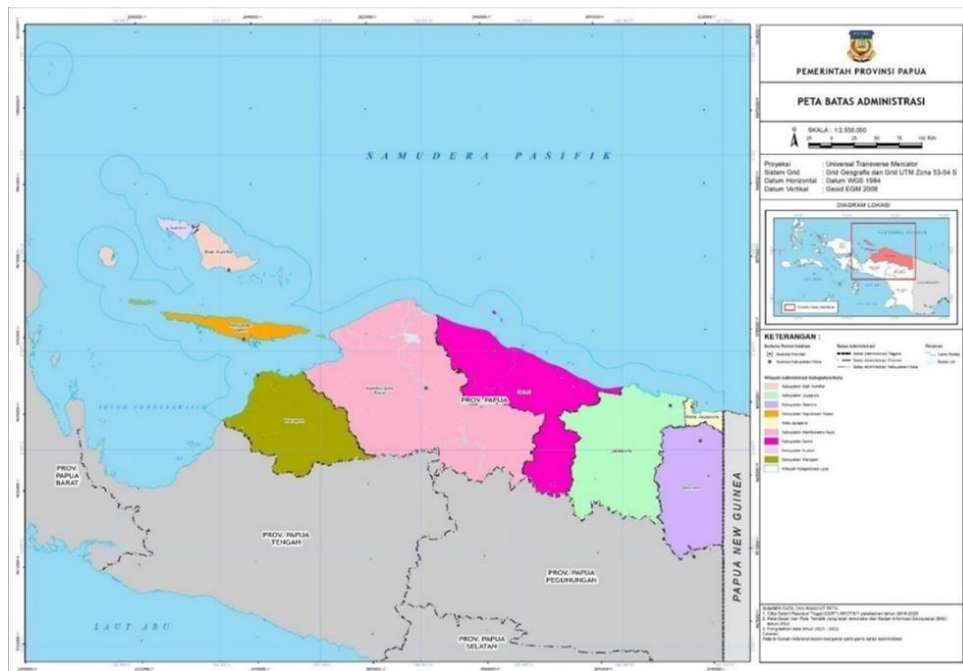
- a. Sebelah Utara : Samudra Pasifik;
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
- c. Sebelah Barat : Provinsi Papua Barat;
- d. Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea.

Provinsi Papua memiliki luas wilayah kurang lebih 13.158.285,28 hektar dengan batasan wilayah terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut seluas kurang lebih 13.158.285,38 hektar. Adapun wilayah darat memiliki luas kurang lebih 8.268.837,32 hektar dengan 8 kabupaten dan 1 kota di dalamnya yang dapat dilihat pada gambar peta. Kabupaten/kota di Provinsi Papua, yaitu:

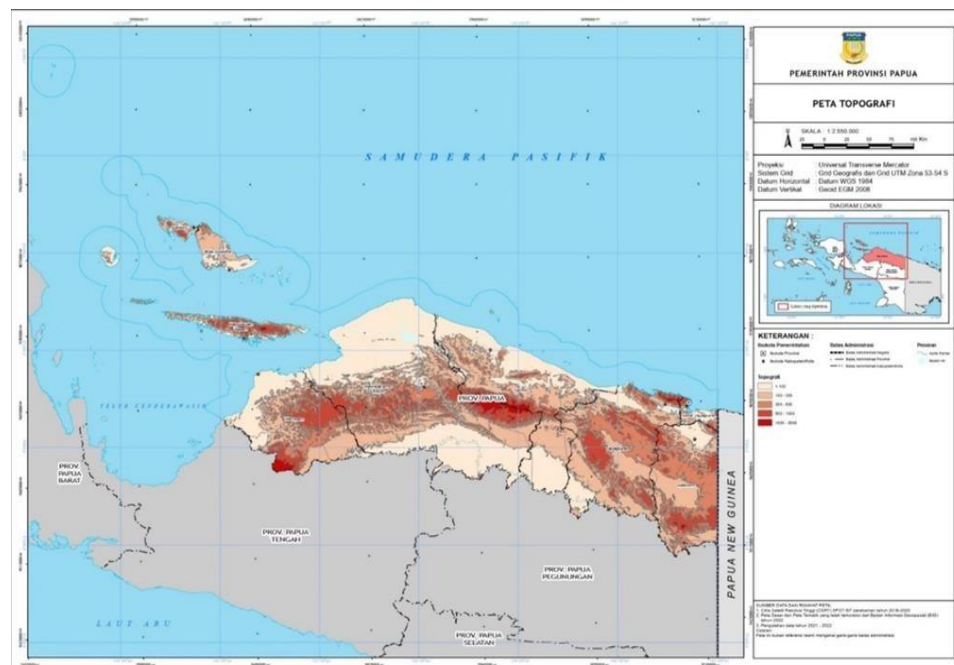
- a. Kota Jayapura;
- b. Kabupaten Jayapura;
- c. Kabupaten Keerom;
- d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
- e. Kabupaten Mamberamo Raya;
- f. Kabupaten Sarmi;
- g. Kabupaten Supiori;
- h. Kabupaten Biak Numfor; dan
- i. Kabupaten Waropen.



Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua



Gambar. 1.2 Peta Ketinggian Provinsi Papua

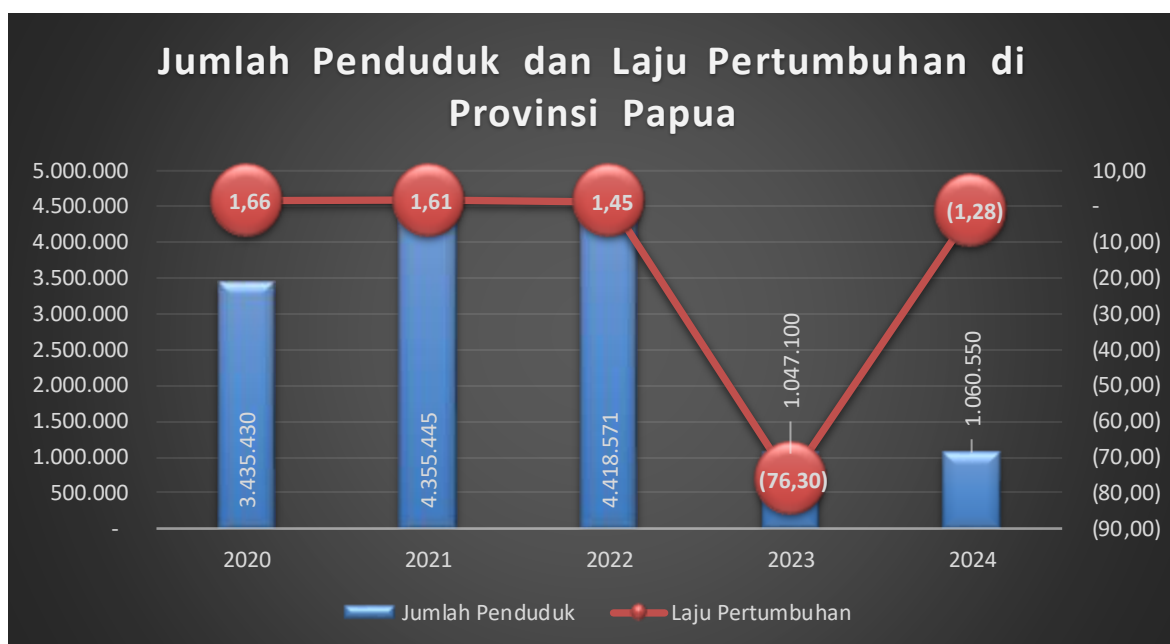




1.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Papua tahun 2024 adalah 1.060.551 jiwa yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kota Jayapura sebesar 420.577 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin sebesar 112.44 yang berarti terdapat 112 laki-laki setiap 100 Perempuan.

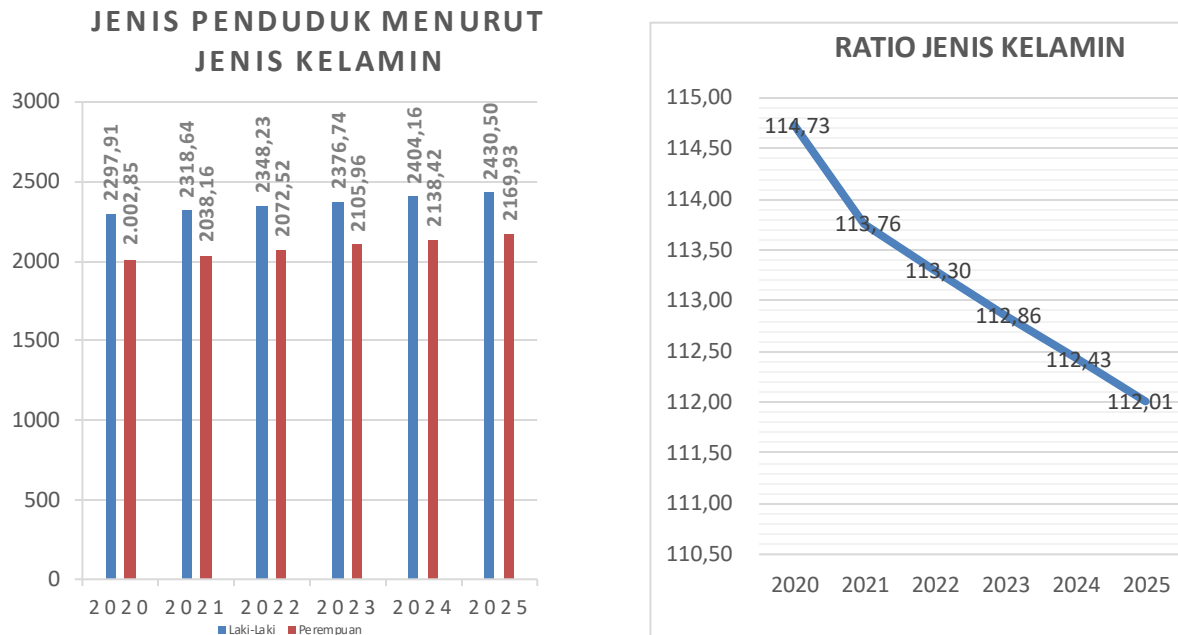
Grafik 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS, 2024



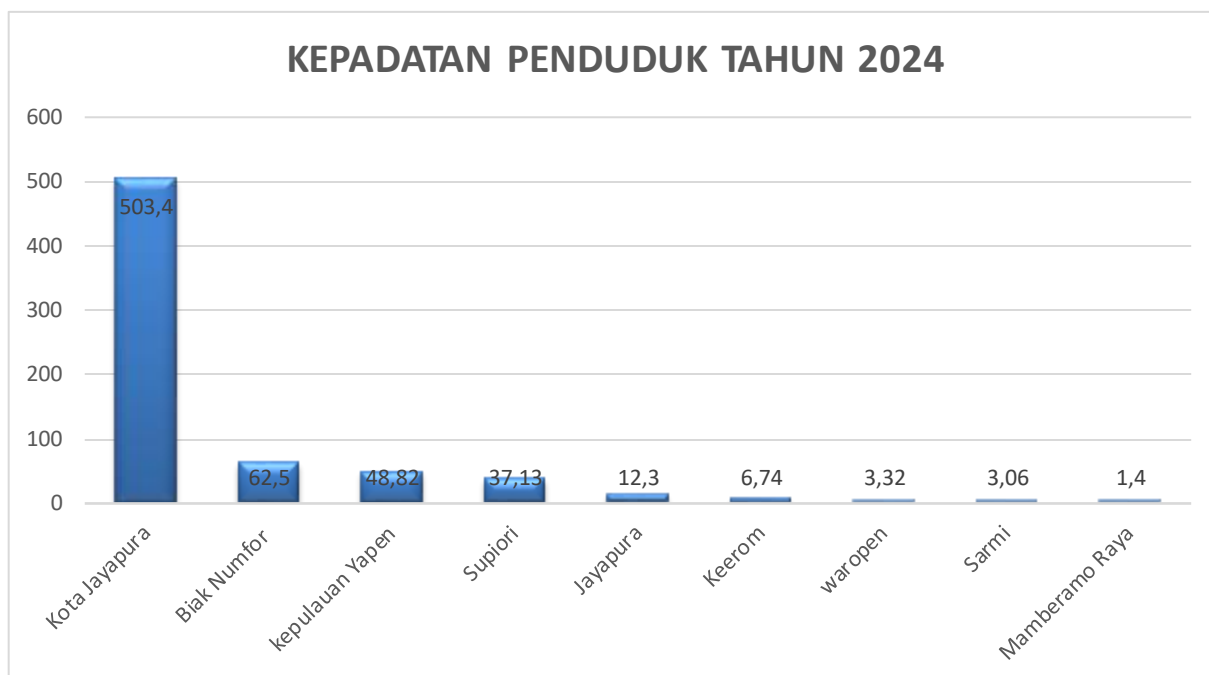
Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Sex di Provinsi Papua Tahun 2020-2024



[a] Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan [b] Rasio Sex

Dengan luas wilayah 82.680,95 km², kepadatan penduduk di Papua sebanyak 14,33 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Jayapura, yakni 503,40 jiwa per km², diikuti Kabupaten Biak Numfor (65,50 jiwa per km²) dan Kabupaten Kepulauan Yapen (48,82 jiwa per km²). Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, yakni kurang dari 1,40 jiwa per km².

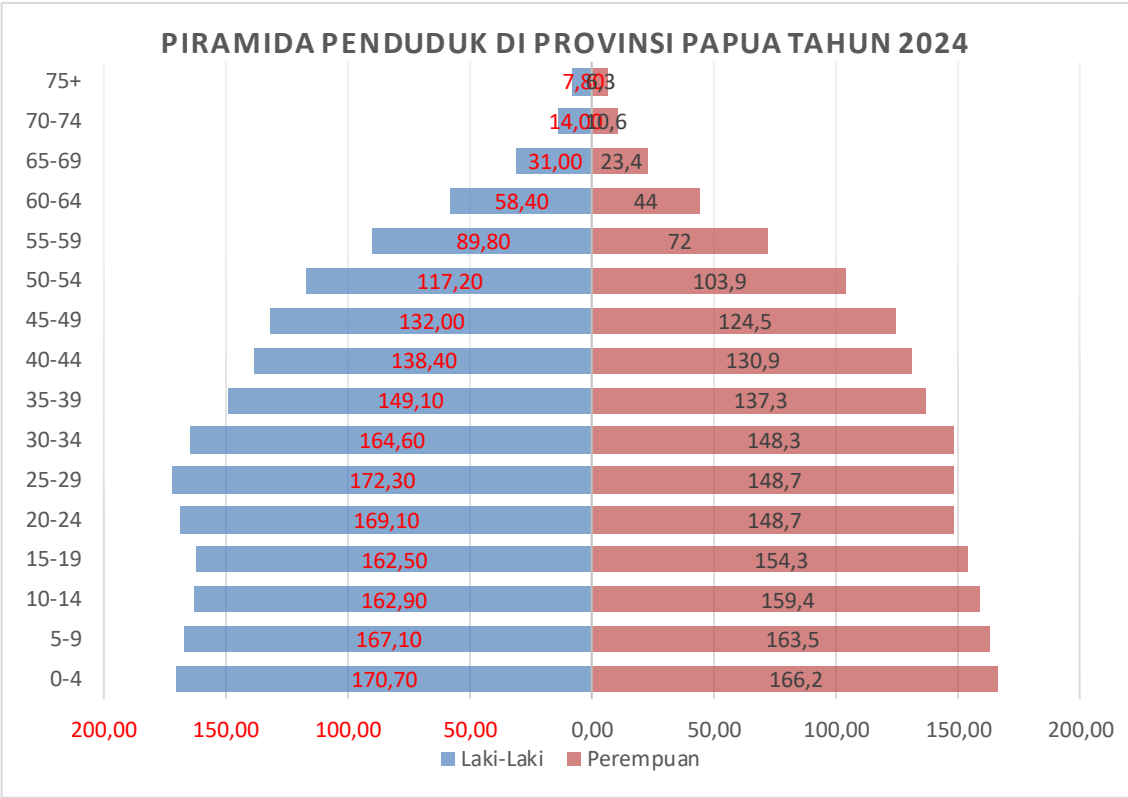
Grafik 1.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2024



Penduduk Papua berdasarkan kelompok umur ternyata didominasi oleh kelompok usia muda (0-4 tahun) bagi laki-laki dan kelompok usia muda (5-9 tahun) bagi perempuan. Kecilnya proporsi penduduk usia tua (kelompok usia 75 tahun keatas. Selain itu, komposisi penduduk seperti di atas menyebabkan rasio ketergantungan di Papua tahun 2024 cukup tinggi, yaitu sebesar **59,77 %**.

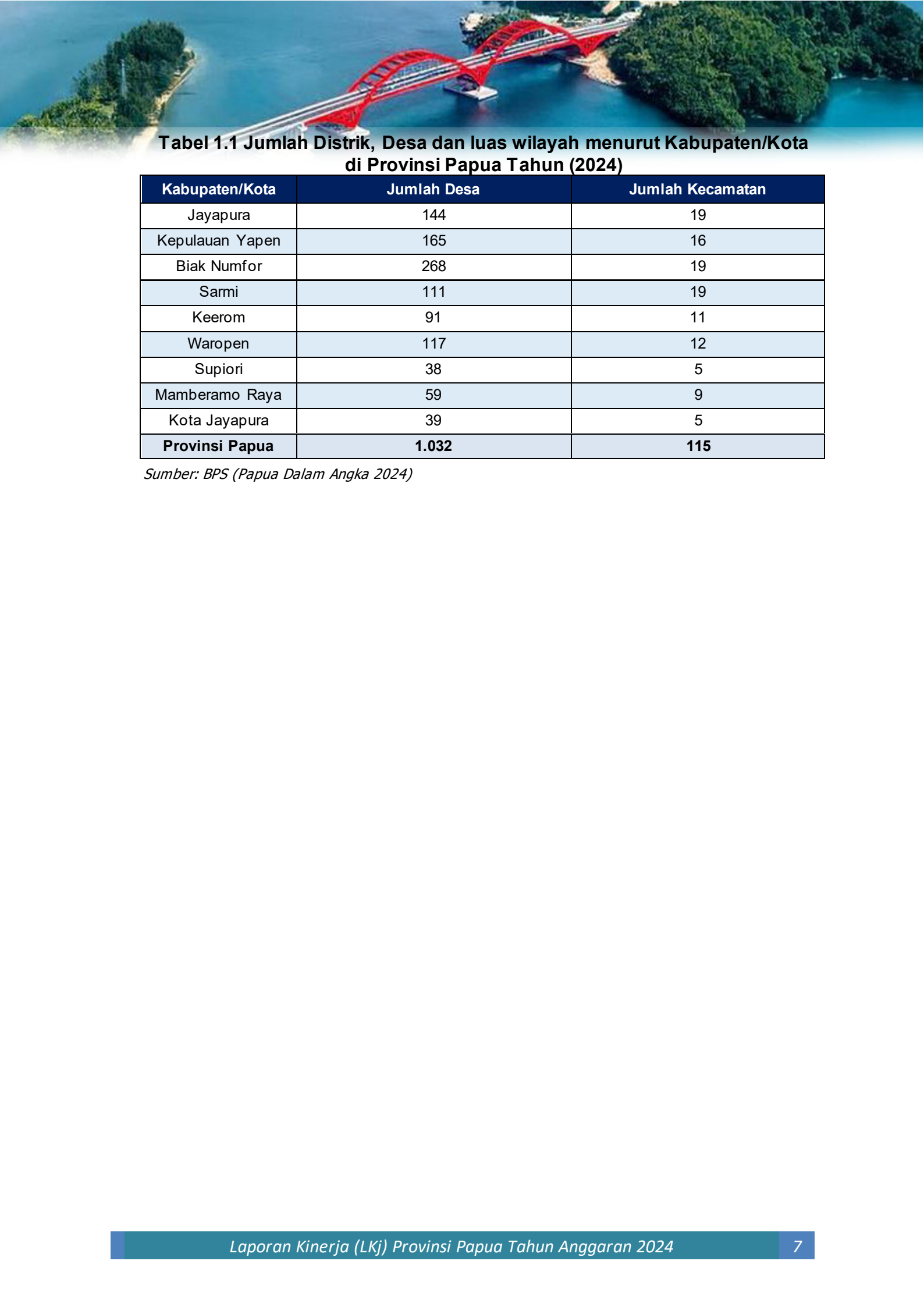


Grafik 1.4 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2024



1.1.3 Kondisi Pemerintahan

Provinsi Papua terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Secara lebih lanjut, Pada tahun 2023 Provinsi Papua tercatat memiliki 115 distrik dengan 1.032 kampung/kelurahan. Kabupaten Biak Numfor menjadi kabupaten dengan jumlah wilayah administratif distrik terbanyak di Provinsi Papua yaitu 19 distrik dan 268 kampung/ kelurahan. Selanjutnya, Kabupaten Supiori menjadi wilayah administratif dengan jumlah kampung terbanyak yaitu 38 kampung yang tersebar di 5 distrik.

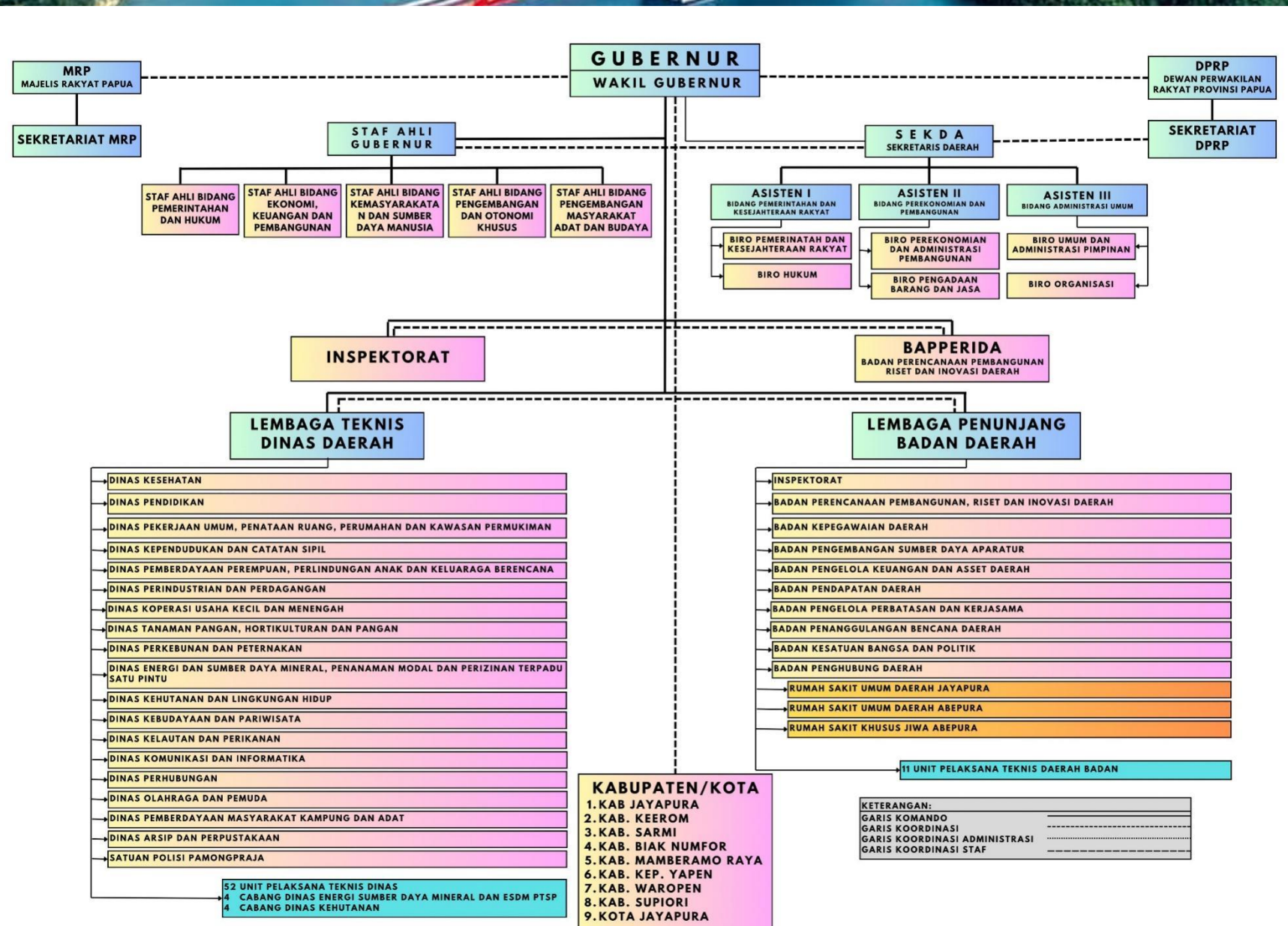


Tabel 1.1 Jumlah Distrik, Desa dan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun (2024)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah Kecamatan
Jayapura	144	19
Kepulauan Yapen	165	16
Biak Numfor	268	19
Sarmi	111	19
Keerom	91	11
Waropen	117	12
Supiori	38	5
Mamberamo Raya	59	9
Kota Jayapura	39	5
Provinsi Papua	1.032	115

Sumber: BPS (Papua Dalam Angka 2024)

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024



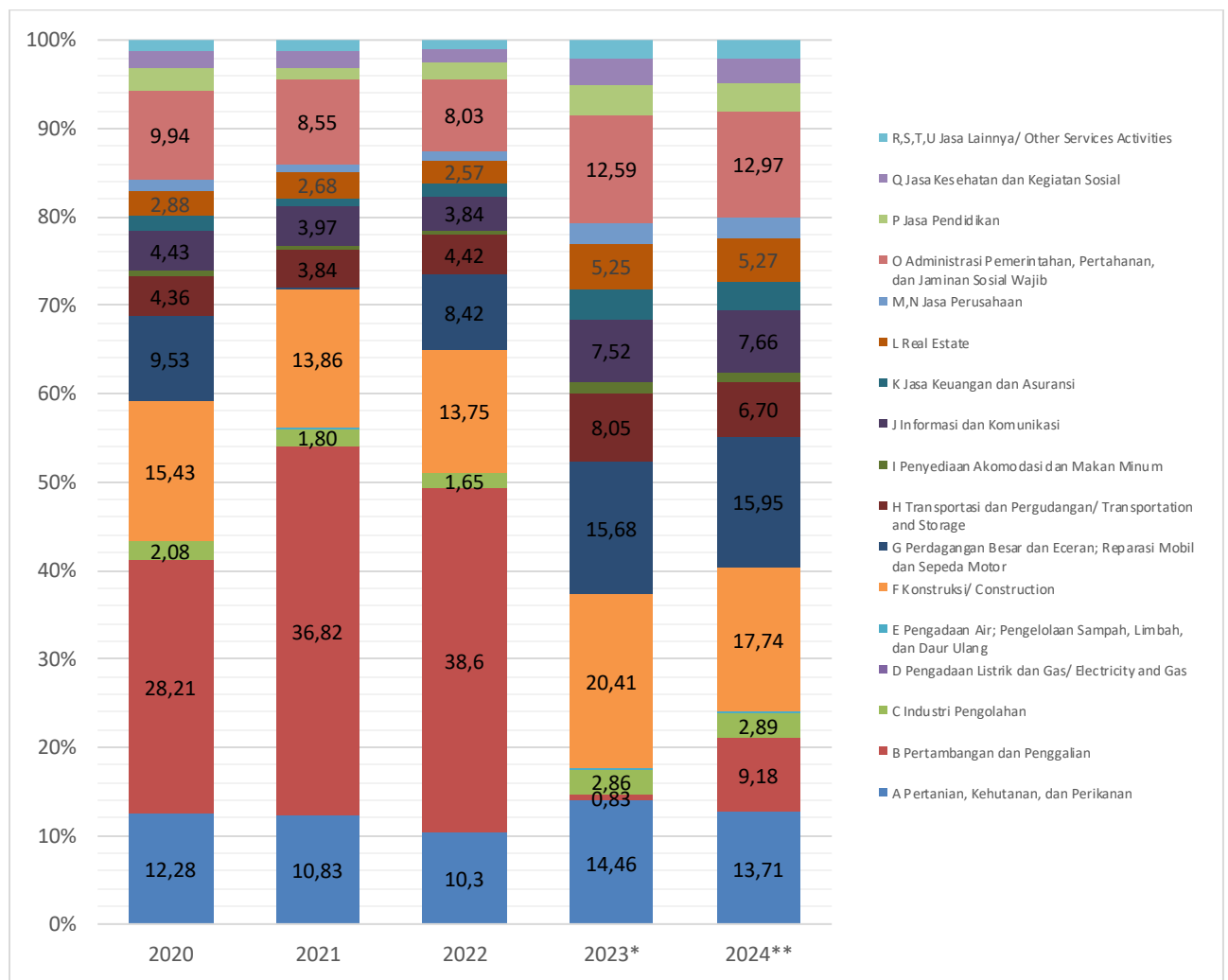


1.1.4 Kondisi Perekonomia

A. Struktur Ekonomi

Distribusi persentase PDRB ADHB terbesar menurut lapangan usaha tahun 2024 di Provinsi Papua pada kategori konstruksi 17,74 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,95 persen, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan 13,71 persen.

Grafik 1.5 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024

*) Angka Sementara
) Angka Sangat Sementara



B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah masing-masing 189.510,70 miliar rupiah (2019), 199.186,57 miliar rupiah (2020), 235.486,12 miliar rupiah (2021), 262.515,82 miliar rupiah (2022), 81.737,92 miliar rupiah (2023) dan 85.914,33(2024). Data tahun 2024 merupakan data PDRB ADHB Provinsi Papua.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2019 - 2024 (miliar rupiah)

TAHUN	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN
2019	189.510,70	134.565,89
2020	199.186,57	137.787,29
2021	235.487,47	158.675,15
2022*	262.519,79	172.907,29
2023*	81.737,92	49.549,83
2024**	85.914,33	51.587,16

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), adalah :

1. Merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.



1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja dan Penetapan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi.

3.2 Capaian, Analisis, dan Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran sasaran dan program yang mendukung sasaran, yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024-2026

Perjanjian Kinerja (PK) 2024

Penghargaan-Penghargaan



BAB II





BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2024-2026

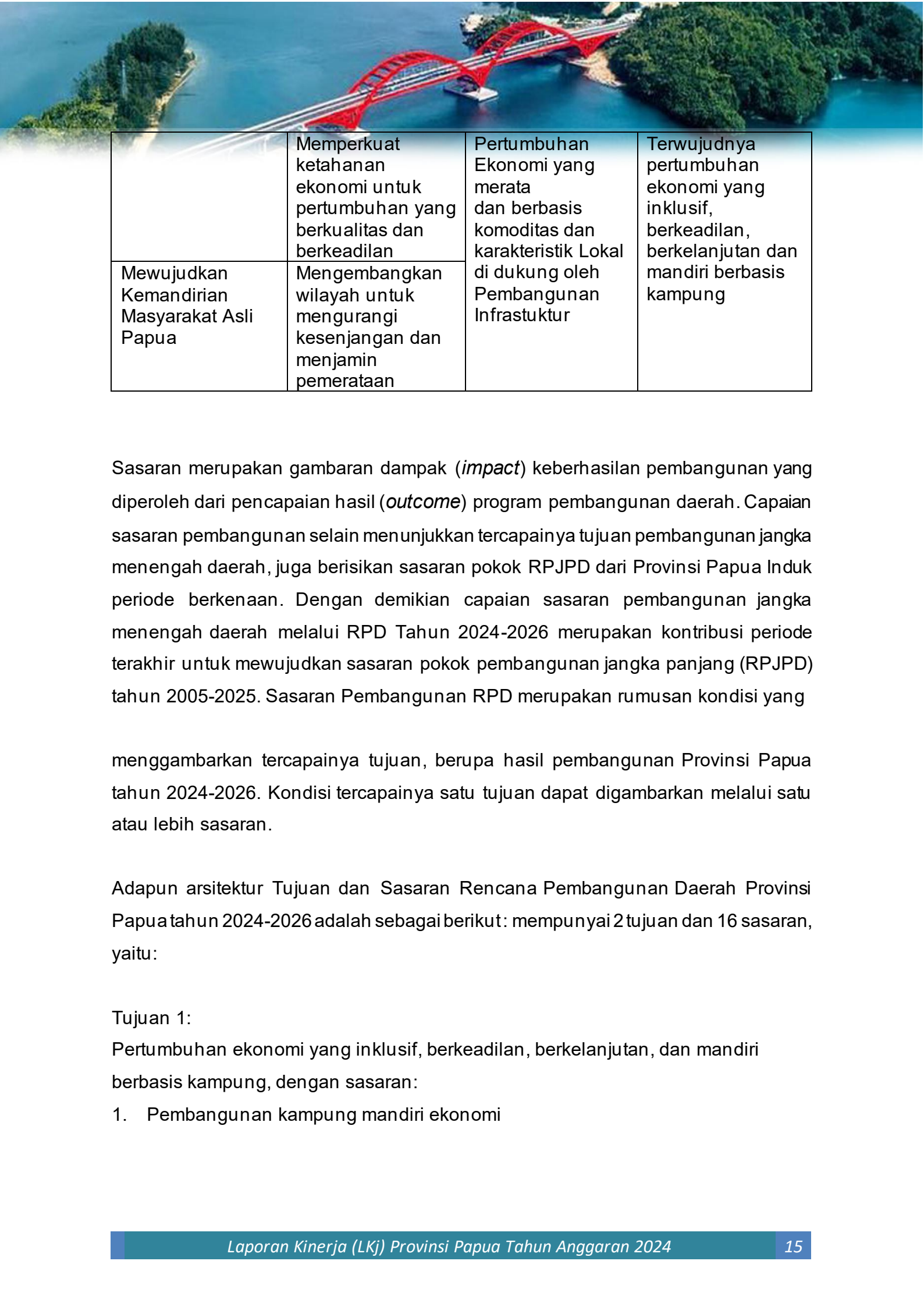
Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Papua juga disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab (IV) empat sebelumnya.



Tabel

Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN dan Isu Strategis Provinsi Papua terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Misi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025	Agenda Pembangunan RPJMN	Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023-2026	Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026
Mewujudkan Kemandirian Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing
Mewujudkan Kemandirian Budaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Mewujudkan Kemandirian Politik	Memperkuat stabiitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
		Pemantapan rasa aman dan suasana demokrasi yang kondusif sbg landasan utama pembangunan	
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan Kabupaten	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada Layanan Dasar dan Pasar
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan klim	



	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan berbasis komoditas dan karakteristik Lokal di dukung oleh Pembangunan Infrastruktur	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri berbasis kampung
Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		

Sasaran merupakan gambaran dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD dari Provinsi Papua Induk periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2024-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Sasaran Pembangunan RPD merupakan rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran.

Adapun arsitektur Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: mempunyai 2 tujuan dan 16 sasaran, yaitu:

Tujuan 1:

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, dengan sasaran:

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi



2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan
3. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada
4. pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
5. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan
6. pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
8. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
9. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah
10. komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi
11. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan
12. pendapatan
13. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

Tujuan 2:

Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun
3. aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah
4. Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan
5. ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
6. Menyiapkan papua gerbang ekspor
7. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
8. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
9. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah



Tujuan 3:

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat
3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

Tujuan 4:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Perumusan Tema RPD Tahun 2024 – 2026

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman

kepada kebijakan yang tertuang dalam RPJPPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, juga

dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

(RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021.

Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025

Sebagai bagian dari dokumen rencana jangka panjang, RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua. Penyelarasan

yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahap IV (tahun 2022 – 2025) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua. Adapun visi, misi,



dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

Visi RPJP: Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik

Misi RPJP :

1. Mewujudkan kemandirian sosial
2. Mewujudkan kemandirian budaya
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua

Pada periode pembangunan Tahap IV, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik seharusnya sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Hal ini akan ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal dan paham terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing.

Pada tahap IV ini, Provinsi Papua diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing. Dari sisi infrastruktur Provinsi Papua akan memiliki permukiman yang sehat, sistem penyediaan air bersih, jaringan energi listrik terbaharui, sanitasi lingkungan yang memadai, dan turut menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selain itu, Provinsi Papua juga diarahkan untuk memiliki presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.



Perumusan Tema RPD Tahun 2024 – 2026

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman

kepada kebijakan yang tertuang dalam RPJPPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, juga

dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

(RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021.

Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025

Sebagai bagian dari dokumen rencana jangka panjang, RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua. Penyelarasan

yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahap IV (tahun

2022 – 2025) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua.

Adapun visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

Visi RPJP: Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik

Misi RPJP :

1. Mewujudkan kemandirian sosial
2. Mewujudkan kemandirian budaya
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua



Pada periode pembangunan Tahap IV, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik seharusnya sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Hal ini akan ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal dan paham terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing.

Pada tahap IV ini, Provinsi Papua diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing. Dari sisi infrastruktur Provinsi Papua akan memiliki permukiman yang sehat, sistem penyediaan air bersih, jaringan energi listrik terbaharui, sanitasi lingkungan yang memadai, dan turut menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selain itu, Provinsi Papua juga diarahkan untuk memiliki presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

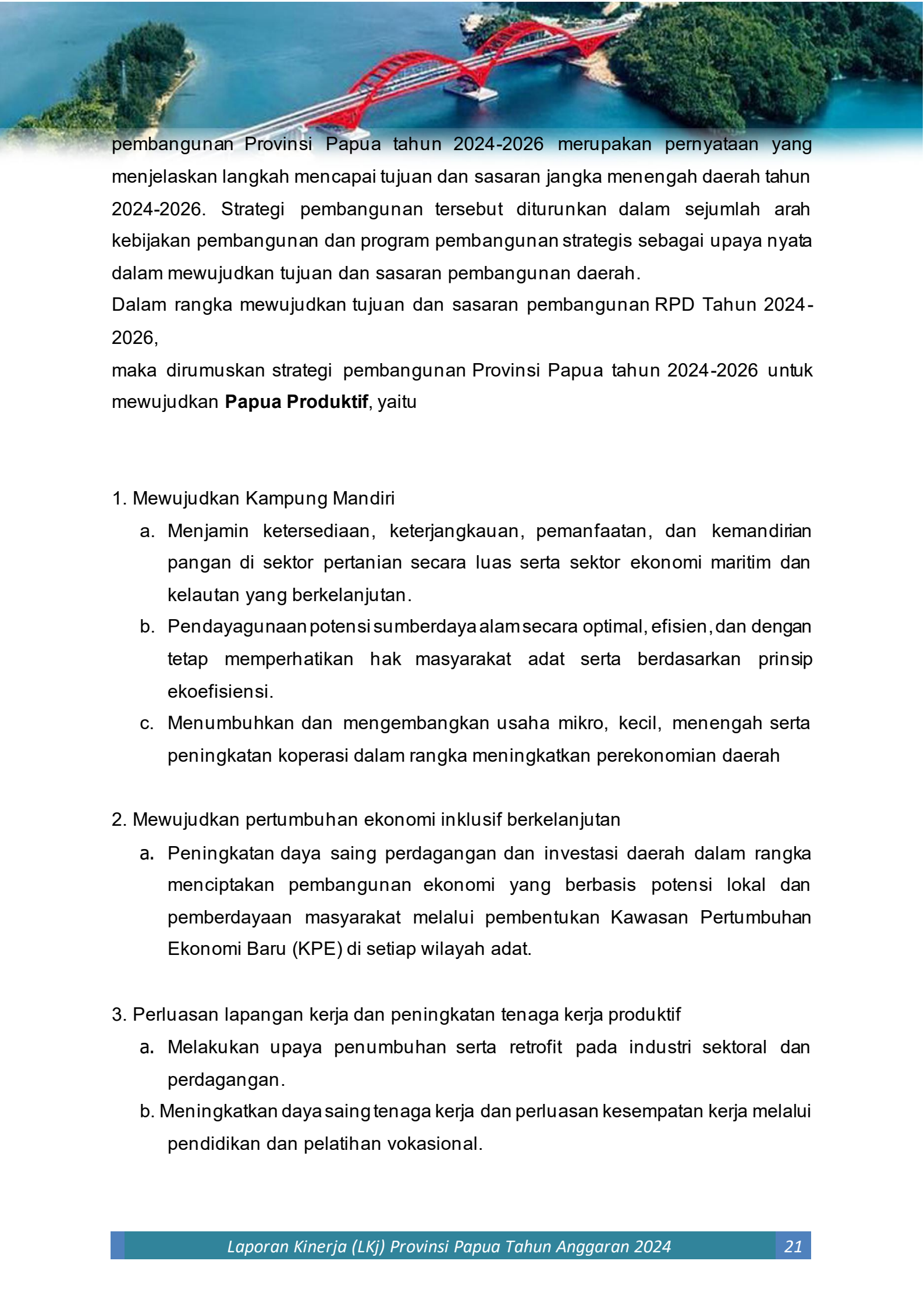
Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024

Strategi merupakan langkah berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam

upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan

dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas. Dengan demikian strategi



pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2024-2026. Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan strategis sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026,

maka dirumuskan strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 untuk mewujudkan **Papua Produktif**, yaitu

1. Mewujudkan Kampung Mandiri

- a. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan di sektor pertanian secara luas serta sektor ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan.
- b. Pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara optimal, efisien, dan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat serta berdasarkan prinsip keefisiensi.
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah serta peningkatan koperasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan

- a. Peningkatan daya saing perdagangan dan investasi daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru (KPE) di setiap wilayah adat.

3. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif

- a. Melakukan upaya penumbuhan serta retrofit pada industri sektoral dan perdagangan.
- b. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasional.



- c. Meningkatkan kualitas pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*development skill centre*) melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi

pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (*cluster*) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua.

Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2024 yang sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka Tema pembangunan di Tahun 2024 adalah :

“Mewujudkan masyarakat Papua yang Mandiri dalam segala bidang dalam Tata Kehidupan yang harmonis dan Selaras”,

maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 sebagai berikut :



1. Prioritas

Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM

2. Prioritas

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan

3. Prioritas

Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah

4. Prioritas

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

5. Prioritas

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada antara Gubernur yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja dalam hal ini masyarakat. Dengan demikian, Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Gubernur dan Wakil Gubernur.

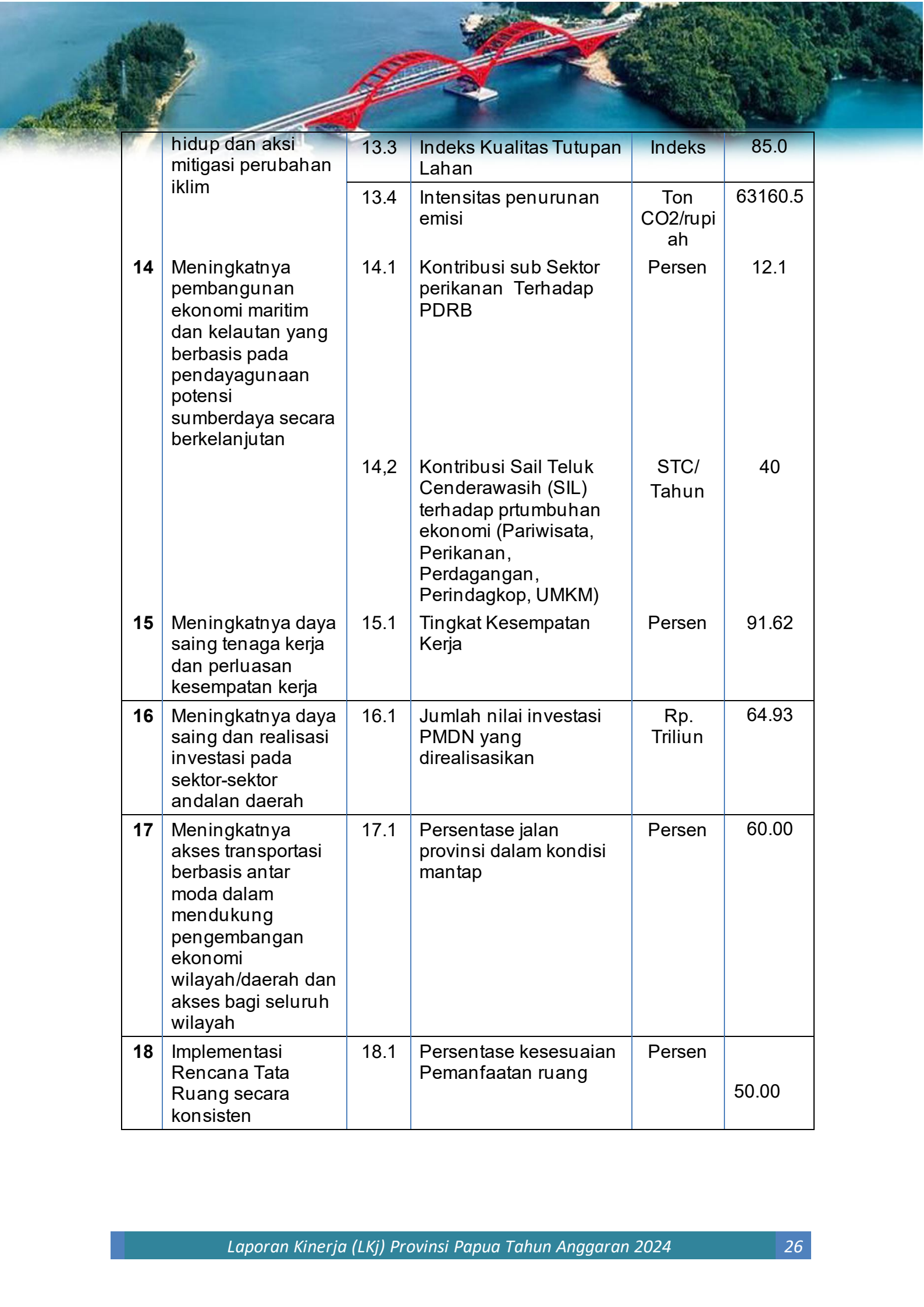
Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPD dan IKU, RKPD tahun 2024, serta APBD Provinsi Papua tahun 2024. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Provinsi Papua Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.42
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.23
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	80.8
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.4
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	15
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	76.2
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.0
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7610
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78.68
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	95.0
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	50.0
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60.0
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	100



9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	BB
		9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	95.00
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPD	Persen	95.0
		10.2	Tingkat konsistensi KUAPPAS terhadap RKPD	Persen	95.0
		10.3	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP	Persen	95.0
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14.27
		11.3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Persen	66.1
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	5.5
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	6.0
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	6.0
13	Meningkatnya kualitas lingkungan	13.1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95.0
		13.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	80.0



14	hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85.0
	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	63160.5
		14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	Persen	12.1
		14.2	Kontribusi Sail Teluk Cenderawasih (SIL) terhadap pertumbuhan ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM)	STC/Tahun	40
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91.62
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	64.93
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	60.00
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	50.00



19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	81.00
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	41.00
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	45.5
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	indeks	52.00
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	73.5
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	12.05
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	68.8
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	14.1
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan Warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	ribu orang per tahun	60
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	60
			Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang



26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	80.01
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	65.01

Tabel 2.3 Belanja Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024

(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

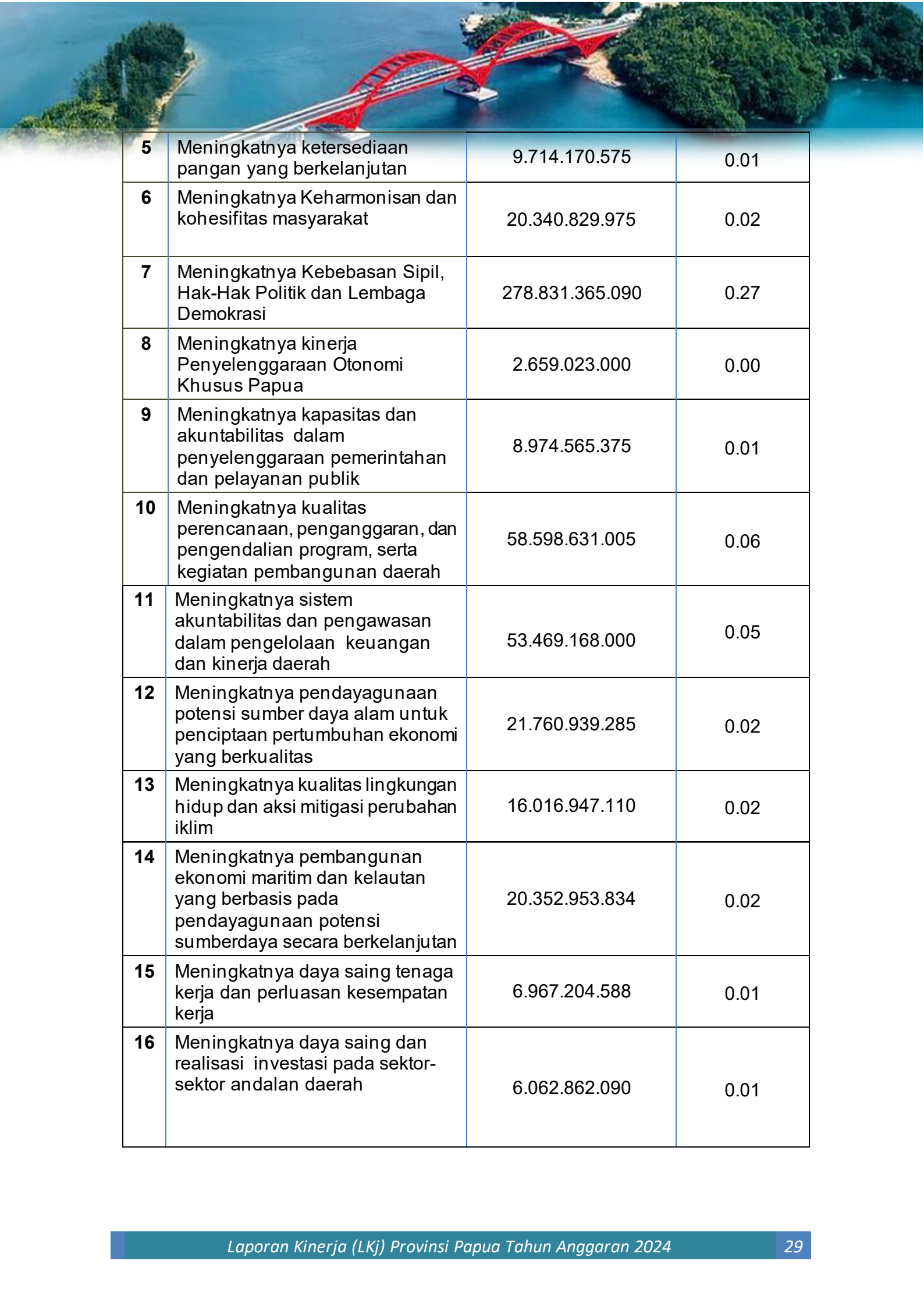
No	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.063.903.789.403.00	0,25
2	Belanja Langsung	3.191.963.348.582.00	0,75
JUMLAH		4.255.867.137.985,00	100

Sumber: BPKAD Provinsi Papua

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Persen
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	42.016.005.191	0.00
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	154.511.899.105	7.00
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	48.833.575.180	0.05
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	661.703.900	0.00



5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	9.714.170.575	0.01
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	20.340.829.975	0.02
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	278.831.365.090	0.27
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	2.659.023.000	0.00
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	8.974.565.375	0.01
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	58.598.631.005	0.06
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	53.469.168.000	0.05
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	21.760.939.285	0.02
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	16.016.947.110	0.02
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	20.352.953.834	0.02
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	6.967.204.588	0.01
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	6.062.862.090	0.01



17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	46.257.572.344	0.04
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	19.849.198.567	0.02
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	80.150.000.000	0.08
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1.019.008.000	0.00
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	3.000.450.000	0.00
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	923.997.330	0.00
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	6.350.013.397	0.01
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	1.802.526.670	0.00
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	130.543.274.132	0.13
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	1.193.524.394	0.00
Anggaran Prioritas IKU		1,040,861,408,137	32.61
Belanja Langsung		3,191,963,348,582	



Pada tabel di atas, pada pos belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang **Utama** dan anggaran untuk Belanja Langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan Utama sebesar Rp. **1,040,861,408,137.00** atau sebesar **32.61** persen dari total Belanja Langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan **Pendukung** sebesar Rp. **3.191.963.348.582.00** atau **2,15** persen dari total anggaran Belanja Langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran 5 pembangunan dengan anggaran paling besar adalah Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan besaran anggaran 7.00 persen dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relative besar yang kedua adalah Sasaran 7 yaitu Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi yaitu sebesar 0.27 persen kemudian Sasaran terbesar Ketiga adalah Sasaran 25 yaitu Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu sebesar 0.13 persen. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil sebesar 0.00 persen dari total anggaran belanja langsung adalah yaitu Sasaran 4 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, juga Sasaran 22 yaitu Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP dengan anggaran 0.00 persen juga Sasaran 20 Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman dengan anggaran 0.00 persen.



BAB III





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah pemerintah daerah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana kinerja dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Karena itu Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen membangun akuntabilitas melalui pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Tabel. Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.42	10.7	127.07
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.23	13.72	103.70
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	80.8	98.37	121.75
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.4	68.79	97.71
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional	Atlet	15	50	333.33
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	76.2	60	78.74
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.0	9	128.6
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	76.10	11.037	145.0
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78.68	100	127.9
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	95.0	100	105.3
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	50.0	60.10	120.2
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60.0	100	166.7
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	100	96.64	96.64
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	66.85
		9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	95.00	90.00	94.73
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPD	Persen	95.00	90.00	94.73
		10.2	Tingkat konsistensi KUAPPAS terhadap RKPD	Persen	95.00	100.00	105.26
		10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP	Persen	95.00	100.00	105.26



11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100.00
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14.27	22.09	154.80
12	Meningkatnya pendayagunaan	11.3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Persen	66.01	97.27	147.15
		12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	5.5	1.29	23.45
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	6.0	1.57	26.17
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	6.0	0.88	14.67
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95.0	95.17	100.18
		13.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	80.0	52.5	65.63
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85.0	100	117.65
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupee	63160.5	0.298	100.33
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	Persen	12.01	8.04	66.45
		14.2	Kontribusi Sail Teluk Cenderawasih (SIL) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM)	STC/Tahun	40.00	42.91	107.28
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91.62	97.20	106.09
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	64.93	10.44	16.07
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	60.00	41.61	69.35
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	50.00	97.39	194.78
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	81.00	75.80	92.60



20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	41.00	64.00	156.09
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	45.05	93.09	204.60
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	52.00	42.29	81.32
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	73.50	91.57	124.6
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	12.5	10.33	82.64
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	68.8	70.97	103.15
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	14.1	12.69	90
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	ribu orang per tahun	60.00	33.43	55.71
		24.2	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	60.00	70.22	117.04
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	80.01	81.64	102.03
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65.01	65.70	101.06



3.2 CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA

Kesepakatan skala ordinal penilaian untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel. Skala Ordinal

NOMOR	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	$91 \geq$	Sangat berhasil
2.	$76 \geq 90$	Berhasil
3.	$66 \geq 75$	Cukup berhasil
4.	$51 \geq 65$	Kurang berhasil
5.	$0 \geq 50$	Tidak berhasil

Pengukuran Kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana program, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka perwujudan visi Papua Bangkit Mandiri, Sejahtera yang berkeadilan.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan penyebab ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Pemerintah Provinsi Papua memiliki struktur organisasi sebagai pelaksana kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Strategik tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang yang menangani pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pencapaian sasaran - sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah sebanyak 26 Sasaran Strategis, dan Capaian yang dihasilkan berdasarkan Kategori Pencapaian Sasaran adalah sebagai berikut :



Sasaran 1 :

Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang penting. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan yaitu Akses, Mutu dan Tata Kelola. Secara makro akses pendidikan dapat diindikasikan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sementara untuk Mutu pendidikan salah satunya dapat digambarkan melalui kecenderungan indikator angka melek huruf serta Tata Kelola pendidikan dapat dilihat dari sisi manajemen pengelolaan pendidikan secara kotinyu dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2024”** sebesar **117.51** persen dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja asaran yaitu :

- 1). Rata-rata Lama Sekolah;
- 2). Harapan Lama Sekolah;
- 3). Angka Melek Huruf.

Berikut Target Indikator Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,42	10,7	127,07
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	13,72	103,70
3	Angka Melek Huruf	Persen	80,8	98,37	121,75
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					117.51

Dari gambaran data di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan



sebagai Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua tahun 2024 khususnya pada sasaran kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) pencapaiannya 117.51 persen. Artinya pencapaian target sasaran strategis pada indikator kinerja sebagaimana dalam Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua tahun 2024 telah menunjukkan prestasi **“sangat berhasil”**.

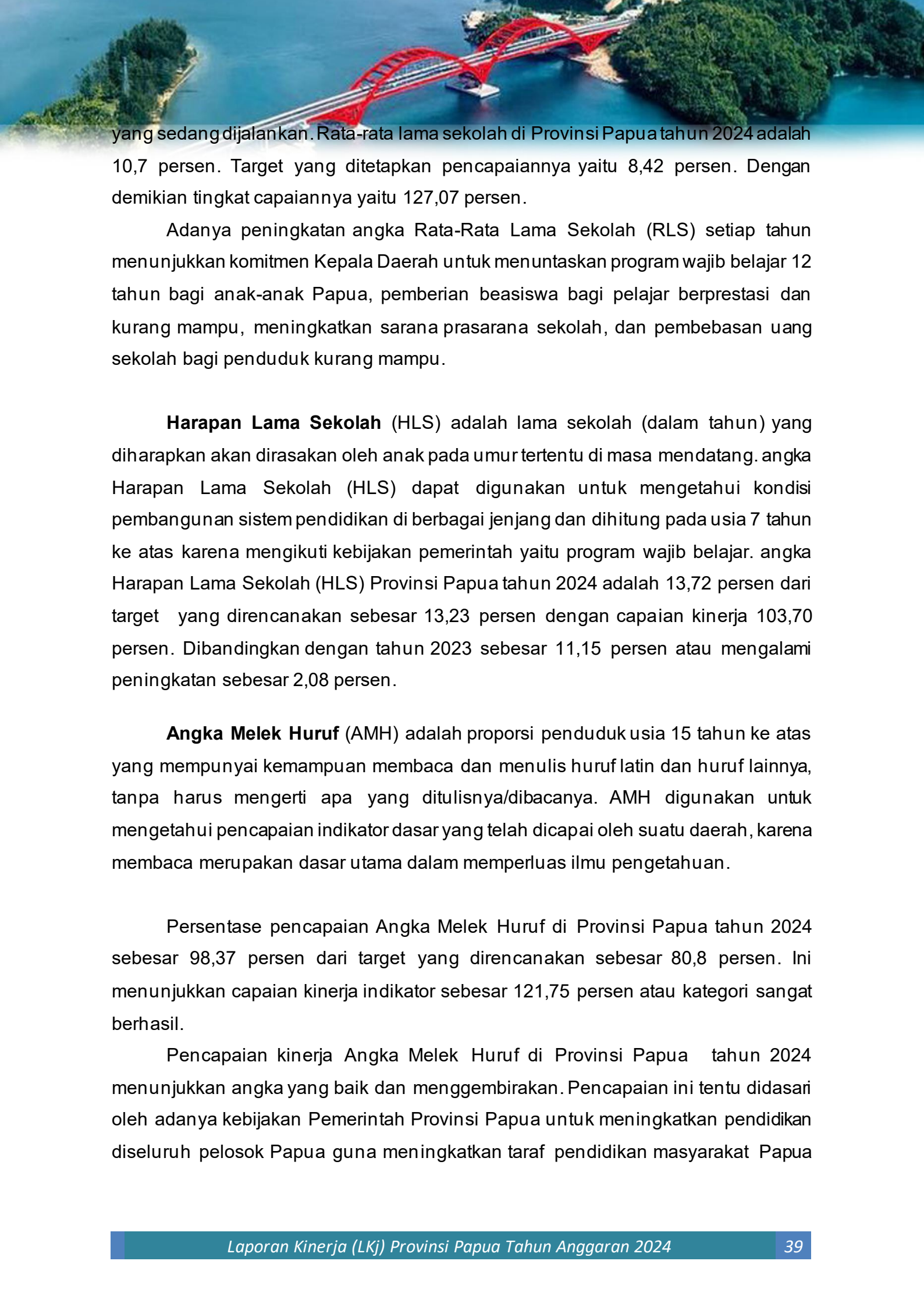
Berikut tabel perbandingan dari Sasaran Strategis **“Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan”** dari tahun 2023-2024 sebagai berikut :

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2023-2024**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun					
		2023			2024		
		TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,20	7,15	87,20	8,42	10,7	127,07
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,00	11,15	92,92	13,23	13,72	103,70
Angka Melek Huruf	Persen	80,00	84,22	105,28	80,8	98,37	121,75
Capaian Indikator Kinerja				95,13			117,51

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Angka **Rata-Rata Lama Sekolah** (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas (di Provinsi Papua) untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat Pendidikan



yang sedang dijalankan. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua tahun 2024 adalah 10,7 persen. Target yang ditetapkan pencapaiannya yaitu 8,42 persen. Dengan demikian tingkat capaiannya yaitu 127,07 persen.

Adanya peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) setiap tahun menunjukkan komitmen Kepala Daerah untuk menuntaskan program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Papua, pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu, meningkatkan sarana prasarana sekolah, dan pembebasan uang sekolah bagi penduduk kurang mampu.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Papua tahun 2024 adalah 13,72 persen dari target yang direncanakan sebesar 13,23 persen dengan capaian kinerja 103,70 persen. Dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 11,15 persen atau mengalami peningkatan sebesar 2,08 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang ditulisnya/dibacanya. AMH digunakan untuk mengetahui pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Persentase pencapaian Angka Melek Huruf di Provinsi Papua tahun 2024 sebesar 98,37 persen dari target yang direncanakan sebesar 80,8 persen. Ini menunjukkan capaian kinerja indikator sebesar 121,75 persen atau kategori sangat berhasil.

Pencapaian kinerja Angka Melek Huruf di Provinsi Papua tahun 2024 menunjukkan angka yang baik dan menggembirakan. Pencapaian ini tentu didasari oleh adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan pendidikan diseluruh pelosok Papua guna meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Papua



melalui berbagai program dan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat hingga ke kampung-kampung. Disamping itu urusan pendidikan memang merupakan prioritas pembangunan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024.

Namun demikian disadari pula bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pendidikan di Provinsi Papua ke arah yang lebih baik sangatlah besar antara lain ketersediaan guru-guru di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas masih kurang dibandingkan luas wilayah di Provinsi Papua, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang relatif terbatas, tingkat kemahalan barang dan jasa yang sangat tinggi. Demikian halnya hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap proses peningkatan pendidikan di Provinsi Papua.



Sasaran 2 :

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan sebuah konsep yang menurut Handrik L. Blum dalam Effendi⁽¹⁾ dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu : lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik. Derajat kesehatan individu atau kelompok (masyarakat) digambarkan sebagai profil kesehatan masyarakat di suatu daerah, dimaksudkan dalam sasaran 2 ini adalah Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Papua.

Rata-rata capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** sebesar **97,71** persen dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu **Angka Harapan Hidup**. Target Indikator Kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Angka Harapan Hidup	tahun	70,4	68,79	97,71
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					97,71

Capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 96.03 persen atau turun sebesar 1.68 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama 2 (Dua) tahun sejak Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN					
			2023			2024		
			TARGET	REALI SASI	CAPA IAN	TARGET	REALI SASI	CAPA IAN
1.	Angka Harapan Hidup		69,6	66,84	96,03	70,4	68,79	97,71

Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu wilayah menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Secara umum Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh adalah angka kematian dari berbagai penyebab, baik penyebab penyakit menular, penyakit tidak menular, maupun penyebab kematian yang lainnya. Dalam kaitannya dengan kesehatan yang dipengaruhi kematian diantaranya adalah : Angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian anak balita dan angka kematian penyakit menular.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan usia harapan hidup adalah program dan kegiatan untuk menurunkan angka kematian yang mendukung siklus kehidupan meliputi :

1. Pelayanan kesehatan pada Bumil dan Buvas;
2. Pelayanan Kesehatan pada Bayi dan Balita;
3. Pelayanan Kesehatan pada Usia Dini (PAUD);
4. Pelayanan Kesehatan pada Usia Sekolah Dasar;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Remaja;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia;
8. Pelayanan Imunisasi dan Pencegahan penyakit;
9. Pelayanan kesehatan Gizi Kesehatan Masyarakat;
10. Pelayanan Promosi Kesehatan;
11. Pelayanan kesehatan lingkungan;



Tentunya hampir semua pelayanan kesehatan yang dilakukan baik pelayanan promotive, preventif dan kuratif adalah pelayanan untuk meningkatkan angka harapan hidup (AHH). Oleh karena itu semua program atau kegiatan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular adalah kegiatan untuk mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup.



Sasaran 3 :

Sukses Pelaksanaan dan Prestasi Olahraga

Secara keseluruhan rata-rata Capaian kinerja sasaran **“Sukses Pelaksanaan dan Prestasi Olahraga”** sebesar **333.33** Persen dengan predikat **“Sangat Berhasil”**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Jumlah Atlet Berprestasi pada Event Olahraga Nasional	Atlit	15	50	333.33
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					333.33

Secara keseluruhan capaian kinerja Sasaran “Sukses Pelaksanaan dan Prestasi Olahraga” mengalami peningkatan di tahun 2024 yaitu sebesar 333.33 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 125 persen atau naik 20.83 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target realisasi dan capaian kinerja dari sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga pada tabel berikut ini :

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2023-2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2023			2024		
			TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Atlet Berprestasi pada Event Olahraga Nasional	Atlet	100	125	125	15	50	333.33

Indikator jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional dengan target 50 atlet terealisasi 50 persen dengan capaian kinerja 333.33 dengan kategori “Sangat Berhasil”. Capaian Kinerja di 2024 meningkat karena Target yang diberikan juga turun yaitu 50 Atlet tidak seperti Tahun 2023 yaitu Target 100 Atlet yang Papua Tuan Ruman PON XX. Untuk Tahun 2024 Papua mengikuti PON XXI di Aceh Sumatera Utara (Sumut) dimana ada 43 Atlet yang menerima penghargaan di tingkat Nasional dalam even PON XXI Aceh Sumut dari 86 Atlet yang dibina.

Terkait 43 Atlet yang mendapatkan Medali yaitu 19 Emas, 26 Perak dan 23 Perunggu. 43 Atlet yang mendapatkan Penghargaan di PON XXI Aceh Sumut yaitu 19 Emas dari Cabang Olahraga (Cabor) Menembak, Renang, Panjat Tebing, Angkat Besi, Layar, Selam, Dayung, Muaythay dan Biliarsedangkan 26 Perak didapatkan dari Cabor Menembak, Renang, Panjat Tebing, Muaythay, Biliar, Dayung dan Selam, kemudian 23 Perunggu didapatkan dari Cabor Menembak, Renang, Panjat Tebing, Selam, Dayung, Layar dan Muaythay.

Target 50 Atlet menjadi kecil tidak sebanding dengan Target 2023 karena Faktor Dukungan Pendanaan yang belum optimal sehingga mempengaruhi penurunan Target di 2024.



Sasaran 4 :

Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Pemuda sangat dibutuhkan pada setiap proses pembangunan di Indonesia dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat adil dan makmur. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif menunjukkan bahwa pemuda berinisiatif memulai proses kegiatan demi perubahan kearah yang lebih baik. Partisipasi masyarakat termasuk pemuda dalam pembangunan sangat diperlukan mengingat pemuda merupakan agen penggerak perubahan. Pemerintah harus mampu membuka akses seluas-luasnya bagi para pemuda untuk melibatkan diri dalam setiap proses pembangunan sehingga kreativitas dan inovasi para pemuda dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Pemuda perlu diberikan wadah bagi mereka merancang gagasan serta melaksanakan program-program pembangunan di Indonesia. Ketersediaan wadah bagi pemuda untuk mengembangkan diri serta membantu pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “ meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah” mencapai **78.74** persen dengan predikat “**Berhasil**” keberhasilan sasaran ini diukur melalui 1 (Satu Indikator) yaitu Persentase Organisasi Pemuda Aktif. Target indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	Persen	76.2	60	78.74
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					78.74



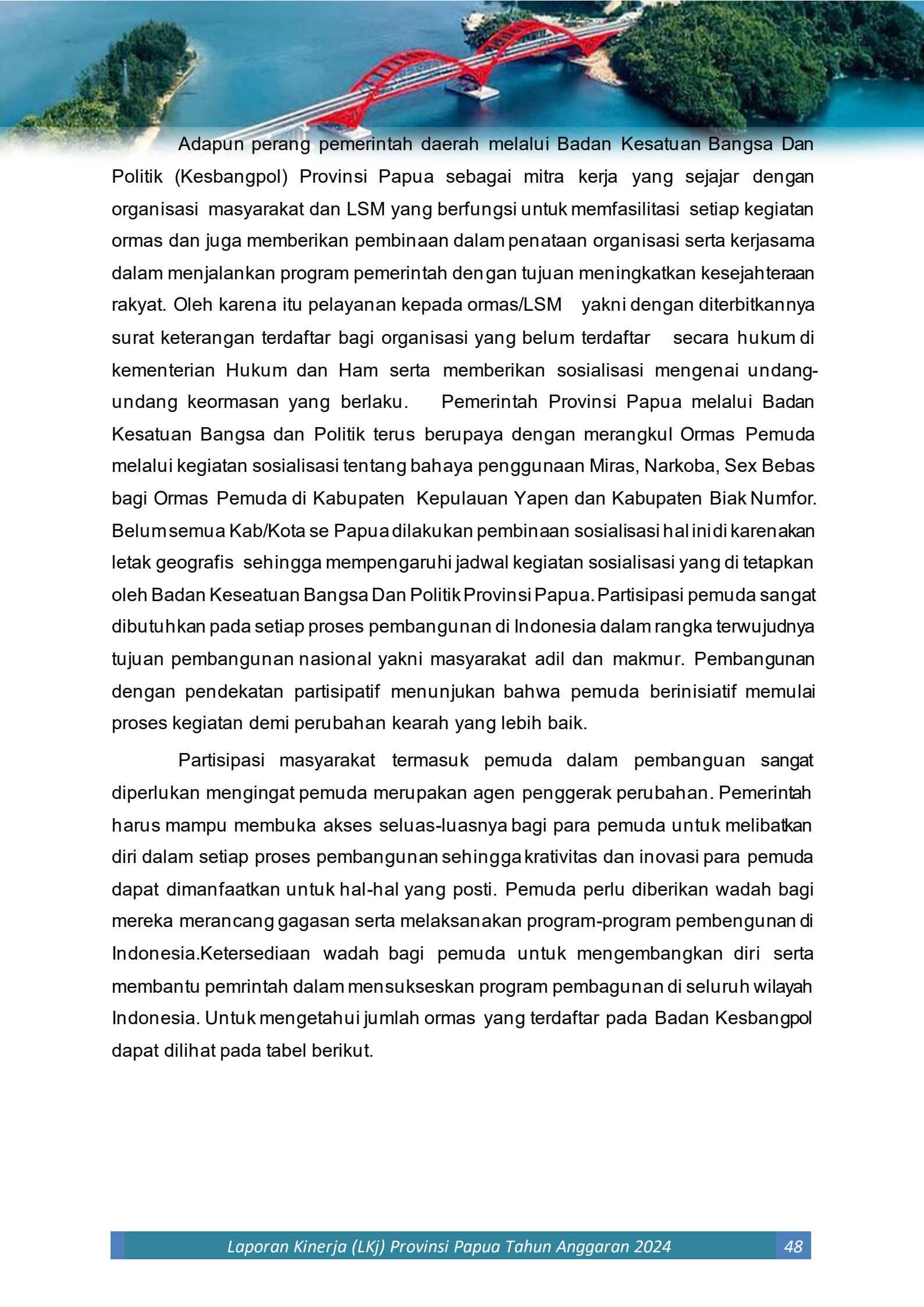
Capaian ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu 40.01 persen atau naik sebesar 39.99 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama tahun anggaran 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2023-2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase Organisasi Pemuda Aktif	Persen	75.00	29.53	40.01	76.2	60	78.74

Indikator persentase organisasi Pemuda yang aktif dengan **target 76,2 terealisasi 60 persen** dengan **capaian kinerja 78.74 persen** dengan kategori **Berhasil**. Indikator persentase organisasi pemuda aktif yang terdaftar pada kesbangpol provinsi papua di tahun 2024 tidak mengalami perubahan masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu 48 Ormas Pemuda yang aktif dari jumlah keseluruhan yang terdaftar yaitu 80 Organisasi Pemuda. Hal yang menyebabkan sehingga tidak adanya peningkatan organisasi pemuda di tahun 2024 karena Badan Kesbangpol tidak lagi mengeluarkan surat tanda terdaftar bagi organisasi pemuda hal ini disebabkan karena organisasi pemuda bersangkutan harus melakukan pendaftaran melalui Notaris dan untuk tahun 2025 baru Badan Kesbangpol akan mengeluarkan surat keterangan melapor atas ormas yang sudah terdaftar.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan partisipasi ormas dalam kegiatan organisasi sudah cukup baik sesuai dengan undang-undang 17 Tahun 2013 sebagai langkah maju dalam mengatur ormas/LSM yang mengikuti dinamisasi dan perkembangan politik yang menuntut adanya kebebasan berkumpul dan berserikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Adapun peran pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua sebagai mitra kerja yang sejajar dengan organisasi masyarakat dan LSM yang berfungsi untuk memfasilitasi setiap kegiatan ormas dan juga memberikan pembinaan dalam penataan organisasi serta kerjasama dalam menjalankan program pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pelayanan kepada ormas/LSM yakni dengan diterbitkannya surat keterangan terdaftar bagi organisasi yang belum terdaftar secara hukum di kementerian Hukum dan Ham serta memberikan sosialisasi mengenai undang-undang keormasan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya dengan merangkul Ormas Pemuda melalui kegiatan sosialisasi tentang bahaya penggunaan Miras, Narkoba, Sex Bebas bagi Ormas Pemuda di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Biak Numfor. Belum semua Kab/Kota se Papua dilakukan pembinaan sosialisasi hal ini dikarenakan letak geografis sehingga mempengaruhi jadwal kegiatan sosialisasi yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua. Partisipasi pemuda sangat dibutuhkan pada setiap proses pembangunan di Indonesia dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat adil dan makmur. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif menunjukkan bahwa pemuda berinisiatif memulai proses kegiatan demi perubahan kearah yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat termasuk pemuda dalam pembangunan sangat diperlukan mengingat pemuda merupakan agen penggerak perubahan. Pemerintah harus mampu membuka akses seluas-luasnya bagi para pemuda untuk melibatkan diri dalam setiap proses pembangunan sehingga kreativitas dan inovasi para pemuda dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Pemuda perlu diberikan wadah bagi mereka merancang gagasan serta melaksanakan program-program pembangunan di Indonesia. Ketersediaan wadah bagi pemuda untuk mengembangkan diri serta membantu pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengetahui jumlah ormas yang terdaftar pada Badan Kesbangpol dapat dilihat pada tabel berikut.



Berikut adalah Data Organisasi Pemuda yang terdaftar dan aktif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua di Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti legitimasi maka ada 80 (Delapan puluh) Organisasi Pemuda yang terdaftar secara aktif yaitu :

Tabel. Nama Organisasi Pemuda

No.	Nama Organisasi Pemuda
1.	Brigade 571 Trisula Putih provinsi papua
2.	Angkatan muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
3.	Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII)
4.	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BAKO PRMI)
5.	Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan (FKPPI)
6.	Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua
7.	Forum Kebangsaan Generasi Muda Papua (FKGMP)
8.	Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Intelektual Masirei (FPPMIM)
9.	Forum Komunikasi Mahasiswa Papua (FKMP)
10.	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
11.	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
12.	Yayasan Generasi Muda Papua (GMP)
13.	Generasi Muda Karyawan Inti Antar Rakyat (GM KIARA)
14.	Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia (GPPI)
15.	Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI)
16.	Gerakan Pemuda Islam (GPI)
17.	Generasi Muda Trikora (GEMA TRIKORA)
18.	Generasi Muda Gabungan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
19.	Gerakan Muda Ansor (GP ANSOR)
20.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
21.	Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (HIPMA SULTRA)
22.	Ikatan Pelajar Mahasiswa Flambamora (IPM) Flambamora
23.	Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Wayer di Jayapura
24.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IRM)
25.	Ikatan Putra Nahdatul Ulama (IPNU)



26.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
27.	Komite Nasional Banteng Muda Indonesia (KNBMI)
28.	Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS)
29.	Pemuda Pancasila (PP)
30.	Pemuda Panca Marga (PPM)
31.	Pemuda Katolik (PK)
32.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
33.	Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PPHI)
34.	Pelajar Islam Indonesia
35.	Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PH)
36.	Yayasan Generasi Muda Papua (YGMP)
37.	Forum Komunitas Intelektual Mahasiswa Moni Papua (FORKIM)
38.	Angkatan Muda kemah Injil Papua (AMKI)
39.	Forum Kebangsaan Generasi Muda Papua (FKGMP)
40.	Himpunan Pengusaha Anak Asli Papua (HIPMAS PAPUA)
41.	Majelis Pimpinan ICMI Muda (PM-ICMI Muda) Provinsi Papu
42.	Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Daerah Provinsi Papua
43.	Yayasan Vita Papua Mandiri Provinsi Papua
44.	Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Provinsi Papua
45.	DWP Komando Pasukan Khusus (KPK) Tipikor Provinsi Papua
46.	Lembaga Adat Masyarakat Ugimba Paniai Papua Serikat Provinsi Papua
47.	Pemerintah Kerajaan Ibunda Sahye Kukumen Papua Serikat Provinsi Papua
48.	Kelompok Kotak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Sumber Data : LKj Badan KESBANGPOL Prov.Papua, Tahun 2024.



Sasaran 5 :

Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan**” mencapai **136.8 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**” Sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (Dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi, dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 5

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Cakupan daerah rawan pangan	Jml. kab/Kota	7	9	128.6%
2	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	76.10	11.037	145.0%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					136.8%

Capaian ini tidak mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dari target 7 Kab/Kota, mengalami peningkatan melebihi target yaitu 128,6% (persen). Sedangkan untuk indicator pendapatan per kapita yang disesuaikan mengalami peningkatan sebesar 145.0% (persen). Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 5
Tahun 2023-2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN					
			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Cakupan daerah rawan pangan	Jml. kab/Kota	7,0	9	128,57	7	9	128,6
2.	Pengeluaran per kapita yg disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7600	7.800	97,43	7610	11.037	145
Capaian Indikator kinerja					113			136.8

Untuk mengetahui secara keseluruhan data terkait cakupan daerah rawan pangan maka bisa dilihat mulai dari tahun 2023 lebih fokus pada 7 kabupaten/kota 110 distrik yang berada di wilayah pemerintah provinsi papua. untuk mengetahui secara keseluruhan data dari tahun 2023.

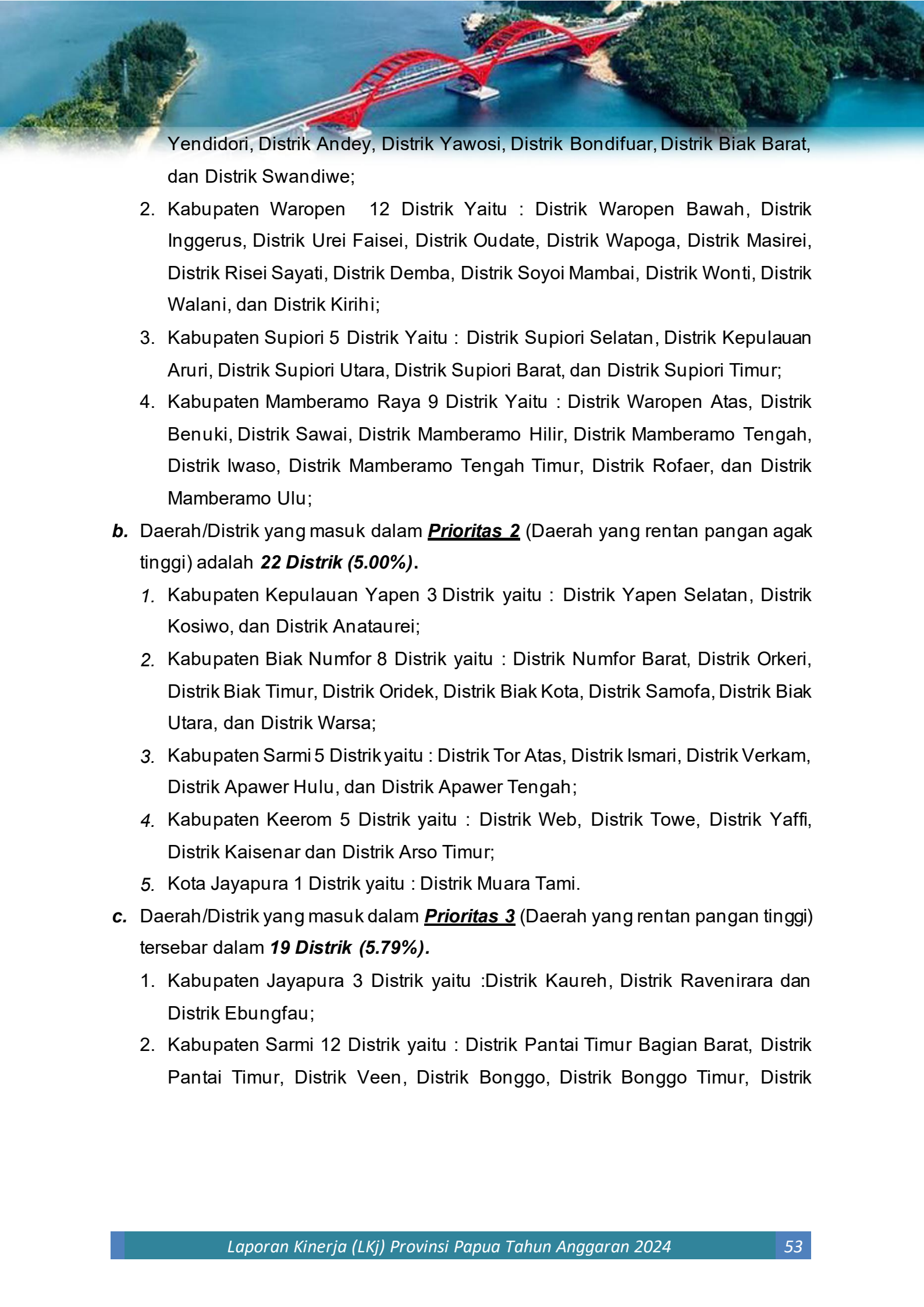
Kecamatan/distrik yang masuk dalam Prioritas memiliki 6 aspek kategori ketahanan pangan diantaranya adalah :

1. Daerah yang sangat rentan.
2. Daerah yang rentan.
3. Daerah yang agak rentan.
4. Daerah yang agak tahan
5. Daerah yang tahan, dan
6. Daerah yang sangat Tahan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari hasil komposit FSVA Provinsi Papua. Tahun 2023 khusus provinsi papua antara lain sebagai berikut:

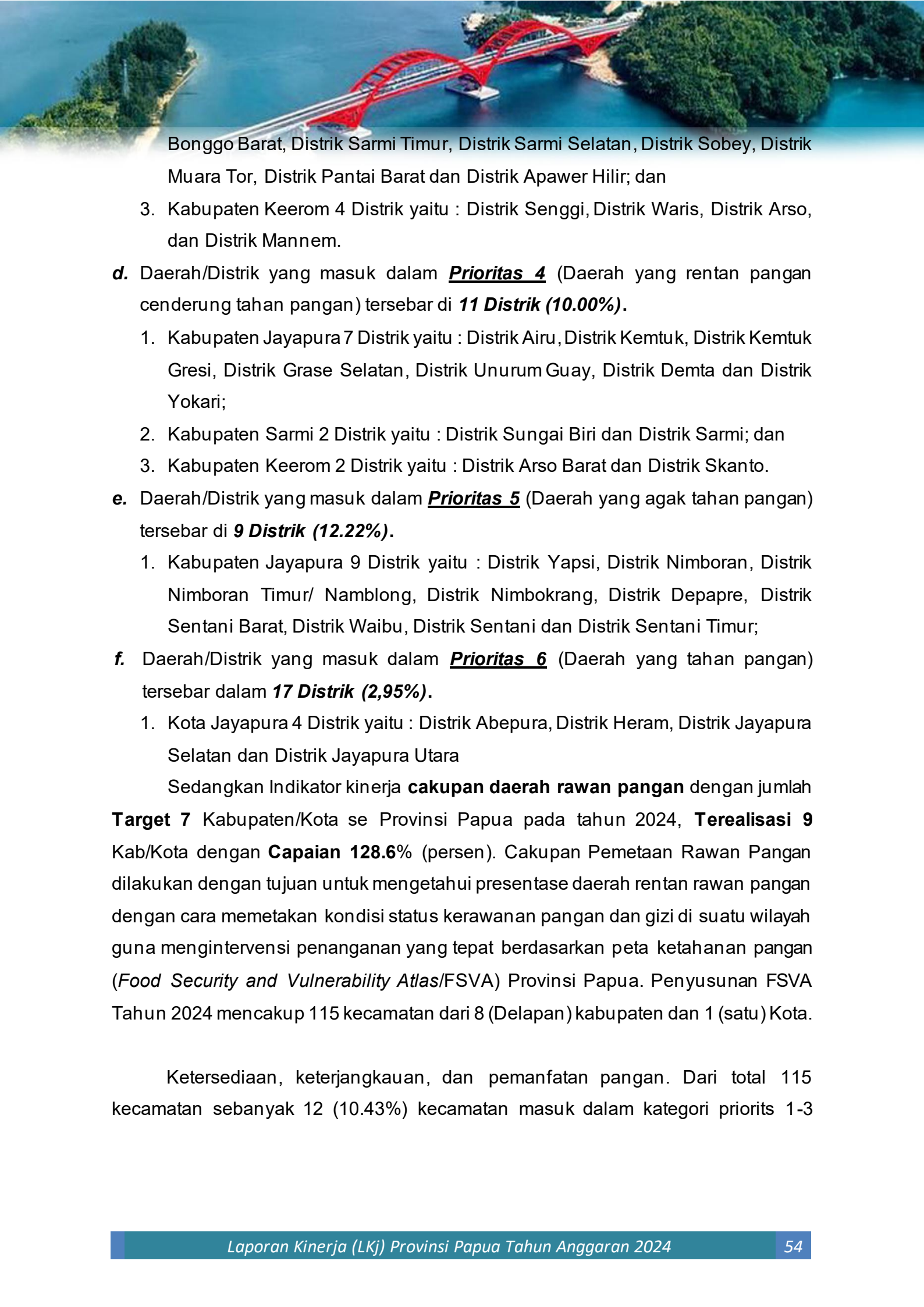
a. Daerah/Distrik yang ada di Provinsi Papua yang masuk dalam **Prioritas 1** (Daerah yang rentan pangan sangat tinggi) adalah **37 Distrik (2.97%)**.

1. Kabupaten Biak Numfor 11 Distrik yaitu : Distrik Numfor Timur, Distrik Bruyadori, Distrik Poiru, Distrik Padaido, Distrik Aimando Padaido, Distrik



Yendidori, Distrik Andey, Distrik Yawosi, Distrik Bondifuar, Distrik Biak Barat, dan Distrik Swandiwe;

2. Kabupaten Waropen 12 Distrik Yaitu : Distrik Waropen Bawah, Distrik Inggerus, Distrik Urei Faisei, Distrik Oudate, Distrik Wapoga, Distrik Masirei, Distrik Risei Sayati, Distrik Demba, Distrik Soyoi Mambai, Distrik Wonti, Distrik Walani, dan Distrik Kirihi;
 3. Kabupaten Supiori 5 Distrik Yaitu : Distrik Supiori Selatan, Distrik Kepulauan Aruri, Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, dan Distrik Supiori Timur;
 4. Kabupaten Mamberamo Raya 9 Distrik Yaitu : Distrik Waropen Atas, Distrik Benuki, Distrik Sawai, Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Iwaso, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Rofaer, dan Distrik Mamberamo Ulu;
- b. Daerah/Distrik yang masuk dalam Prioritas 2 (Daerah yang rentan pangan agak tinggi) adalah **22 Distrik (5.00%)**.**
1. Kabupaten Kepulauan Yapen 3 Distrik yaitu : Distrik Yapen Selatan, Distrik Kosiwo, dan Distrik Anataurei;
 2. Kabupaten Biak Numfor 8 Distrik yaitu : Distrik Numfor Barat, Distrik Orkeri, Distrik Biak Timur, Distrik Oridek, Distrik Biak Kota, Distrik Samofa, Distrik Biak Utara, dan Distrik Warsa;
 3. Kabupaten Sarmi 5 Distrik yaitu : Distrik Tor Atas, Distrik Ismari, Distrik Verkam, Distrik Apawer Hulu, dan Distrik Apawer Tengah;
 4. Kabupaten Keerom 5 Distrik yaitu : Distrik Web, Distrik Towe, Distrik Yaffi, Distrik Kaisenar dan Distrik Arso Timur;
 5. Kota Jayapura 1 Distrik yaitu : Distrik Muara Tami.
- c. Daerah/Distrik yang masuk dalam Prioritas 3 (Daerah yang rentan pangan tinggi) tersebar dalam **19 Distrik (5.79%)**.**
1. Kabupaten Jayapura 3 Distrik yaitu :Distrik Kaureh, Distrik Ravenirara dan Distrik Ebungfau;
 2. Kabupaten Sarmi 12 Distrik yaitu : Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Veen, Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik



Bonggo Barat, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sobey, Distrik Muara Tor, Distrik Pantai Barat dan Distrik Apawer Hilir; dan

3. Kabupaten Keerom 4 Distrik yaitu : Distrik Senggi, Distrik Waris, Distrik Arso, dan Distrik Mannem.
- d. Daerah/Distrik yang masuk dalam **Prioritas 4** (Daerah yang rentan pangan cenderung tahan pangan) tersebar di **11 Distrik (10.00%)**.
 1. Kabupaten Jayapura 7 Distrik yaitu : Distrik Airu, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Grase Selatan, Distrik Unurum Guay, Distrik Demta dan Distrik Yokari;
 2. Kabupaten Sarmi 2 Distrik yaitu : Distrik Sungai Biri dan Distrik Sarmi; dan
 3. Kabupaten Keerom 2 Distrik yaitu : Distrik Arso Barat dan Distrik Skanto.
- e. Daerah/Distrik yang masuk dalam **Prioritas 5** (Daerah yang agak tahan pangan) tersebar di **9 Distrik (12.22%)**.
 1. Kabupaten Jayapura 9 Distrik yaitu : Distrik Yapsi, Distrik Nimboran, Distrik Nimboran Timur/ Namblong, Distrik Nimbokrang, Distrik Depapre, Distrik Sentani Barat, Distrik Waibu, Distrik Sentani dan Distrik Sentani Timur;
- f. Daerah/Distrik yang masuk dalam **Prioritas 6** (Daerah yang tahan pangan) tersebar dalam **17 Distrik (2,95%)**.
 1. Kota Jayapura 4 Distrik yaitu : Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara

Sedangkan Indikator kinerja **cakupan daerah rawan pangan** dengan jumlah **Target 7** Kabupaten/Kota se Provinsi Papua pada tahun 2024, **Terealisasi 9** Kab/Kota dengan **Capaian 128.6%** (persen). Cakupan Pemetaan Rawan Pangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui presentase daerah rentan rawan pangan dengan cara memetakan kondisi status kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah guna mengintervensi penanganan yang tepat berdasarkan peta ketahanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Provinsi Papua. Penyusunan FSVA Tahun 2024 mencakup 115 kecamatan dari 8 (Delapan) kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Dari total 115 kecamatan sebanyak 12 (10.43%) kecamatan masuk dalam kategori prioritas 1-3



(rentan pangan), sedangkan untuk sebagian besar kecamatan yang berada di wilayah Provinsi Papua. Sedangkan yang masuk kategori daerah yang agak tahan sampai daerah yang sangat tahan pangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Prioritas 4 dengan 7 (tujuh) Kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) kecamatan.
2. Prioritas 5 dengan 8 (delapan) Kabupaten dan 43 (empat puluh tiga) kecamatan. dan
3. Prioritas 6. Dengan 6 (enam) Kabupaten/Kota dan 26 kecamatan.

Sehingga untuk cakupan penanganan daerah rawan pangan tahun 2024 analisis data dilakukan di kabupaten/kota dan distrik yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Papua dilakukan pada 9 kabupaten/kota dengan presentase 128.6%.

Hal ini dapat dilihat dari hasil komposit dan pembobotan FSVA Provinsi Papua Tahun 2024 pada 9 kabupaten/kota di provinsi papua dengan kesimpulan bahwa :

- a. Pada tahun 2024 di Provinsi Papua Kabupaten/Kota yang masuk dalam analisis FSVA adalah 9 Kabupaten / Kota (8 Kabupaten dan 1 Kota) dengan total 115 Distrik/Kecamatan.
- b. Daerah yang termasuk dalam prioritas 1 (Daerah kerentanan kerawanan terhadap ketahanan pangan sangat tinggi) tersebar di 1 Kabupaten dan 1 Distrik, yaitu:
 1. Kabupaten Waropen pada 1 Distrik yaitu : Distrik Walani
- c. Daerah yang termasuk dalam prioritas 2 (Daerah kerentanan kerawanan terhadap ketahanan pangan agak tinggi) tersebar di 2 Kabupaten dan 4 Distrik/Kecamatan, yaitu:
 1. Kabupaten Kepulauan Yapen Utara sebanyak 1 Distrik; dan
 2. Kabupaten Biak Numfor sebanyak 3 Distrik.
- d. Daerah yang termasuk dalam prioritas 3 (Daerah kerentanan kerawanan terhadap ketahanan pangan tinggi) tersebar di 2 Kabupaten dan 7 Distrik/Kecamatan, yaitu :
 1. Kabupaten Kepulauan Yapen dengan jumlah 3 Distrik/Kecamatan dan
 2. Kabupaten Biak Numfor dengan jumlah 4 Distrik/Kecamatan.



- e. Daerah yang termasuk dalam prioritas 4 (Daerah yang cenderung agak tahan terhadap kerawanan pangan) tersebar di 7 Kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Jayapura sebanyak 1 Kecamatan;
 2. Kabupaten Kepulauan Yapen Sebanyak 6 Kecamatan;
 3. Kabupaten Biak Numfor 7 Kecamatan;
 4. Kabupaten Sarmi 2 Kecamatan;
 5. Kabupaten Waropen 7 Kecamatan;
 6. Kabupaten Supiori 4 Kecamatan; dan
 7. Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak 7 Kecamatan.
- f. Daerah yang termasuk dalam prioritas 5 (Daerah yang agak tahan terhadap kerawanan pangan) tersebar di 8 Kabupaten dan 43 Kecamatan/Distrik, yaitu :
1. Kabupaten Jayapura dengan jumlah 10 Distrik/Kecamatan;
 2. Kabupaten Kepulauan Yapen dengan jumlah 3 Distrik/Kecamatan;
 3. Kabupaten Keerom dengan jumlah 7 Distrik/Kecamatan;
 4. Kabupaten Biak Numfor dengan jumlah 4 Distrik/Kecamatan;
 5. Kabupaten Sarmi dengan jumlah 13 Distrik/Kecamatan;
 6. Kabupaten Waropen dengan jumlah 4 Distrik/kecamatan;
 7. Kabupaten Supiori dengan jumlah 1 Distrik/Kecamatan, dan
 8. Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah 2 Distrik/Kecamatan.
- g. Daerah yang termasuk dalam prioritas 6 (Daerah tahan terhadap kerawanan pangan) tersebar di 6 Kabupaten dan 26 Distrik/Kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Jayapura dengan jumlah 8 Distrik/Kecamatan;
 2. Kabupaten Kepulauan Yapen dengan jumlah 3 Distrik/Kecamatan;
 3. Kabupaten Biak Numfor dengan jumlah 2 Distrik/Kecamatan;
 4. Kabupaten Sarmi dengan jumlah 4 Distrik/Kecamatan;
 5. Kabupaten Keerom dengan jumlah 4 Distrik/Kecamatan dan;
 6. Kota Jayapura dengan 5 jumlah Distrik/Kecamatan.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka tingkat pengeluaran rata-rata per kapita dari tahun 2023 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2023 dengan laju pengeluaran per kapita dari 8.49% dibanding tahun 2024 mengalami kenaikan yang



cukup signifikan dengan laju pengeluaran per kapita sebesar 9,49%. Faktor yang menyebabkan terlampauinya target indikator kinerja Cakupan Daerah Rawan Pangan dan Indikator kinerja pengeluaran perkapita yang disesuaikan adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan Cakupan Daerah Rawan Pangan dari target Kabupaten/Kota terealisasi menjadi 9 Kabupaten/Kota dengan Capaian 128.6,% (persen);
2. Terjadinya peningkatan Indikator kinerja pengeluaran perkapita yang disesuaikan dari Target 7610,0 Rp.Ribu per kapita, terealisasi menjadi 11.037,0 Rp.Ribu per kapita dengan Capaian 145.03% (persen);
3. Adanya Program dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Provinsi Papua;
4. Dukungan Pemerintah Provinsi Papua bagi Dinas Pertanian dan Pangan.

Pada tahun 2023 Indikator kinerja **pengeluaran perkapita yang disesuaikan** dengan **Target** 7610,0 Rp.Ribu per kapita naik sebesar 1.03% (persen) dari tahun 2023 dengan nilai 7.600, dan dapat ter **Realisasi** sebesar 11.037,0 Rp. per kapita dengan **Capaian** 145.03% (persen) pada tahun 2024 naik sebesar 1.5% (persen) dibandingkan tahun 2023 dengan nilai realisasi sebesar 7800 Rp. Per kapita. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data BPS Provinsi Papua, perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan dengan tahun terakhir seperti tabel berikut.

Tabel. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2023 - 2024

No	Tahun	Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (Rp.000)	Laju Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (%)	Keterangan
1.	2023	7600,0	8,49	Kenaikan angka Pengeluaran Perkapita dari tahun 2023 naik sebesar 1.5% pada tahun 2024
2.	2024	7610.0	9.99	

Sumber : LKj Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan, Tahun 2024.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka tingkat pengeluaran rata-rata per kapita dari tahun 2023 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2023 dengan laju pengeluaran per kapita dari 8.49% dibanding tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan laju pengeluaran per kapita sebesar 9,49%. Faktor yang



menyebabkan terlampauinya target indikator kinerja Cakupan Daerah Rawan Pangan dan Indikator kinerja pengeluaran perkapita yang disesuaikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang 14,15,dan 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, sehingga terjadi Pemisahan daerah administrasi pada Pemerintah Provinsi Papua. Dimana Provinsi Papua yang terdiri dari 28 Kabupaten dan 1 Kota, kini mengalami pemisahan kabupaten/kota.
2. Peningkatan Cakupan Daerah Rawan Pangan dari target Kabupaten/Kota terealisasi menjadi 9 Kabupaten/Kota dari total target 7 Kabupaten/Kota pada tahun 2024 dengan Capaian 128.6,% (persen);
3. Terjadinya peningkatan Indikator kinerja pengeluaran perkapita yang disesuaikan dari Target 7610,0 Rp.Ribu per kapita dan terealisasi menjadi 11.037,0 Rp.Ribu per kapita dengan Capaian 145.03% (persen) pada tahun 2024;
4. Adanya Program dukungan dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Provinsi Papua;
5. Dukungan Pemerintah Provinsi Papua bagi Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.



Sasaran 6 :

Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas Masyarakat

Sasaran ini bertujuan meningkatkan keharmonisan dan kohesifitas dengan indikator kinerja yaitu indeks kerukunan umat beragama yang diukur melalui jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik dikali 100 %.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas Masyarakat”** mencapai **127,9 persen** dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,68	100	127,9
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					127,9

Secara umum dalam tahun 2024 situasi di Provinsi Papua rawan terkendali walaupun terjadi beberapa aksi dan konflik di beberapa Kabupaten. Adapun konflik yang terjadi di tahun 2024 dapat di bedakan menjadi :

A. Konflik Dalam Bidang Ideologi

Dalam bidang Ideologi secara umum situasi di Papua selama tahun 2024 masih diwarnai pergerakan dan perkembangan pengaruh kelompok Pro M (Kelompok Separatis Teroris Papua/KSTP). Dalam kaitan itu, KSTP dibagi menjadi 3 katagori, yakni KSTP front bersenjata, KSTP front politik dan KSTP front Klandesin.

Dalam periode Januari – 18 Desember 2024, **KSTP front bersenjata** di Provinsi Papua melakukan 1 aksi gangguan keamanan yang dilakukan oleh KSTP



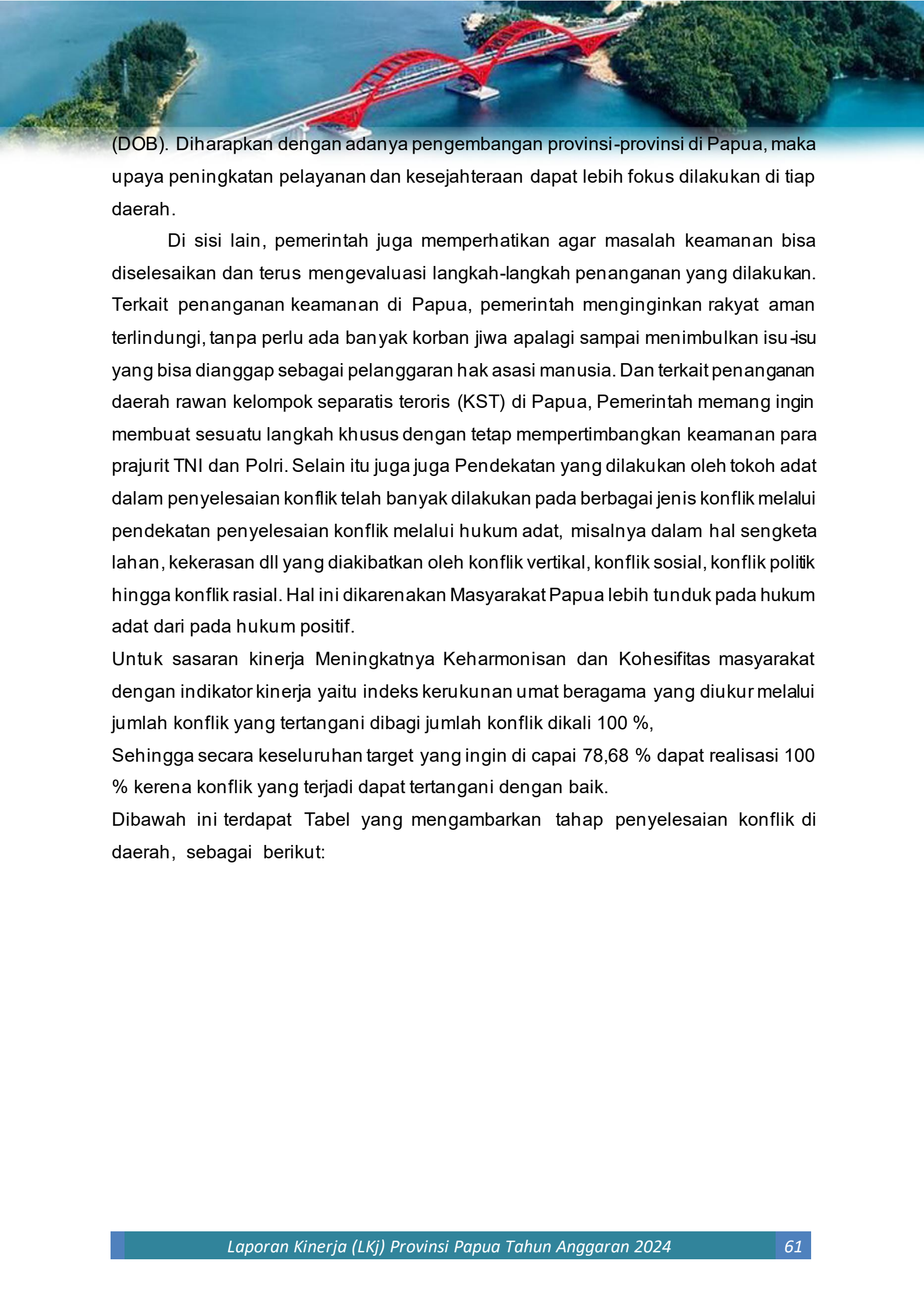
front bersenjata dan kontak tembak dengan Aparat keamanan TNI-Polri di wilayah Kabupaten. Kepulauan Yapen (1 aksi).

Sementara KSTP Front politik sepanjang Januari – 18 Desember 2024 terus melakukan propaganda melalui aksi-aksi unjuk rasa, diskusi maupun penyebaran informasi hoaks di berbagai media, terutama media sosial, KSTP Front Politik melakukan 95 aksi di beberapa wilayah yaitu Kota Jayapura (81 aksi), Kab. Jayapura (13 aksi), Kab. Biak Numfor (1 aksi) serta 54 narasi bersifat propaganda dan provokatif di media sosial. Dalam narasinya, KSTP front politik terus dan masih mengangkat isu-isu terkini seperti kasus intimidasi dan diskriminasi terhadap Non Orang Asli Papua. Sedangkan, KSTP front klandestin pergerakannya masih sulit dideteksi karena mereka selaku bergerak di belakang layar melalui diskusi-diskusi publik, kegiatan ibadah dan kegiatan kemasyarakatan. Bahkan sebagian dari tokoh KSTP front politik berstatus sebagai aparatur atau pejabat negara. Namun dalam aktivitasnya mereka tetap berpegang pada ideologi pro M dan terus menyuarakan tuntutan untuk menentukan nasib sendiri (referendum). Untuk itu, diperlukan langkah-langkah progresif dan nyata untuk membatasi ataupun meredusir pergerakan KSTP untuk menekan dan bahkan menghilangkan ideologi pro M.

B. Konflik Bidang Ketahanan dan Keamanan

Sepanjang tahun 2024, pada aspek Ketahanan dan Keamanan secara umum Wilayah Provinsi Papua dalam keadaan rawan terkendali dengan hanya terjadi satu aksi konflik bersenjata di Kab. Kep. Yapen (1 aksi). Dari fakta kejadian, pola manuver dan aksi gangguan keamanan yang dilakukan oleh KSTP front bersenjata yaitu melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam yang menyasar Aparat Keamanan TNI-Polri dan masyarakat sipil.

Terkait dengan penanganan konflik yang terjadi adapun Pendekatan yang dilakukan pemerintah berupa pendekatan yang bersifat komprehensif dimana Pemerintah fokus melakukan pendekatan komprehensif dalam upaya pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan penanganan keamanan di Papua. Pendekatan komprehensif yang dimaksud adalah tetap berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua. Pemerintah juga berupaya meningkatkan pelayanan di Tanah Papua melalui daerah otonomi baru



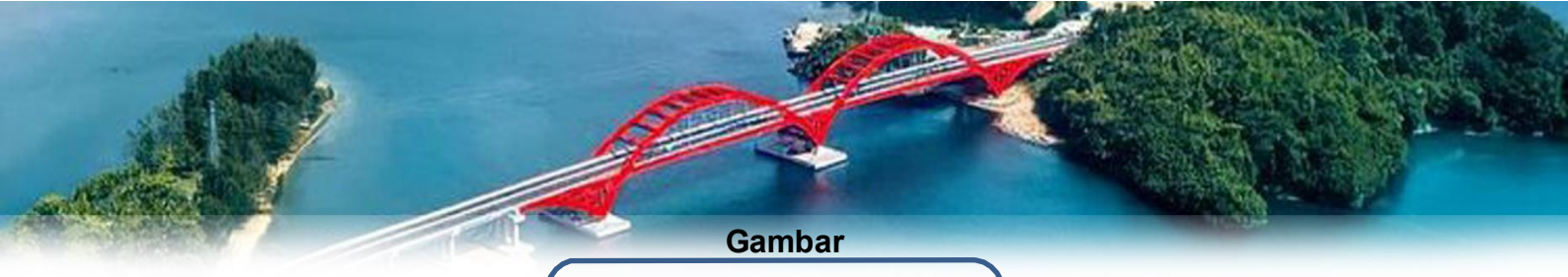
(DOB). Diharapkan dengan adanya pengembangan provinsi-provinsi di Papua, maka upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan dapat lebih fokus dilakukan di tiap daerah.

Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan agar masalah keamanan bisa diselesaikan dan terus mengevaluasi langkah-langkah penanganan yang dilakukan. Terkait penanganan keamanan di Papua, pemerintah menginginkan rakyat aman terlindungi, tanpa perlu ada banyak korban jiwa apalagi sampai menimbulkan isu-isu yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dan terkait penanganan daerah rawan kelompok separatis teroris (KST) di Papua, Pemerintah memang ingin membuat sesuatu langkah khusus dengan tetap mempertimbangkan keamanan para prajurit TNI dan Polri. Selain itu juga juga Pendekatan yang dilakukan oleh tokoh adat dalam penyelesaian konflik telah banyak dilakukan pada berbagai jenis konflik melalui pendekatan penyelesaian konflik melalui hukum adat, misalnya dalam hal sengketa lahan, kekerasan dll yang diakibatkan oleh konflik vertikal, konflik sosial, konflik politik hingga konflik rasial. Hal ini dikarenakan Masyarakat Papua lebih tunduk pada hukum adat dari pada hukum positif.

Untuk sasaran kinerja Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas masyarakat dengan indikator kinerja yaitu indeks kerukunan umat beragama yang diukur melalui jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik dikali 100 %,

Sehingga secara keseluruhan target yang ingin di capai 78,68 % dapat realisasi 100 % karena konflik yang terjadi dapat tertangani dengan baik.

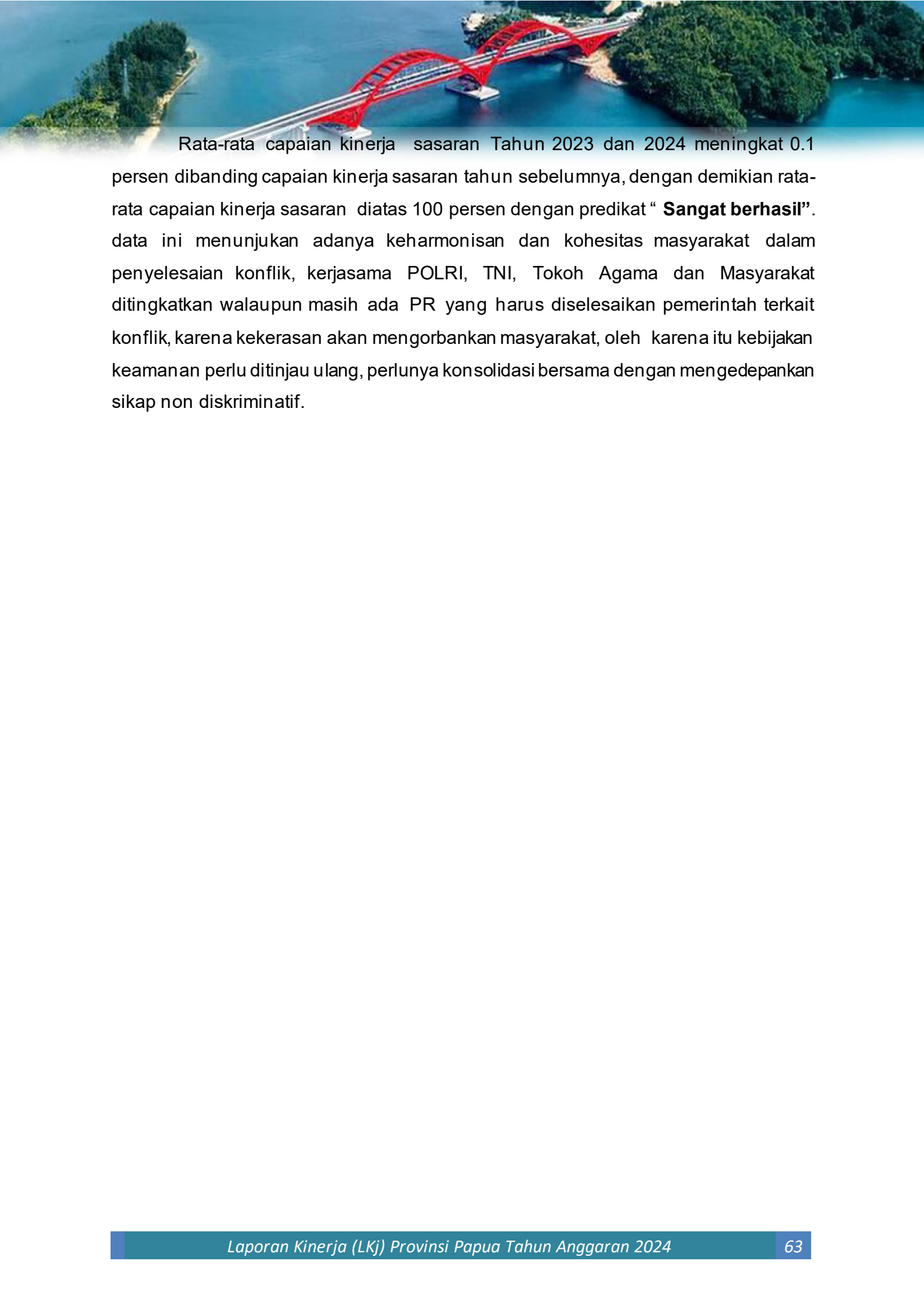
Dibawah ini terdapat Tabel yang menggambarkan tahap penyelesaian konflik di daerah, sebagai berikut:



Dibawah ini adalah matriks capaian sasaran meningkatnya keharmonisan dan kohesitas masyarakat Tahun 2024-2023 sebagai berikut :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
		2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya keharmonisan dan kohesitas masyarakat.	Indeks	78,7	100	127,8	78,68	100	127,9
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				127,8			127,9



Rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2023 dan 2024 meningkat 0.1 persen dibanding capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya, dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran diatas 100 persen dengan predikat “ **Sangat berhasil**”. data ini menunjukkan adanya keharmonisan dan kohesitas masyarakat dalam penyelesaian konflik, kerjasama POLRI, TNI, Tokoh Agama dan Masyarakat ditingkatkan walaupun masih ada PR yang harus diselesaikan pemerintah terkait konflik, karena kekerasan akan mengorbankan masyarakat, oleh karena itu kebijakan keamanan perlu ditinjau ulang, perlunya konsolidasi bersama dengan mengedepankan sikap non diskriminatif.



Sasaran 7 :

Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran 7 (ketujuh) yaitu **“Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi”** diukur melalui pencapaian 3 (Tiga) indikator sasaran dengan capaian kinerja **130,7** persen dengan kategori **“Sangat Berhasil”**, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3(Tiga) indikator sasaran, sebagai berikut:

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Nilai Skor aspek kebebasan sipil	Skor	95,0	100	105,3
2.	Nilai skor aspek hak- hak politik	Skor	50,0	60,10	120,2
3.	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60,0	100	166,7
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					130,7

Sesuai dengan Wikipedia kebebasan sipil adalah kebebasan yang pemerintah tidak dapat ikut campur, baik oleh hukum atau oleh tafsiran yudisial tanpa suatu alasan tertentu. Dalam indikator sasaran nilai skor aspek kebebasan sipil didukung oleh beberapa indikator penunjang seperti kebebasan berkumpul, berpendapat dan berserikat, pengawasan sosial masyarakat dan permohonan ijin masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Indikator ini diukur dengan Nilai skor aspek kebebasan sipil diukur melalui jumlah permohonan ijin yang diberikan kepada LSM dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan fungsi pembinaan di daerah.



Tahun 2023 Jumlah permohonan ijin yang dikeluarkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) ijin dari 23 data ORMAS yang mengajukan permohonan ijin lengkap dan memenuhi syarat dengan ditetapkannya surat Keterangan keberadaan organisasi terealisasi 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 105,3 persen dari target 95,0 persen dan untuk tahun 2024 jumlah Ormas terdaftar sebanyak 25 ORMAS sesuai data yang di berikan oleh ORMAS yang melapor ke Kesbangpol.
(data terlampir)

Penunjang kebebasan berkumpul dan berserikat memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk dapat berkumpul dan berserikat. Sesuai data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua untuk tahun 2023 indeks kebebasan berkumpul dan berserikat sebesar 79,98 %.

Indikator penunjang pengawasan sosial masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dimana dijelaskan bahwa Pemerintah Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.

Indikator penunjang permohonan ijin masyarakat untuk menyampaikan pendapat, dimana dapat dilihat Pemerintah Provinsi Papua memberikan kebebasan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat di muka umum.

Jika di lihat dari indikator penunjang diatas dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berhasil dalam memberikan kebebasan sipil bagi seluruh warganya sebesar 79,98 %.

Untuk sasaran kinerja Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi dengan **indikator kinerja I Nilai skor aspek Kebebasan sipil** yang diukur dengan permohonan ijin yang diberikan dibagi jumlah permohonan ijin yang

masuk dikali 100 %, Sehingga secara keseluruhan target yang ingin di capai 95 % dapat realisasi 100 %.

Tahun Anggaran.2023 data LSM, Paguyuban dan ORMAS yang diberikan ijin oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

Tabel. Data Organisasi Masyarakat Sipil Tahun 2023

(Masih menunggu data Tahun 2024)

NO	NAMA OGANISASI,TGL,NOMOR PENDAFTARAN DI BAKESBANG	NOMOR SURAT PERMOHONAN ,AHU & TGL DITERBIT	TAHUN	ALAMAT
1.	DPW KERUKUNAN KELUARGA MALUKU UTARA (KKMU) PROVINSI PAPUA	AHU-0002537.AH.01.07, TAHUN 2022; TGL 15 MARET 2022 220/051, 13 FEBRUARI 2023	2023	JL. AMPHIBI NO.17 JAYAPURA SELATAN
2.	IMAJI PAPUA	AHU-781.AH.02.01 TAHUN 2010; TGL 26 MARET 2010 220/829	2023	PERUMAHAN PEMDA II, BLOK.L-1 CIKOMBONG KOTARAJA DALAM; KEL. VIM KOTARAJA ABEPURA
3.	YAYASAN RAJAWALI CITRA PAPUA (RAJAWALI CITRA PAPUA FOUNDATION)	AHU-0002879.AH.01.04 TAHUN 2017, TGL 13 FEBRUARI 2017 220/091, 15 MARET 2023	2023	JL. JERUK NIPIS VURIA KOTARAJA
4.	YAYASAN BENGKEL KERJA PAPUA	AHU-0023691.AH.01.12 TAHUN 2012, TGL 27 JULI 2021 220/090, 15 MARET 2023	2023	JL. RAMBUTAN NO. 3 ARDIPURA KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
5.	DPP KELUARGA BESAR PUTRA – PUTRI PEJUANG PEMBEBASAN IRIAN BARAT	01/SK/P31B/2023, TGL 03 MARET 2023	2023	JL. RI MACAN TUTUL NO. 13 DOK.V ATAS JAYAPURA UTARA
6.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) GERAKAN WANACITA RAKYAT INDONESIA	AHU-0001210..AH.01.08 , TAHUN 2021, TGL 1 SEPTEMBER 2021 220/212, 11 APRIL 2023	2023	GANG MERPATI –III YOTEFA KOTA JAYAPURA
7.	IKATAN KAUM PEREMPUAN YAHUKIMO(IKPY)	AHU-202.AH.02.01 TAHUN 2013, TGL 19 JUNI 2013 220/21, 11 APRIL 2023	2023	JL. RAYA SENTANI HAWAI DUNLOP NO.178 KABUPATEN JAYAPURA
8.	KOMUNITAS BRIONESIA CHAPTE JAYAPURA	AHU-00657.AH.02.01 TAHUN 2014, TGL 24 OKTOBER 2014 220/214, 11 APRIL 2023	2023	JL. KELAPA DUA ENTROP BELAKANG TERMINAL (LOS PASAR NO. A.210) JAYAPURA
9.	DEWAN ADAT SUKU WILAYAH TABI (DASWILTABI) PROVINSI PAPUA	AHU 337AH.02.01, TAHUN 2011, TGL 06 MEI 2011 220/213, 11 APRIL 2023	2023	JL. PASIR 6 KAMPUNG ORMO KABUPATEN JAYAPURA
10.	GEREJA BETHEL (GEREJA PENTAKHOSTA) DI TANAH PAPUA. BADAN PENGHUBUNG PUSAT (BPP)	01/SP/BPP.GBGP/III/2023, TGL 13 MARET 2023 220/156, 06 MEI 2023	2023	JL KOYA TIMUR PERUMAHAN GREEN ROLLO, RT.04/RW.02 BLOK F NO. 27 KOYA TENGAH MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
11.	DEWAN PRESEDIUM PUSAT MASYARAKAT ADAT TABI (DEOTAMA) PAPUA	AHU-781.AH.0201 TAHUN 1010, TGL 26 MARET 2010 220/239, 06 JUNI 2023	2023	JL. KOYA DISTRIK WAENA JAYAPURA
12.	GEMA PERJUANGAN MAHARANI NUSANTARA (GPMN) PROVINSI PAPUA	AHU. 04.02.02 TAHUN2010, TGL 25 JANUARI 2010, 220/554, 24 AGUSTUS 2023	2023	JL. KALI ABEPURA JAYAPURA
13.	DEWAN PIMPINAN DAERAH HIMPUNAN PARMUWISA INDONESIA (INDONESIA TOURIST GUIDE ASSOCIATION)	AHU.0001489, AH.01.08 TAHUN 2022, TGL 05 AGUSTUS 2023, 220/555, 24 AGUSTUS 2023	2023	JL. KOMBO YABASO, SAMPING GEREJA ADVEN SENTANI



14.	IKATAN PERSAUDARAAN INDONESIA (IPHI)	AHU-0000881.AH.01.08 TAHUN 2021 TGL 15 JUNI 2021, 220/556, 24 AGUSTUS 2023	2023	JL. ARDIPURA RUKO ASRI NO.248 POLIMAK JAYAPURA
15.	DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PIJAR Keadilan Demokrasi	AHU-0012839.AH.01.07 TAHUN 2020, 03 JANUARI 2012 220/557, 24 AGUSTUS 2023	2023	JL. PERIKANAN HAMADI, JAYAPURA SELATAN
16.	KOMUNITAS PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA	AHU-C-77.HT.03.01 TAHUN 2006; TGL 20 APRIL 2022 220/444, 21 JULI 2023	2023	PERUM. ORGANDA PADANG BULAN BLOK. D-15 HEDAM KOTA JAYAPURA – PAPUA
17.	PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PAPUA	AHU-um.01.01-63; TGL 01 JULI 2016 220/227, 07 AGUSTUS 2023	2023	JL. SERUI NO. 3 KOMPLEKS SD. MUHAMMADIYAH LT.2 ABEPURA KOTA JAYAPURA
18.	YAYASAN KINGMI ZAITUN	AHU-0007399.AH.01.04, TAHUN 2023, TGL 08 JUNI 2023, 220/238, 11 SEPTEMBER 2023	2023	JL. KABUPATEN II NO.01, KOTA JAYAPURA
19.	WAHANA PEMBINAAN GENERASI MUDA TOLI (WAGEMULI)	AHU-0004607.AH.01.07, TAHUN 2023, TGL 08 JUNI 2023, 220/328, 11 SEPTEMBER 2023	2023	JL. BUPER WAENA KOMPLEKS IMANUEL, RT.013/RW.003 KELUARAHAAN WAENA – DIDTRIK HERAM KOTA JAYAPURA
20.	GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI PAPUA (GPI-PAPUA)	M-53-HT.03.05 – TH.19, TGL 30 DESEMBER 1992. TGL 19 SEPTEMBER 2023 (mendaftar)	2023	KANTOR PERWAKILAN JAYAPURA JL. RAYA SENTANI-BAEPURA, RT.002/RW.004 KELURAHAN KOTA BARU, DISTRIK ABEPURA
21.	DPP HIMPUANAN PEMUDA PAPUA PAROVINSI PAPUA (HPP)	NO. SURAT; 035/eks/DPP-HPP/PAPUA/X/2023, TGL 09 OKTOBER 2023 220/375, TGL 10 OKTOBER 2023	2023	JL RAYA SENTANI KOTA BARU, ABEPURA - KEL. WAIMHOROK – KOTA HAYAPURA
22.	PERKUMPULAN KELUARGA BESAR FATEGOMI SE-TANAH PAPUA (FKBF)	AHU-0015319.AH.0107 TAHUN 2021, TGL 15 JANUARI 2022 TGL 15 AGUATUS 2023 (mendaftar)	2023	JL. WOROT. PERUM UNCEN NO. A1 – KALIACAI RT.007/RW.012 KEL. VIM DISTRIK ABEPURA – KOTA JAYAPURA
23.	PERKUMPULAN PEREMPUAN KAWANUA PAPUA	AHU-0207.AH.02.01 TAHUN 2010, TAHUN 2010; TGL 23 JANUARI 2010 220/367, 09 OKTOBER 2023	2023	JL. AMPHIBI HAMADI SAMPING LAPANGAN AL. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.2023

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024 jumlah permohonan ijin yang diberikan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. Data Organisasi Masyarakat Sipil yang mendapat Ijin di Tahun 2024 (Masih menunggu data)

NO.	BIDANG KEGIATAN ORMAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	jumlah permohonan ijin yang diberikan	20	431	54	43	23	Masih menunggu data
	Jumlah	20	431	54	43	23	Masih menunggu data

Sumber data: LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2024



Berdasarkan data jumlah permohonan ijin yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada LSM dan ORMAS yang mengajukan pendaftaran dari Tahun 2019 sd 2023 terbanyak pada Tahun 2020 dengan jumlah 431 ijin yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diikuti 54 ijin pada Tahun 2021, 43 ijin pada Tahun 2022, 23 ijin Tahun 2023, ??? ijin pada Tahun 2024 dan 20 ijin Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Capaian Indikator ke-2 Nilai skor aspek hak-hak politik Indikator di Provinsi Papua diukur melalui Realisasi Hak-hak politik dalam undang-undang Otonomi Khusus Papua,

Untuk indikator nilai aspek hak-hak politik didukung dengan indikator penunjang berupa definisi hak politik sesuai ketentuan; kesempatan untuk berpolitik dipilih dan memilih; kebebasan berorganisasi dan hak politik secara general atau otsus.

Dari indikator penunjang tersebut Pemerintah Provinsi Papua senantiasa memberikan dukungan hak politik kepada seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali dan Pemerintah juga memberikan kesempatan berpolitik kepada seluruh anggota masyarakat untuk dapat dipilih dan memilih sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memberikan kebebasan berorganisasi kepada setiap warga masyarakat. Sesuai dengan data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tahun 2023 di mana nilai skor aspek hak-hak politik sebesar 60,10 %.

Sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketentuan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua pasal 6 ayat (2 dan 4). Dimana realisasi hak-hak politik dan otonomi khusus telah dimulai dari pengangkatan anggota DPRP melalui jalur Otonomi Khusus atas 11(sebelas) kursi dilakukan sesuai Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 yang pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan di Kabupaten dan Provinsi. Tahap Pendaftaran, seleksi, tes wawancara sampai dengan penetapan disampaikan kepada Gubernur atas 11 (sebelas) kursi orang anggota DPRP yang diangkat dan 22 (Dua puluh dua) daftar tunggu.



Untuk Pemilihan anggota MRP periode ke-IV telah dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal pada bulan Maret – April 2023 untuk unsur agama, unsur perempuan, unsur adat. Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 jo PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam implementasi otonomi khusus Papua yang beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan, dimana jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Pemilihan anggota MRP periode 2005-2010 berjumlah sebanyak 42 anggota, periode 2011-2016 sebanyak 51 anggota, periode 2017-2022 sebanyak 51 anggota, dan untuk periode 2023-2028 sebanyak 42 anggota, Pemilihan anggota MRP periode 2023-2028 diatur dengan PERDASI Nomor 5 /2023 tentang Tatacara Pemilihan Anggota MRP, yang mengatur secara khusus untuk wilayah adat Tabi dan Saereri berjumlah sebanyak 42 (empat puluh dua) orang/anggota.

Jumlah anggota DPRP periode 2024-2029 hasil pemilu 2024 sebanyak 45(empat puluh lima) kursi dan 11 (sebelas) kursi yang diangkat, jumlah total keanggotaan DPRP 56, saat ini masih berlangsung prosesnya sehingga belum nampak berapa jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki ataupun berapa jumlah OAP dan Non OAP yang terpilih.

Adapun Keterlibatan perempuan dalam partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa aspek kebijakan negara telah mengatur keterlibatan perempuan dalam Partai Politik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki untuk dapat duduk dalam lembaga legislatif, diatur kembali dalam dalam PP 106/2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, mulai dari pasal 32 sd pasal 84 mengatur tentang pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP termasuk dalam komposisi sekurang-kurangnya 30 persen adalah keterwakilan perempuan



Tabel
PEMILIHAN ANGGOTA MRP PERIODE 2023-2028

NO.	DAERAH WILAYAH ADAT DI PAPUA	KUOTA	Keterangan
A.	Wilayah Adat Tabi terdiri atas 2 wilayah Pemilihan, yaitu :		
1.	Wilayah Pemilihan I	8 Kursi	4 (empat) kursi untuk Wakil Adat dan 4 (empat) kursi untuk wakil perempuan
	1). Kota Jayapura		
	2). Kabupaten Jayapura		
	3) Kabupaten Keerom		
2	Wilayah Pemilihan II	7 Kursi	4 (empat) kursi untuk Wakil Adat dan 3 (tiga) kursi untuk wakil perempuan
	1).Kabupaten Sarmi		
	2). Kabupaten Mambero Raya		
B	Wilayah Adat Saereri, terdiri atas 2 Wilayah Pemilihan, yaitu		
1.	Wilayah Pemilihan III	6 Kursi	3 (tiga) kursi untuk Wakil Adat dan 3 (tiga) kursi untuk wakil Perempuan
	1). Kabupaten Biak Numfor		
	2). Kabupaten Supiori		
2	Wilayah Pemilihan IV	7 Kursi	3 (tiga) kursi untuk Wakil Adat dan 4 (empat) kursi untuk wakil Perempuan
	1). Kabupaten Kepulauan Yapen		
	2).Kabupaten Waropen		

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut keterwakilan perempuan dalam organisasi telah setara gender dengan laki-laki.

Capaian Indikator ke-3, Indikator nilai skor aspek lembaga demokrasi diukur dengan jumlah lembaga demokrasi yang mendapat ijin, dengan realisasi 100 persen melalui jumlah lembaga demokrasi yang mendapat ijin dibagi jumlah lembaga demokrasi yang terdaftar.

Jumlah partai peserta pemilu periode 2024-2029 sebanyak 18 (delapan belas) partai dan di Provinsi Papua tidak ada partai politik lokal sebagaimana di Aceh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak mengatur adanya pembentukan partai lokal di Provinsi Papua.

Pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022, Jumlah Partai politik dapat berubah jumlahnya pada masa menjelang Pemilu. Pelaksanaan Pilkada diatur dengan aturan yang berlaku secara nasional dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan Pilkada tidak diatur dalam Undang-undang OTSUS Papua, sehingga setiap Parpol yang mengusung pasangan calonnya bersifat umum kepada OAP dan non OAP. Sedangkan hak politik yang diatur dalam UU Otsus yang terkait dengan Pilkada hanya kekhususan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua setelah mendapatkan persetujuan keasliannya dari MRP.

dibawah ini Tabel Partai peserta dari pemilu ke pemilu, sebagai berikut :

Tabel. Pemilu Dalam Angka di Indonesia

NO	PEMILU	JUMLAH PESERTA
1.	1955	172 peserta
2.	1971	10 partai
3.	1977, 1982, 1987, 1992, 1997	3 partai
4.	1999	48 partal
5.	2004	24 partai
6.	2009	38 partai + 6 parpol lokal di Aceh
7.	2014	12 parpol + 3 parpol lokal di Aceh
8.	2019	16 parpol + 4 parpol lokal di Aceh
9.	2024	18 Partai Politik+ 4 parpol lokal di Aceh

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2020



Ketiga indikator sasaran ini memperlihatkan kontribusi dari masing-masing indikator sasaran terhadap sasaran strategis yang ada. Adapun indikator sasaran nilai skor aspek kebebasan sipil memberikan kontribusi paling tinggi disusul indikator sasaran nilai skor aspek lembaga demokrasi dan yang paling kecil kontribusinya adalah indikator sasaran nilai skor aspek hak-hak politik sehingga sesuai dengan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Papua untuk tahun 2023 sesuai data BPS Provinsi Papua yakni 67,64 %

Sesuai presentase tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berhasil dalam mengembangkan sistim demokrasi, khususnya terkait hak kebebasan sipil bagi warganya.



Partai Ummat mendapat nomor urut ke 24 setelah lolos verifikasi Nomor Urut Partai Lokal dari Aceh terdiri atas :

18. Partai Nangroe Aceh (PNA)
19. Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaath dan Taqwa (Gabthat)
20. Partai Darul Aceh (PDA)
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
23. Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA)

Pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022, Jumlah Partai politik dapat berubah jumlahnya pada masa menjelang



Pemilu Pelaksanaan Pilkada diatur dengan aturan yang berlaku secara nasional dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan Pilkada tidak diatur dalam Undang-undang OTSUS Papua, sehingga setiap Parpol yang mengusung pasangan calonnya bersifat umum kepada OAP dan non OAP. Sedangkan hak politik yang diatur dalam UU Otsus yang terkait dengan Pilkada hanya kekhususan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua setelah mendapatkan persetujuan keasliannya dari MRP.

Berikut rincian perolehan suara 18 partai politik yang ditetapkan oleh KPU:

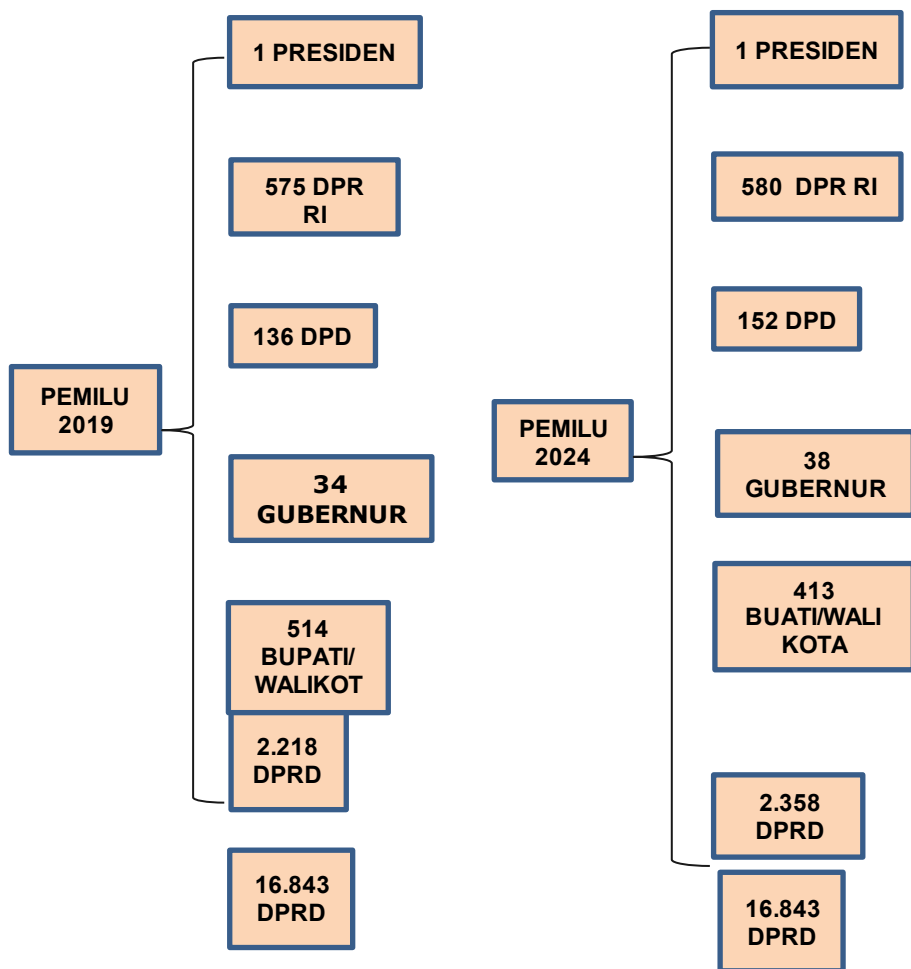
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 16.115.655 suara
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 20.071.708 suara
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan: 25.387.279 suara
4. Partai Golkar: 23.208.654 suara
5. Partai Nasdem: 14.660.516 suara
6. Partai Buruh: 972.910 suara
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora): 1.281.991 suara
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 12.781.353 suara
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN): 326.800 suara
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): 1.094.588 suara
11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda): 406.883 suara
12. Partai Amanat Nasional (PAN): 10.984.003 suara
13. Partai Bulan Bintang (PBB): 484.486 suara
14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 4.260.169 suara
16. Partai Perindo: 1.955.154 suara
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 5.878.777 suara
24. Partai Ummat: 642.545 suara

Data : Artikel dari [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/22231361/hasil-pemilu-2024-pdi-p-menang-25387279-suara) dengan judul "Hasil Pemilu 2024: PDI-P Menang 25.387.279 Suara", baca <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/22231361/hasil-pemilu-2024-pdi-p-menang-25387279-suara>.



Gambar

DESAIN PEMIL SERENTAK
TAHUN 2024



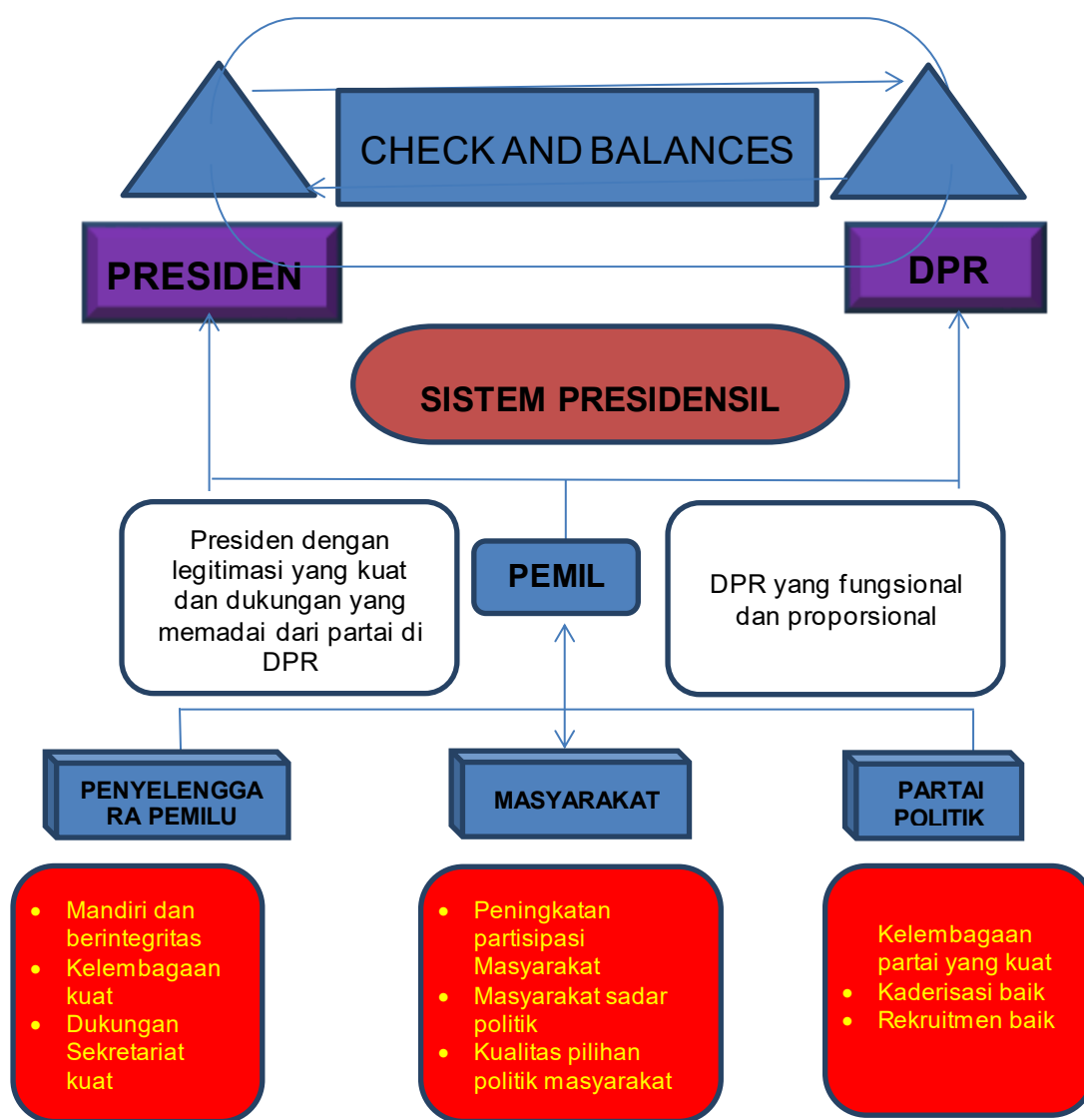
Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Papua



Gambar

GRAND DESIGN PEMILU SERENTAK

STABILITAS DAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN



Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua



Bila di kaitkan dengan Indeks variabel IDI Papua pada Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi dari Tahun 2022 termasuk dalam kategori “Sedang” dengan 64,63 poin ada kenaikan 2,48 poin dari tahun 2021 yaitu 62,15, terdapat 8 indikator pendukung, dengan 5 Indikator berada pada dengan skor “Baik”, dengan 2 indikator dengan skor “Sedang”. Serta 3 indikator dengan skor “Buruk” yaitu :

- Indikator no 15 : Kinerja Lembaga Legislatif dengan capaian 16,22 ;
- Indikator no. 20 : Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN /D oleh pemerintah dengan capaian 42,86;
- Indikator no. 22 : Pendidikan politik pada kader partai politik dengan capaian 33,85;

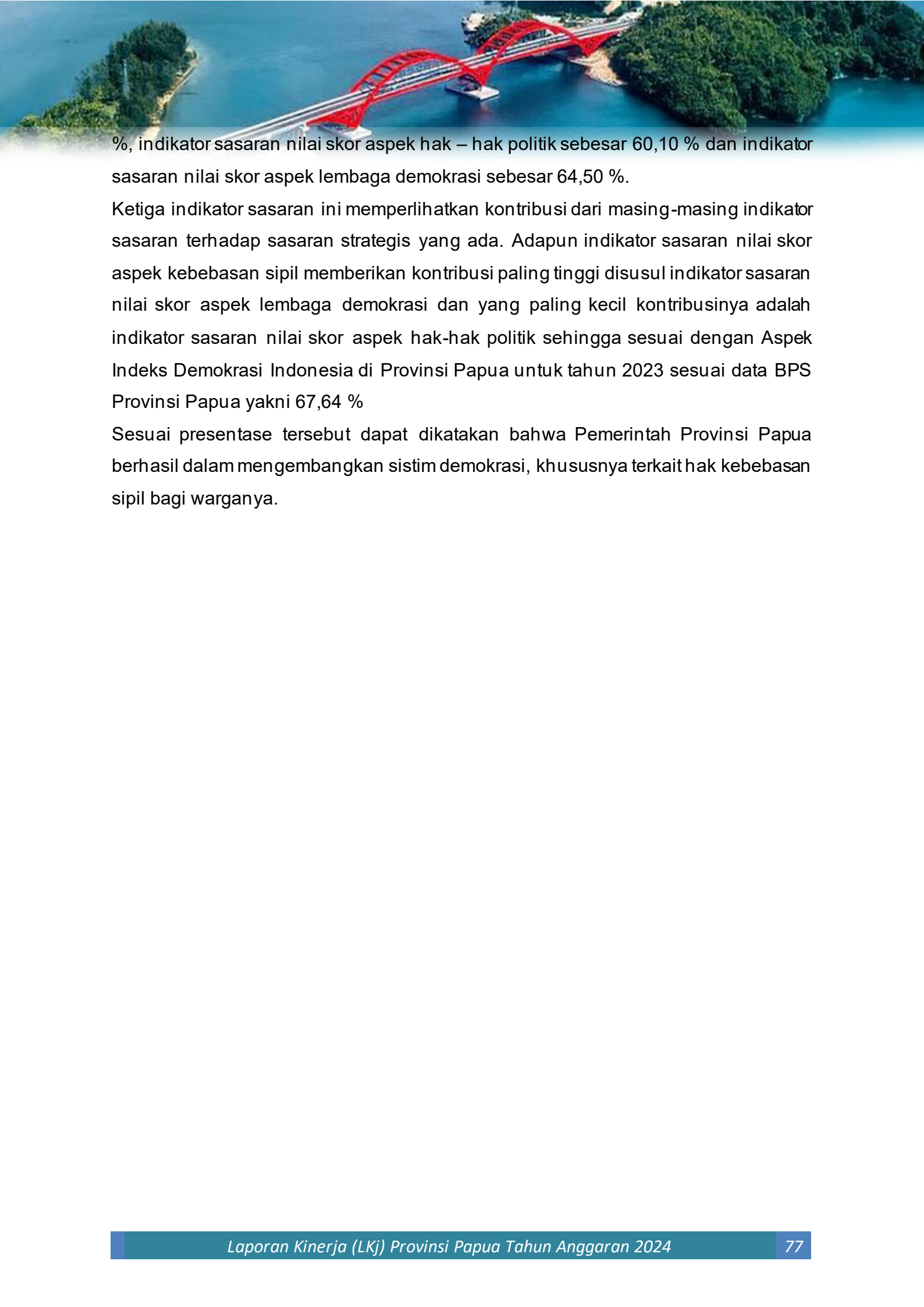
Indikator-indikator ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik, dalam meningkatkan skor pada aspek lembaga-lembaga demokrasi.

Di bawah ini terdapat matriks capaian sasaran “Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi” Tahun 2024-2023, sebagai berikut :

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 7
Tahun 2023-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
		2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Skor	95,0	100	105,3	95,0	100	105,3
	Skor	50,0	67,85	135,7	50,0	60,10	120,2
	Skor	60,0	100	166,7	60,0	100	166,7
Rata-rata capaian kinerja asasaran				135,9			130,7

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tahun 2023 untuk sasaran strategis meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi dengan indikator sasaran nilai skor aspek kebebasan sipil sebesar 79,98



%, indikator sasaran nilai skor aspek hak – hak politik sebesar 60,10 % dan indikator sasaran nilai skor aspek lembaga demokrasi sebesar 64,50 %.

Ketiga indikator sasaran ini memperlihatkan kontribusi dari masing-masing indikator sasaran terhadap sasaran strategis yang ada. Adapun indikator sasaran nilai skor aspek kebebasan sipil memberikan kontribusi paling tinggi disusul indikator sasaran nilai skor aspek lembaga demokrasi dan yang paling kecil kontribusinya adalah indikator sasaran nilai skor aspek hak-hak politik sehingga sesuai dengan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Papua untuk tahun 2023 sesuai data BPS Provinsi Papua yakni 67,64 %

Sesuai presentase tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berhasil dalam mengembangkan sistim demokrasi, khususnya terkait hak kebebasan sipil bagi warganya.



Sasaran 8 :

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua

Secara keseluruhan capaian kinerja Sasaran “**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus (OTSUS) Papua**” sebesar **96,64 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat capaian realisasi program-program OTSUS yang direncanakan	Persen	100	96,64	96,64

Berdasarkan perhitungan pada table 3.31 Capaian Kinerja Utama menunjukkan bahwa Indikator kinerja **tingkat capaian realisasi program-program OTSUS yang direncanakan** yakni target indikator kinerja sebesar **100 persen** dengan **realisasi** sebesar **96,64 persen** dan capaian kinerja sebesar **96,64 persen** dengan kategori **Sangat Berhasil**. Hal ini menunjukkan bahwa program-program Otonomi Khusus yang direncanakan dalam dokumen perencanaan telah dilaksanakan.

Capaian tersebut untuk tahun 2024 dikategorikan Sangat Berhasil karena mengalami trend kenaikan dari tahun 2023 yakni sebesar 80,78 persen atau naik sebesar 15.86 persen, hal ini dapat dilihat pada perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dari Tahun 2023-2024 seperti pada Tabel dibawah ini :



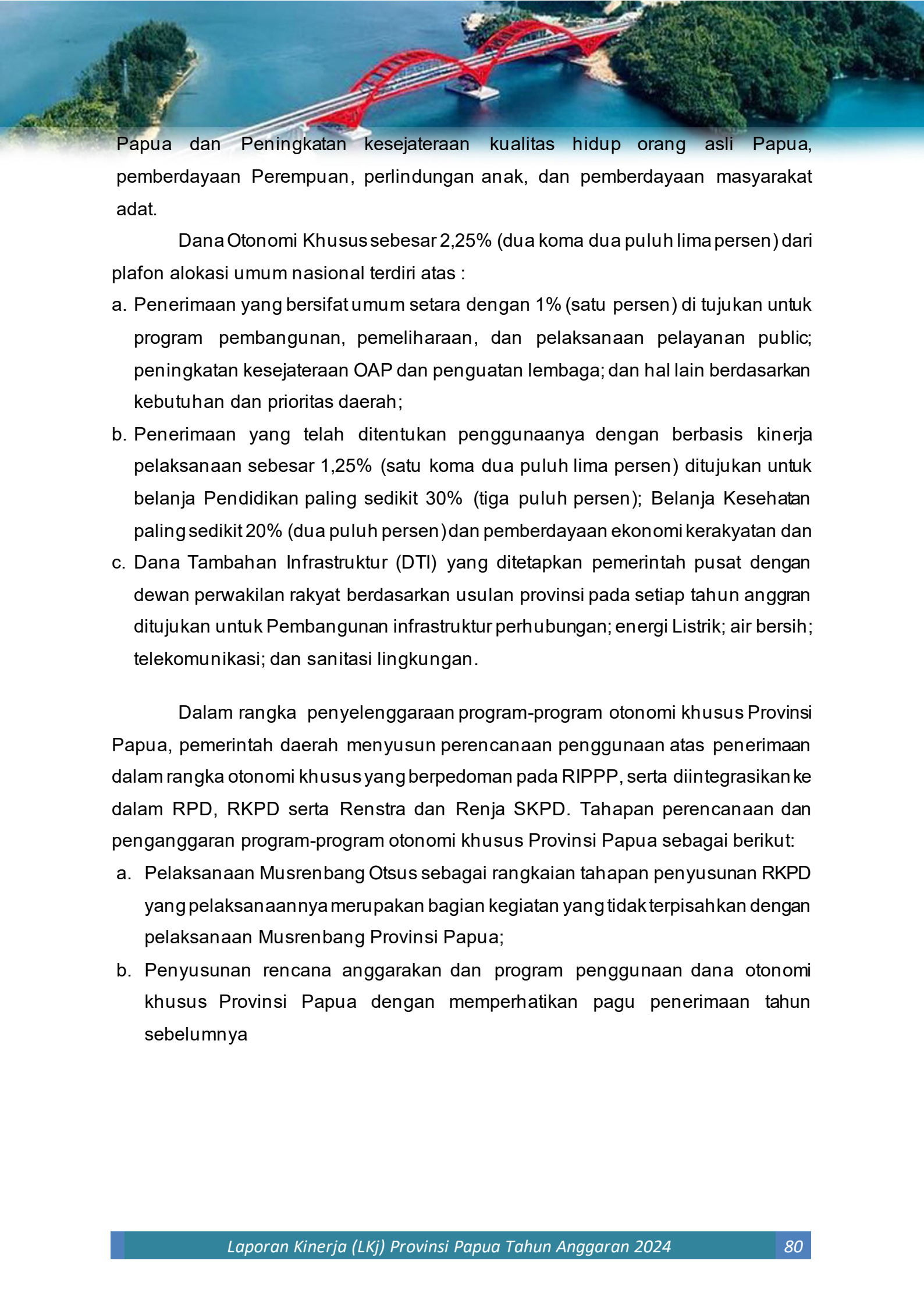
Tabel
Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat capaian realisasi program-program otsus yang direncanakan	Persen	100	80.78	80.78	100	96.64	96.64

Dilihat dari capaian indikator kinerja diatas bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan 2023 mengalami kenaikan, tahun 2024 sebesar 96,64% sedangkan tahun 2023 sebesar 80,78% terjadi kenaikan sebesar 15,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah bila dibandingkan dengan tahun lalu sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dengan adanya regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dalam rangka Otonomi Khusus

Pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dikelola secara efektif, efisiensi, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan, partisipasi Masyarakat, keberpihakan bagi OAP, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatuhan, pemanfaatan, keadilan dan berkelanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan program-program yang ada pada APBD. Kebijakan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua meliputi :

- a. pemerataan pelayanan dan peningkatan Pendidikan dan Kesehatan dengan memprioritaskan orang asli Papua;
- b. pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan memprioritaskan orang asli Papua;
- c. Pembangunan infrastruktur berkualitas Terutama mendukung Pembangunan infrastruktur perhubungan, energi Listrik, air bersih, telekomunikasi, sanitasi lingkungan, permukiman dan perumahan, serta infrastruktur dasar lainnya dengan memprioritaskan distrik dan kampung yang merupakan basis orang asli



Papua dan Peningkatan kesejahteraan kualitas hidup orang asli Papua, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat adat.

Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon alokasi umum nasional terdiri atas :

- a. Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) di tuju kan untuk program pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan public; peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga; dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah;
- b. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaanya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) ditujukan untuk belanja Pendidikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); Belanja Kesehatan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan
- c. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang ditetapkan pemerintah pusat dengan dewan perwakilan rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran ditujukan untuk Pembangunan infrastruktur perhubungan; energi Listrik; air bersih; telekomunikasi; dan sanitasi lingkungan.

Dalam rangka penyelenggaraan program-program otonomi khusus Provinsi Papua, pemerintah daerah menyusun perencanaan penggunaan atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang berpedoman pada RIPPP, serta diintegrasikan ke dalam RPD, RKPD serta Renstra dan Renja SKPD. Tahapan perencanaan dan penganggaran program-program otonomi khusus Provinsi Papua sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua;
- b. Penyusunan rencana anggaran dan program penggunaan dana otonomi khusus Provinsi Papua dengan memperhatikan pagu penerimaan tahun sebelumnya



- c. Menteri Keuangan, Kemendagri dan Bappenas/PPN melakukan pendampingan, evaluasi, penyesuaian dan peniaian rencana anggaran dan Program penggunaan data otonomi khusus antara lain :
- Kesesuaian antara usulan program dengan RIPPP dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
 - Kesesuaian usulan program dengan melihat kewenangan provinsi/kabupaten/kota;
 - sinergi usulan rencana program dan kegiatan kabupaten/kota dengan rencana program kegiatan provinsi;
 - kewajaran nilai program dan kegiatan
 - asas efisiensi dan efektivitas
 - hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan data otonomi khusus Provinsi Papua
 - sinergi dengan rencana anggran dan program penggunaan penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1%, 1,25% dan DTI
- d. hasil evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD Provinsi Papua yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di lingkup pemerintah daerah di Provinsi Papua

Adapun kinerja Perangkat daerah dalam penggunaan dana otonomi khusus pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Realisasi dan Capaian Kinerja OPD Penerima Sumber Dana Otonomi Khusus
Provinsi Papua Tahun 2024

No	OPD	Satuan	Capaian 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Dinas Pendidikan	Persen	47,14	100	100	100
2.	Dinas Kesehatan	Persen	30,95	100	100	100
3.	RSUD Jayapura	Persen	99,98	100	99,45	100



No	OPD	Satuan	Capaian 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4.	RS Jiwa Abepura	Persen	99,61	100	98,05	100
5.	RSUD Abepura	Persen	19,98	100	99,45	100
6.	DPUPR	Persen	93,82	100	86,98	81,00
7.	Dinas Perhubungan	Persen	91,21	100	53,54	55,01
8.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	n/a	100	100	100
9.	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	2,54	100	100	100
10	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100	100	99,00	100
11.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Persen	94,45	100	97,80	100
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Persen	92,95	100	96,42	98,89
13.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	97,58	100	99,94	100
14.	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Persen	n/a	100	99,28	100
15.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja	Persen	97,58	100	100	100
16.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Persen	100	100	99,23	100
17	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Persen	61,09	100	100	100
18.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Persen	n/a	100	99,91	100
19.	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	Persen	95,89	100	100	100
20.	Sekretariat Daerah	Persen	n/a	100	100	100
21.	Inspektorat	Persen	n/a	100	97,70	100
22.	Sekretariat MRP	Persen	n/a	100	99,29	100
Rata-rata		Persen	80,78	100	96,64	97,04

Sumber: TP2K 2025 (diolah)



Sasaran 9 :

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”** sebesar **80,79** persen dengan capaian **Berhasil** dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (Dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 9

	INDIKATOR KINERJA	ATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	66.85
2.	Capaian implementasi e-government terintegrasi	Persen	95	90	94.73
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					80.79

Berikut nya adalah **Indikator Kinerja “Capaian Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh KEMENPANRB dan RI”** dengan **Target BB** dan **Realisasi B** dengan Nilai **66.85** sebagai penilaian **Akuntabilitas Kinerja** untuk **Tahun 2024**. Untuk memenuhi target masih belum bisa tercapai ke Predikat BB karena nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kab/Kota se Papua 2/3 nya atau sekitar 6 Kab belum mendapat predikat B tuk nilai Akuntabilitas Kinerja dimana untuk Kab/Kota se Papua di Tahun 2024 nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) nya masih pada level Predikat C yaitu Kab. Mamberamo Raya dengan nilai AKIP 46.11, Kab.Sarmi nilai AKIP 38.99 dan Kab. Supiori nilai AKIP 32.77 sementara Kab. Waropen Tdk mendapat Nilai AKIP atau 0 karena tidak dievaluasi oleh Pemerintah melalui KEMENPANRB RI karena tidak mengumpulkan Laporan Kinerja



(LKj) Pemda Waropen Tahun 2023. Sementara yang Predikat CC ada 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kab.Biak Numfor 54.27, Kab.Keerom 53.33 dan Kab. Kep.Yapen 50.05 sementara yang Predikat B ada 3 (Tiga) yaitu Provinsi Papua dengan nilai AKIP 66,85 kemudian Kota Jayapura dengan nilai AKIP 61.31 serta Kab. Jayapura dengan nilai AKIP 60.04 . Sementara syarat untuk mencapai predikat BB adalah 2/3 Kab/Kota atau sekitar 6 Kab Nilai AKIP nya harus sudah Predikat B sementara realisasinya baru 2 (Dua) yang berpredikat B yaitu Kabupaten/Kota se Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura dan Kab.Jayapura. Itulah sebabnya secara akumulasi mempengaruhi Kinerja Provinsi Papua secara keseluruhan untuk belum dapat sampai pada Predikat BB apalagi Predikat A dan Predikat AA.

Berikut adalah perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua yang tertera pada Tabel sebagai berikut :

Tabel.
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua Tahun 2015-2024

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA			
TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2015	46.03	C	KURANG
2016	51,18	CC	CUKUP
2017	60,04	B	BAIK
2018	62,59	B	BAIK
2019	64,05	B	BAIK
2020	64,53	B	BAIK
2021	64,57	B	BAIK
2022	66,05	B	BAIK
2023	66,27	B	BAIK
2024	66,85	B	*BAIK
Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua			
Sumber : KEMENPANRB RI			



Tahun 2015 - 2021 Bobot Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) didasarkan pada PERMENPANRB RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sedangkan Tahun 2022-2024 PERMENPANRB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP) yang terdiri atas 4 (Empat) komponen yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Seperti yang dapat dilihat di penjelasan dibawah ini :

**Tabel. Perkembangan Nilai AKIP Provinsi Papua
Tahun 2023-2024**

KOMPONEN YANG DINILAI		2023		2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	21.26	30	21,30
b	Pengukuran Kinerja	30	16,96	30	17,50
c	Pelaporan Kinerja	15	10,25	15	10,29
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	25	17,76
JUMLAH		100	66,26	100	66,85
			B		B
Kenaikan Nilai AKIP					0.59

Target AKIP Provinsi Papua di Tahun 2025 adalah BB hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026 juga sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua Tahun 2024-2026 serta juga sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024.

Berikut penjelasan penilaian AKIP Tahun 2024 yang mengalami perubahan bobot penilaian sebagaimana terlampir dalam Surat MENPANRB RIRI kepada Sekda Provinsi Papua yaitu :



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/541/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Provinsi Papua**
Di
Jayapura

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Provinsi Papua, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan



implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dan PD telah menyampaikan laporan kinerja atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada esr.menpan.go.id secara tepat waktu;
- b. PD telah menyampaikan rencana aksi dan rencana kerjanya sebagai turunan dari dokumen perjanjian kinerja yang telah disusun pada esr.menpan.go.id.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan nilai **66,85** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	21,30	21,30
2. Pengukuran Kinerja	30	16,96	17,50
3. Pelaporan Kinerja	15	10,25	10,29
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	17,76
Nilai Hasil Evaluasi	100	66,26	66,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun dokumen perencanaan kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah dan tingkat unit kerja di bawahnya. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya:

- a. Masih terdapat dokumen perencanaan kinerja (perjanjian kinerja dan RPD) pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah yang belum disampaikan pada esr.menpan.go.id, sebagai contoh PK



Gubernur 2024, dan PK Kepala Dinas Sosial 2024;

- b. Dokumen perjanjian kinerja pada sebagian PD masih belum sepenuhnya sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Masih terdapat sasaran strategis pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) pada level kinerjanya, contoh:
 - Pada Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur 2023 salah satu sasaran strategisnya yaitu meningkatnya bantuan sosial PMKS, sasaran strategis tersebut belum berorientasi hasil (*outcome*) untuk menjadi kinerja level Kepala Daerah, karena lebih tepat menjadi kinerja Perangkat Daerah teknis;
 - Pada PK Kepala Dinas kehutanan dan lingkungan hidup tahun 2024 dengan sasaran strategis tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD, Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD, sasaran-sasaran strategis tersebut belum berorientasi hasil karena masih fokus pada pelaksanaan kegiatan dan belum menggambarkan kondisi positif apa yang ingin diwujudkan.
- d. Belum seluruh rumusan indikator kinerja memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) serta cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis, contoh:
 - Pada sasaran strategis di PK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024, yaitu “meningkatnya pemanfaatan informasi untuk mendukung e-government, penyediaan data dan informasi bagi Pemerintah dan Informasi bagi pemerintah dan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik”, dengan indikator rata-rata persentase pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang layanan, indikator tersebut dinilai belum memenuhi kriteria SMART khususnya pada kriteria *relevant*;
 - Pada sasaran strategis PK Kepala Dinas Perhubungan meningkatnya aksesibilitas transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah dengan indikator persentase jumlah arus barang dan orang keluar masuk wilayah Papua, indikator tersebut belum memenuhi kriteria SMART dan cukup khususnya pada kriteria relevan dan cukup.



- e. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya berdasarkan *logical framework/prinsip logis* yang sebelumnya telah disusun menggambarkan hubungan kausalitas, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- f. Implementasi penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga mengakibatkan penetapan kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan level jabatannya;
- g. Penetapan rencana aksi PD belum menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan.

2) Pengukuran Kinerja

Provinsi Papua dan Perangkat Daerahnya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya:

- a. Ketidakselarasan antara dokumen Indikator Kinerja Utama PD dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- b. Masih terdapat rumusan formulasi perhitungan indikator kinerja utama yang tidak sesuai dengan indikator kinerja, contoh IKU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja pada indikator Jumlah UKM yang berkembang dengan formulasi perhitungan jumlah UMKM tahun n dikurangi jumlah UMKM tahun $n-1$, formulasi perhitungan tersebut dinilai kurang sesuai untuk menghitung indikator kinerja UKM yang berkembang;
- c. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
- d. Pemerintah daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai salah satu dasar pemberian *reward and punishment*.

3) Pelaporan Kinerja

Provinsi Papua telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat pemda maupun tingkat perangkat daerah (PD). Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya:



- a. Terdapat ketidakselarasan antara kinerja yang disampaikan realisasinya pada Lakin PD dengan kinerja yang ditetapkan pada PK PD tersebut, contoh pada Lakin Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 di mana realisasi kinerja yang disampaikan pada bab III adalah jumlah pengadaan multimedia, jumlah multimedia terpelihara, jumlah layanan transponder dan sebagainya, Namun demikian, kinerja yang ditetapkan di PK Kepala Dinas Kominfo tahun 2023 adalah Indeks SPBE, rata-rata persentase pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang layanan, persentase layanan data dan informasi kinerja;
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan target kinerja tahun berjalan yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya, contoh pada Dinas Ketahanan Pangan yang menetapkan target indikator kinerja penguatan cadangan pangan daerah pada tahun 2024 yaitu 40 ton, sedangkan capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sudah mencapai 43,40 ton;
- c. Lakin pada sebagian besar PD masih belum menyajikan analisis keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah (PD). Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya:

- a. Laporan hasil evaluasi dinilai belum memberikan rekomendasi yang cukup dan belum menysasar secara langsung akar permasalahan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;
- b. Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan seluruh dokumen perencanaan kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah hingga seluruh PD disampaikan pada esr.menpan.go.id;
- 2) Mereviu kembali dokumen perjanjian kinerja pada PD agar sesuai dengan



format pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revaluasi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Merevaluasi kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja sehingga strategisnya lebih berorientasi *outcome* pada level kinerjanya dan memastikan indikator kinerja yang digunakan relevan dan memberikan *continuous improvement* pada pencapaian kinerja;
- 4) Melakukan revaluasi dan perbaikan dokumen pohon kinerja (*cascading*) baik di level Pemerintah Daerah maupun di level PD untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam upaya menyelesaikan isu strategis daerah. Selanjutnya *cascading* yang telah disusun tersebut diimplementasikan pada dokumen perencanaan kinerja PD;
- 5) Merevaluasi kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD, dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan kegiatan-kegiatan/aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- 6) Memastikan kembali keselarasan pada perencanaan kinerja PD antara dokumen Renstra, PK dengan IKU;
- 7) Memastikan seluruh indikator kinerja utama telah dilengkapi dengan formulasi perhitungan dan sumber data untuk memastikan keandalan dan validitas pengukuran, serta memastikan seluruh formulasi perhitungan sudah tepat untuk menghitung indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- 8) Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja yang terintegrasi;
- 9) Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan menyampaikan data capaian indikator kinerja utama sehingga bukan hanya capaian program dan realisasi anggaran saja;
- 10) Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja, dan menjadikan capaian indikator kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang, baik yang masih berada di bawah 75 % maupun yang sudah berada di atas kategori tersebut;
- 11) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemda maupun PD dengan menyajikan



updated data kinerja yang lengkap, analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi beserta solusinya, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;

- 12) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
- 13) Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil capaian kinerja PD dan evaluasi SAKIP internal sehingga dapat menjadi penyemangat setiap Perangkat Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

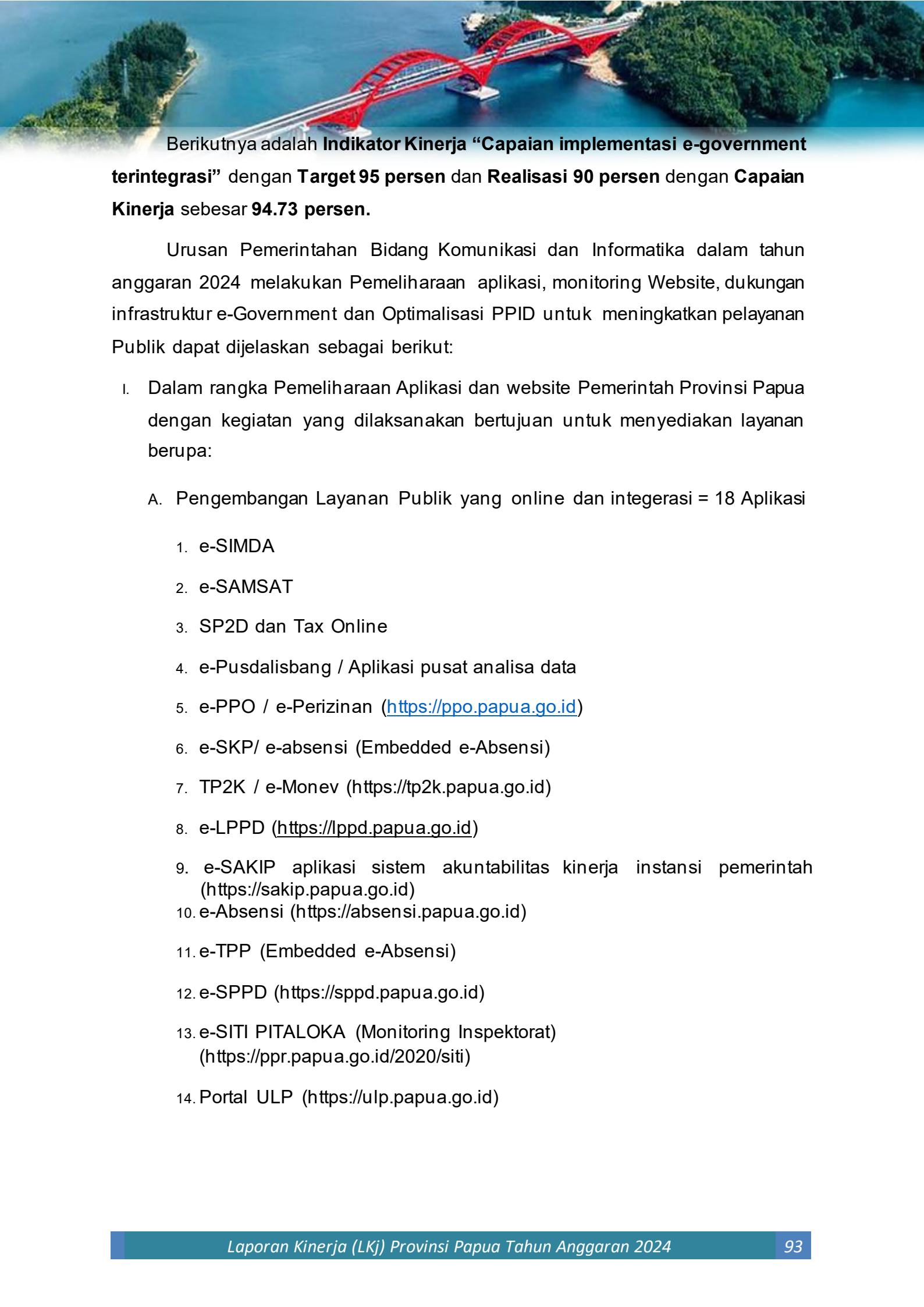


**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Provinsi Papua.



Berikutnya adalah **Indikator Kinerja “Capaian implementasi e-government terintegrasi”** dengan **Target 95 persen** dan **Realisasi 90 persen** dengan **Capaian Kinerja sebesar 94.73 persen**.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam tahun anggaran 2024 melakukan Pemeliharaan aplikasi, monitoring Website, dukungan infrastruktur e-Government dan Optimalisasi PPID untuk meningkatkan pelayanan Publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Dalam rangka Pemeliharaan Aplikasi dan website Pemerintah Provinsi Papua dengan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk menyediakan layanan berupa:
 - A. Pengembangan Layanan Publik yang online dan integerasi = 18 Aplikasi
 1. e-SIMDA
 2. e-SAMSAT
 3. SP2D dan Tax Online
 4. e-Pusdalisbang / Aplikasi pusat analisa data
 5. e-PPO / e-Perizinan (<https://ppo.papua.go.id>)
 6. e-SKP/ e-absensi (Embedded e-Absensi)
 7. TP2K / e-Monev (<https://tp2k.papua.go.id>)
 8. e-LPPD (<https://lppd.papua.go.id>)
 9. e-SAKIP aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (<https://sakup.papua.go.id>)
 10. e-Absensi (<https://absensi.papua.go.id>)
 11. e-TPP (Embedded e-Absensi)
 12. e-SPPD (<https://sppd.papua.go.id>)
 13. e-SITI PITALOKA (Monitoring Inspektorat) (<https://ppr.papua.go.id/2020/siti>)
 14. Portal ULP (<https://ulp.papua.go.id>)



15. Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Papua (<https://sikap-oap.papua.go.id>)

16. e-SINGA sistem informasi pengadaan (<https://singa2.papua.go.id>)

17. npd.papua .go.id

18. e-efficial.papua.go.id

B. Pemeliharaan Website Pemerintah Provinsi Papua dan monitoring website SKPD dilingkungan Pemprov Papua dengan melaksanakan monitoring pelaksanaan

pemanfaatan domine dan sub domine Pemerintah Provinsi Papua, dengan jumlah domain dan sub domain di OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, adalah:

1. Jumlah Domain sebanyak 1 website, yaitu: <https://papua.go.id>

iii. Fasilitas Jaringan Intranet, Akses Internet antra SKPD di Lingkung Pemerintah Provinsi Papua dan ppengelolaan Server dan Disaster Recovery System (DRC) serta Sistem Pengelolaan Keamanan Informasi Pada e-Governement

1. Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terhubung dengan Akses Intranet;
2. Terdapat Internet Kampung yang di kembangan ada 3 kampung antara lain ;
 - Kampung Kayupulo
 - Kampung Enggros
 - Kampung Tobati
3. Kapasitas Bandwith Internet tersedia dan terpakai untuk mendukung e-Government;
4. Jumlah Space Server Lokal dan Co-Location terpasang dan jumlah terpakai;



5. Jumlah DRC yang disiapkan untuk recovery Sistem e- Governemnt
6. Jumlah Cyber Attack yang masuk pada Server Pemprov Papua dalam 1 (satu) Periode.

Berikut perkembangan Indikator Sasaran Kinerja capaian implementasi e-Government terintegrasi dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 9 Indikator 2
Tahun 2023-2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Capaian Implementasi e-Government terintegrasi	Persen	95	90	94.73	95	90	94.73

Perkembangan capaian e-Government Pemerintah Provinsi Papua dari sisi capaian realisasi masih tetap sama dengan Tahun sebelumnya di Tahun 2024 yaitu 90% jika dibandingkan dengan tahun 2023 masih sama yaitu 90 %, hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 tidak ada penambahan aplikasi dan masih tetap sama melakukan pemeliharaan sistem aplikasi yang sudah terbangun untuk dapat dijalankan secara maksimal di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.



Sasaran 10 :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan Daerah

Salah satu tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua 2024-2026 ialah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Salah satu perwujudan tujuan dimaksud adalah Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah”** sebesar **101.75 persen** dengan predikat **“Sangat Berhasil”**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja Sasaran 10

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD	Persen	95	90	94,73
2.	Tingkat konsistensi KUAPPAS terhadap RKPD	Persen	95	100	105,26
3.	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RAP	Persen	95	100	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					101.75

Indikator Kinerja yang ada Tiga diatas merupakan Indikator yang baru dalam dokumen RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, sehingga perkembangan Indikator ini baru dapat di ukur pada Tahun 2024 tanpa membandingkan dengan Tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja dari sasaran ini meningkat yaitu 101.75 hal ini menunjukkan bahwa program Kegiatan dan Sub kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan sudah konsisten antara dokumen menengah dan tahunan.

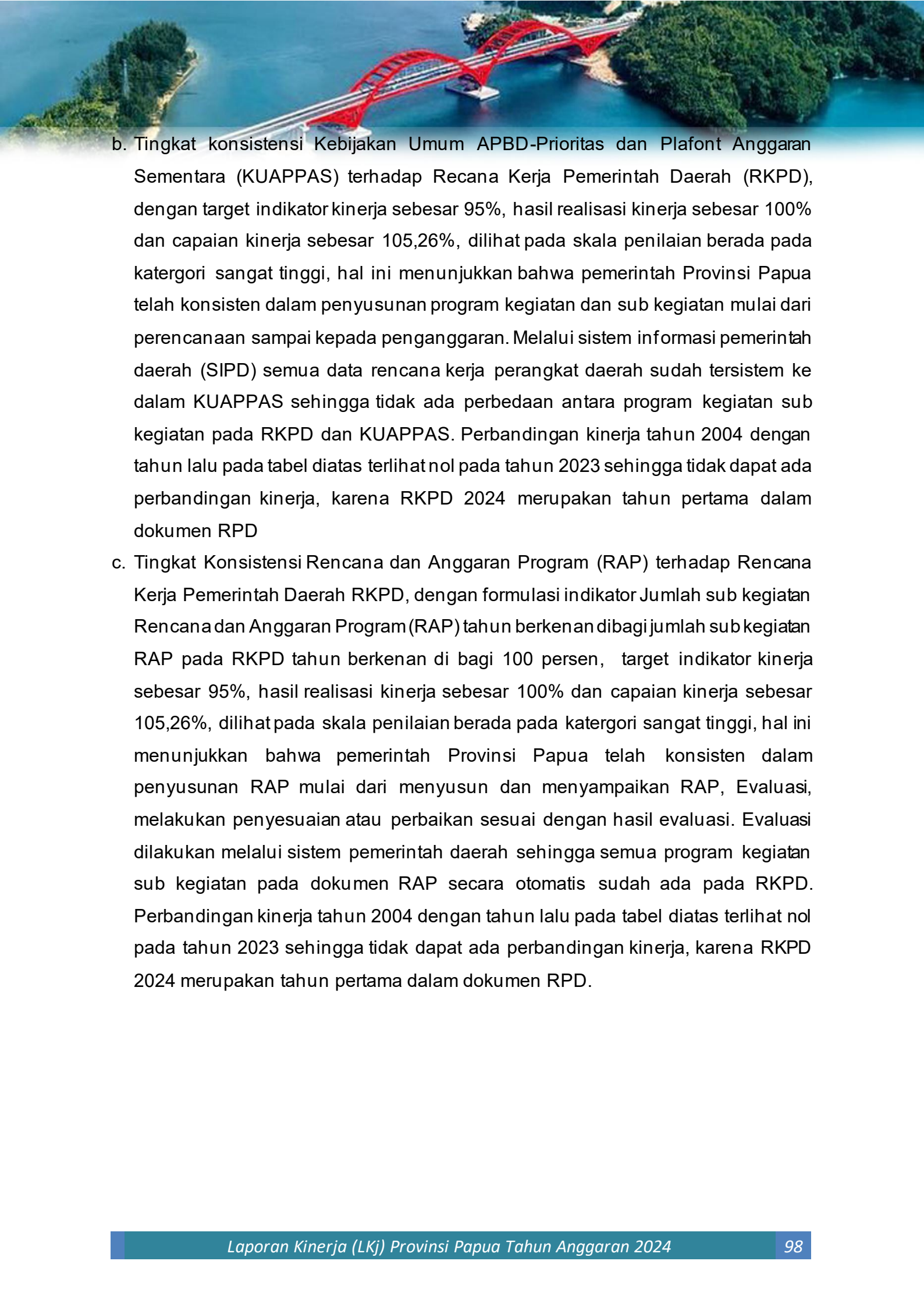


Target dan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah terdapat tiga (3) indikator sasaran yakni :

- a. Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD, dengan target indikator kinerja tahun 2024 sebesar 95% adapun hasil realisasi kinerja sebesar 90% dan capaian kinerja sebesar 94,75%. Apabila dilihat dari data realisasi dan capaian target terdapat selisih 0,13% hal ini menunjukkan bahwa masih dibawah target yang direncanakan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah dokumen transisi rencana Pembangunan menengah untuk periode 3 (Tiga) tahun yang akan digunakan oleh pejabat kepala daerah dan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan. Untuk tahun 2024 RPD sebagai tahun pertama dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan sehingga dalam penyusunan program-program Pembangunan melihat Kembali hasil evaluasi kinerja periode tahun sebelum.

Apabila melihat konsistensi antara program-program RPD dan RKPD, terdapat beberapa program yang tidak tertuang dalam RKPD hal ini sebabkan adanya regulasi dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan selanjutnya di ubah menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya regulasi yang diubah sehingga beberapa program kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi telah dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota.



- b. Tingkat konsistensi Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafont Anggaran Sementara (KUAPPAS) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan target indikator kinerja sebesar 95%, hasil realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 105,26%, dilihat pada skala penilaian berada pada kategori sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah konsisten dalam penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan mulai dari perencanaan sampai kepada penganggaran. Melalui sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) semua data rencana kerja perangkat daerah sudah tersistem ke dalam KUAPPAS sehingga tidak ada perbedaan antara program kegiatan sub kegiatan pada RKPD dan KUAPPAS. Perbandingan kinerja tahun 2004 dengan tahun lalu pada tabel diatas terlihat nol pada tahun 2023 sehingga tidak dapat ada perbandingan kinerja, karena RKPD 2024 merupakan tahun pertama dalam dokumen RPD
- c. Tingkat Konsistensi Rencana dan Anggaran Program (RAP) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD, dengan formulasi indikator Jumlah sub kegiatan Rencana dan Anggaran Program (RAP) tahun berkenan dibagi jumlah sub kegiatan RAP pada RKPD tahun berkenan di bagi 100 persen, target indikator kinerja sebesar 95%, hasil realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 105,26%, dilihat pada skala penilaian berada pada kategori sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah konsisten dalam penyusunan RAP mulai dari menyusun dan menyampaikan RAP, Evaluasi, melakukan penyesuaian atau perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui sistem pemerintah daerah sehingga semua program kegiatan sub kegiatan pada dokumen RAP secara otomatis sudah ada pada RKPD. Perbandingan kinerja tahun 2004 dengan tahun lalu pada tabel diatas terlihat nol pada tahun 2023 sehingga tidak dapat ada perbandingan kinerja, karena RKPD 2024 merupakan tahun pertama dalam dokumen RPD.



Berikut konsistensi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan pada tabel berikut :

Tabel
Jumlah Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Dokumen Perencanaan
Tahun 2024

URAIAN	RPD	RTRW	RKPD	KUA PPAS	RAP		
					1%	1,25%	DTI
Program	164	115	146	146	10	30	8
Kegiatan	n/a	n/a	299	299	19	40	9
Sub Kegiatan	n/a	n/a	512	512	47	86	16

Sumber Data : Bapperida Prov.Papua, 2025.



Sasaran 11 :

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya sistem akuntabilitas dan Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah**” sebesar **133,98 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100,00
2.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14.00	37,02	264,43
3.	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Persen	66.01	97,27	147,15
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					133, 98



Indikator **Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD)** menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan kembali untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Provinsi Papua Tahun 2024 oleh BPK RI.

Adapun Indikator Opini oleh BPK RI adalah :

1. Kesesuaian dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Pengungkapan yang memadai;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas pengendalian intern; jika tidak ada permasalahan yang signifikan dan material berpengaruh terhadap penyajian Laporan Keuangan (LK) terkait 4 Indikator diatas, opini nya WTP.

Berikut Realisasi Perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. Perkembangan LKPD Provinsi Papua oleh BPK RI

Tahun 2023-2024

Tahun	2023	2024
Opini BKP RI Atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua	WTP	*WTP

(*) Pemerintah Provinsi Papua Menargetkan Opini BPK RI di Tahun 2024 adalah WTP Yang Hasilnya baru diketahui sekitar Triwulan II Tahun 2025

Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua dengan predikat WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin membaik artinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI.

Adapun Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah sebagai berikut :



Buku I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA**

Nomor : 22.A/LHP/XIX.JYP/05/2024

Tanggal : 31 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

BPK Perwakilan Provinsi Papua

iii f1



Pemerintah Provinsi Papua. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal Lain

Dalam LHP BPK Nomor 01.A/LHP/XIX/JYP/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 karena dalam Catatan 5.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua menyajikan realisasi Belanja Daerah senilai Rp11,45 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya terdapat realisasi belanja senilai Rp1,57 triliun yang melampaui anggaran induk dengan rincian yaitu Belanja Barang dan Jasa senilai Rp403,70 miliar, Belanja Hibah senilai Rp437,44 miliar, Belanja Bantuan Sosial senilai Rp27,54 miliar, Belanja Modal senilai Rp566,11 miliar, dan Belanja Tidak Terduga senilai Rp141,02 miliar. Atas pelampauan realisasi belanja tersebut Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Anggaran Perubahan sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, namun penetapan peraturan gubernur tersebut tidak melalui persetujuan bersama DPRD dan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Papua bersama DPRD Papua telah melakukan upaya perbaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 Oktober 2023, sehingga penyajian Laporan Keuangan menjadi wajar.

BPK Perwakilan Provinsi Papua

2 iv P 1



Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 22.B/LHP/XIX.JYP/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jayapura, 31 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Papua
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



[Signature]
Dr. Ir. Martuama Saragi S.T., M.M., CSFA, IPU/AL
Register CSFA Nomor R.0123.2022

BPK Perwakilan Provinsi Papua

[Signature] v



Indikator Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dengan Target pada tahun 2024 sebesar 14,27% Realisasi sebesar 22,09% dan Capaian Kinerja sebesar 154,80% kategori “Sangat Baik” dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tabel. Indikator Kinerja Nomor 2 untuk Sasaran 11
Tahun 2023-2024**

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
2.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14.27	22,09	154,80

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari 4 (empat) jenis pajak yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-Lain PAD yang Sah.



Tabel. Target dan Realisasi PAD Tahun 2024

Target dan Realisasi PAD Tahun 2024			
Uraian	Target Induk	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	565,381,850,000.00	674,740,210,036.95	119.34
- Pajak Daerah	386,285,664,000.00	410,863,356,228.00	106.36
- Retribusi Daerah	130,021,186,000.00	118,912,410,760.34	91.46
- Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	44,500,000,000.00	55,982,500,244.00	125.80
- Lain-lain PAD Yang Sah	4,575,000,000.00	88,981,942,804.61	1,944.96

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Target PAD dari sektor Pajak Daerah, Penerimaan Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah telah tercapai. Pendapatan yang sangat signifikan di peroleh dari sektor Lain-Lain PAD yang sah, yaitu sebesar 1,944.96%. Namun pada sektor Retribusi hanya terealisasi sebesar 91,46% artinya kurang 11.108.775.239,65 dari target yang ditetapkan yakni sebesar 130.021.186.000,00.

Realisasi PAD tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 masih terdapat penerimaan Deviden PT. Freeport Indonesia sebesar Rp. 485.024.909.391,00, namun, dengan adanya Pemekaran Provinsi Papua menjadi 4 (empat) Provinsi dengan penambahan 3 (tiga) Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 14, 15 dan 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, maka Tahun 2024 ini penerimaan Deviden PT. Freeport Indonesia tidak lagi menjadi penerimaan Provinsi Papua. Perbandingan pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2023 dan Tahun 2024

Uraian	Realisasi		%
	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Triwulan Pertama	172,936,283,901.70	158.152.446.190,54	(9,35)
Triwulan Kedua	311,306,416,600.97	193.370.332.594,10	(60,99)
Triwulan Ketiga	812,588,118,829.33	160.767.389.481,38	(405,44)
Triwulan Keempat	569,361,986,210.76	162.450.041.770,93	(250,48)
TOTAL	1,381,950,105,040	674.740.210.036,95	(104,81)

Walaupun Target PAD pertumbuhannya negatif namun Realisasinya tumbuh sangat positif bahkan melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 109.358.360.036,95 atau 119,34% dengan katagori sangat baik.

Tabel Capaian kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD	565.381.850.000,00	674.740.210.036,96	119,34 %

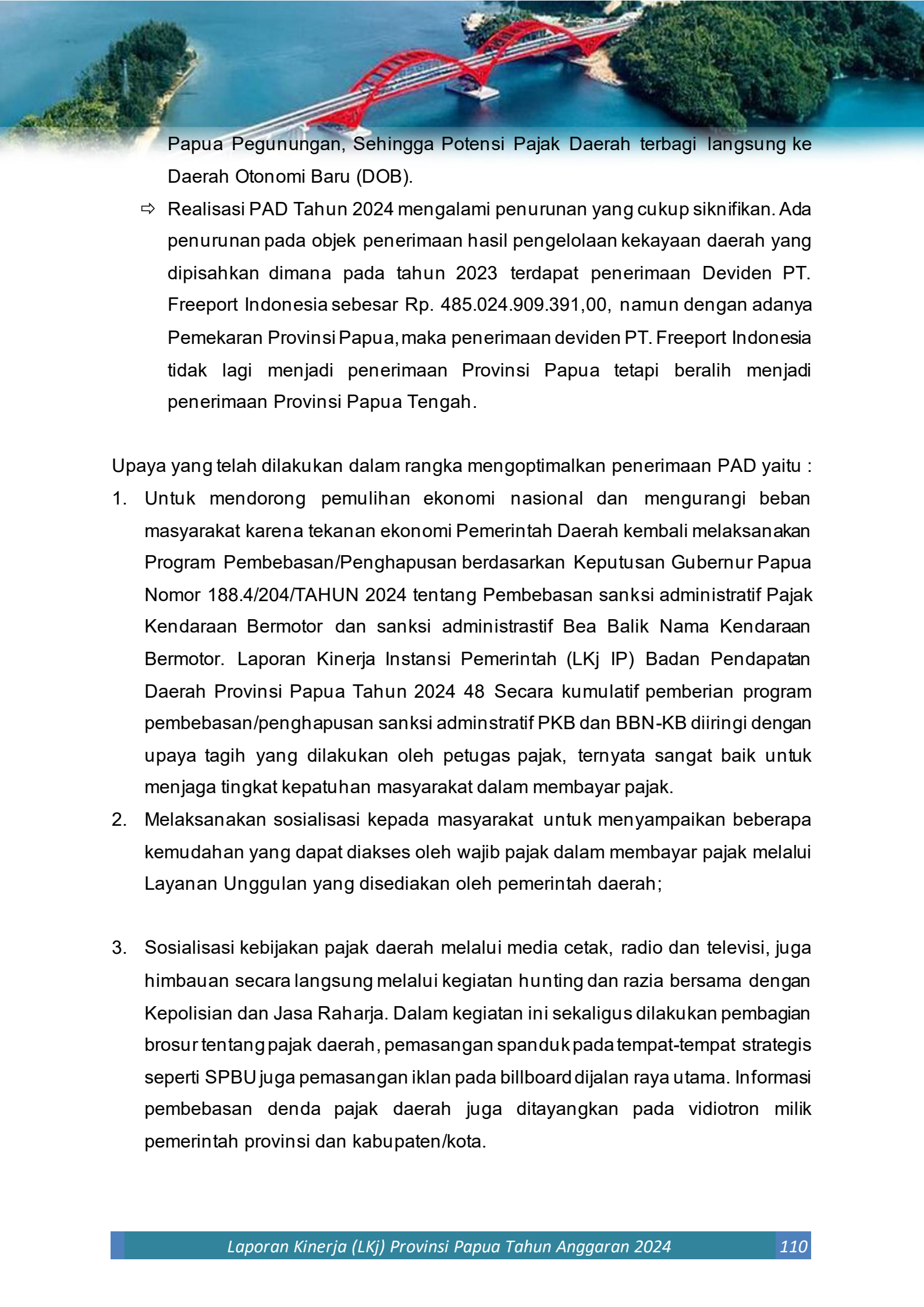


Tabel. Realisasi PAD selama 5 (lima) Tahun terakhir

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1.050.453.475.377	1.977.739.632.899	2.114.929.998.061	1.177.838.112.117	565.381.850.000
Realisasi	1.388.510.064.435	2.139.689.476.134	2.226.754.654.927	1.381.850.105.040	674.740.210.036

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi PAD Provinsi Papua selama 5 tahun terakhir mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Adapun penjelasan Trend PAD dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu :

- ⇒ Realisasi PAD Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Realisasi PAD Tahun 2020 sebesar Rp751.179.411.698,60. Adapun peningkatan realisasi pada pos Pajak Daerah sebesar Rp640.694.456.369,00, pos pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp8.506.351.096,00 dan pos pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp103.193.741.272,00. Peningkatan ini disebabkan karena : adanya pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia Termin II Thn 2021 sebesar Rp. 685.518.686.720,00 (pokok, denda, dan konsolidasi);
- ⇒ Realisasi PAD Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Realisasi PAD Tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan karena ada penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp722.223.405.759,00 yang bersumber dari penerimaan Deviden PT. Freeport Indonesia untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang disetor di tahun 2022.
- ⇒ Realisasi PAD Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp844.804.549.887,29 Adapun Penurunan pada pos pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp716.852.305.166,00, pos pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 734.801.685,00 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp239.201.496.368,00. Penurunan ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 14, 15 dan 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi

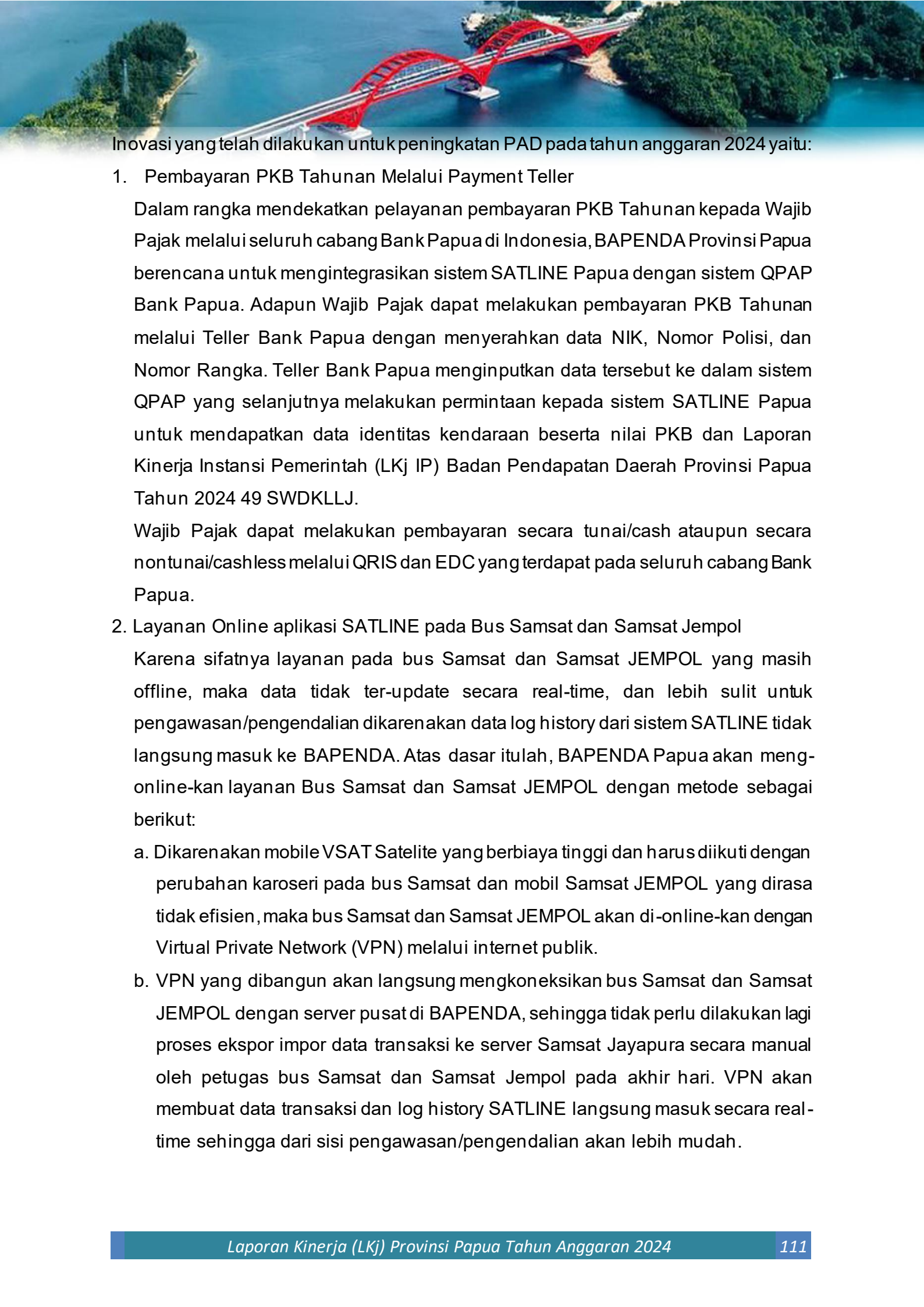


Papua Pegunungan, Sehingga Potensi Pajak Daerah terbagi langsung ke Daerah Otonomi Baru (DOB).

- ⇒ Realisasi PAD Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ada penurunan pada objek penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana pada tahun 2023 terdapat penerimaan Deviden PT. Freeport Indonesia sebesar Rp. 485.024.909.391,00, namun dengan adanya Pemekaran Provinsi Papua, maka penerimaan deviden PT. Freeport Indonesia tidak lagi menjadi penerimaan Provinsi Papua tetapi beralih menjadi penerimaan Provinsi Papua Tengah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD yaitu :

1. Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan mengurangi beban masyarakat karena tekanan ekonomi Pemerintah Daerah kembali melaksanakan Program Pembebasan/Penghapusan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/204/TAHUN 2024 tentang Pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 48 Secara kumulatif pemberian program pembebasan/penghapusan sanksi administratif PKB dan BBN-KB diiringi dengan upaya tagih yang dilakukan oleh petugas pajak, ternyata sangat baik untuk menjaga tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan beberapa kemudahan yang dapat diakses oleh wajib pajak dalam membayar pajak melalui Layanan Unggulan yang disediakan oleh pemerintah daerah;
3. Sosialisasi kebijakan pajak daerah melalui media cetak, radio dan televisi, juga himbauan secara langsung melalui kegiatan hunting dan razia bersama dengan Kepolisian dan Jasa Raharja. Dalam kegiatan ini sekaligus dilakukan pembagian brosur tentang pajak daerah, pemasangan spanduk pada tempat-tempat strategis seperti SPBU juga pemasangan iklan pada billboard di jalan raya utama. Informasi pembebasan denda pajak daerah juga ditayangkan pada vidiotron milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.



Inovasi yang telah dilakukan untuk peningkatan PAD pada tahun anggaran 2024 yaitu:

1. Pembayaran PKB Tahunan Melalui Payment Teller

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pembayaran PKB Tahunan kepada Wajib Pajak melalui seluruh cabang Bank Papua di Indonesia, BAPENDA Provinsi Papua berencana untuk mengintegrasikan sistem SATLINE Papua dengan sistem QPAP Bank Papua. Adapun Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PKB Tahunan melalui Teller Bank Papua dengan menyerahkan data NIK, Nomor Polisi, dan Nomor Rangka. Teller Bank Papua menginputkan data tersebut ke dalam sistem QPAP yang selanjutnya melakukan permintaan kepada sistem SATLINE Papua untuk mendapatkan data identitas kendaraan beserta nilai PKB dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 49 SWDKLLJ.

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara tunai/cash ataupun secara nontunai/cashless melalui QRIS dan EDC yang terdapat pada seluruh cabang Bank Papua.

2. Layanan Online aplikasi SATLINE pada Bus Samsat dan Samsat Jempol

Karena sifatnya layanan pada bus Samsat dan Samsat JEMPOL yang masih offline, maka data tidak ter-update secara real-time, dan lebih sulit untuk pengawasan/pengendalian dikarenakan data log history dari sistem SATLINE tidak langsung masuk ke BAPENDA. Atas dasar itulah, BAPENDA Papua akan meng-online-kan layanan Bus Samsat dan Samsat JEMPOL dengan metode sebagai berikut:

- a. Dikarenakan mobile VSAT Satellite yang berbiaya tinggi dan harus diikuti dengan perubahan karoseri pada bus Samsat dan mobil Samsat JEMPOL yang dirasa tidak efisien, maka bus Samsat dan Samsat JEMPOL akan di-online-kan dengan Virtual Private Network (VPN) melalui internet publik.
- b. VPN yang dibangun akan langsung mengkoneksikan bus Samsat dan Samsat JEMPOL dengan server pusat di BAPENDA, sehingga tidak perlu dilakukan lagi proses ekspor impor data transaksi ke server Samsat Jayapura secara manual oleh petugas bus Samsat dan Samsat Jempol pada akhir hari. VPN akan membuat data transaksi dan log history SATLINE langsung masuk secara real-time sehingga dari sisi pengawasan/pengendalian akan lebih mudah.



3. Fitur Opsen

Fitur Opsen merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua untuk mengakomodasi pemungutan Opsen PKB (Opsen Pajak Kendaraan Bermotor) dan Opsen BBNKB (Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dalam sistem SAMSAT Online. Penambahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 50 menu Opsen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan di Bidang Perpajakan Daerah (HKPD) serta Perda Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Fitur Opsen ini, pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat dilakukan secara bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB oleh wajib pajak melalui sistem SAMSAT Online. Hal ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta memastikan pemungutan Opsen yang merupakan kewenangan kabupaten/kota dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien yang pemungutannya akan dilakukan oleh Provinsi Papua melalui sistem SAMSAT Online. Inovasi Fitur Opsen ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Papua, khususnya terkait Opsen PKB dan Opsen BBNKB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitur Opsen ini akan mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2025, sejalan dengan implementasi Perda Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Indikator Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah (IPPD) dengan **Target** pada Tahun 2024 sebesar **66.01%** **Realisasi** sebesar **97.27%** dan **Capaian Kinerja** sebesar **147,15%** kategori **“Sangat Baik”** dengan penjelasan sebagai berikut :



Tabel. Indikator Kinerja Nomor 3 Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
3.	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Persen	66.01	97.27	147,15

Berdasarkan tabel diatas, target kinerja sebesar 66,01% adapun realisasi sebesar 97,27% dan capaian kinerja sebesar 147,15% dengan rumusan rata-rata realisasi indikator Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah IPPD) terdiri dari :

1. pengukuran kinerja utama daerah,
2. pengukuran kualitas kehidupan Masyarakat,
3. pengukuran kualitas tata Kelola pemerintahan daerah dan
4. pengukuran kualitas Pembangunan daerah di bagi target IPPD

Indikator Kinerja IPPD diatas merupakan Indikator yang baru dalam dokumen RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, sehingga perkembangan Indikator ini baru dapat di ukur pada Tahun 2024 tanpa membandingkan dengan Tahun 2023.

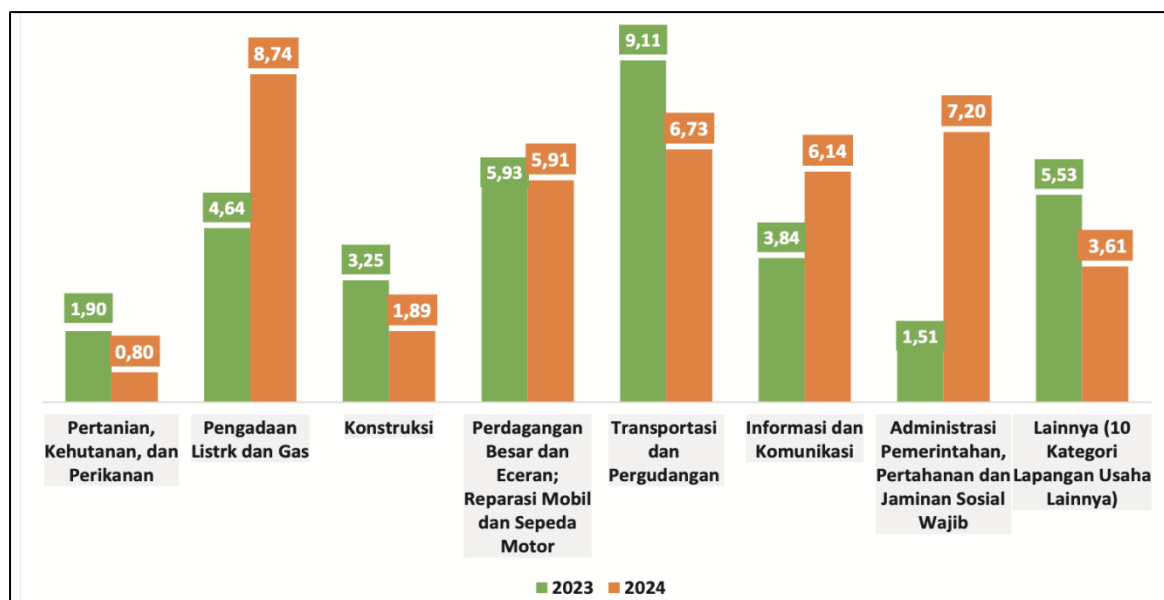


Sasaran 12 :

Meningkatnya Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Alam untuk Penciptaan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas.

Ekonomi Papua di tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,11 persen (c-to-c) sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,22 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh signifikan sebesar 8,74 persen, peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya produksi listrik; diikuti Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,20 persen; Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,73 persen; Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,14 persen; serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,91 persen.

Gambar. Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)



Sumber : Berita Resmi Statistik, 6 Februari 2025



Struktur perekonomian Papua dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2024 menunjukkan komposisi yang sama dengan tahun 2023. Lapangan Usaha Konstruksi masih menjadi kontributor terbesar pada perekonomian Papua sebesar 20,09 persen diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,24 persen; serta Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,09 persen.

Dengan demikian berdampak pula pada pencapaian sasaran strategis pembangunan Provinsi Papua di tahun 2024 yaitu **meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** yang diukur melalui pencapaian 3 (tiga) sub sektor pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Perkebunan dan Kontribusi Sektor Peternakan.

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 12

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	%	5,5	1,29	23,45
2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	6.0	1,57	26,17
3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	%	6.0	0,88	14,67
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					21,43

Sumber : BPS, 2025, (diolah)

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “**meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Tahun 2024**” sebesar **21,43** persen dengan predikat “**Tidak Berhasil**”. Capaian kinerja 3 (tiga) indikator Kontribusi Sektor tanaman



pangan Terhadap PDRB hanya mencapai 23,45%, Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB hanya mencapai 26,17% dan Kontribusi Sektor Peternakan yang paling terendah hanya mencapai 14,67% sehingga secara keseluruhan predikat kinerja sangat rendah/tidak berhasil.

Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran 12 : Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah 21,43 persen. Jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2023 yang sebesar 24,33 persen, maka capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan. Capaian kinerja sasaran ini selama periode tahun 2021-2024 cenderung mengalami penurunan, di mana tahun 2021 capaian kinerja sasaran mencapai 43,40 persen, tahun 2022 turun menjadi 33,40 persen, selanjutnya tahun 2023 turun lagi menjadi 24,33 persen dan tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 21,43 persen. Diharapkan ini menjadi perhatian bagi SKPD khususnya urusan Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan serta peternakan dalam mendukung dan mendorong peningkatan produksi di sub sektor ini mengingat dari tahun ke tahun sumbangan sub sektor ini cenderung mengalami penurunan.

Jika melihat rata-rata kontribusi dari tahun 2021-2024 sebagai masa pelaksanaan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 untuk sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB sebesar 3,06 persen, selanjutnya kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 1,71 persen dan kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sebesar 1,29 persen.

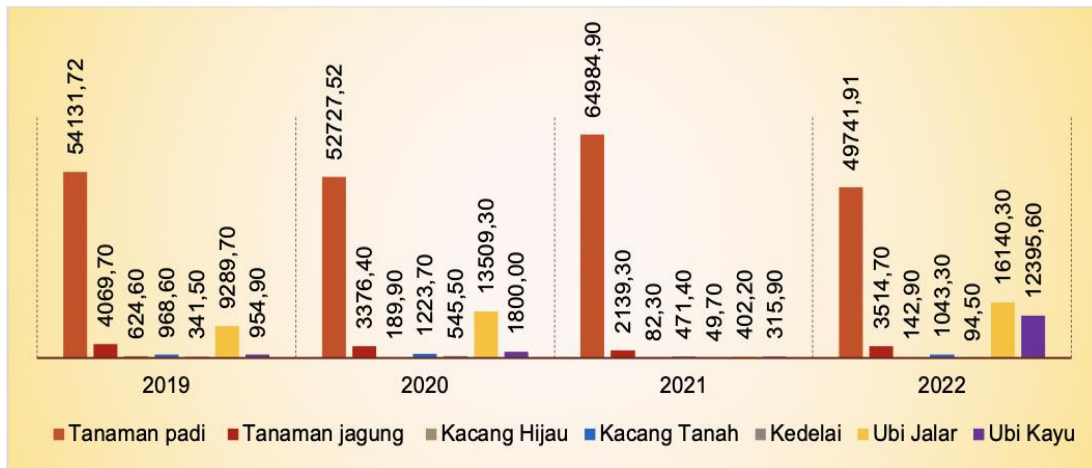
Namun kontribusi sub Sektor Perkebunan mengalami pertumbuhan kontribusi di Tahun 2024 dari tahun 2021-2024 yang mencapai 1,57 persen dan sub sektor peternakan yang mencapai 0,88 persen, diharapkan kedua sektor perkebunan dan peternakan semakin berkembang di Provinsi Papua seiring perubahan struktur perekonomian Provinsi Papua pasca pemekaran atau DOB.

Analisis luas panen sektor tanaman pangan di Provinsi Papua menunjukkan variasi yang signifikan antar komoditi selama periode 2019- 2022. Tanaman padi memiliki luas panen tertinggi dibandingkan komoditi lainnya, dengan rata-rata mencapai 55.396,51 hektar. Meskipun terjadi fluktuasi, luas panen padi pada tahun 2021



mencapai puncaknya menjadi 64.984,90 hektar, yang menunjukkan potensi yang baik dalam produksi padi di Provinsi Papua ini.

**Gambar. Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Papua
Tahun 2019-2023 (dalam hektar)**



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)

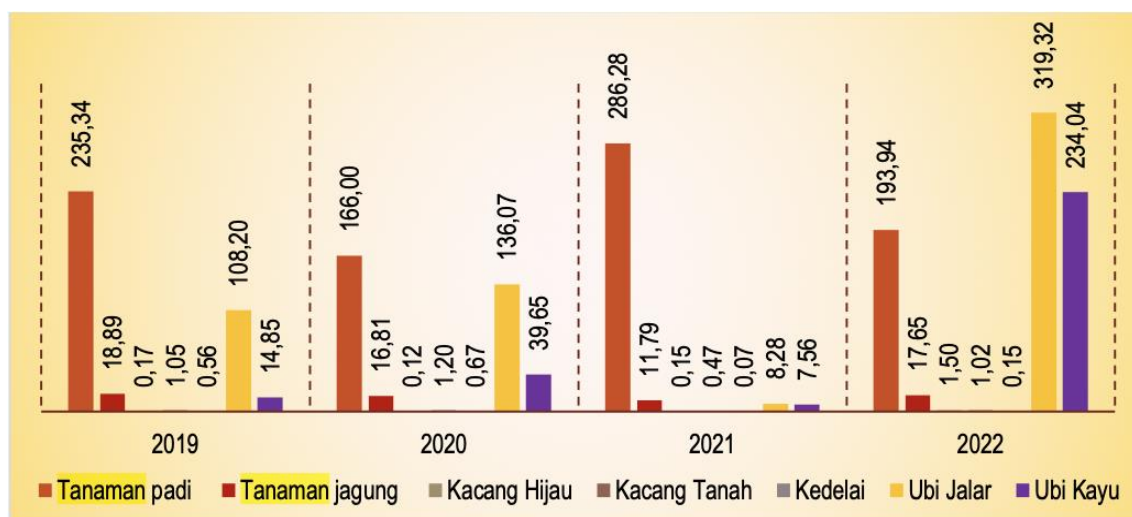
Adapun tanaman jagung menunjukkan tren yang menurun, dengan rata-rata luas panen 3.275,03 hektar per tahun. Angka tertinggi tercatat pada tahun 2019, tetapi menurun signifikan pada tahun 2021 menjadi hanya 2.139,30 hektar. Penurunan ini disebabkan oleh faktor cuaca dan masalah agronomi lainnya.

Berikutnya untuk kacang hijau memiliki luas panen yang sangat kecil, dengan rata-rata hanya 259,93 hektar per tahun. Jumlah ini menunjukkan ketidakstabilan yang ekstrem, dengan nilai terendah hanya 82,30 hektar pada tahun 2021. Hal ini menggambarkan kurangnya perhatian atau kondisi yang tidak mendukung untuk penanaman kacang hijau. Kacang tanah menunjukkan hasil yang lebih baik dengan rata-rata luas panen 926,75 hektar per tahun. Ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2020, tetapi kembali menurun di tahun 2021. Namun, tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik, mencerminkan pemulihan dalam produksi. Sementara itu untuk kacang kedelai memiliki rata-rata luas panen 257,80 hektar, dengan angka terendah pada tahun 2021. Ubi jalar memiliki rata-rata luas panen 9.835,38 hektar per tahun,



dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 mencapai 16.140,30 hektar. Hal ini menunjukkan peningkatan minat dan keberhasilan dalam menanam ubi jalar.

**Gambar. Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Papua
Tahun 2019-2023 (dalam ribuan ton)**



Produksi sektor tanaman pangan di Provinsi Papua menunjukkan variasi dan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda di antara komoditi dari tahun 2019 hingga 2022. Produksi padi fluktuatif dengan rata-rata 220,39 ribu ton dan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 6.81%. Puncak produksi terjadi pada tahun 2021 dengan angka mencapai 286,28 ribu ton. Sementara produksi jagung menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dengan rata-rata produksi 16,28 ribu ton dan tingkat pertumbuhan negatif -8,87% per tahun, mencapai titik terendah di tahun 2021 dengan jumlah produksi hanya mencapai 11,79 ribu ton. Selengkapnya, lihat Gambar 3.12 di bawah ini.

Untuk produksi kacang-kacangan, terlihat jelas kacang hijau mengalami peningkatan signifikan, dengan rata-rata produksi 0,48 ribu ton per tahun dan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi 264.27% per tahun, yang mencapai puncaknya sebesar 1,50 ribu ton pada tahun 2022

Sementara kacang tanah menunjukkan produksi yang lebih stabil, dengan rata-rata 0,93 ribu ton per tahun dan tingkat pertumbuhan positif 6,64% per tahun, dimana tertinggi pada tahun 2020 dengan produksi 1,20 ribu ton. Adapun kacang kedelai



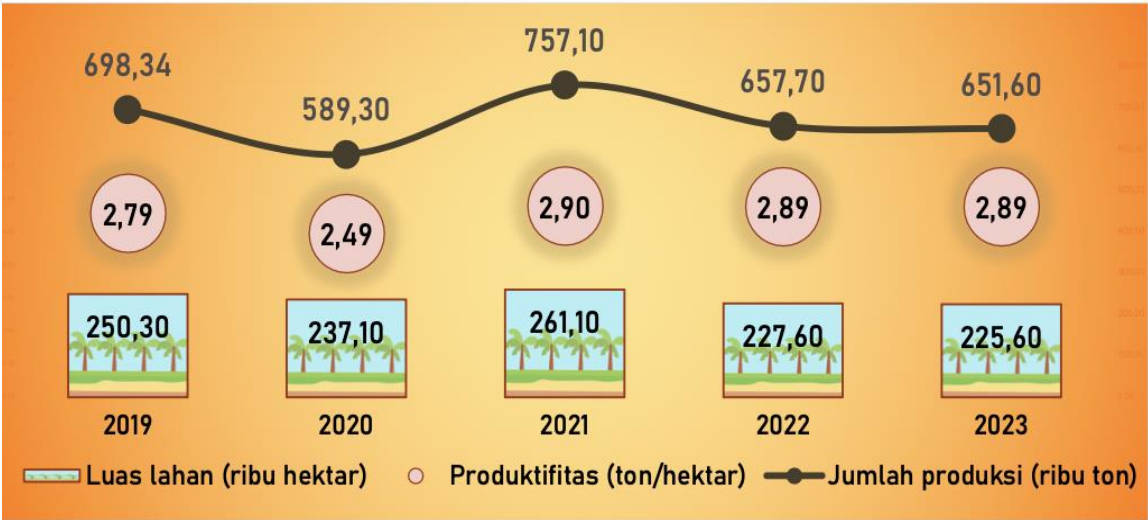
memiliki produksi yang bervariasi, dengan rata-rata 0,36 ribu ton per tahun dan tingkat pertumbuhan negatif -32,76% per tahun, terendah sebesar 0,070 ribu ton di tahun 2021.

Selanjutnya pada produk umbi-umbian, terlihat ubi jalar menunjukkan kinerja baik, dengan rata-rata 142,97 ribu ton per tahun dan tingkat pertumbuhan signifikan 48,72% per tahun, puncaknya pada 319,32 ribu ton di tahun 2022. Ubi kayu juga menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan rata-rata 74,02 ribu ton dan tingkat pertumbuhan positif 35,72% per tahun, tertinggi di tahun 2022 dengan 234,04 ribu ton.

Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB** dapat dilihat dari produksifitas sektor Perkebunan. Papua memiliki berbagai komoditas unggulan sektor perkebunan yang sesuai dengan karakteristik lahan dan iklimnya. Beberapa komoditas yang memiliki potensi tinggi antara lain kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, sagu, dan sebagainya. Selama tahun 2019-2023 perkembangan kinerja sektor perkebunan di Provinsi Papua menunjukkan dinamika yang menarik dalam luas lahan, jumlah produksi, dan produktivitas. Pertama untuk luas lahan perkebunan, terlihat mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2022, yang menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan lahan seperti pergeseran penggunaan lahan atau kebijakan yang tidak mendukung ekspansi sektor perkebunan. Pada tahun 2019, luas lahan mencapai 250,30 ribu hektar, tetapi menurun drastis menjadi 227,60 ribu hektar pada tahun 2022. Penurunan ini bisa mengindikasikan adanya pengurangan area tanam atau konversi lahan untuk keperluan lain. Meskipun ada sedikit pemulihan pada tahun 2023, luas lahan masih di bawah angka awal tahun 2019, dengan rata-rata luas lahan selama periode ini adalah 240,34 ribu hektar.



Gambar. Produktifitas Sektor Perkebunan di Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)

Kinerja dari beberapa komoditi utama sektor perkebunan di Provinsi Papua pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang menarik dalam hal luas lahan, produksi, dan produktivitas. Sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.17 berikut ini, luas lahan yang digunakan untuk kelapa sawit mencapai 143,60 hektar, menjadikannya komoditas dengan area terbesar. Diikuti oleh kelapa dengan 25,70 hektar, karet 8,70 hektar, kopi 14,70 hektar, dan kakao 32,90 hektar. Ini menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas dominan dalam sektor perkebunan di Papua.

Tabel. Luas Lahan dan Produksi Komoditi Utama Sektor Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2023

Komoditi	Luas Lahan (ribu ha)	Produksi (ribu ton)	Produktifitas (ton/hektar)
Kelapa Sawit	143.60	619.50	4.31
Kelapa	25.70	15.30	0.60
Karet	8.70	4.80	0.55
Kopi	14.70	3.20	0.22
Kakao	32.90	8.80	0.27

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)



Selanjutnya dari segi jumlah produksi, kelapa sawit juga memimpin dengan total produksi 619,50 ton. Kelapa menyusul dengan 15,30 ton, karet 4,80 ton, kopi 3,20 ton, dan kakao 8,80 ton. Hal ini menegaskan posisi kelapa sawit sebagai komoditas utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi perkebunan di Papua.

Produktivitas per hektar menunjukkan performa yang bervariasi di antara komoditas. Kelapa sawit memiliki produktivitas tertinggi dengan 4,31 ton/hektar, yang mencerminkan efisiensi dan potensi produksi yang baik. Di sisi lain, kelapa, karet, kopi, dan kakao menunjukkan produktivitas yang lebih rendah, masing-masing dengan 0,60 ton/hektar, 0,55 ton/hektar, 0,22 ton/hektar, dan 0,27 ton/hektar. Rendahnya produktivitas pada komoditas selain kelapa sawit dapat mencerminkan tantangan dalam teknik budidaya, pengelolaan lahan, atau faktor lingkungan yang mempengaruhi hasil.

Secara umum produktivitas tanaman perkebunan yang ada di Provinsi Papua masih di bawah 60 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Penggunaan bibit/benih yang berasal dari benih asalan (tidak bersertifikat) menyebabkan produksi secara jangka panjang berkurang.
2. Tingginya intensitas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
3. Rendahnya kemampuan dan pengetahuan petani dalam penerapan sistem budidaya yang baik.
4. Usia tanaman yang melewati batas usia produktif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

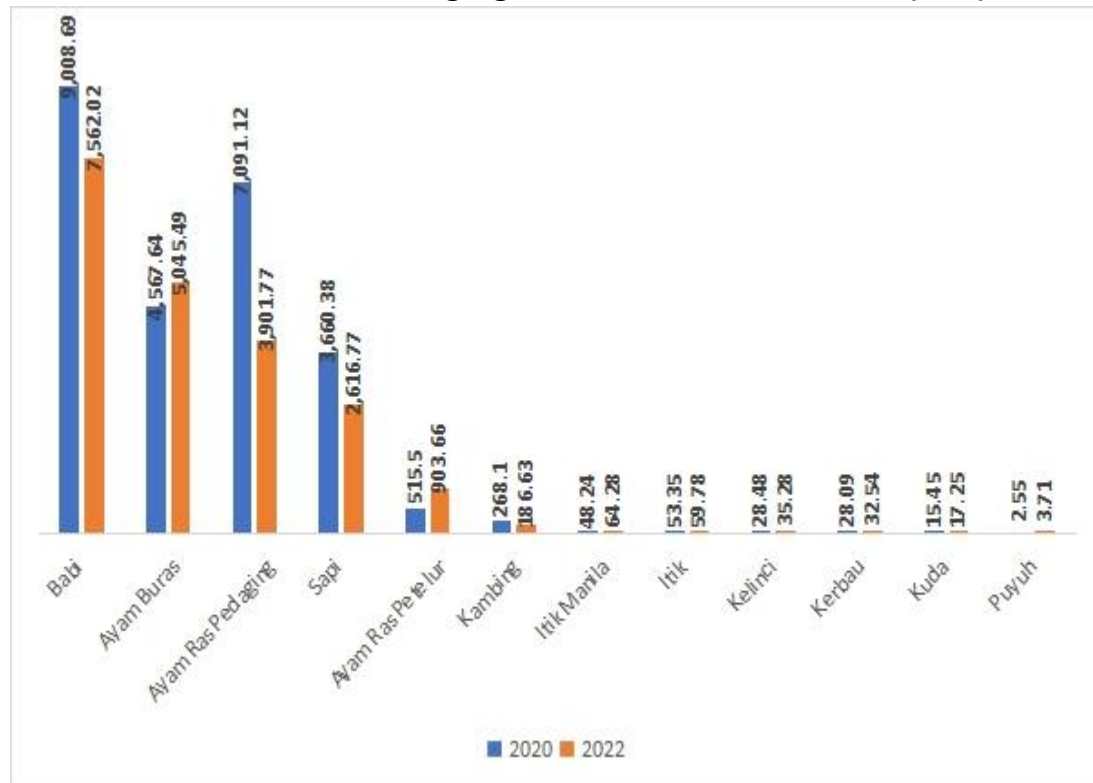
1. Melakukan penendalian secara terintegrasi dan terpadu melalui gerakan massal pengendalian hama dan penyakit.
2. Pelatihan dan pembinaan petani melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT), Bintek dan pelatihan.

Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB** dapat dilihat dari produksi daging ternak besar, produksi daging ternak kecil dan produksi daging unggas. Untuk tahun 2022 produksi daging ternak besar mengalami



peningkatan khususnya sapi potong sebesar 125.101 Kg dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 121.210 Kg.

Grafik. Produksi Daging Ternak Tahun 2020-2023 (Ton)



Sumber : Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023 (diolah)

Dalam menunjang capaian output indikator kinerja tahun 2023 dilakukan kegiatan pasar murah, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha peternakan. memang dilihat bahwa pada tahun 2023 investasi sub sektor peternakan masih sangat terbatas untuk itu perlu diambil langkah-langkah strategis dalam menumbuhkan investasi peternakan di Provinsi Papua juga melakukan pembinaan dan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil produk peternakan.



Sasaran 13 :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim**” sebesar **95,94 Persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 13

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95	95.17	100.18
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	80	52,5	65,63
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85	100.00	117.65
4.	Intensitas Penurunan Emisi	Ton CO2 eq /juta Rp	0.298	0.299	100,33
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					95,94



Berikut dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023-2024 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

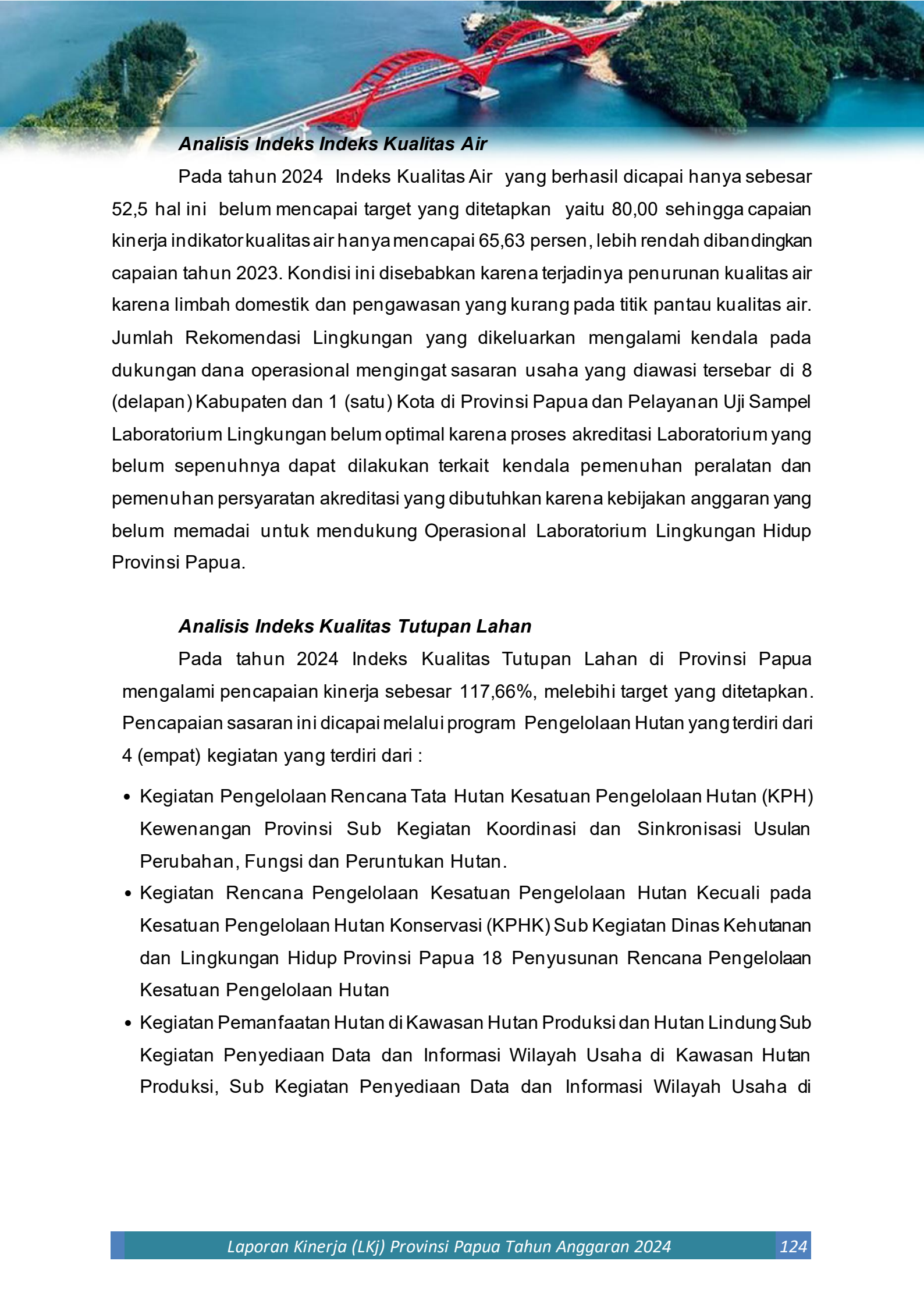
Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 13
Tahun 2023-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN					
			2023			2024		
			TARGET	REASASI	CAPAIAN	TARGET	REALSASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,0	95,87	100.92	95,0	95,17	100.18
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,0	54,73	68.41	80,0	52,5	65.63
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85,0	100	117.65	85,0	100	117.65
4.	Intensitas Penurunan Emisi	Ton Co2/ Rupiah	0,30	0,39	76.41	0.298	0.299	100.33
Rata - Rata Capaian Kinerja					90.85			95.94

Sasaran “meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim” diukur dengan 4 (empat) Indikator yaitu :

Analisis Indeks Kualitas Udara

Pada tahun 2024 terdapat peningkatan kinerja yang signifikan untuk Indeks Kualitas Udara yaitu 95,17 indeks melampaui target 2024 yaitu 95 indeks, kinerja capaian tahun 2024 juga merupakan capaian kinerja terbaik, yaitu 100,18 persen. Pencapaian ini dicapai karena Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut, termasuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.



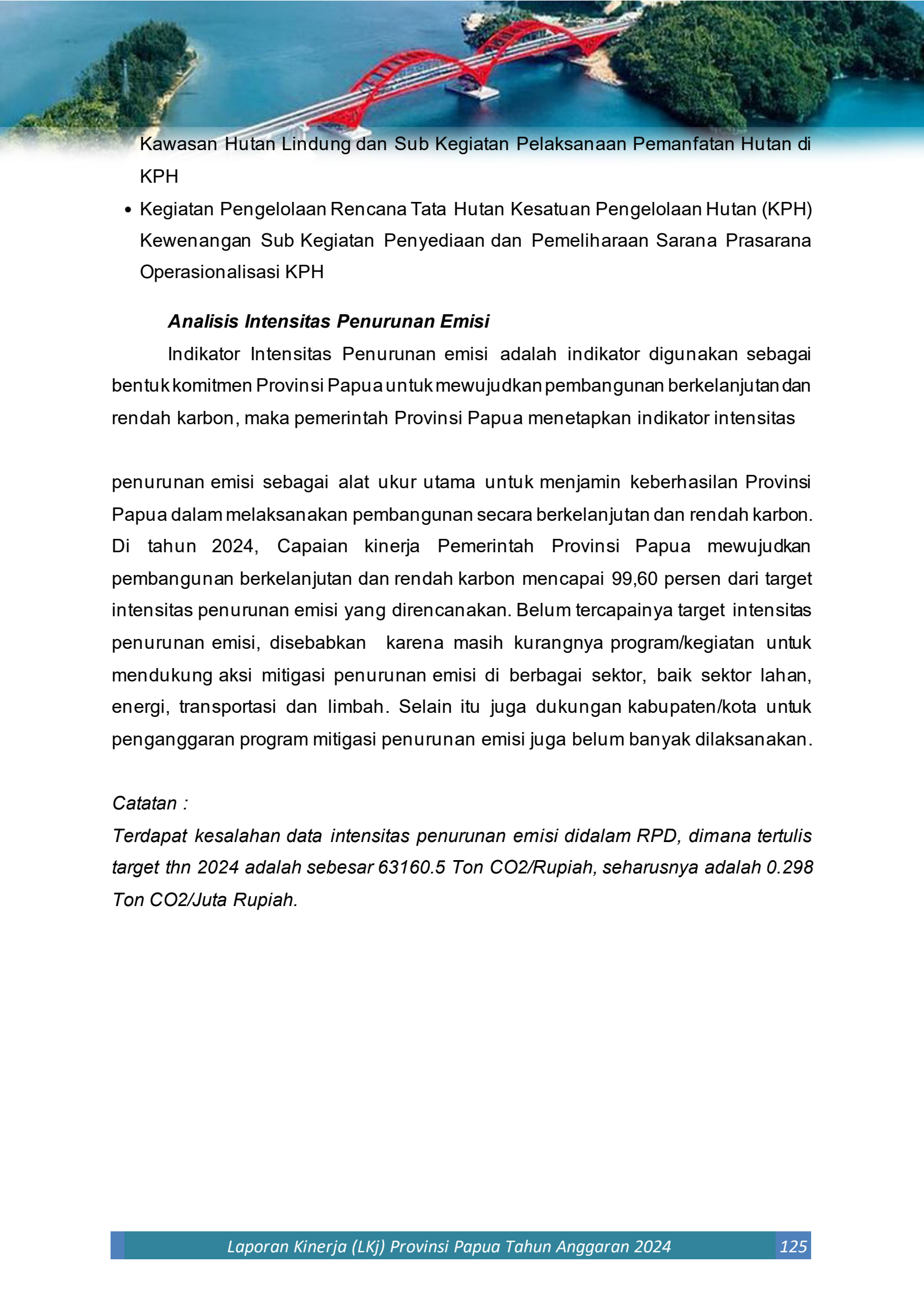
Analisis Indeks Indeks Kualitas Air

Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Air yang berhasil dicapai hanya sebesar 52,5 hal ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 80,00 sehingga capaian kinerja indikator kualitas air hanya mencapai 65,63 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023. Kondisi ini disebabkan karena terjadinya penurunan kualitas air karena limbah domestik dan pengawasan yang kurang pada titik pantau kualitas air. Jumlah Rekomendasi Lingkungan yang dikeluarkan mengalami kendala pada dukungan dana operasional mengingat sasaran usaha yang diawasi tersebar di 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Papua dan Pelayanan Uji Sampel Laboratorium Lingkungan belum optimal karena proses akreditasi Laboratorium yang belum sepenuhnya dapat dilakukan terkait kendala pemenuhan peralatan dan pemenuhan persyaratan akreditasi yang dibutuhkan karena kebijakan anggaran yang belum memadai untuk mendukung Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

Analisis Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Papua mengalami pencapaian kinerja sebesar 117,66%, melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian sasaran ini dicapai melalui program Pengelolaan Hutan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari :

- Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan, Fungsi dan Peruntukan Hutan.
- Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Sub Kegiatan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua 18 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi, Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di



Kawasan Hutan Lindung dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH

- Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH

Analisis Intensitas Penurunan Emisi

Indikator Intensitas Penurunan emisi adalah indikator digunakan sebagai bentuk komitmen Provinsi Papua untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, maka pemerintah Provinsi Papua menetapkan indikator intensitas

penurunan emisi sebagai alat ukur utama untuk menjamin keberhasilan Provinsi Papua dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan rendah karbon. Di tahun 2024, Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon mencapai 99,60 persen dari target intensitas penurunan emisi yang direncanakan. Belum tercapainya target intensitas penurunan emisi, disebabkan karena masih kurangnya program/kegiatan untuk mendukung aksi mitigasi penurunan emisi di berbagai sektor, baik sektor lahan, energi, transportasi dan limbah. Selain itu juga dukungan kabupaten/kota untuk penganggaran program mitigasi penurunan emisi juga belum banyak dilaksanakan.

Catatan :

Terdapat kesalahan data intensitas penurunan emisi didalam RPD, dimana tertulis target thn 2024 adalah sebesar 63160.5 Ton CO2/Rupiah, seharusnya adalah 0.298 Ton CO2/Juta Rupiah.



Sasaran 14 :

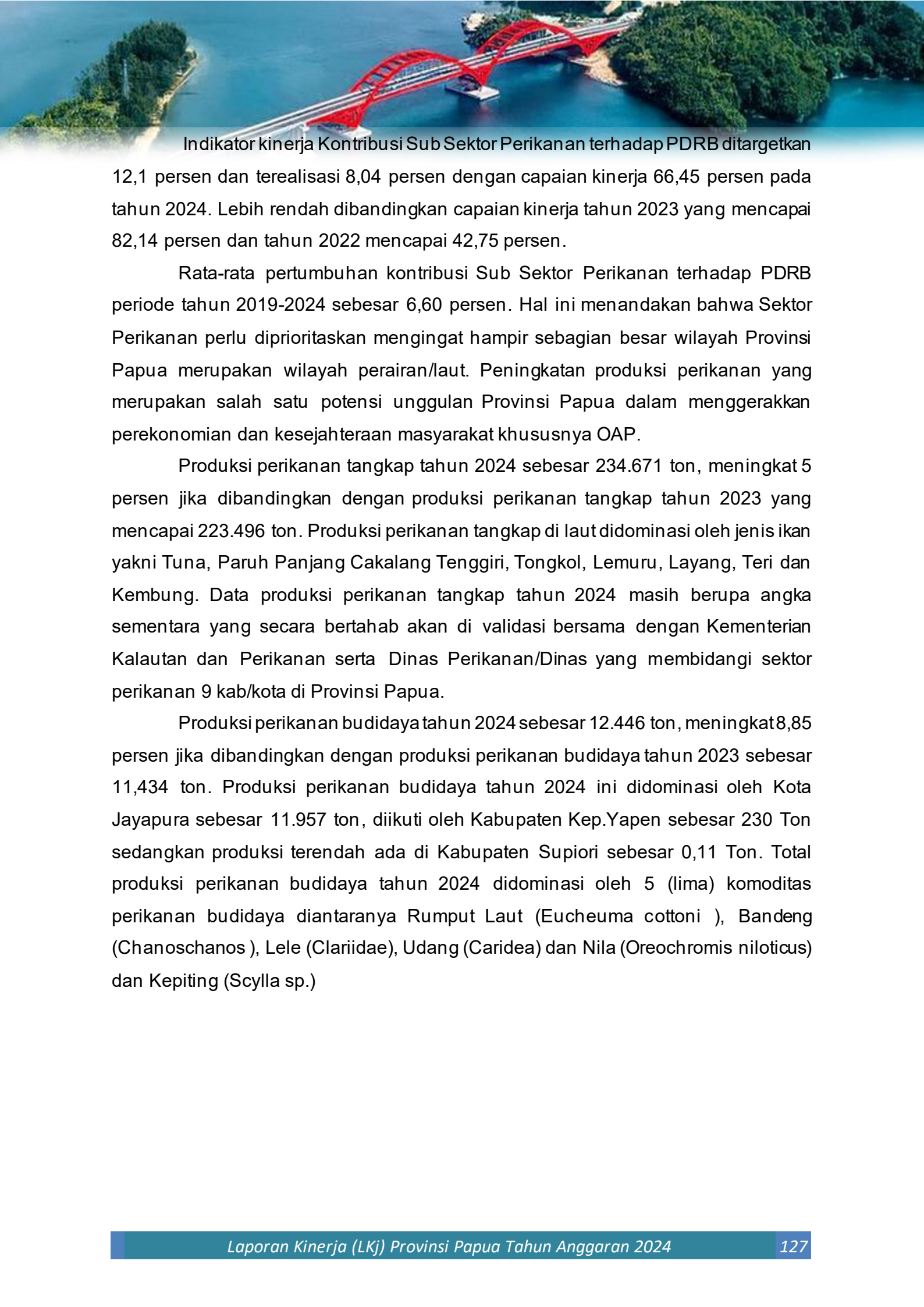
Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumber daya secara berkelanjutan

Sasaran Meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan daerah yaitu Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Indikator untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dengan indikator **“Kontribusi Sub Sektor perikanan Terhadap PDRB” dan Kontribusi Sail Teluk Cenderawasih (STC) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM)**, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sebesar **86,86** persen dengan predikat **“tinggi”**

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 14

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	%	12,1	8,04	66,45
2	Kontribusi Sail Teluk Cenderawasih (STC) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM)	STC/ Tahun	40	42,91	107,28
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					86,86



Indikator kinerja Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ditargetkan 12,1 persen dan terealisasi 8,04 persen dengan capaian kinerja 66,45 persen pada tahun 2024. Lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 yang mencapai 82,14 persen dan tahun 2022 mencapai 42,75 persen.

Rata-rata pertumbuhan kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB periode tahun 2019-2024 sebesar 6,60 persen. Hal ini menandakan bahwa Sektor Perikanan perlu diprioritaskan mengingat hampir sebagian besar wilayah Provinsi Papua merupakan wilayah perairan/laut. Peningkatan produksi perikanan yang merupakan salah satu potensi unggulan Provinsi Papua dalam menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya OAP.

Produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 234.671 ton, meningkat 5 persen jika dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap tahun 2023 yang mencapai 223.496 ton. Produksi perikanan tangkap di laut didominasi oleh jenis ikan yakni Tuna, Paruh Panjang Cakalang Tenggiri, Tongkol, Lemuru, Layang, Teri dan Kembung. Data produksi perikanan tangkap tahun 2024 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan di validasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan/Dinas yang membidangi sektor perikanan 9 kab/kota di Provinsi Papua.

Produksi perikanan budidaya tahun 2024 sebesar 12.446 ton, meningkat 8,85 persen jika dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 11.434 ton. Produksi perikanan budidaya tahun 2024 ini didominasi oleh Kota Jayapura sebesar 11.957 ton, diikuti oleh Kabupaten Kep.Yapen sebesar 230 Ton sedangkan produksi terendah ada di Kabupaten Supiori sebesar 0,11 Ton. Total produksi perikanan budidaya tahun 2024 didominasi oleh 5 (lima) komoditas perikanan budidaya diantaranya Rumput Laut (*Eucheuma cottoni*), Bandeng (*Chanoschanos*), Lele (*Clariidae*), Udang (*Caridea*) dan Nila (*Oreochromis niloticus*) dan Kepiting (*Scylla sp.*)

Tabel. Produksi Perikanan Provinsi Papua Tahun 2023 dan Capaian Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Produksi Thn 2023		Capaian Produksi Perikanan Thn 2024*	
		Budidaya	Tangkap	Budidaya	Tangkap
1	Kab. Biak Numfor	0,855	4.930	0,855	5.177
2	Kab. Jayapura	45,925	15.268	50,925	16.031
3	Kab. Keerom	196,631	-	199,631	-
4	Kab. Kepulauan Yapen	226,528	37.311	230,528	39.177
5	Kab. Mamberamo Raya	0,673	3.960	0,673	4.158
6	Kab. Sarmi	5,406	5.840	5,406	6.132
7	Kab. Supiori	0,116	152	0,116	160
8	Kab. Waropen	2,679	1.478	2,679	1.552
9	Kota Jayapura	10.957,013	110.242	11.957,013	162.285
Jumlah		11.434,182	223.496	12.446,182	234.671,

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, 2025

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah pemberian stimulan berupa paket hibah produksi, sarana prasarana perikanan budidaya; pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Budidaya untuk mendukung penyediaan benih bermutu, calon induk dan induk unggul yang bersertifikasi; fasilitasi standar mutu CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) bagi unit usaha perikanan budidaya; pengendalian kualitas produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan, kandungan residu, lingkungan budidaya serta pemantauan peredaran dan pemakaian pakan dan obat ikan kimia dan biologi (OIKB); pengembangan klaster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor; fasilitasi program anti kemiskinan dengan pemberian paket-paket bantuan berupa sarana budidaya perikanan; pengembangan kawasan agropolitan perikanan budidaya; fasilitasi program pakan mandiri; sosialisasi dan pembinaan.

Indikator Kinerja Kontribusi Sail Teluk Cenderawasih (STC) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM) pada tahun 2024 mencapai 40,88 persen. Terdapat 5 (lima) lapangan usaha dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha yang berdampak langsung dari penyelenggaraan



STC yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Dari akumulasi distribusi pertumbuhan 5 sektor lapangan usaha ini mencapai 42,91 persen dari pertumbuhan PDRB tahun 2024 sebesar 4,11 persen.

Tabel. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan			Distribusi		
		2022	2023*	2024**	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	1,90	0,80	14,76	14,46	14,09
B.	Pertambangan dan Penggalian	-	2,97	4,82	0,83	0,84	0,83
C.	Industri Pengolahan	-	1,34	5,26	2,95	2,93	2,98
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-	4,64	8,74	0,07	0,06	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0,06	2,94	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	-	3,25	1,89	20,65	20,33	20,09
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	5,93	5,91	15,54	16,04	16,24
H.	Transportasi dan Pergudangan	-	9,11	6,73	7,52	8,04	8,29
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	3,15	4,47	1,30	1,27	1,31
J.	Informasi dan Komunikasi	-	3,84	6,14	6,28	6,10	5,98
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	12,81	2,55	3,49	3,75	3,62
L.	Real Estat	-	5,83	4,47	4,69	4,70	4,65
M,N.	Jasa Perusahaan	-	8,14	3,08	2,31	2,46	2,43
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	1,51	7,20	12,17	11,60	11,87
P.	Jasa Pendidikan	-	4,45	3,10	2,60	2,67	2,71
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	3,65	3,46	2,90	2,84	2,92
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	-	3,88	1,85	1,86	1,81	1,81
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-	4,22	4,11	100,00	100,00	100,00

Catatan: *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara



Kegiatan **Sail Teluk Cenderawasih (STC)** adalah yang kedua kalinya dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, dan ini sudah menjadi kalender tahunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dilaksanakan selama lima tahun berturut-turut (tahun 2023 – 2028). Sail Teluk Cenderawasih ini akan memperkenalkan potensi bahari, potensi maritim, potensi pariwisata, potensi sosial budaya dan upaya-upaya peningkatan ekonomi kreatif yang dimiliki, dengan even STC akan meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga keterlibatan masyarakat, keterlibatan UMKM dan berdampak pada kontribusi perekonomian di Provinsi Papua sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya dari tindak lanjut setelah event ini berakhir.



Adapun rangkaian kegiatan STC 2024 yang dilaksanakan, diantaranya; All Sailor Have Arrived in Biak, Biak Tour, Lunch at the hill, The Culture Night, Sailing Pass, Dive Trips, Cooking Class in Asana Hotel, dan beberapa kegiatan lainnya dengan melibatkan wisatawan asing dan juga masyarakat serta komunitas yang ada di Biak.

Dengan pelaksanaan STC 2024 di Biak maka sekaligus Kab. Biak Numfor diperkenalkan sebagai salah satu Kabupten Pariwisata di Provinsi Papua yang mempunyai Potensi dan Daya Tarik Pariwisata.



Sasaran 15 :

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Ketika kesempatan kerja tinggi, pengangguran akan rendah dan ini akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kesempatan kerja dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang diterima bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan. Pentingnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat adalah sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Lapangan pekerjaan yang tersedia biasanya hanya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya relatif semakin sulit. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga berdampak pada pengangguran.

Berdasarkan pengolahan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2024. Terdapat tambahan 3 juta orang angkatan kerja dari Februari 2024 ke Agustus 2024. Hal ini dibarengi dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja dari 69,8% menjadi 70,63%. Kedua data ini menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang masuk dan berkontribusi pada pasar kerja. Sementara itu, peningkatan jumlah angkatan kerja menunjukkan bahwa Indonesia mendapat tambahan sumber daya manusia yang cukup banyak untuk membantu pergerakan ekonomi negara.

Akan tetapi, peningkatan jumlah angkatan kerja juga dapat menjadi tantangan bagi para pencari kerja itu sendiri. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja dapat memunculkan persaingan yang semakin ketat bagi para pencari kerja. Data menunjukkan adanya penurunan tingkat kesempatan kerja pada Agustus 2024. Tingkat kesempatan kerja awalnya sebesar 95,18% pada bulan Februari turun menjadi 95,8%. Selain penurunan tingkat



kesempatan kerja, terjadi juga peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT naik dari 4,82% pada bulan Februari menjadi 4,91% pada bulan Agustus.

Tidak tersedianya lapangan kerja membuat banyak masyarakat beralih ke pekerjaan sektor informal, seperti buruh lepas, pedagang kaki lima, atau pekerja sektor jasa lainnya yang tidak terikat kontrak formal. BPS mencatat bahwa pekerja di Indonesia lebih banyak yang bekerja di sektor informal daripada sektor formal. Sebesar 57,95% pekerja bekerja di sektor informal.

Provinsi Papua pasca penetapan Daerah Otonomi Baru tahun 2022 juga tidak terlepas dari permasalahan ketenagakerjaan. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2024 terkait Tingkat Kesempatan Kerja :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 15

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,62	97.20	106,09
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					106,09

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja”** sebesar **106,09 persen** dengan predikat **“Sangat Berhasil”**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran.

Meskipun secara prosentase ada kenaikan yang cukup signifikan akan tetapi hal tersebut diakibatkan oleh karena adanya penurunan target capaian , yang mana pada tahun sebelumnya adalah target 98,34 persen menjadi hanya 91,62 persen.

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 2 (dua) tahun ,yaitu Tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel berikut ini :

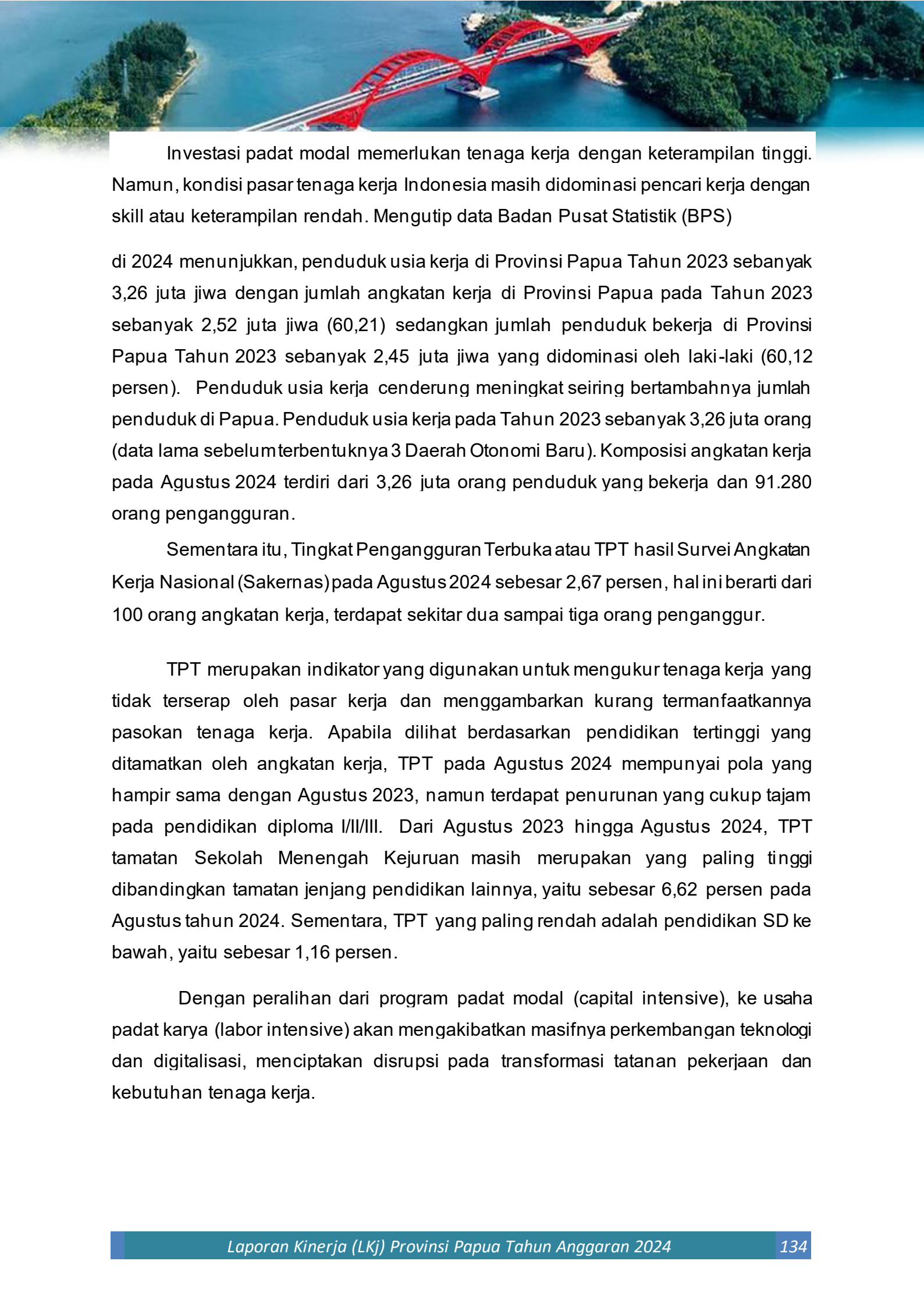
**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 15
Tahun 2023-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	%	98.34	97.22	98.08	91,62	97,20	106,09

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat kesempatan kerja pada tahun 2023 sebesar 97,22 persen dengan capaian kinerja 98.08 persen. Sedangkan tingkat kesempatan kerja pada tahun 2024 adalah 97,20 dengan capaian kinerja mencapai 106,09 persen. Terjadi penurunan dari aspek realisasi akan tetapi capaian kinerjanya meningkat sangat signifikan, hal ini terjadi oleh karena adanya faktor penurunan target capaian dimana target capaian pada tahun 2023 sebesar 98,32 persen, pada tahun 2024 diturunkan target capaiannya menjadi 91,62 persen. Sehingga meskipun secara fakta di lapangan ada terjadi PHK oleh karena kondisi perekonomian negara dan daerah mengalami beberapa kendala akan tetapi capaian kinerja tetap mengalami peningkatan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia lantaran pemerintah fokus pada program padat modal (capital intensive), ketimbang menerapkan usaha padat karya (labor intensive).

Dalam Outlook Ekonomi 2024, tercatat ada penurunan serapan tenaga kerja selama sembilan tahun terakhir. Pada tahun 2013, setiap Rp1 triliun investasi yang masuk bisa menyerap 4.594 tenaga kerja. Jumlah itu berkurang drastis dengan hanya bisa menyerap 1.379 tenaga kerja per tiap Rp1 triliun investasi di 2022



Investasi padat modal memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi. Namun, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi pencari kerja dengan skill atau keterampilan rendah. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS)

di 2024 menunjukkan, penduduk usia kerja di Provinsi Papua Tahun 2023 sebanyak 3,26 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua pada Tahun 2023 sebanyak 2,52 juta jiwa (60,21) sedangkan jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua Tahun 2023 sebanyak 2,45 juta jiwa yang didominasi oleh laki-laki (60,12 persen). Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Papua. Penduduk usia kerja pada Tahun 2023 sebanyak 3,26 juta orang (data lama sebelum terbentuknya 3 Daerah Otonomi Baru). Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 3,26 juta orang penduduk yang bekerja dan 91.280 orang pengangguran.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebesar 2,67 persen, hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar dua sampai tiga orang penganggur.

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2024 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2023, namun terdapat penurunan yang cukup tajam pada pendidikan diploma I/II/III. Dari Agustus 2023 hingga Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 6,62 persen pada Agustus tahun 2024. Sementara, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,16 persen.

Dengan peralihan dari program padat modal (capital intensive), ke usaha padat karya (labor intensive) akan mengakibatkan masifnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, menciptakan disrupsi pada transformasi tatanan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja.



Untuk mengatasi persoalan semakin ketatnya persaingan didalam mendapatkan kesempatan kerja, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua :

1. Mengembangkan kemampuan para Pencari Kerja.

Menurut data BPS, hampir sepertiga tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh orang dengan pendidikan tamat SMA/SMK, yaitu sebesar 29,3%. Masalah ini dapat diatasi dengan meningkatkan keterampilan mereka dengan melakukan pelatihan yang bersertifikasi, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan dunia kerja atau dunia industri. Di dalam pelatihan tersebut diberikan juga materi *softskill* (kemampuan *teamwork*, berbicara di depan umum, mengelola waktu dan pekerjaan dengan efektif, dan lain-lain) untuk menunjang kemampuannya bekerja.

2. Menjalinkan kerjasama dengan dunia industri

Agar pelatihan yang dilakukan tidak bias yang pada akhirnya tidak dapat diserap oleh pasar kerja maka sebelum melakukan pelatihan terlebih dahulu harus dilakukan Training Needs Analysis (TNA) ataupun Focus Discussion Group (FGD) dengan para stakeholder untuk dapat bersinergi link and match mengidentifikasi jenis keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.



Sasaran 16 :

Meningkatnya Daya Saing dan Realisasi Investasi pada Sektor-Sektor Andalan Daerah

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah**” sebesar **16,07 persen** dengan predikat “**Tidak Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 16

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	64,93	10,44	16,07
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					16,07

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 2 (dua) tahun, yaitu Tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 16
Tahun 2023 - 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
		2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1 Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	64,93	9,41	14,49	64,93	10,44	16,07
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				14,49			16,07

Dari data diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja tahun 2023 dengan target sebanyak **64,93 triliun**, realisasi sebanyak **9,41 triliun** dan kinerja sebanyak **14,49 persen** menunjukkan capaian kinerja yang sangat **rendah** apabila dibandingkan dengan indikator kinerja jumlah nilai investasi PMDN tahun 2024. Hal ini dapat kita lihat dari perbandingan indikator kinerja tahun 2024 yang mana dari target sebanyak **64,93 triliun**, mengalami kenaikan/peningkatan realisasi sebanyak **10,44 triliun** dan capaian kinerja sebesar **16,07 persen**, atau mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar **10,90** persen.

Meskipun terdapat kenaikan dari sisi realisasi dan capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa target pencapaian kinerja (PK) dinyatakan tidak berhasil.

Untuk mencapai target yang ditetapkan, maka perlu dilakukan beberapa hal dalam peningkatan Realisasi kinerja dari sasaran startegis “Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan untuk tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :



Analisis Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. *Tren Realisasi dan Capaian Kinerja*

Berdasarkan data dalam laporan, kinerja indikator jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke 2024, meskipun masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Capaian Kinerja (%)
2023	64,93	9,41	14,49
2024	64,93	10,44	16,07

- **Realisasi naik dari Rp 9,41 triliun (2023) menjadi Rp 10,44 triliun (2024), tetapi** masih sangat jauh dari target Rp 64,93 triliun.
- **Capaian kinerja meningkat dari 14,49% menjadi 16,07%, tetapi tetap berada** dalam kategori "tidak berhasil."
- **Untuk mengetahui rata-rata capaian kinerja sasaran kita dapat menggunakan rumus**

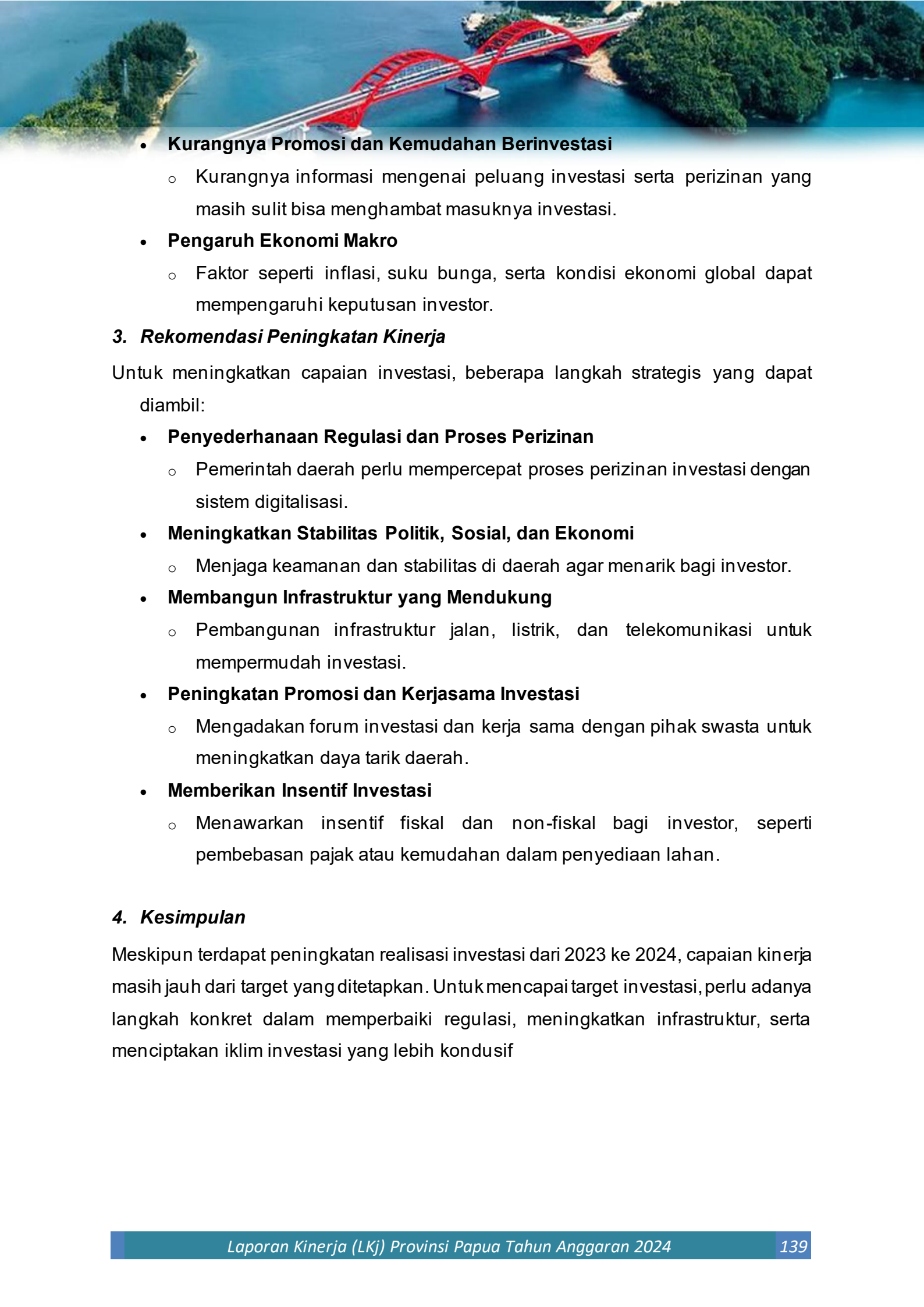
$$\frac{\text{Nilai investasi PMDN tahun ybs} - \text{Nilai investasi PMDN tahun lalu}}{\text{Nilai investasi PMDN tahun lalu}} \times 100\% \text{ jadi}$$

$$\frac{16,07 - 14,49}{14,49} \times 100\% = 10,90$$

2. *Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Realisasi dan Capaian Kinerja*

Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab rendahnya realisasi investasi PMDN:

- **Iklim Investasi yang Kurang Menarik**
 - Ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat realisasi investasi.
- **Keterbatasan Infrastruktur Pendukung**
 - Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat mengurangi minat investor.
- **Stabilitas Politik dan Sosial**
 - Adanya ketidakpastian politik dan keamanan di daerah dapat mengurangi kepercayaan investor.



- **Kurangnya Promosi dan Kemudahan Berinvestasi**
 - Kurangnya informasi mengenai peluang investasi serta perizinan yang masih sulit bisa menghambat masuknya investasi.
- **Pengaruh Ekonomi Makro**
 - Faktor seperti inflasi, suku bunga, serta kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi keputusan investor.

3. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian investasi, beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

- **Penyederhanaan Regulasi dan Proses Perizinan**
 - Pemerintah daerah perlu mempercepat proses perizinan investasi dengan sistem digitalisasi.
- **Meningkatkan Stabilitas Politik, Sosial, dan Ekonomi**
 - Menjaga keamanan dan stabilitas di daerah agar menarik bagi investor.
- **Membangun Infrastruktur yang Mendukung**
 - Pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan telekomunikasi untuk mempermudah investasi.
- **Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
 - Mengadakan forum investasi dan kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan daya tarik daerah.
- **Memberikan Insentif Investasi**
 - Menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor, seperti pembebasan pajak atau kemudahan dalam penyediaan lahan.

4. Kesimpulan

Meskipun terdapat peningkatan realisasi investasi dari 2023 ke 2024, capaian kinerja masih jauh dari target yang ditetapkan. Untuk mencapai target investasi, perlu adanya langkah konkret dalam memperbaiki regulasi, meningkatkan infrastruktur, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif



Sasaran 17 :

Meningkatnya Akses Transportasi Berbasis Antar Moda Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah/Daerah Dan Akses Bagi Seluruh Wilayah.

Keterbelakangan daerah kampung di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah kampung di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas wilayah. Ratusan kampung di Provinsi Papua sangat timpang keadaannya dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang memiliki dukungan fasilitas lengkap. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur jalan merupakan prasyarat kunci dalam mendukung aktivitas masyarakat untuk mendorong perkembangan ekonomi. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan, maka pertumbuhan ekonomi sangat sulit dicapai. Hal ini akan berakibat pada proses pembangunan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik dan masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai proses transaksi antar kampung ke kampung maupun kampung dengan kota.

Akses transportasi adalah salah satu penunjang perekonomian masyarakat secara langsung mau pun tidak langsung, baik itu jalan atau pun jembatan serta ruang lingkup pinggiran jalan yang dikuasai penganggaran oleh Kabupaten atau pun Provinsi serta Pemerintah Pusat.

Salah satu cara mewujudkan ekonomi inklusif adalah melalui pembangunan infrastruktur yang memudahkan pergerakan orang dan barang. Selanjutnya, akan memacu aktivitas ekonomi dan kegiatan lain, antara lain menarik investasi. Untuk itulah maka kondisi jalan menjadi salah satu faktor pemicu perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah.

Berikut ini adalah tabel pengukuran Indikator kinerja persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap :



Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 17

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap.	Persen	60,00	41,61	69,35
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					69.35

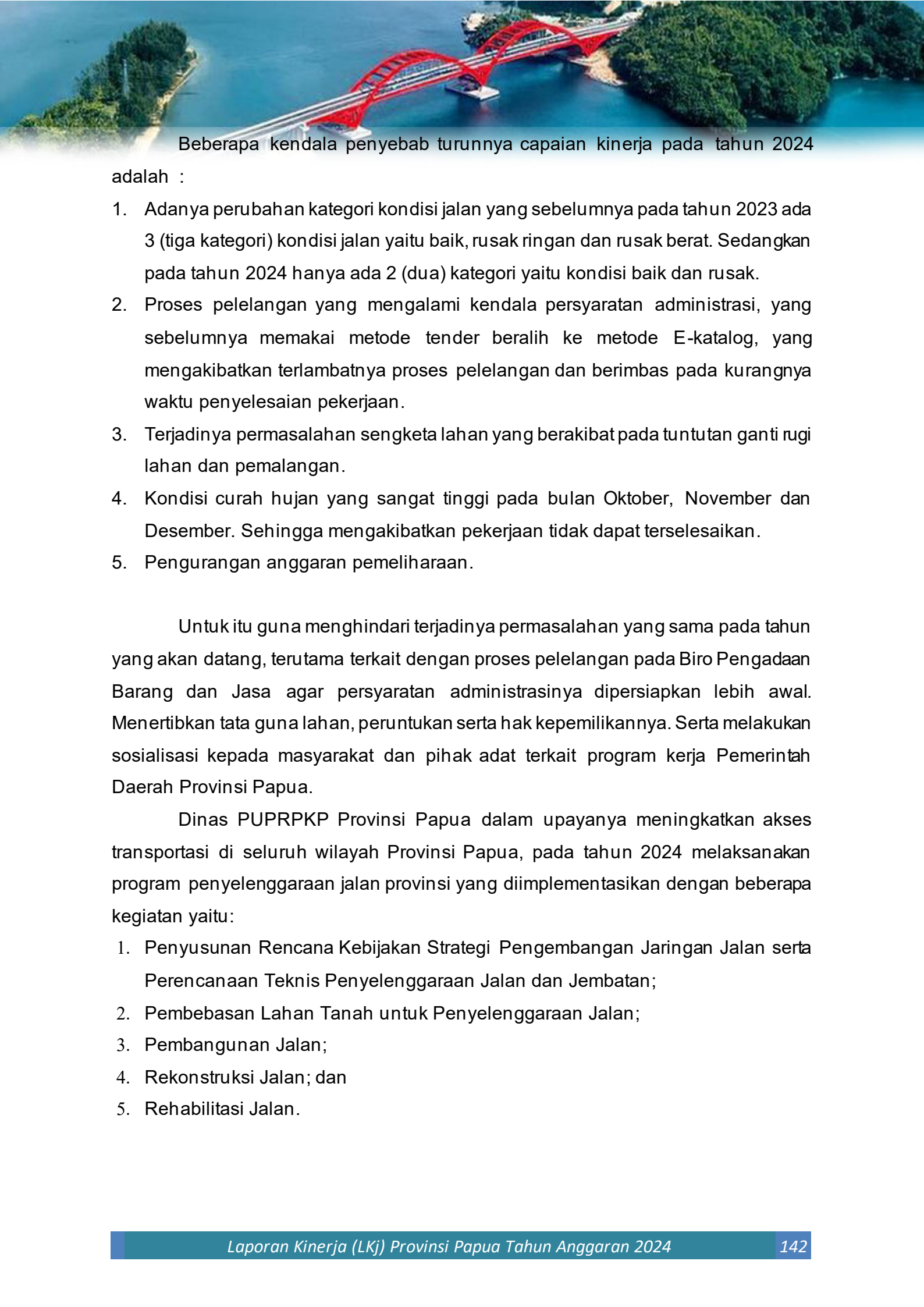
Capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah**” adalah **69,35** persen atau dalam skala ordinal adalah “**Cukup Berhasil**”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap.

Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja, diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 17
Tahun 2023-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap.	Persen	55,00	74,67	135,76	60,00	41,61	69,35

Indikator kinerja persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap diperoleh dengan cara membandingkan antara panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dengan total panjang jalan provinsi. Panjang jalan provinsi sesuai SK Gubernur Papua Nomor 188.4/113/Tahun 2023 adalah 2.168,37 KM. Data dari Dinas PUPRKP untuk panjang jalan provinsi dalam kondisi baik tahun 2024 adalah 902,35 KM mengalami penurunan yang sangat signifikan sepanjang 861,15 KM yang mana panjang jalan kondisi baik tahun 2023 yaitu 1.763,50 KM.



Beberapa kendala penyebab turunnya capaian kinerja pada tahun 2024 adalah :

1. Adanya perubahan kategori kondisi jalan yang sebelumnya pada tahun 2023 ada 3 (tiga kategori) kondisi jalan yaitu baik, rusak ringan dan rusak berat. Sedangkan pada tahun 2024 hanya ada 2 (dua) kategori yaitu kondisi baik dan rusak.
2. Proses pelelangan yang mengalami kendala persyaratan administrasi, yang sebelumnya memakai metode tender beralih ke metode E-katalog, yang mengakibatkan terlambatnya proses pelelangan dan berimbas pada kurangnya waktu penyelesaian pekerjaan.
3. Terjadinya permasalahan sengketa lahan yang berakibat pada tuntutan ganti rugi lahan dan pemalangan.
4. Kondisi curah hujan yang sangat tinggi pada bulan Oktober, November dan Desember. Sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan.
5. Pengurangan anggaran pemeliharaan.

Untuk itu guna menghindari terjadinya permasalahan yang sama pada tahun yang akan datang, terutama terkait dengan proses pelelangan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa agar persyaratan administrasinya dipersiapkan lebih awal. Menertibkan tata guna lahan, peruntukan serta hak kepemilikannya. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak adat terkait program kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Dinas PUPRKP Provinsi Papua dalam upayanya meningkatkan akses transportasi di seluruh wilayah Provinsi Papua, pada tahun 2024 melaksanakan program penyelenggaraan jalan provinsi yang diimplementasikan dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
2. Pembebasan Lahan Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan;
3. Pembangunan Jalan;
4. Rekonstruksi Jalan; dan
5. Rehabilitasi Jalan.



Jalan sebagai salah satu akses penting dalam dunia transportasi dan mendukung pengembangan wilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian suatu wilayah selayaknya mendapatkan perhatian tinggi oleh pemerintah dalam rangka pembangunan dan pemeliharaannya.

Jalan sebagai salah satu infrastruktur penting yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya di Provinsi Papua memerlukan pemeliharaan yang terus menerus serta peningkatan jalan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi baik sehingga aman dalam penggunaannya. Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi teknis pengelola infrastruktur pada tahun 2024 telah melaksanakan pemeliharaan jalan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua.



Sasaran 18 :

Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten**” sebesar **194,78 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 18

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	50,00	97,39	194,78

berdasarkan tabel diatas target kinerja sebesar **50%**, adapapun realisasi kinerja sebesar **97,39%** dan capaian kinerja sebesar **194,87%**, berdasarkan hasil perhitungan realisasi lebih tinggi dari target yang direncanakan, adapun skala penilaian berada pada kategory **sangat tinggi**. Kesesuaian pemanfaatan ruang dalam Program RTRW Provinsi Papua dengan Program RKPD Provinsi Papua Tahun 2024, untuk Indikasi Program dalam RTRW disesuaikan dalam Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang, sehingga ada perbedaan jumlah Program RKPD dengan RTRW.



Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 18
Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	50,00	97,73	195,46	50,00	97,39	194,78

Apabila dibandingkan realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,34%, namun bila di lihat program-program yang ada di RKPD sudah sesuai dengan program yang ada di dokumen RTRW.



Sasaran 19 :

Meningkatnya Ketersediaan Sistem Pengairan Yang Mendukung Produktifitas Wilayah

Pemanfaatan sumber daya air sebagai salah satu usaha dalam mengelola sumber daya air, dilaksanakan lewat aktifitas penatagunaan, ketersediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Potensi sumber daya air yang dimiliki Provinsi Papua sangat besar, namun dalam hal pengelolaan agar dapat dimanfaatkan masih tergolong rendah, berkisar 20% dari sumber yang ada. Pemanfaatan sumber daya air bermaksud bagaimana mengelola air dan dapat dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat secara seimbang.

Pendayagunaan sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air, dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pendayagunaan sumber daya air harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pendayagunaan sumber daya air ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil, dengan mempertimbangkan:

- a. Mengutamakan pendayagunaan air permukaan, yang berada diluar kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam.
- b. Mengutamakan fungsi sosial dengan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- c. Diselenggarakan secara terpadu dan adil dengan mendorong pola kerjasama antar sektor, antar kelompok, antar wilayah.
- d. Melibatkan peran masyarakat.



Capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktifitas wilayah**” sebesar **92,60** persen dengan predikat “**sangat berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran persentase pemanfaatan sumber daya air. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaian indikator kinerjanya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 19

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2	3	4	5
1.	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	81	75	92.60

Capaian kinerja persentase pemanfaatan sumberdaya air sebesar 92.60 diperoleh dari jumlah sumber daya air yang termanfaatkan sebesar 75 persen (sebesar 75 ltr/dtk sesuai rencana di tahun 2023) dibagi target yang ditetapkan yaitu sebesar 81 persen. Namun demikian pada tahun 2024 kegiatan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya air tidak dilaksanakan oleh karena keterbatasan anggaran.

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 19 Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	80	75	93,75	81	75	92.60

Capaian kinerja tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja 93,75 persen sedangkan tahun 2024 hanya mencapai 92,60 persen. Hal ini disebabkan adanya peningkatan target kinerja di tahun 2024.



Target kinerja tahun 2024 dinaikkan menjadi 81 persen dari target 2023 yaitu 80 persen atau naik 1 persen.

Selain itu pada tahun 2024, Dinas PUPRPKP tidak melaksanakan kegiatan Pendayagunaan Sumber Air oleh karena minimnya anggaran yang tersedia, hal inilah yang menjadi penyebab menurunnya capaian kinerja tersebut.

Sumber daya air yang banyak dimanfaatkan di Provinsi Papua adalah irigasi. Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan dimanfaatkan serta berfungsi dengan baik hingga tahun 2024 adalah sebesar 67,50 % atau sama dengan 8.697,21 m² dari total jaringan irigasi di wilayah Provinsi Papua sepanjang 12.885,00 m².

Pemerintah Provinsi Papua memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah Republik Indonesia untuk swasembada pangan, sehingga untuk meningkatkan hal tersebut diusahakan peningkatan pelayanan irigasi untuk mengaliri sawah.

Hal ini juga terlihat di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sangat jelas termaktub dalam Sasaran 19 **Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktifitas wilayah** dengan Indikator kinerjanya persentase pemanfaatan sumber daya air, maka seharusnya ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh para stakeholder.

Dinas PUPRPKP selaku instansi teknis yang memiliki tugas pokok terkait pengairan menetapkan kegiatan tersebut dalam skala prioritas, sehingga kendala keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan ditiadakannya kegiatan tersebut.

Badan Perencanaan dan Riset Daerah (Baperida) selaku instansi yang bertanggungjawab mengawal setiap perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peran yang sangat vital guna memastikan Sasaran Kinerja Gubernur Provinsi Papua yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dilaksanakan secara serius dan berkelanjutan oleh SKPD teknis yang membidangi.

Terlebih dengan diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Maka penetapan setiap Program Kegiatan harus benar-benar dilakukan secara cermat melalui skala prioritas.



Sasaran 20 :

Meningkatnya Pemenuhan Perumahan Layak Huni Dan Penataan Pemukiman

Sasaran strategis **Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman** didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik dan Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman**” adalah **180,345** persen dengan predikat “**sangat berhasil**”.

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 20

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik	Persen	41.00	64.00	156,09
2	Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih Layak	Persen	45.50	93.09	204,60
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					180,345

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman tahun 2024 sebesar 345 persen diperoleh dari capaian individu indikator kinerja Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan capaian kinerja sebesar 156.09 persen dan Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.



Sebagai pembanding kinerja Tahun 2024 dapat digambarkan pada table berikut dengan target dan capaian yang meningkat di dua tahun setelah terjadinya pemekaran wilayah;

Tabel. Pembanding Indikator Kinerja Sasaran 20
Tahun 2023 – 2024

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TAHUN					
			2023			2024		
			TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN
1.	Cakupan Rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	40.00	47.00	117.51	41.00	64.00	156.09
2.	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	45.25	65.26	144.02	45.50	93.09	204.60
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					130.765			180.345

1. Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik

Secara individu Sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup, dimana sanitasi baik adalah kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, yang dicapai melalui berbagai upaya mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup

Tingkat sanitasi yang baik mencerminkan kemajuan suatu daerah dalam hal infrastruktur, kesadaran masyarakat dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat oleh sebab itu Sanitasi baik menjadi salah satu indikator kinerja utama Gubernur Papua Indikator kinerja cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

Capaian kinerja indikator Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik untuk tahun 2024 adalah 156 persen dengan predikat Sangat Baik diperoleh dari realisasi 64.00 persen dibagi dengan target yang ditetapkan yaitu 41.00 persen.



Kabupaten Jayapura sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang menunjukkan upaya peningkatan sanitasi baik dengan program untuk menjadikan wilayahnya bersih dan peduli lingkungan hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan sanitasi yang memiliki cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik mencapai 76 persen yaitu dari target yang ditetapkan sebanyak 45.841 rumah tangga dan terealisasi 35.025 rumah tangga. Capaian ini tertinggi dibanding wilayah lain di Provinsi Papua. Data realisasi cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik pada 9 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua dirincikan dalam tabel berikut:

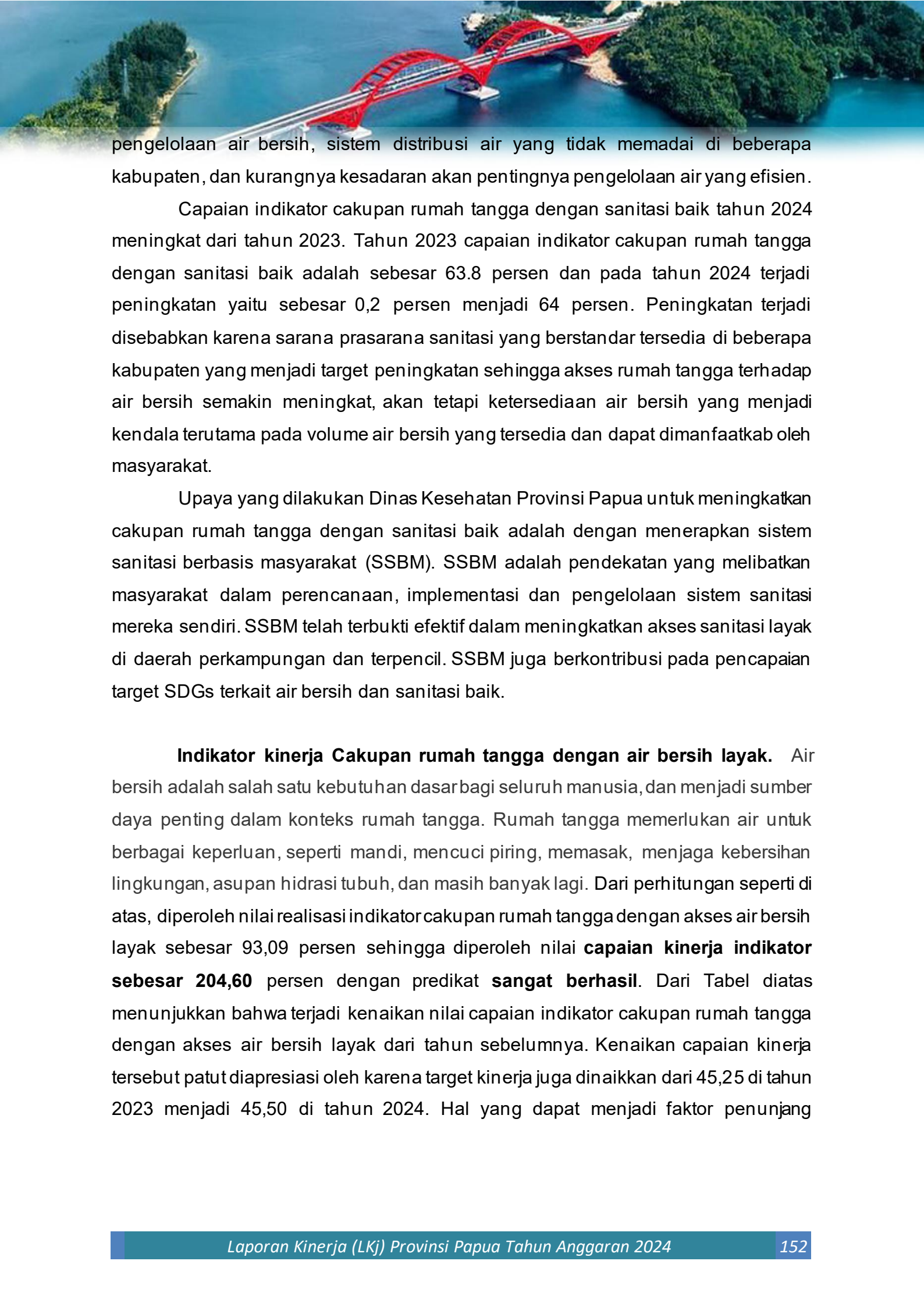
Tabel. Jumlah Jamban yang memenuhi Syarat Kesehatan

No	Kabupaten/Kota	Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Jamban yang memenuhi syarat Kesehatan	Jumlah masyarakat yang menjadi target	%
1.	Jayapura	35025	45841	76%
2.	Kepulauan Yapen	9070	20600	44%
3.	Biak Numfor	25916	37101	70%
4.	Sarmi	6254	10859	58%
5.	Keerom	10474	14297	73%
6.	Waropen	4266	8118	53%
7.	Supiori	1758	3736	47%
8.	Mamberamo Raya	1637	6171	27%
9.	Kota Jayapura	42687	65834	65%
Jumlah		137086	212557	64%

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua TA 2024

Realisasi indikator cakupan Rumah Tangga dengan sanitasi baik sebagaimana data pada tabel di atas adalah 64 persen sementara target yang ditetapkan adalah 41.00 persen sehingga capaian kinerja indikator ini untuk tahun 2024 adalah 156.09 persen.

Indikator kinerja ini telah mencapai 156.09 persen namun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pola hidup sehat dan bersih, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya keterbatasan ekonomi masyarakat dalam menyediakan fasilitas sarana prasana sanitasi baik, kurangnya investasi dalam

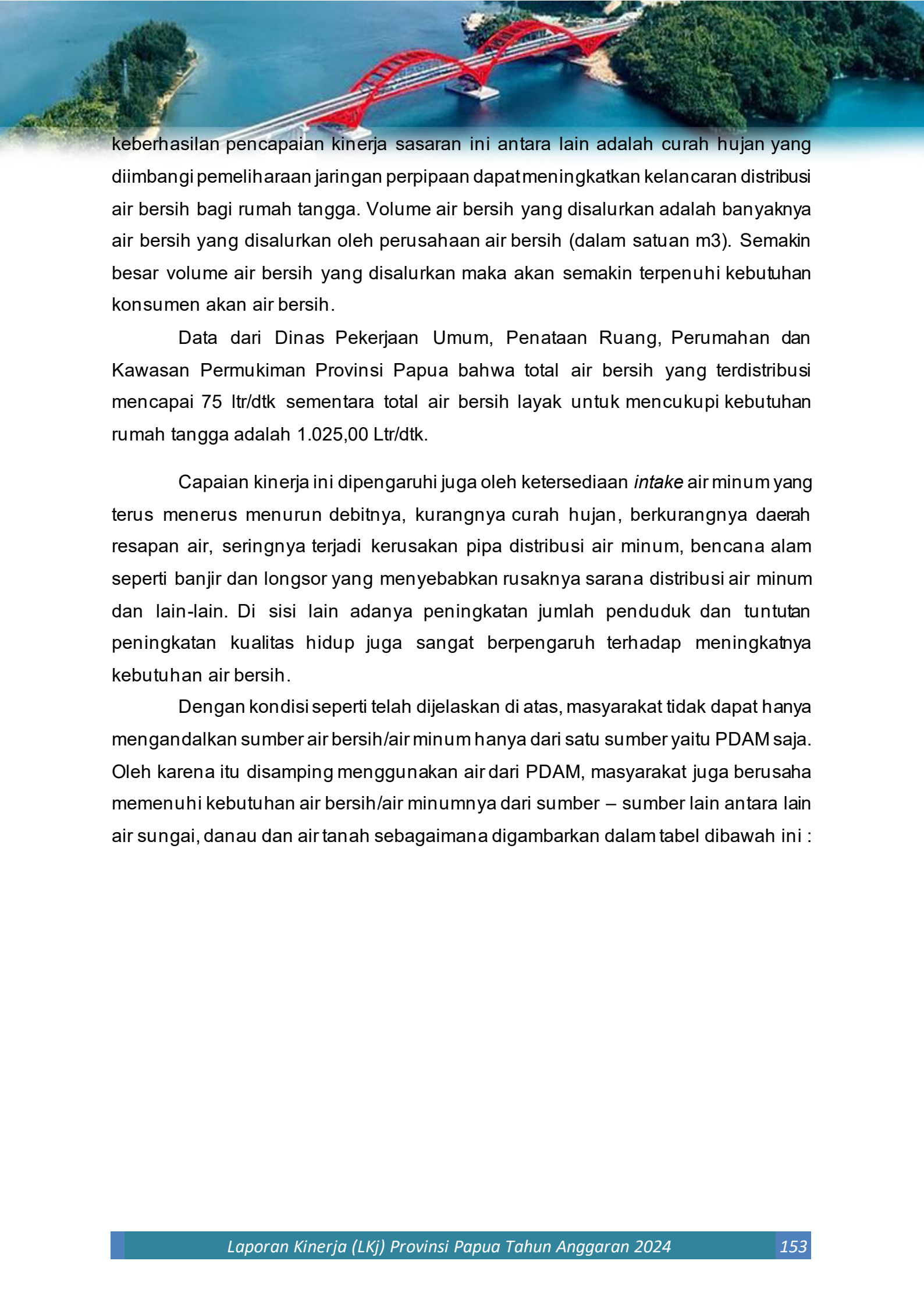


pengelolaan air bersih, sistem distribusi air yang tidak memadai di beberapa kabupaten, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan air yang efisien.

Capaian indikator cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik tahun 2024 meningkat dari tahun 2023. Tahun 2023 capaian indikator cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik adalah sebesar 63,8 persen dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan yaitu sebesar 0,2 persen menjadi 64 persen. Peningkatan terjadi disebabkan karena sarana prasarana sanitasi yang berstandar tersedia di beberapa kabupaten yang menjadi target peningkatan sehingga akses rumah tangga terhadap air bersih semakin meningkat, akan tetapi ketersediaan air bersih yang menjadi kendala terutama pada volume air bersih yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk meningkatkan cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik adalah dengan menerapkan sistem sanitasi berbasis masyarakat (SSBM). SSBM adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan pengelolaan sistem sanitasi mereka sendiri. SSBM telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses sanitasi layak di daerah perkampungan dan terpencil. SSBM juga berkontribusi pada pencapaian target SDGs terkait air bersih dan sanitasi baik.

Indikator kinerja Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak. Air bersih adalah salah satu kebutuhan dasar bagi seluruh manusia, dan menjadi sumber daya penting dalam konteks rumah tangga. Rumah tangga memerlukan air untuk berbagai keperluan, seperti mandi, mencuci piring, memasak, menjaga kebersihan lingkungan, asupan hidrasi tubuh, dan masih banyak lagi. Dari perhitungan seperti di atas, diperoleh nilai realisasi indikator cakupan rumah tangga dengan akses air bersih layak sebesar 93,09 persen sehingga diperoleh nilai **capaian kinerja indikator sebesar 204,60** persen dengan predikat **sangat berhasil**. Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan nilai capaian indikator cakupan rumah tangga dengan akses air bersih layak dari tahun sebelumnya. Kenaikan capaian kinerja tersebut patut diapresiasi oleh karena target kinerja juga dinaikkan dari 45,25 di tahun 2023 menjadi 45,50 di tahun 2024. Hal yang dapat menjadi faktor penunjang



keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain adalah curah hujan yang diimbangi pemeliharaan jaringan perpipaan dapat meningkatkan kelancaran distribusi air bersih bagi rumah tangga. Volume air bersih yang disalurkan adalah banyaknya air bersih yang disalurkan oleh perusahaan air bersih (dalam satuan m³). Semakin besar volume air bersih yang disalurkan maka akan semakin terpenuhi kebutuhan konsumen akan air bersih.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua bahwa total air bersih yang terdistribusi mencapai 75 ltr/dtk sementara total air bersih layak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah 1.025,00 Ltr/dtk.

Capaian kinerja ini dipengaruhi juga oleh ketersediaan *intake* air minum yang terus menerus menurun debitnya, kurangnya curah hujan, berkurangnya daerah resapan air, seringnya terjadi kerusakan pipa distribusi air minum, bencana alam seperti banjir dan longsor yang menyebabkan rusaknya sarana distribusi air minum dan lain-lain. Di sisi lain adanya peningkatan jumlah penduduk dan tuntutan peningkatan kualitas hidup juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih.

Dengan kondisi seperti telah dijelaskan di atas, masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan sumber air bersih/air minum hanya dari satu sumber yaitu PDAM saja. Oleh karena itu disamping menggunakan air dari PDAM, masyarakat juga berusaha memenuhi kebutuhan air bersih/air minumnya dari sumber – sumber lain antara lain air sungai, danau dan air tanah sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini :



Tabel

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, 2024

Kabupaten/Kota	Leding	Pompa	Air dalam kemasan	Sumur terlindungi	Sumur tak terlindungi
Jayapura	9,88	11,31	1,63	1,87	2,83
Kepulauan Yapen	28,76	3,32	-	2,80	2,04
Sarmi	-	13,04	-	12,48	9,89
Keerom	0,45	1,51	-	6,46	57,32
Biak Numfor	5,40	0,70	44,35	4,10	6,70
Waropen	0,42	4,37	1,14	6,39	1,10
Supiori	-	3,25	1,97	10,43	8,69
Mamberamo Raya	-	-	-	9,24	20,02
Kota Jayapura	23,79	3,65	2,55	0,77	0,18
Provinsi Papua	14,85	4,63	7,56	3,19	6,77

Sumber data : BPS

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa air sungai menyumbang sebagian besar pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di Papua yaitu 14,85%. Air sungai disalurkan baik melalui pipa PDAM.

Penerapan Pengelolaan Konsumsi Air Bersih Kebutuhan air saat ini semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kota. Penyediaan kebutuhan air minum yang terus meningkat harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan

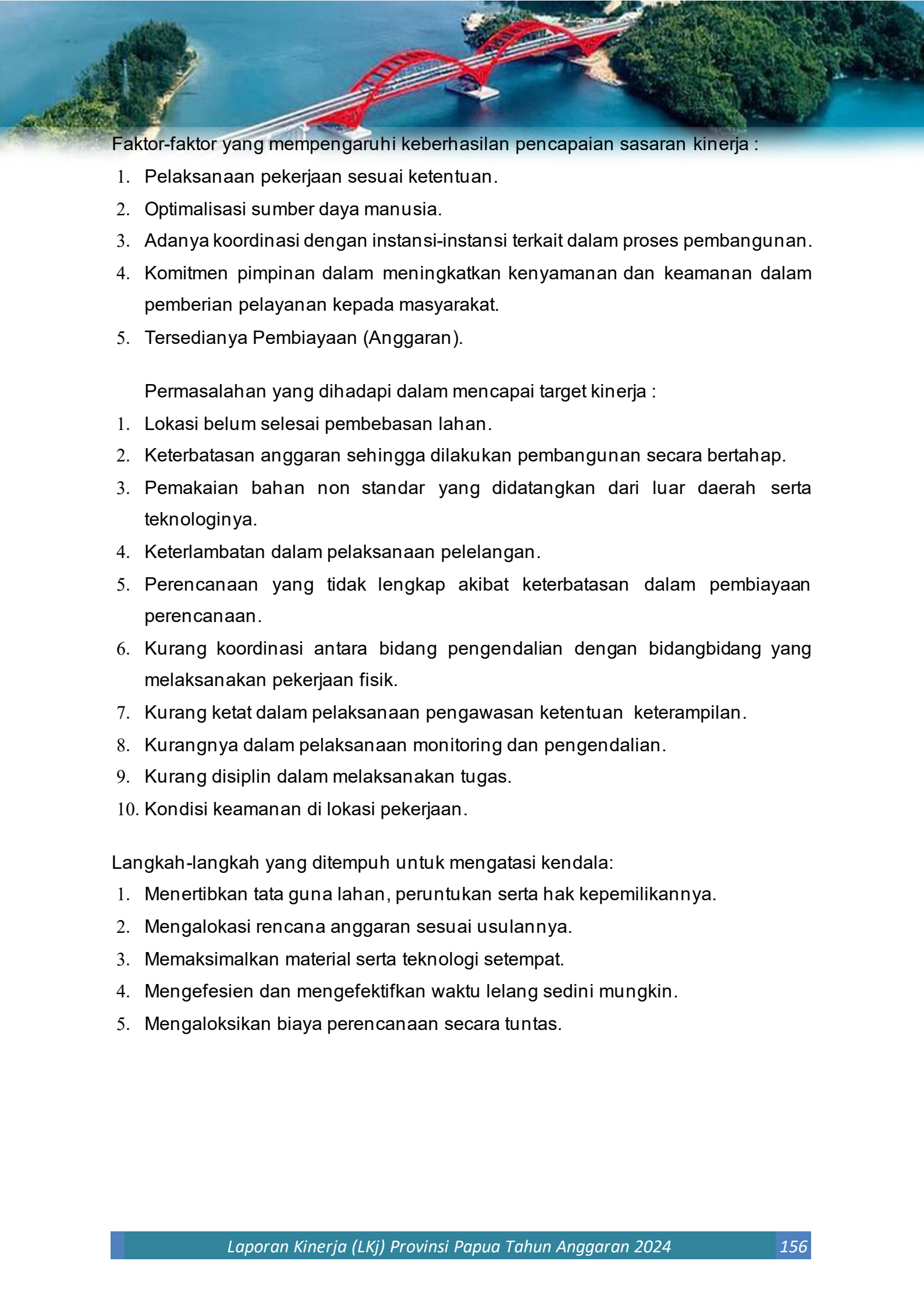


prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Kewajiban untuk mengembangkan penerapan pengelolaan konsumsi air bersih pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kondisi saat ini masih banyak sistem air minum yang telah terbangun tetapi belum dimanfaatkan secara optimal terutama disebabkan karena belum dilaksanakannya komitmen investasi untuk pembangunan jaringan distribusi yang merupakan tanggung jawab daerah.

Penerapan pengelolaan konsumsi air bersih pada rumah tangga dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar akan air minum dapat terpenuhi dengan baik. Pengelolaan lingkungan untuk sistem penyediaan air minum harus bersifat dinamis karena persepsi manusia untuk kebutuhan air minum berbeda-beda dan cenderung akan berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pilihan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan.

Air bersih sangat penting keberadaannya bagi keberlangsungan hidup manusia. Jika air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup memiliki kualitas yang baik maka akan dapat membantu menjaga tingkat kesehatan, sebaliknya jika air yang digunakan berkualitas buruk akan berdampak buruk juga kesehatan. Untuk itulah ketersediaan air bersih ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.

Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja :

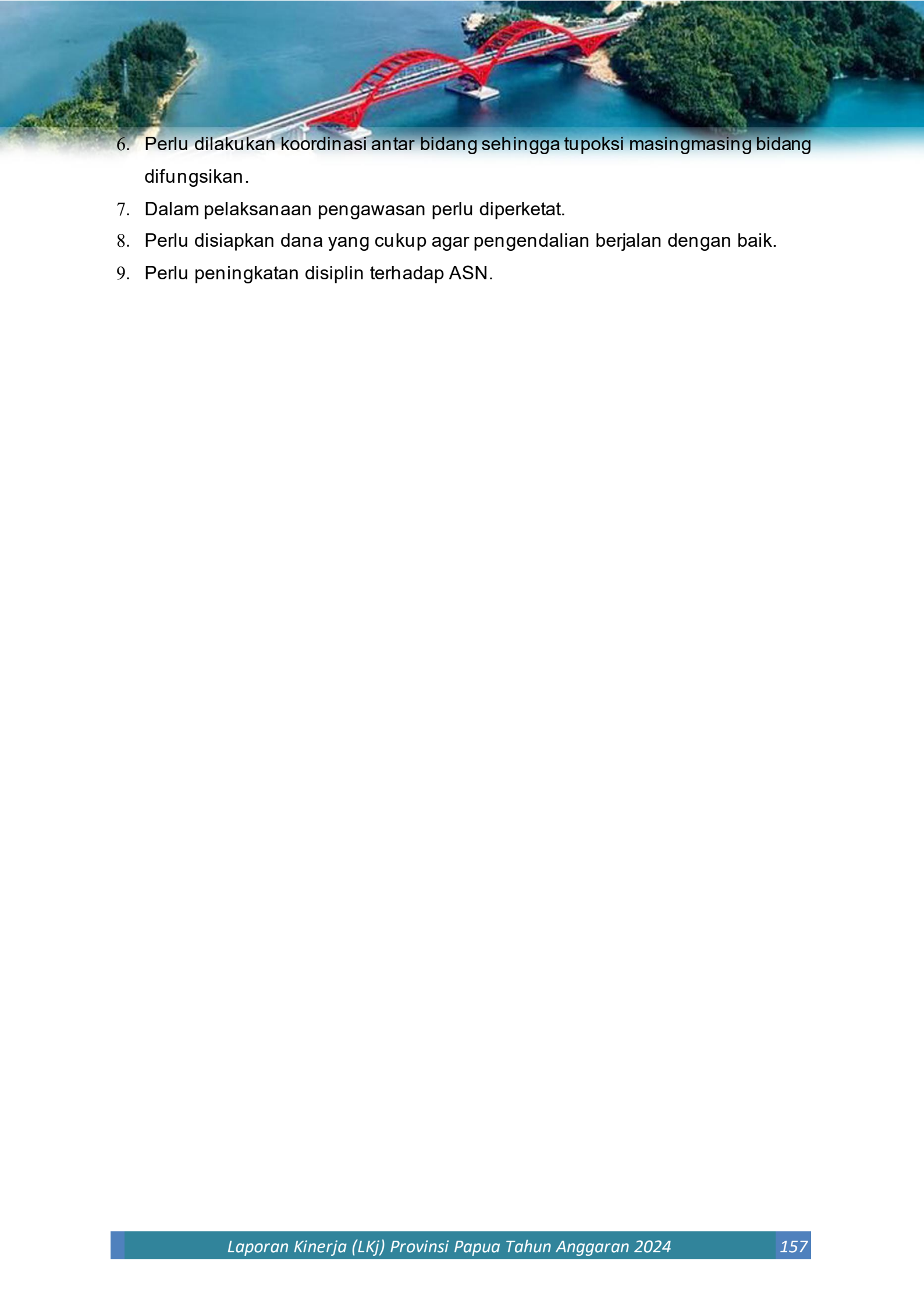
1. Pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan.
2. Optimalisasi sumber daya manusia.
3. Adanya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam proses pembangunan.
4. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
5. Tersedianya Pembiayaan (Anggaran).

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja :

1. Lokasi belum selesai pembebasan lahan.
2. Keterbatasan anggaran sehingga dilakukan pembangunan secara bertahap.
3. Pemakaian bahan non standar yang didatangkan dari luar daerah serta teknologinya.
4. Keterlambatan dalam pelaksanaan pelelangan.
5. Perencanaan yang tidak lengkap akibat keterbatasan dalam pembiayaan perencanaan.
6. Kurang koordinasi antara bidang pengendalian dengan bidangbidang yang melaksanakan pekerjaan fisik.
7. Kurang ketat dalam pelaksanaan pengawasan ketentuan keterampilan.
8. Kurangnya dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian.
9. Kurang disiplin dalam melaksanakan tugas.
10. Kondisi keamanan di lokasi pekerjaan.

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala:

1. Menertibkan tata guna lahan, peruntukan serta hak kepemilikannya.
2. Mengalokasi rencana anggaran sesuai usulannya.
3. Memaksimalkan material serta teknologi setempat.
4. Mengefisien dan mengefektifkan waktu lelang sedini mungkin.
5. Mengalokasikan biaya perencanaan secara tuntas.



6. Perlu dilakukan koordinasi antar bidang sehingga tupoksi masingmasing bidang difungsikan.
7. Dalam pelaksanaan pengawasan perlu diperketat.
8. Perlu disiapkan dana yang cukup agar pengendalian berjalan dengan baik.
9. Perlu peningkatan disiplin terhadap ASN.



Sasaran 21 :

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung

Capaian kinerja untuk sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung**” mencapai **81,32** persen dengan predikat “**Berhasil**”. Pencapaian sasaran ini, diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini :

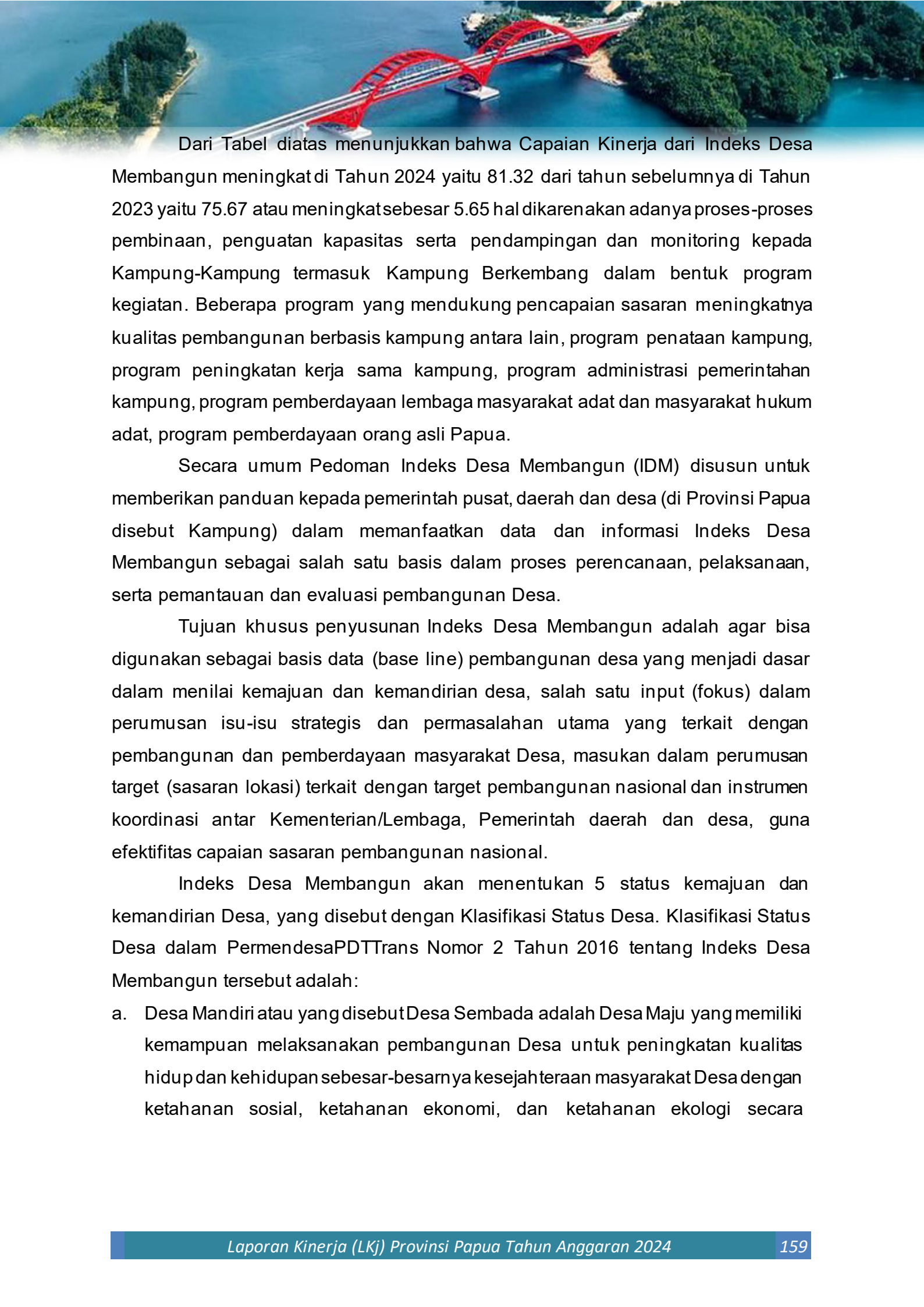
Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 21

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TERGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	52,00	42,29	81,32
Capaian Indikator Kinerja					81,32

Capaian kinerja Indeks Desa membangun dengan Target 52.00 Realisasi 42.29 sehingga capaian kinerja adalah 81.32. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung ini berdasarkan Indikator kinerja yakni : Indek Kampung Membangun atau dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia disebut Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 21
Tahun 2023-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Tahun		
		2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Desa Membangun	Indeks	52.00	39.35	75.67	52.00	42.29	81.32



Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian Kinerja dari Indeks Desa Membangun meningkat di Tahun 2024 yaitu 81.32 dari tahun sebelumnya di Tahun 2023 yaitu 75.67 atau meningkat sebesar 5.65 hal dikarenakan adanya proses-proses pembinaan, penguatan kapasitas serta pendampingan dan monitoring kepada Kampung-Kampung termasuk Kampung Berkembang dalam bentuk program kegiatan. Beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung antara lain, program penataan kampung, program peningkatan kerja sama kampung, program administrasi pemerintahan kampung, program pemberdayaan lembaga masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, program pemberdayaan orang asli Papua.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah dan desa (di Provinsi Papua disebut Kampung) dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan target (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status Desa dalam Permendesa PDTT Trans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara



berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.

- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907.



Apa Saja Komponen Indeks Desa Membangun (IDM)?

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi.

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Dalam hal klasifikasi status Desa sebagaimana tersebut di atas dimana kriteria penentuan status desa disamaratakan untuk seluruh Indonesia, maka atas pertimbangan letak geografis, ketersediaan infrastruktur, adat budaya lokal dan rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Provinsi sampai Kampung, maka ditetapkan target kampung membangun adalah Kampung Berkembang menjadi titik fokus pembangunan ke arah Kampung Maju dan Kampung Mandiri, Sudah barang tentu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga mengupayakan secara maksimal kemajuan Kampung Sangat Tertinggal dan Tertinggal ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan 3 (tiga) Indeks tersebut di atas, maka jumlah Desa/Kampung Berkembang di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Tahun 2023-2024 tergambar sebagaimana tabel berikut ini :



**Tabel. Jumlah Kampung Berkembang Tahun 2023 dan 2024
di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung	Kamp. sangat tertinggal / tertinggal		Kampung Berkembang		Kampung Maju		Kampung Mandiri	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Jayapura	139	38	68	55	62	8	9	-	-
2	Kepulauan Yapen	160	58	22	129	133	4	5	-	-
3	Biak Numfor	254	17	143	90	109	5	2	-	-
4	Sarmi	92	1	81	9	9	2	2	-	-
5	Keerom	91	16	64	22	21	4	5	1	1
6	Waropen	100	1	63	33	34	3	3	-	-
7	Supiori	38	11	10	24	22	3	6	-	-
8	Mamberamo Raya	60	2	55	5	5	-	-	-	-
9	Kota Jayapura	14	1	-	6	6	6	7	1	1
Jumlah		948	145	506	373	401	35	39	2	2

Sumber Data : LKj DPMK Tahun 2024

Dari tabel tersebut diketahui bahwa hasil penginputan dan verifikasi terhadap **948** kampung yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Papua, terdapat **Kampung Berkembang sebanyak 401 (tiga ratus tujuh puluh tiga)**, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan capaian kinerja **81.32** yang tinggi pada sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung”**. Tingginya capaian sasaran tersebut disebabkan karena jumlah kampung yang diinput dan diverifikasi semakin banyak, tetapi juga diikuti dengan semakin meningkatnya kategori kampung dari kategori Kampung Sangat Tertinggal/Tertinggal ke Kampung Berkembang, Kampung Maju dan Kampung Mandiri.



Sasaran 22 :

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Orang Asli Papua (OAP)

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Orang Asli Papua**” sebesar **124.6 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 22

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar OAP	Persen	73,50	91,57	124,6

Berdasarkan tabel diatas target kinerja sebesar **73,5%**, adapun realisasi kinerja sebesar **91,57%** dan capaian kinerja sebesar **124,60%**, berdasarkan hasil perhitungan realisasi **lebih tinggi** dari target yang direncanakan, adapun skala penilaian berada pada kategory sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa anggaran digunakan untuk kebutuhan dasar bagi orang asli Papua yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% dari dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, 1% DAU bersifat umum (Blockgrant) untuk pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik; Peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; hal lain sesuai kebutuhan dan prioritas. 1,25% (DAU) ditentukan penggunaan (Sprsific grand) untuk membiayai Pendidikan minimal 30%, kesehatan (minimal 20%), pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan; dana tambahan infrastruktur untuk Infrastruktur perhubungan, air bersih, enegri listrik, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan. Adapun tujuan dari penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk mengurangi ketimpangan dengan daerah lain; meningkatnya kesejahteraan masyarakat (khususnya OAP).



Penerimaan dalam rangka Otsus digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP.

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 22
Tahun 2023-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar OAP	Persen	73.00	72.47	99.27	73,50	91,57	124,6

Dilihat dari capaian indikator kinerja diatas bila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023 mengalami kenaikan sebesar 25,73%, tahun 2024 sebesar 124.6% sedangkan tahun 2023 sebesar 99,27%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dilihat dari pengalokasian Dana Otsus dan DTI untuk kebutuhan orang asli Papua sudah diarahkan kepada program-program yang berdampak kepada masyarakat dengan memperhatikan prioritas kebutuhan, pembagian kewenangan dan kinerja pelaksanaan dana Otsus.



Berikut Tabel rekapitulasi anggaran yang bersumber dari Dama Otonomi Khusus :

**Tabel. Rekapitulasi Realisasi Anggaran
yang bersumber dari Dana Otsus Tahun Anggaran 2024**

No	Sumber Dana	Target (Rp.)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Otsus 1% :	218.239.461.700	217.441.429.785	99,63%
	Admininistrasi Pemerintahan	78.425.498.758	78.018.611.120	99,48%
	Kesehatan	41.355.011.316	40.963.867.039	99,05%
	Pendidikan	11.216.500.000	11.216.500.000	100.00%
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	87.242.451.626	87.242.451.626	100.00%
2.	Otsus 1,25 %	273.203.897.709	271.507.203.711	99,38%
	Pendidikan	124.456.772.306	124.456.772.306	100.00%
	Kesehatan	75.413.394.789	74.773.194.219	99,15%
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	73.333.730.614	72.277.237.186	98.56%
3	DTI :	683.423.487.296	586.818.353.973	85,86%
	Infrastruktur Perhubungan	410.773.487.390	344.694.928.087	83,91%
	Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	126.000.000.000	105.996.353.003	84,12%
	Infrastruktur Air Bersih	79.150.000.000	68.628.402.199	86,71%
	Infrastruktur Telekomunikasi	53.000.000.000	52.998.670.778	100.00%
	Infrastruktur Energi Listrik	14.499.999.906	14.499.999.906.	100.00%
Total		1.174.866.846.705	1.075.766.987.469	91.57%

Sumber Data : LKj Bapperida Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran yang didukung dengan kebijakan, antara lain:

1. Implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis Elektronik yang terintegrasi.
2. Peningkatan kualitas aparatur perencana Pembangunan Daerah sampai ditingkat pelaksana program di SKPD Provinsi Papua.



3. Peningkatan Perencanaan Pembangunan berbasis Data/Bukti (evidence base planning) serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas.

Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua yang pasti berpengaruh terhadap keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan sosial budaya. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Provinsi Papua.

Untuk mengetahui tingkat kehidupan masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan khususnya di Provinsi Papua dapat diukur melalui capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan”** dengan Capaian Kinerja sebesar **91,93** persen dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini, diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- a. Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan;
- b. Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan;
- c. Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan.

Target Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dirinci lebih lanjut sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 23

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan	Tahun	12.5	10,33	82,64%
2.	Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan	Tahun	68.8	70,97	103,15%
3.	Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan	Rp Juta/ Kapita	14.1	12,69	90%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					91,93



Sasaran 23 :

Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan

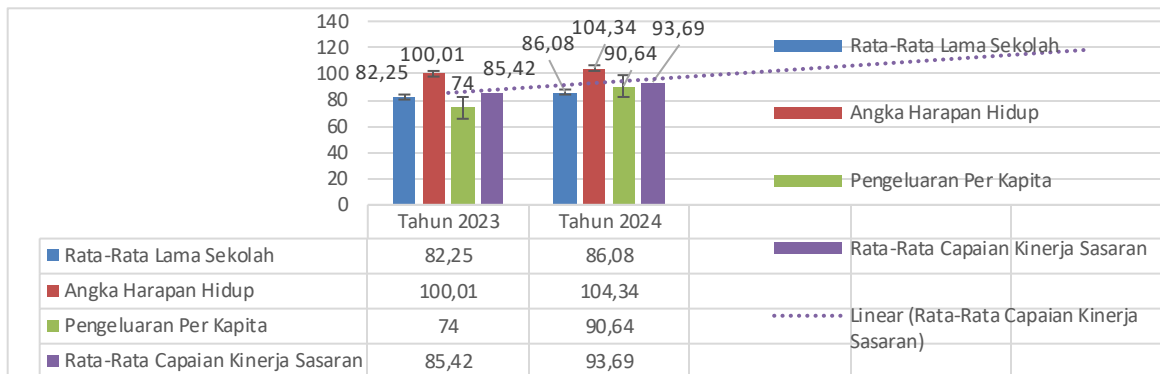
Capaian Kinerja Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan tahun 2024 sebesar **91,93 persen** lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 85,42 **persen** atau lebih tinggi **6,51 persen**. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 23 Tahun 2023-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan	Tahun	12,00	9,87	82,25	12,5	10,33	82,64
2.	Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan	Tahun	68,00	68,05	100,01	68,8	70,97	103,15
3.	Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan	Rp Juta/ Kapita	14,00	10,36	74,00	14,1	12,69	90
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					85.42			91.93



Dari tabel tersebut di atas, memperlihatkan bahwa Capaian Sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2024 meningkat dari capaian tahun 2023 seperti terlihat pada grafik di bawah ini:



Capaian kinerja tahun 2024 sebesar **91,93** persen meningkat dibanding tahun 2023 sebesar **85,42 persen**. Terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 9,68% dari 85,42% (2023) menjadi 93,69% pada tahun 2024. Peningkatan capaian kinerja wilayah perbatasan Papua terjadi Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan, Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan, dan Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan.

Sasaran Kinerja “Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan” yang diukur melalui Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan, Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan dan Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan” pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **91,93 persen** dari tahun 2023 faktor penyebabnya adalah:

1. Untuk Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan hal-hal yang dilakukan adalah:
 - a. Pembangunan sekolah baru dan rehabilitasi sekolah rusak dan meningkatkan akses Pendidikan;
 - b. Beasiswa untuk anak-anak di wilayah perbatasan dan insentif bagi guru yang bertugas di daerah perbatasan;
 - c. Pelibatan Masyarakat Adat dalam sosialisasi pendidikan berbasis budaya lokal untuk mengurangi angka putus sekolah



2. Untuk Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan hal-hal yang dilakukan adalah:
 - a. Pembangunan puskesmas dan posyandu di wilayah perbatasan, yang telah dilengkapi tenaga kesehatan dan obat-obatan;
 - b. Penanganan Gizi Buruk berupa pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil;
 - c. Pencegahan Penyakit Endemik berupa Vaksinasi massal dan penyediaan kelambu anti-nyamuk untuk menekan malaria
3. Untuk Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan yang dilakukan adalah berupa:
 - a. Pengembangan usaha mikro berbasis potensi lokal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbatasan;
 - b. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran kepada keluarga miskin di perbatasan;
 - c. Pembangunan jalan dan jembatan untuk menghubungkan wilayah perbatasan.

Tabel. Wilayah Perbatasan di Provinsi Papua

NO.	U R A I A N	KETERANGAN
1.	Provinsi Papua	
2.	Kabupaten Jayapura	
3.	Kabupaten Keerom	Memiliki wilayah perbatasan
4.	Kabupaten Sarmi	
5.	Kabupaten Biak Numfor	
6.	Kabupaten Supiori	Memiliki wilayah perbatasan
7.	Kabupaten Mamberamo Raya	
8.	Kabupaten Waropen	
9.	Kabupaten Kepulauan Yapen	
10.	Kota Jayapura	Memiliki wilayah perbatasan



Sasaran 24 :

Meningkatnya bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Perbandingan setiap indikator kinerja dari Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dirinci sebagai berikut :

1. Target untuk indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan pada tahun 2024 sebesar 12,5 terealisasi sebesar 10,33 dengan capaian kinerja sebesar **82,64 persen**. Pencapaian kinerja pada tahun 2024 sebesar **86,08 persen** lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar **82,25**, naik sebesar **0,39 persen**.
2. Target untuk indikator kinerja Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan pada tahun 2024 sebesar 68,8 terealisasi sebesar 70,97 dengan capaian kinerja sebesar **103,15 persen**. Pencapaian kinerja pada tahun 2024 sebesar **104,34 persen** lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar **100.01**, naik sebesar **3,14 persen**.
3. Target untuk indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan pada tahun 2024 Target sebesar 14,1 terealisasi sebesar 12,69 dengan capaian kinerja sebesar **90 persen**. Pencapaian kinerja pada tahun 2024 sebesar **90 persen** lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar **74 persen** atau naik sebesar **16 persen**.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**” sebesar **86.375%** persen dengan predikat “**Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (Dua) Indikator dengan Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :



Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 24

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Cakupan Warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	Ribu Orang Per Tahun	60	33.43	55,71%
2.	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Ribu Orang Per Tahun	60	70.22	117,04%
Capaian Kinerja Sasaran					86,375%

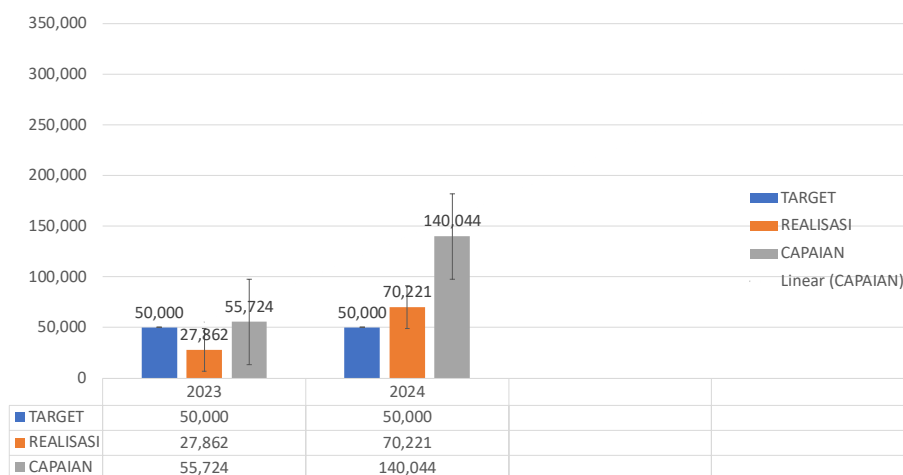
Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja yaitu Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 24
Tahun 2023-2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Cakupan Warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	Ribu orang per Thn	-	-	-	60	33.43	55,71
2.	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Ribu orang per Thn	50	27.862	55,724	60	70.22	117,04

Catatan : Indikator 1 terkait KAT merupakan Indikator baru dalam RPD Prov.Papua Tahun 2024-2026 jadi tidak di bandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu 2023

Grafik. Capaian Indikator Meningkatnya Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



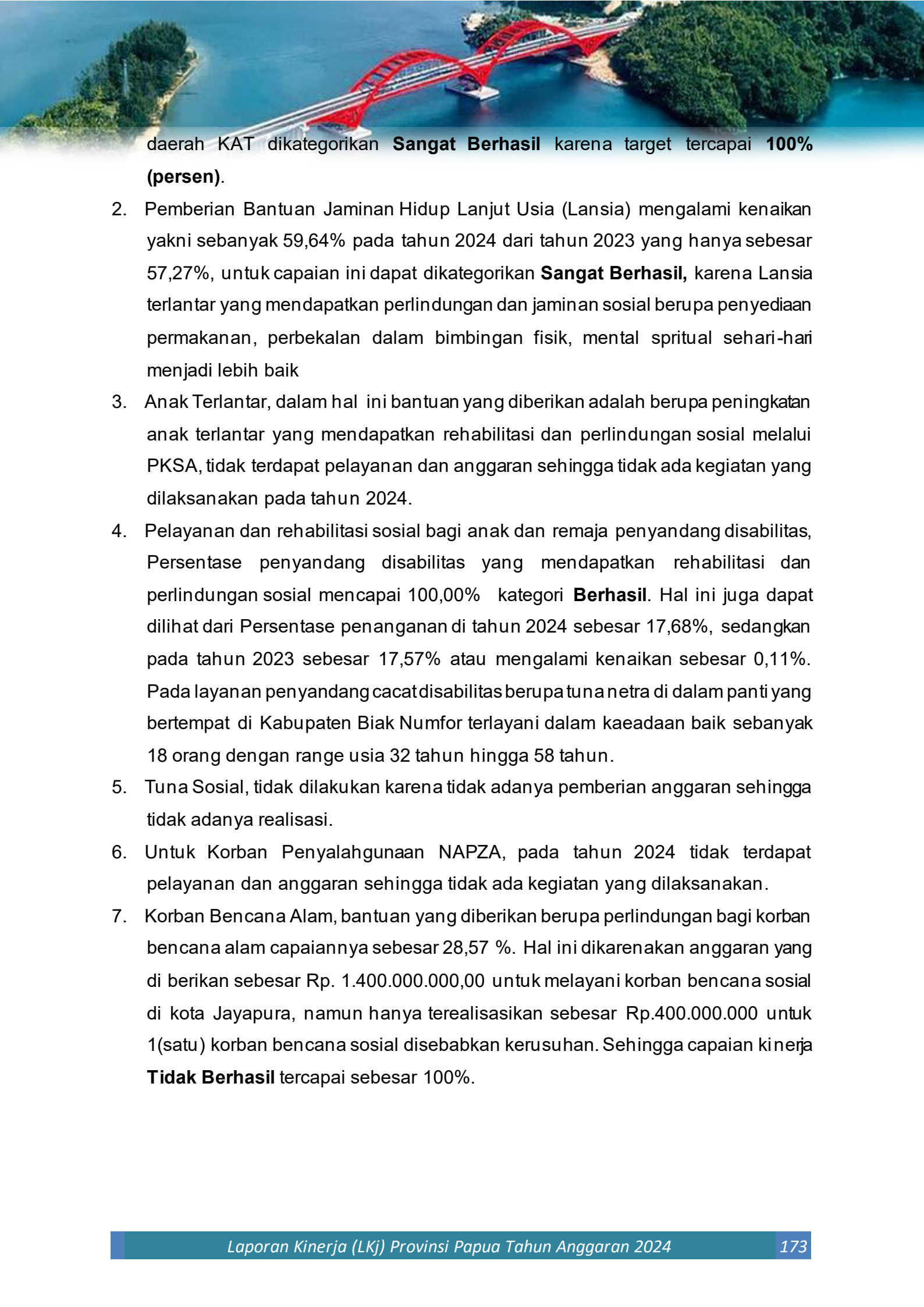
Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan P3A, Tahun 2024 (diolah)

Indikator Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial dengan target sebanyak **60.000** orang yang direncanakan untuk menerima bantuan, terealisasi sebanyak **70.22** orang pada tahun 2024 atau sekitar 117,04% (persen).

Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2024 mengalami Kenaikan sekitar 84,716% (persen) dari tahun 2023 yakni sebanyak 42.359 orang. Kenaikan indikator sebesar 117,04% (persen) ini terjadi karena Jumlah orang yang memperoleh bantuan sosial bertambah dan hal ini juga merupakan dampak dari perubahan kebijakan anggaran oleh pemerintah pusat dan dukungan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota serta *stakeholders* lainnya seperti para pendamping yang tersebar di Kabupaten/Kota.

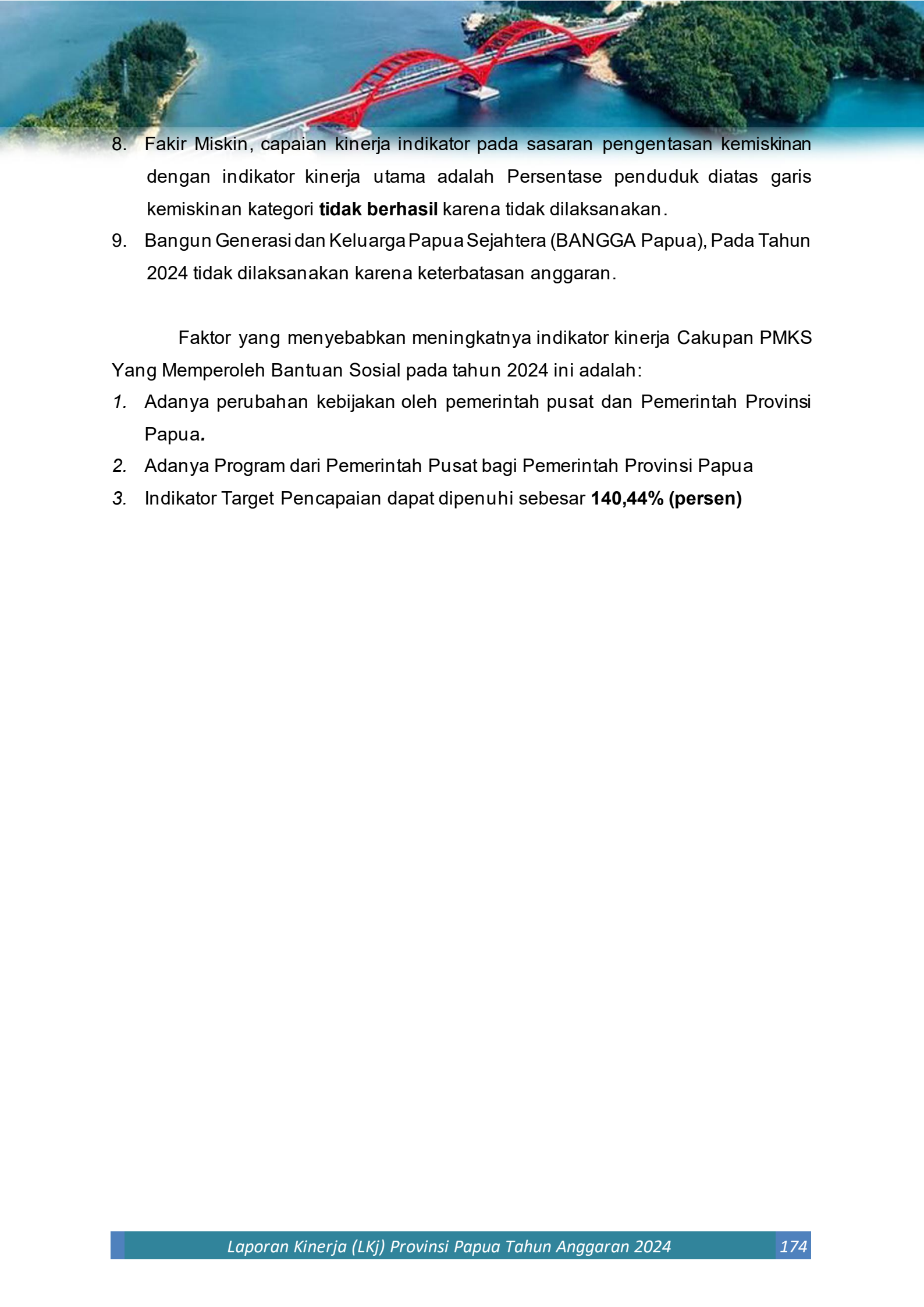
PMKS yang memperoleh bantuan sosial ini didapat dari delapan (8) Kelompok PMKS yang tertangani di Provinsi Papua yakni:

1. Komunitas Adat Terpencil (KAT), untuk KAT target sebanyak **33,43%** pada tahun 2024 yang diberikan melalui kegiatan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial diberikan kepada **1.428** Kepala Keluarga pada Kabupaten yang merupakan lokasi



daerah KAT dikategorikan **Sangat Berhasil** karena target tercapai **100% (persen)**.

2. Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Lanjut Usia (Lansia) mengalami kenaikan yakni sebanyak 59,64% pada tahun 2024 dari tahun 2023 yang hanya sebesar 57,27%, untuk capaian ini dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**, karena Lansia terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berupa penyediaan permakanan, perbekalan dalam bimbingan fisik, mental spritual sehari-hari menjadi lebih baik
3. Anak Terlantar, dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah berupa peningkatan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial melalui PKSA, tidak terdapat pelayanan dan anggaran sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.
4. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja penyandang disabilitas, Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial mencapai 100,00% kategori **Berhasil**. Hal ini juga dapat dilihat dari Persentase penanganan di tahun 2024 sebesar 17,68%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 17,57% atau mengalami kenaikan sebesar 0,11%. Pada layanan penyandang cacat disabilitas berupa tuna netra di dalam panti yang bertempat di Kabupaten Biak Numfor terlayani dalam kaeadaan baik sebanyak 18 orang dengan range usia 32 tahun hingga 58 tahun.
5. Tuna Sosial, tidak dilakukan karena tidak adanya pemberian anggaran sehingga tidak adanya realisasi.
6. Untuk Korban Penyalahgunaan NAPZA, pada tahun 2024 tidak terdapat pelayanan dan anggaran sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.
7. Korban Bencana Alam, bantuan yang diberikan berupa perlindungan bagi korban bencana alam capaiannya sebesar 28,57 %. Hal ini dikarenakan anggaran yang di berikan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 untuk melayani korban bencana sosial di kota Jayapura, namun hanya terealisasikan sebesar Rp.400.000.000 untuk 1(satu) korban bencana sosial disebabkan kerusuhan. Sehingga capaian kinerja **Tidak Berhasil** tercapai sebesar 100%.



8. Fakir Miskin, capaian kinerja indikator pada sasaran pengentasan kemiskinan dengan indikator kinerja utama adalah Persentase penduduk diatas garis kemiskinan kategori **tidak berhasil** karena tidak dilaksanakan.
9. Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA Papua), Pada Tahun 2024 tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Faktor yang menyebabkan meningkatnya indikator kinerja Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial pada tahun 2024 ini adalah:

1. Adanya perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua.
2. Adanya Program dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Provinsi Papua
3. Indikator Target Pencapaian dapat dipenuhi sebesar **140,44% (persen)**



Sasaran 25 :

Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Melalui Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

Secara keseluruhan capaian kinerja untuk sasaran “**Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Melalui Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**” termasuk kategori **Sedang** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Pencapaian sasaran ini, diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 25

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5
1.	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					Sedang

Dimana penentuan kategori tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Rendah = 0 - 13 (tidak rawan bencana)

Sedang = 13,01 - 144,0 (cukup rawan

bencana) Tinggi= 144,01 - dst (rawan bencana)

Adapun nilai skoring IRBI Provinsi Papua untuk tahun 2024 belum dikeluarkan hasilnya dari BNPB RI. Sehingga nilai skoring IRBI Provinsi Papua untuk tahun 2024 ini masih menggunakan nilai skoring pada tahun 2023 yaitu sebesar 50 sehingga masih dikategorikan sedang atau cukup rawan bencana.



Dengan rumusan penentuan skor IRBI adalah sebagai berikut :

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Risk = Indeks Resiko Bencana
Hazard = Bahaya
Vulnerability = Kerentanan
Capacity = Kapasitas

Di bawah ini adalah data perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dengan capaian realisasi “Sedang” sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 25
Tahun 2023-2024**

No	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

* untuk tahun 2024 belum dikeluarkan hasilnya dari BNPB RI sehingga nilai skoring IRBI Provinsi Papua untuk tahun 2024 ini masih menggunakan nilai skoring pada tahun 2023 yaitu sebesar 50 sehingga masih dikategorikan sedang atau cukup rawan bencana

Dari 9 Kabupaten/Kota yang memiliki skor IRB tinggi yang dapat dinyatakan rawan bencana di Provinsi Papua adalah

1. Kabupaten Jayapura (skor IRB = 203,20)
2. Kabupaten Sarmi (skor IRB = 172,50),
3. Kabupaten Mamberamo Raya (skor IRB = 165,60)
4. Sedangkan 7 Kab/Kota lainnya masuk dalam skor IRB sedang atau dapat dinyatakan cukup rawan bencana.



Tahun 2024 di Provinsi Papua telah terjadi 22 kasus bencana alam di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua, yaitu :

1. Kota Jayapura
2. Kab. Jayapura,
3. Kab. Keerom,
4. Kab. Sarmi,
5. Kab. Waropen
6. Kab. Mamberamo Raya
7. Kab. Kepulauan Yapen

Jenis bencana yang terjadi adalah banjir, angin kencang, banjir rob, gelombang pasang, dan tanah longsor.

Dari 22 kasus bencana yang terjadi, tidak semua kasus dapat ditangani oleh BPBD Provinsi Papua. Hanya 7 (tujuh) kasus yang dapat ditangani oleh BPBD Provinsi Papua, Dan dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang mengalami bencana tersebut, ada 5 kabupaten/kota yang bisa ditangani oleh BPBD Provinsi Papua Yaitu :

1. Kota Jayapura
2. Kabupaten Jayapura
3. Kabupaten Sarmi,
4. Kabupaten Keerom
5. Kabupaten Kepulauan Yapen

Hal ini disebabkan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Papua masih minim, Selain itu juga jarak yang menyulitkan untuk ditempuh. Bantuan yang diberikan berupa bantuan logistik dan juga peminjaman peralatan penanggulangan bencana antara lain : tenda, mobil toilet, dan matras. Bila dihitung kinerja BPDB Provinsi Papua diukur melalui jumlah bencana yang tertangani di Provinsi Papua di bagi jumlah bencana yang terjadi di Provinsi Papua di kali 100 persen atau $\frac{5}{7} \times 100 = 71$ persen sebagai capaian kinerja BPDB Provinsi Papua termasuk dalam kategori “Sedang”, hal ini menunjukkan keseriusan dimana tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua antara lain menyebutkan bahwa “Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dimulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian Pemerintah yaitu :

1. Mendapat dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPDB Provinsi Papua.
2. Melakukan upaya penguatan kapasitas personil, sumberdaya dan kelembagaan penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasarana, secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut;

Dalam penanganan 22 kasus kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam hal ini BNPB RI yang sangat membantu yaitu pemberian bantuan bufferstok logistik, bantuan dana hibah siap pakai, dan bantuan peralatan. Namun dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang terkena bencana pada tahun 2024, hanya 2 (dua) kabupaten yang mendapatkan bantuan, yaitu Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Papua dari segi jenis peralatannya cukup memadai. Hanya saja dari segi jumlah dan usia peralatan, masih belum memadai dan usia peralatannya pun sudah banyak yang sudah tua. Dan semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Papua adalah pemberian (hibah) dari pemerintah pusat dalam hal ini BNPB RI. Adapun data peralatan yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Papua, adalah sebagai berikut :



Tabel. Sarana dan Pagarana Aset Mobilitas Operasional Penunjang Kegiatan BPBD Provinsi Papua 2024

Golongan	Jumlah Sarana dan prasarana
	BPBD
SARANA MOBILITAS	
1. Roda 4	5
2. Roda 2	8
5. Mobil rescue Komando	2
6. Mobil water Threatment	2
7. Mobil dapur Umum lapangan	1
8. Mobil Truk serbaguna	4
9. Mobil ambulance	1
10. Perahu Speed boat/Fiber 9 Inc	1
11. Perahu karet	1
12. Mesin Motor temple 10 dan 60 PK	1
13. Mesin motor temple 80 PK	5
14. Mesin motor temple 40 PK	2
15. Mesin motor temple 25 PK	2
16. Mobil Komunikasi	1
17. Mobil toilet	1
18. Light tower portable	1
19. Water treatmen Portabel	1
20. Genset 2000watt	1

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian BPBD Prov. Papua, 2024

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa, fase tanggap darurat akan lebih efektif jika didukung oleh ketersediaan logistik dan peralatan yang cukup, agar transisi darurat dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselerasi.

Provinsi Papua dengan kondisi geografisnya dan juga merupakan daerah yang memiliki banyak pulau – pulau kecil, dengan luas yang berbeda-beda serta termasuk dalam daerah yang cukup rawan bencana karena Papua secara geographly terletak pada Pacific Rim of fire yaitu kawasan di sekitar Lautan Pasifik yang berisiko mengalami kejadian bencana alam seperti erupsi gunung berapi dan gempa bumi, sehingga mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Melihat akan kondisi tersebut BPBD Provinsi Papua sering melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan BMKG dan juga RRI melalui program talkshow kantong yang biasanya disiarkan oleh RRI Jayapura – Papua.

Selain itu BPBD Provinsi Papua bekerja sama dengan BMKG juga memiliki alat deteksi dini tsunami yang ada di 2 (dua) titik di Kota Jayapura yang dihubungkan



dengan sirine peringatan tsunami, yang setiap tanggal 26 tiap bulannya sering dilakukan simulasi sirine peringatan tsunami, sebagai bagian dari pemeliharaan peralatan peringatan dini bencana tsunami.

Dibawah ini adalah data potensi bencana yang terjadi di Provinsi Papua, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Papua ini meliputi 13 (tiga belas) jenis bencana yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Jenis Bencana di Provinsi Papua

No.	Jenis Bencana
1	Banjir
2	Banjir Bandang
3	Cuaca Ekstrim
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi
5	Gempa Bumi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan
7	Kekeringan
8	Tanah Longsor
9	Tsunami
10	Epidemi dan Wabah Penyakit
11	Likuefaksi

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia, BNPB dan Hasil Analisis, 2020

Dengan penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana karena akan memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan.



Sasaran 26 :

Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Upaya Perlindungan Anak.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak” sebesar **101.545** Persen dengan predikat **Sangat Berhasil**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Target indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut :

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 26

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	80,01	81,64	102.03
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	65,01	65,70	101.06
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					101.545

Target Pengukuran Kinerja, Realisasi Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender Papua sampai dengan Tahun 2024, dimensi kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi terlihat meningkat dari tahun ke tahun walaupun sedikit. Namun demikian masih terdapat permasalahan di berbagai sector pembangunan, dimnesi IPM dan IPG Provinsi Papua masih berada di bawah rata-rata Nasional. Situasi ini berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia maupun di Provinsi Papua.



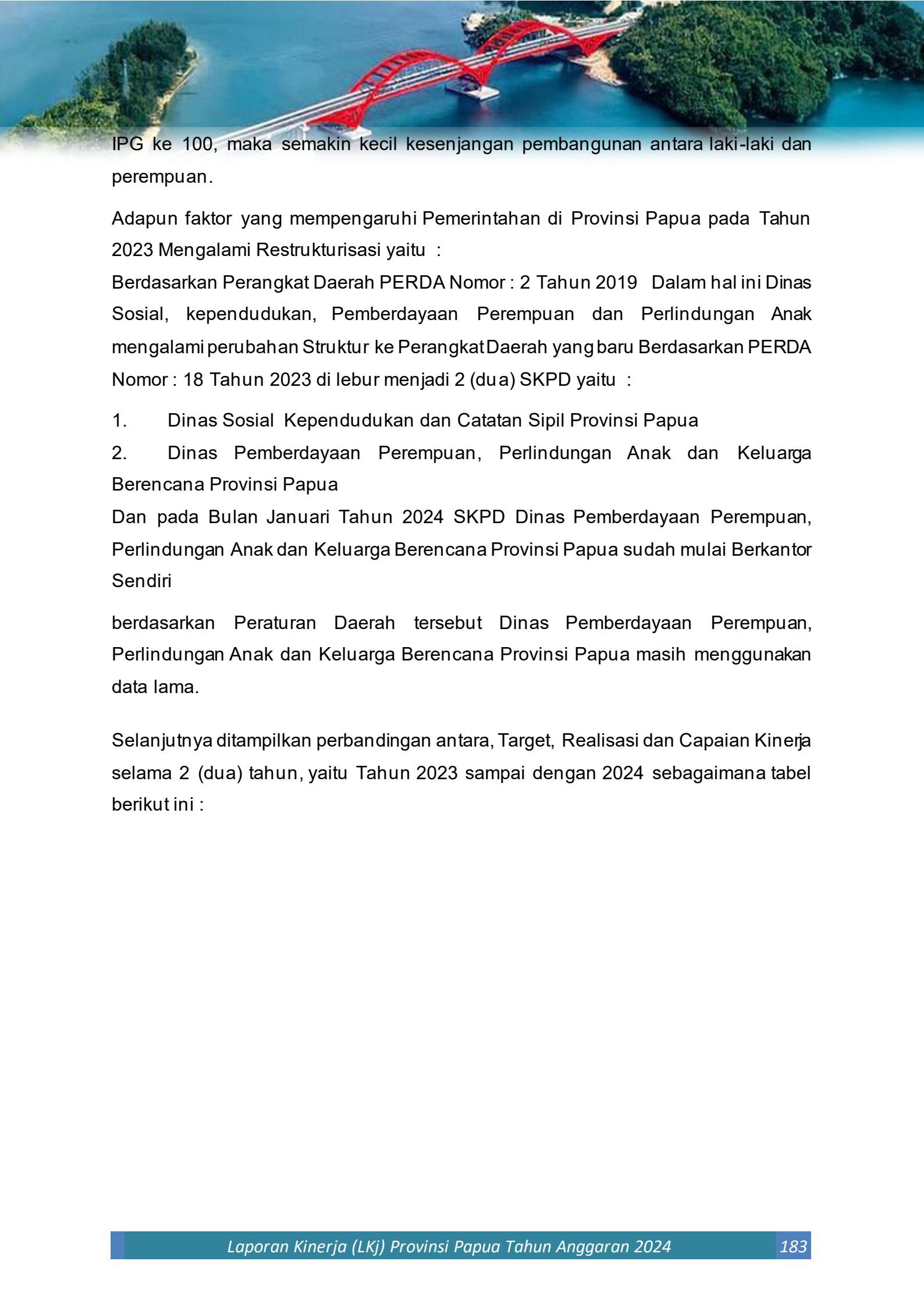
Sebelum dilakukan evaluasi target kinerja IPG 2024, perlu penjelasan/data pendukung terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),

**Tabel. Indeks Pembangunan Gender (IPG) /
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Mengukur Partipasi Laki-Laki & Perempuan Dalam Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi				
NO	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kota Jayapura	94.65	94.79	94.74
2	Kabupaten Jayapura	91.19	91.73	91.61
3	Kabupaten Biak Numfor	90.25	90.79	90.96
4	Kabupaten Kepulauan Yapen	89.15	90.25	89.90
5	Kabupaten Keerom	86.32	87.46	87.92
6	Kabupaten Sarmi	82.56	83.37	83.72
7	Kabupaten Mamberamo Raya	82.11	82.81	83.31
8	Kabupaten Supiori	76.78	77.88	78.27
9	Kabupaten Waropen	70.35	70.97	71.52
	Provinsi Papua	80.16	81.04	81.64
	Indonesia	91.27	91.63	91.85

Sumber : PMBG tahun 2024.

Tahun 2024 Indeks Pembangunan Papua mencapai 81,64 % atau meningkat 1,63 % dari target 80,01 %, dengan demikian capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender sebesar 102% dapat dikatakan berhasil melampaui target. Indeks Pembangunan Gender Papua masih lebih rendah 10,21 % dari capaian target seluruh provinsi Kab.Kota di Indonesia sebesar 91,85 %. Capaian kinerja ini merupakan hasil kinerja pemerintah daerah dalam mendorong pengarusutamaan gender di segala bidang. **IPG menggunakan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.** Perbedaannya adalah IPG lebih memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG dibentuk dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Penghitungan IPM terpilah gender ini membuat analisis kualitas pembangunan, baik pada laki-laki maupun perempuan dapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka



IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Adapun faktor yang mempengaruhi Pemerintahan di Provinsi Papua pada Tahun 2023 Mengalami Restrukturisasi yaitu :

Berdasarkan Perangkat Daerah PERDA Nomor : 2 Tahun 2019 Dalam hal ini Dinas Sosial, kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami perubahan Struktur ke Perangkat Daerah yang baru Berdasarkan PERDA Nomor : 18 Tahun 2023 di lebur menjadi 2 (dua) SKPD yaitu :

1. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua

Dan pada Bulan Januari Tahun 2024 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua sudah mulai Berkantor Sendiri

berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua masih menggunakan data lama.

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 2 (dua) tahun, yaitu Tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran 26
Tahun 2023-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN					
			2023			2024		
			TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	80,00	81,84	102.30	80,01	81,64	102.03
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,00	69,66	107.16	65,01	65,70	101.06
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					104.73			101.545

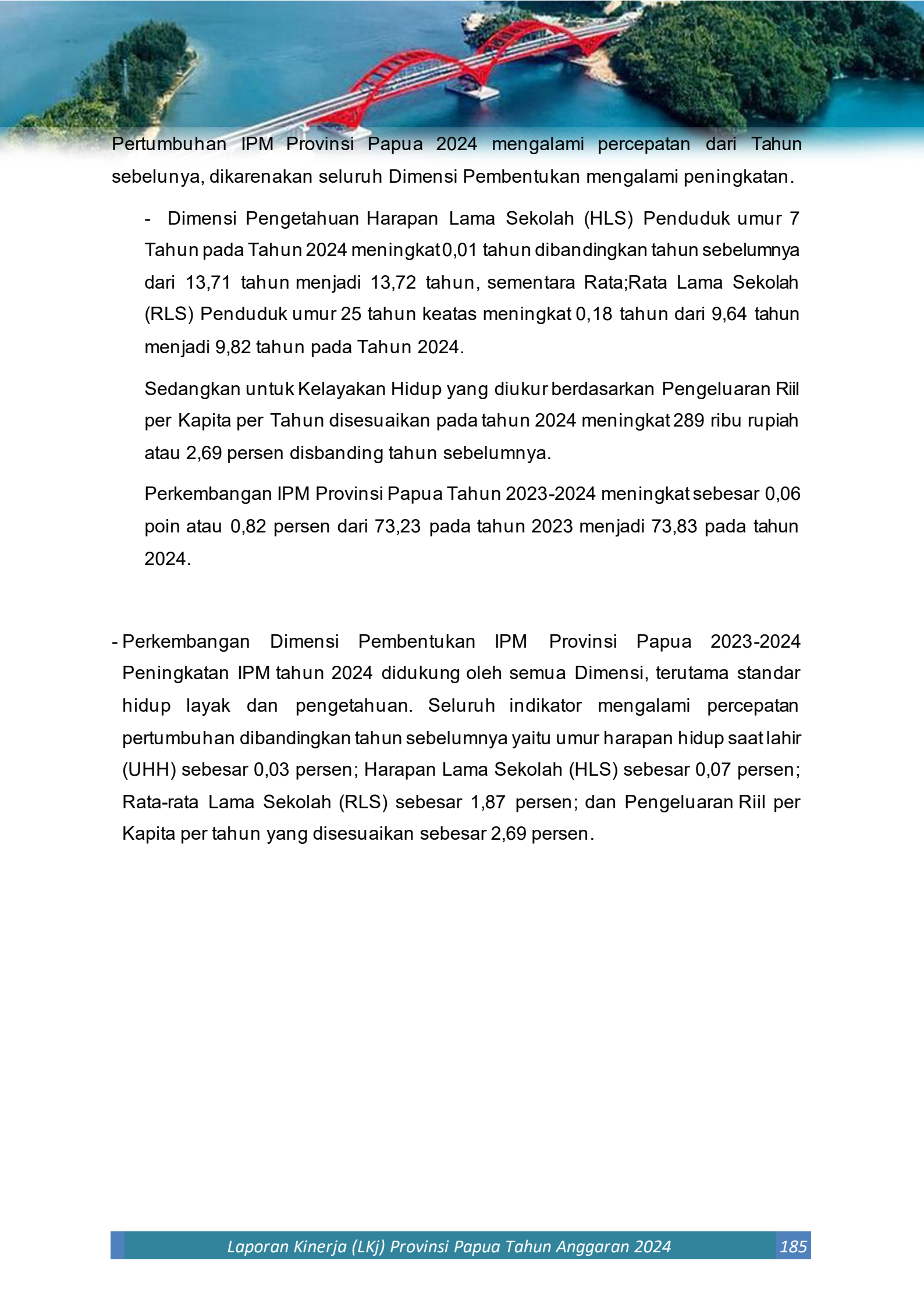
Sumber Data BPS Prov Papua

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2024 dengan capaian kinerja 102.03 dari Target 80,01 terealisasi 81,64 mengalami kenaikan sekitar 1.63 persen *artinya ini hampir mencapai* target IPG 100% atau 102.03 point akan tetapi secara keseluruhan telah berhasil memperoleh capaian kinerja 102.03 di tahun 2024. Perkembangan indeks pembangunan gender (IPG) 2024 mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan IPG tahun sebelumnya (2023) sebesar 81,64. Adapun penurunan indikator IPG dipengaruhi oleh :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)
2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
4. Pengeluaran Perkapita yang ditentukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2024 mencapai 73,83, meningkat 0,60 poin atau 8,82 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 73,23.

Selama 2023-2024, IPM Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 0,82 persen per tahun.



Pertumbuhan IPM Provinsi Papua 2024 mengalami percepatan dari Tahun sebelumnya, dikarenakan seluruh Dimensi Pembentukan mengalami peningkatan.

- Dimensi Pengetahuan Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk umur 7 Tahun pada Tahun 2024 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dari 13,71 tahun menjadi 13,72 tahun, sementara Rata;Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk umur 25 tahun keatas meningkat 0,18 tahun dari 9,64 tahun menjadi 9,82 tahun pada Tahun 2024.

Sedangkan untuk Kelayakan Hidup yang diukur berdasarkan Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun disesuaikan pada tahun 2024 meningkat 289 ribu rupiah atau 2,69 persen disbanding tahun sebelumnya.

Perkembangan IPM Provinsi Papua Tahun 2023-2024 meningkat sebesar 0,06 poin atau 0,82 persen dari 73,23 pada tahun 2023 menjadi 73,83 pada tahun 2024.

- Perkembangan Dimensi Pembentukan IPM Provinsi Papua 2023-2024
Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua Dimensi, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Seluruh indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH) sebesar 0,03 persen; Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,07 persen; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,87 persen; dan Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang disesuaikan sebesar 2,69 persen.



**Tabel. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua
dari Dimensi Penyusunan, 2023-2024**

Dimensi/Indikator	Satuan	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur Panjang dan Hidup Sehat Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	tahun	70,26	70,47
Pengetahuan Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun tahun	13,71 9,64	13,72 9,82
Standar Hidup Layak Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun disesuaikan	Ribu rupiah	10,748	11,037

- Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir, mempresentasikan dimensi umur Panjang dan Hidup Sehat terus meningkat dari tahun ke tahun . Pada Tahun 2023, UHH Provinsi Papua adalah 70,26 tahun dan pada Tahun 2024 mencapai 70,47 tahun. Tahun 2024 UHH Meningkat 0,21 tahun atau 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

- Dimensi Pengetahuan

Dimensi Pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua Indikator , yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama 2023. Kedua Indikator ini terus meningkat setiap tahun selama periode 2023 hingga 2024. HLS Provinsi Papua meningkat sebesar 0,01 tahun atau 0,07 persen, sementara RLS meningkat sebesar 0,18 tahun atau 1,87 persen.



- Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili Pembangunan Manusia adalah Standar Hidup Layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran Rill per Kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada Tahun 2024 Pengeluaran Rill per Kapita per tahun Provinsi Papua mencapai 11,04 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 289 ribu rupiah atau 2,69 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 10,75 juta rupiah.

- Capaian Pembangunan Manusia di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rendah (1) Sedang (4) Tinggi (3) Sangat Tinggi (1)

(IPM <60) (60≤IPM<70) (70≤IPM<80) (IPM≥80)

Pada Tingkat Kabupaten/Kota, jumlah Kabupaten/kota berstatus Pembangunan manusia “sangat tinggi” (IPM ≥ 80) hanya terdapat di kota Jayapura, status “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) sebanyak 3, berstatus “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 4, dan berstatus “rendah” (IPM < 60) sebanyak 1. IPM tertinggi pada tahun 2024 terdapat di kota Jayapura yang mencapai 81,98, sedangkan IPM terendah terdapat di Mamberamo Raya sebesar 59,48.

Tabel. IPM Pembentukan Kabupaten/Kota 2023-2024

Kabupaten /Kota	Umur Harapan Hidup Saat lahir 1 (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	70,23	70,48	14,58	14,59	10,32	10,57
Kepulauan Yapen	70,72	70,85	12,81	12,82	9,70	9,71
Biak Numfor	70,75	70,92	14,22	14,24	10,54	10,55
Sarmi	69,68	69,91	12,33	12,38	9,36	9,61
Keerom	69,73	69,95	12,46	12,52	8,57	8,58
Waropen	69,54	69,72	12,84	12,85	9,41	9,42
Supiori	69,37	69,62	13,19	13,2	9,2	9,21
Mamberamo Raya	68,75	68,95	11,83	12,04	6,28	6,49
Kota Jayapura	71,76	71,99	15,26	15,27	11,84	12,07
Provinsi Papua	70,26	70,47	13,71	13,72	9,64	9,82

Sumber Data BPS Provinsi Papua



Tabel. Kabupaten /Kota Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Rill per Kapita per Tahun (yang d disesuaikan)(ribu rupiah		IPM	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jayapura	10,671	10,848	74,74	75,32
Kepulauan Yapen	8,091	8,409	69,62	70,12
Biak Numfor	10,229	10,600	74,45	74,95
Sarmi	7,204	7,499	67,00	67,89
Keerom	9,545	9,967	69,25	69,87
Waropen	7,335	7,569	67,67	68,13
Supiori	6,259	6,474	65,84	66,37
Mamberamo Raya	5,105	5,298	58,49	59,48
Kota Jayapura	15,272	15,408	81,51	81,98
Provinsi Papua	10,748	11,037	73,23	73,83

Sumber Data BPS Provinsi Papua

2). Indekx Pemberdayaan Gender (IDG)

Pencapaian sasaran strategis Indeks Pemberdayaan Gender merupakan dampak dari keberhasilan kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam semua sector.

Sasaran strategis diatas menggambarkan adanya kesetaraan gender dipengaruhi oleh peningkatan pada dimensi Politik, Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan (Ekonomi) . Pengukuran kinerja Indeks



Pemberdayaan Gender (sumber data PMBG 2024) menggunakan capaian 2023 karena data IDG tahun 2024 belum keluar. Adapun pencapaian indeks Pemberdayaan gender Papua sebesar 65,70 poin meningkat 0,69 poin dari target 65,01 poin, sehingga dapat dikatakan IDG Papua masih di bawah rata-rata.

IPG memberikan gambaran perempuan dari 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran perkapita dari semua perempuan yang berada di Papua, yang apabila diurai maka akan nampak jelas bahwa perempuan asli Papua merupakan kelompok yang rentang, karena berada dibawah standar rata-rata yang dapat akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Maka kebijakan yang diambil pemerintah Papua melalui Kesetaraan Gender dalam memperkuat kapasitas perempuan adalah dengan pendekatan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di fokuskan bagi Perempuan.

**Tabel. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
PROVINSI PAPUA**

Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Kota Jayapura	80.25	75.55	77.65
Kabupaten Jayapura	70.20	69.50	70.20
Kabupaten Biak Numfor	68.87	69.84	70.71
Kabupaten Kepulauan Yapen	67.73	64.65	68.76
Kabupaten Keerom	59.83	54.04	63.87
Kabupaten Sarmi	72.92	68.85	70.73
Kabupaten Mamberamo Raya	59.29	55.13	54.83
Kabupaten Supiori	62.65	63.21	64.18
Kabupaten Waropen	50.39	50.86	55,92
Provinsi Papua	67.50	68.66	65.70
Indonesia	76.26	76.59	76.90

Tabel. Keterlibatan perempuan parlemen (%)

NO	Nama Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Kota Jayapura	25.64	22.50	23.08
2	Kabupaten Jayapura	16.00	16.00	16.00
3	Kabupaten Biak Numfor	24.00	24.00	24.00
4	Kabupaten Kepulauan Yapen	16.00	16.00	16.00
5	Kabupaten Keerom	5.56	5.00	10.00
6	Kabupaten Sarmi	20.00	20.00	20.00
7	Kabupaten Mamberamo Raya	15.00	15.00	15.79
8	Kabupaten Supiori	15.00	15.00	15.00
9	Kabupaten Waropen	5.00	5.00	5.00
10	Provinsi Papua	14.55	15.94	12.73

Tabel. Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)

NO	Nama Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Kota Jayapura	45.14	35.53	40.54
2	Kabupaten Jayapura	44.19	40.43	39.87
3	Kabupaten Biak Numfor	41.29	43.17	45.44
4	Kabupaten Kepulauan Yapen	33.70	25.83	32.41
5	Kabupaten Keerom	44.06	30.30	41.09
6	Kabupaten Sarmi	37.73	28.23	29.88
7	Kabupaten Mamberamo Raya	23.80	16.14	15.58
8	Kabupaten Supiori	38.11	36.76	37.51
9	Kabupaten Waropen	28.23	26.85	38.31
10	Provinsi Papua	37.36	34.91	35.77

Tabel. Sumbangan Pendapatan perempuan (%)

NO	Nama Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Kota Jayapura	43.77	34.64	35.24
2	Kabupaten Jayapura	33.99	33.85	33.29
3	Kabupaten Biak Numfor	30.20	30.56	31.04
4	Kabupaten Kepulauan Yapen	36.95	36.99	37.67
5	Kabupaten Keerom	33.15	36.64	35.47



6	Kabupaten Sarmi	36.77	35.38	35.61
7	Kabupaten Mamberamo Raya	39.84	39.35	41.69
8	Kabupaten Supiori	33.14	31.86	32.03
9	Kabupaten Waropen	33.51	33.85	35.75
10	Provinsi Papua	36.92	37.31	36.84

Sumber Data : BPMBG Tahun 2022/2023 dan 2024 Kemen PPA RI

Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu *keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan*. Meski sama- sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Kesempatan berpolitik bagi perempuan kelembagaan politik perempuan , bahkan di daerah harus memberikan peluang bagi perempuan dalam organisasi politik. Dan mendapat kesempatan yang sama untuk bersaing di kancah politik bersama dengan laki- laki. Namun peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat terobosan – terobosan membuka peluang bagi perempuan antara lain melakukan Kerjasama dengan KPU serta instansi lainnya untuk menjaring potensi sumberdaya perempuan untuk mengisi kekosongan kursi perempuan dalam kelembagaan politik, termasuk memberikan peluang yang sama untuk menduduki jabatan – jabatan penting dalam struktur pemerintah tentu dengan pertimbangan kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya.

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2024

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	PROGRAM-PROGRAM
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	42.016.005.191,00	40.360.730.281,00	96,06	
		4.548.651.435,00	4.541.639.521,00	99,85	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
		923.320.930,00	922.681.685,00	99,93	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
		31.133.674.926,00	29.624.389.423,00	95,15	Pengelolaan Pendidikan Khusus
		5.410.357.900,00	5.272.019.652,00	97,44	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
2	Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat	154.511.899.105,00	137.703.516.573,46	89,12	
		86.418.178.975,00	83.802.338.441,46	96,97	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		39.666.290.920,00	39.611.989.014,00	99,86	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		406.072.280,00	400.841.107,00	98,71	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		7.256.937.930,00	7.140.407.678,00	98,39	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
		19.454.415.000,00	5.444.038.753,00	27,98	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
		150.029.000,00	148.777.060,00	99,17	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
		1.109.975.000,00	1.106.082.520,00	99,65	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
		50.000.000,00	49.042.000,00	98,08	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber



					Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	48.833.575.180,00	47.027.334.002,00	96,30	
		44.240.838.500,00	42.472.280.892,00	96,00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
		3.292.876.680,00	3.283.909.240,00	99,73	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
		1.299.860.000,00	1.271.143.870,00	97,79	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	661.703.900,00	626.725.640,00	94,71	
		661.703.900,00	626.725.640,00	94,71	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	9.714.170.575,00	9.352.221.716,00	96,27	
		1.599.999.980,00	1.568.605.370,00	98,04	Penataan Prasarana Pertanian
		1.652.391.600,00	1.488.367.192,00	90,07	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		401.500.000,00	380.053.760,00	94,66	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
		500.399.920,00	497.174.100,00	99,36	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
		1.479.879.275,00	1.462.571.604,00	98,83	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
		4.079.999.800,00	3.955.449.690,00	96,95	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	20.340.829.975,00	17.111.700.730,00	84,12	
		18.990.866.485,00	15.762.172.540,00	83,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		1.349.963.490,00	1.349.528.190,00	99,97	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	278.831.365.090,00	271.087.218.659,00	97,22	



		7.991.877.130,00	7.429.771.751,00	92,97	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		268.864.629.670,00	261.747.422.837,00	97,35	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

		470.345.640,00	457.790.660,00	97,33	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		1.004.512.360,00	957.201.060,00	95,29	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		500.000.290,00	495.032.351,00	99,01	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	2.659.023.000,00	2.610.704.400,00	98,18	
		539.000.000,00	539.000.000,00	100,00	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus
		1.520.022.900,00	1.509.022.900,00	99,28	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
		600.000.100,00	562.681.500,00	93,78	Pelaksanaan Otonomi Daerah
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	8.974.565.375,00	8.042.479.022,00	89,61	
		2.682.625.030,00	2.688.355.387,00	100,21	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		1.093.511.005,00	770.521.245,00	70,46	Mutasi dan Promosi ASN
		5.098.179.240,00	4.483.452.390,00	87,94	Pengembangan Kompetensi ASN
		100.250.100,00	100.150.000,00	99,90	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur



10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	58.598.631.005,00	55.756.806.766,00	95,15	
		650.000.000,00	639.726.730,00	98,42	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		7.300.000.000,00	7.026.100.027,00	96,25	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		749.994.000,00	749.950.691,00	99,99	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		3.878.768.360,00	3.877.412.323,00	99,97	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		450.000.000,00	449.901.020,00	99,98	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		750.000.000,00	699.457.544,00	93,26	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		6.166.844.650,00	6.163.079.210,00	99,94	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		2.399.999.055,00	2.399.511.373,00	99,98	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		5.288.802.460,00	5.287.833.772,00	99,98	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		4.344.255.480,00	4.139.759.982,00	95,29	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		8.022.830.000,00	7.447.501.663,00	92,83	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
		6.497.736.000,00	4.929.709.145,00	75,87	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		4.999.829.000,00	4.933.863.553,00	98,68	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		7.099.572.000,00	7.012.999.733,00	98,78	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	53.469.168.000,00	49.828.657.405,00	93,19	
		14.451.462.000,00	14.213.538.760,00	98,35	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		2.112.880.000,00	2.092.544.790,00	99,04	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		1.984.374.000,00	1.913.773.194,00	96,44	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan



		5.622.935.000,00	5.221.851.195,00	92,87	Pendampingan dan Asistensi
		313.500.000,00	313.500.000,00	100,00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
		721.200.000,00	721.200.000,00	100,00	Pengawasan Penggunaan Anggaran
		348.800.000,00	348.800.000,00	100,00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
		22.916.545.000,00	20.065.091.736,00	87,56	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		4.997.472.000,00	4.938.357.730,00	98,82	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	21.760.939.285,00	20.521.069.627,42	94,30	
		899.975.140,00	898.440.360,34	99,83	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		1.349.793.000,00	1.305.315.870,00	96,70	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
		564.716.600,00	518.671.379,00	91,85	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
		1.996.545.610,00	1.890.462.660,00	94,69	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
		5.299.919.955,00	5.209.577.655,29	98,30	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
		9.099.988.980,00	8.169.678.014,94	98,30	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
		1.750.000.000,00	1.730.561.300,99	98,89	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
		800.000.000,00	798.362.386,86	99,80	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	16.016.947.110,00	15.360.545.676,53	95,90	
		12.567.299.674,00	12.128.314.147,53	96,51	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
		1.399.998.980,00	1.386.625.660,00	99,04	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
		2.049.648.456,00	1.845.605.869,00	90,04	Perbenihan Tanaman Hutan
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	20.352.953.834,00	19.934.309.070,80	97,94	



		827.052.000,00	826.291.091,00	99,91	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
		4.979.336.000,00	4.968.218.768,00	99,78	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
		5.939.351.020,00	5.555.703.952,06	93,54	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
		3.659.798.800,00	3.643.336.154,74	99,55	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
		2.097.726.780,00	2.094.467.804,00	99,84	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
		2.611.231.234,00	2.607.848.201,00	99,87	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
		238.458.000,00	238.443.100,00	99,99	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	6.967.204.588,00	6.917.059.858,00	99,28	
		199.999.875,00	199.999.875,00	100,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		328.526.030,00	328.526.030,00	100,00	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		599.999.800,00	599.999.800,00	100,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		1.305.363.628,00	1.298.858.628,00	99,50	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		549.998.165,00	516.779.310,00	93,96	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
		749.999.920,00	744.460.350,00	99,26	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		149.998.770,00	149.998.770,00	100,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
		199.999.745,00	199.999.745,00	100,00	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota



					(UMSK)
		449.983.295,00	449.983.295,00	100,00	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
		1.233.336.720,00	1.231.428.720,00	99,85	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		1.199.998.640,00	1.197.025.335,00	99,75	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	6.062.862.090,00	5.330.825.156,84	87,93	
		314.055.065,00	70.150.000,00	22,34	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
		199.869.820,00	193.414.300,00	96,77	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		285.786.000,00	0,00	0,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
		3.531.957.755,00	3.497.157.755,00	99,01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
		1.731.193.450,00	1.570.103.101,84	90,69	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	46.257.572.344,00	26.045.406.308,20	56,31	
		17.671.626.610,00	10.985.986.727,00	62,17	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
		6.232.469.560,00	1.647.682.320,20	26,44	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
		14.070.316.354,00	11.996.293.871,00	85,26	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
		8.283.159.820,00	1.415.443.390,00	17,09	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	19.849.198.567,00	3.831.291.843,72	19,30	
		19.849.198.567,00	3.831.291.843,72	19,30	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
19	Meningkatnya Ketersediaan	80.150.000.000,00	69.628.376.540,24	86,87	



	sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah				
		80.150.000.000,00	69.628.376.540,24	86,87	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1.019.008.000,00	988.147.850,00	96,97	
		1.019.008.000,00	988.147.850,00	96,97	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	3.000.450.000,00	3.000.058.653,00	99,99	
		1.000.450.000,00	1.000.058.653,00	99,96	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	923.997.330,00	921.385.050,00	99,72	
		799.997.330,00	798.635.050,00	99,83	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
		124.000.000,00	122.750.000,00	98,99	Penyediaan Profil Kependudukan
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	6.350.013.397,00	6.270.418.059,00	98,75	
		2.299.999.805,00	2.237.721.260,00	97,29	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama
		1.950.013.592,00	1.936.076.975,00	99,29	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
		600.000.000,00	598.710.000,00	99,79	Fasilitas Keprotokolan
		1.500.000.000,00	1.497.909.824,00	99,86	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
24	Meningkatnya	1.802.526.670,00	1.801.869.661,00	99,96	



	bantuan sosial PMKS				
		572.828.500,00	572.372.881,00	99,92	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
		1.229.698.170,00	1.229.496.780,00	99,98	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	130.543.274.132,00	110.521.225.741,35	84,66	
		126.995.850.140,00	106.981.203.143,35	84,24	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		648.204.400,00	647.260.010,00	99,85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		32.250.000,00	32.245.600,00	99,99	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
		322.349.690,00	320.849.690,00	99,53	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		770.832.470,00	769.983.738,00	99,89	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		1.374.785.950,00	1.371.520.340,00	99,76	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		399.001.482,00	398.163.220,00	99,79	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	1.193.524.394,00	1.190.998.224,00	99,79	



		366.802.950,00	366.802.950,00	100,00	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
		58.140.000,00	58.140.000,00	100,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
		382.778.954,00	380296034,00	99,35	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		135.802.490,00	135.759.240,00	99,97	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
	ANGGARAN PRIORITAS IKU	1.040.861.408.137,00	931.771.082.514,56	89,52	
	BELANJA LANGSUNG	3.191.963.348.582,00	2.774.707.875.291,91	86,93	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.063.903.789.403,00	932.705.787.067,00	87,67	
	TOTAL BL + BTL	4.255.867.137.985,00	3.707.413.662.358,91	87,11	

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2024 adalah Rp4.255.867.137.985,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp1.063.903.789.403,00 dan Belanja Langsung Rp3.191.963.348.582,00. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp1.040.861.408.137,00 atau 32,61% dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp931.771.082.514,56 dari realisasi belanja langsung atau 33,58%. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran APBD untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 25,13%. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 21,89% tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.



BAB IV





BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Provinsi Papua telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selaku penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua.

Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Biro, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melalui kegiatan masing-masing satuan kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan dan dicapai dalam Tahun 2024 adalah sbb :

**Tabel. Rekapitulasi 26 Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2024**

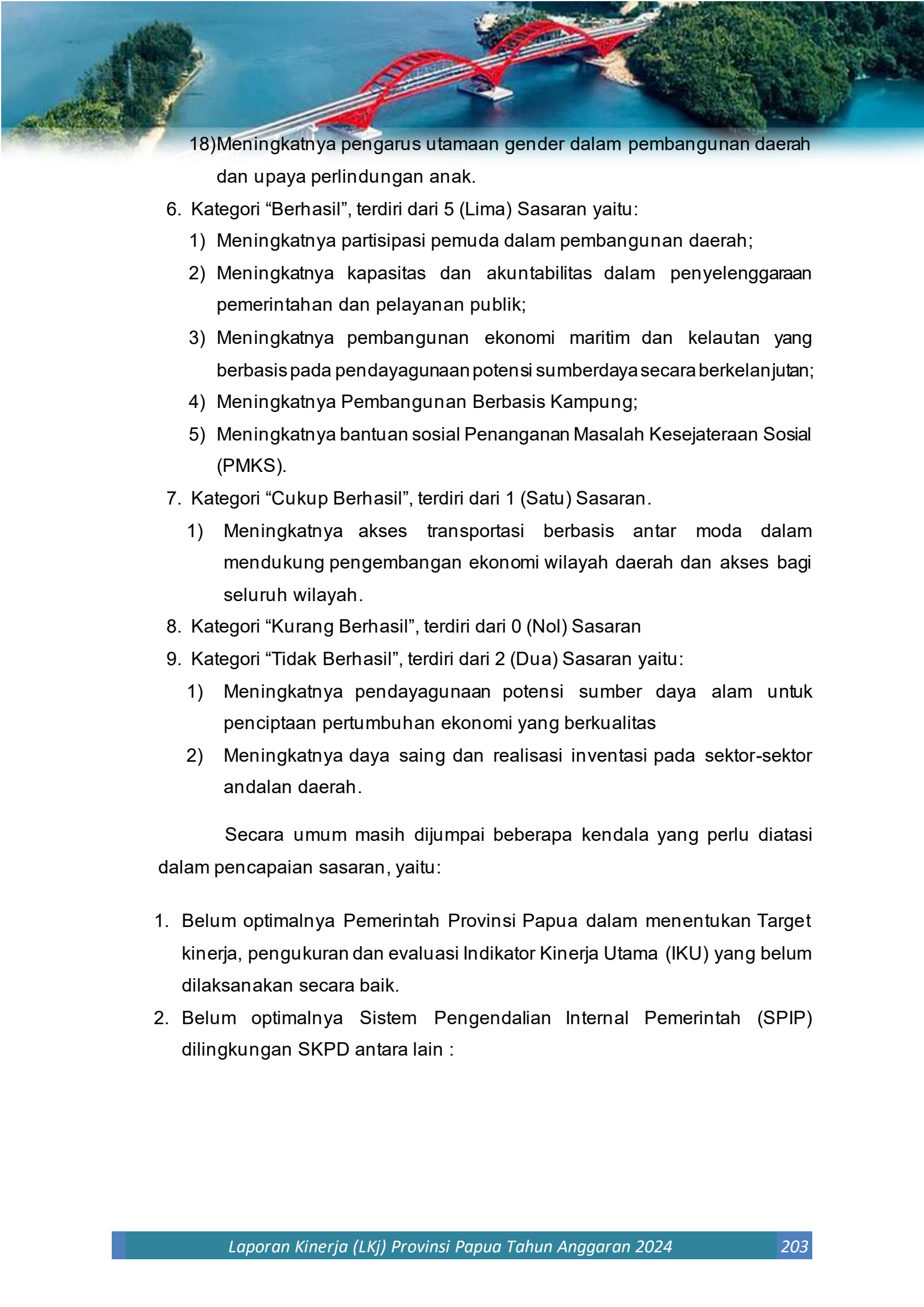
Keterangan	Jumlah
➤ Sasaran stratejik yang dilaksanakan dengan kategori :	26 sasaran
>Kategori "Sangat Berhasil"	18 sasaran
>Kategori "Berhasil"	5 sasaran
>Kategori "Cukup Berhasil"	1 sasaran
>Kategori "Kurang Berhasil"	0 sasaran
>Kategori "Tidak Berhasil"	2 sasaran
➤ Realisasi belanja pelaksanaan IKU	Rp931.771.082.514,56
>Prosentase realisasi belanja IKU terhadap anggaran IKU	33,58%
➤ Realisasi Belanja Langsung	Rp2.774.707.875.291.91
> Prosentase realisasi belanja langsung terhadap anggaran belanja langsung	86.93%



Realisasi keuangan tahun 2024 yang digunakan untuk melaksanakan 26 (Dua Puluh Enam) sasaran tersebut adalah sebesar Rp931.771.082.541,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.040.861.408.137,00

Penjelasan sasaran sesuai kategori adalah sebagai berikut :

5. Kategori “Sangat Berhasil”, terdiri dari 18 (Delapan Belas) Sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan;
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - 3) Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga;
 - 4) Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan;
 - 5) Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat;
 - 6) Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi;
 - 7) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua;
 - 8) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah;
 - 9) Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah;
 - 10) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim;
 - 11) Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - 12) Implementasi rencana tata ruang secara konsisten;
 - 13) Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah;
 - 14) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman;
 - 15) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP;
 - 16) Meningkatnya percepatan pembagunan wilayah perbatasan;
 - 17) Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;



- 18) Meningkatnya pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak.
6. Kategori “Berhasil”, terdiri dari 5 (Lima) Sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
 - 2) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan;
 - 4) Meningkatnya Pembangunan Berbasis Kampung;
 - 5) Meningkatnya bantuan sosial Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
7. Kategori “Cukup Berhasil”, terdiri dari 1 (Satu) Sasaran.
- 1) Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah daerah dan akses bagi seluruh wilayah.
8. Kategori “Kurang Berhasil”, terdiri dari 0 (Nol) Sasaran
9. Kategori “Tidak Berhasil”, terdiri dari 2 (Dua) Sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
 - 2) Meningkatnya daya saing dan realisasi inventasi pada sektor-sektor andalan daerah.

Secara umum masih dijumpai beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan Target kinerja, pengukuran dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum dilaksanakan secara baik.
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :



- 3) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.
- 4) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan.
3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja sasaran.

B. UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong pemangku kepentingan untuk selalu memperbaiki kualitas penyajian data dengan memperhatikan metode pengumpulan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu perlu ditingkatkan komitmen semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan isi Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani bersama antara Kepala SKPD dengan Gubernur sebagai Pimpinan Tertinggi di daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua, perlu juga dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada seluruh SKPD.
2. Memperbaiki target kinerja yang ditetapkan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil wilayah Papua.
3. Meningkatkan pemahaman pada seluruh pimpinan SKPD dan jajaran di bawahnya akan pentingnya penerapan SAKIP pada SKPD masing-masing



sehingga mempermudah dalam mengawal kinerja SKPD terutama dalam mencapai kinerja yang ditetapkan sesuai Visi Misi SKPD dan Visi Misi Gubernur.

4. Meningkatkan pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan antar instansi yang terkait.
6. Mengutamakan penganggaran untuk melaksanakan program kerja yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan
7. Mendorong Kepala SKPD untuk memanfaatkan Hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*).



Lampiran





GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah dan ukuran keberhasilan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Papua, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua;

12. Peraturan...../3

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode transisi 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran berhasil dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Pasal 3

- (1) IKU Provinsi merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh SKPD untuk :
 - a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - c. menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
 - d. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan;
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026.
- (2) IKU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

BAPPERIDA, Inspektorat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, berkewajiban melakukan :

- a. monitoring atas penerapan IKU Provinsi dan SKPD; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian IKU Provinsi dan SKPD untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...../5

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 7 Februari 2025
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 6 Februari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI PAPUA
PERIODE 2024 – 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
Misi 1:Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM			
1. Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk } i$ Keterangan : RLS : Rata-rata Lama Sekolah pada umur a ditahun t Lama sekolah penduduk i : Lama sekolah penduduk ke-i pada suatu wilayah n : Jumlah penduduk ($i = 1,2,3, \dots, n$)	Dinas Pendidikan
	2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i}$ Keterangan : HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a ditahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i : Usia ($a, a + 1, \dots, n$) FK : Faktor koreksi Sekolah	Dinas Pendidikan

			$FK = \frac{\text{jumlah Siswa sekolah dan mukim}}{\text{jumlah penduduk usia 7 tahun keatas}} + 1$ $\text{Rasio Siswa mukim} = \frac{\text{jumlah bermukim}}{\text{jumlah siswa seluruhnya}}$ $= \frac{\text{jumlah Siswa sekolah}}{\text{jumlah Siswa mukim}} \times \text{jumlah Siswa sekolah}$	
	3.	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf	Jumlah penduduk usia > 15 Tahun yang melek huruf Jumlah penduduk	$\times 100 \%$ Dinas Pendidikan,
2.		Angka Harapan Hidup	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua	Dinas Kesehatan
3.		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Jumlah atlet yang menerima penghargaan tingkat nasional Jumlah seluruh Atlet dalam pembinaan	$\times 100 \%$ Dinas Olahraga dan Pemuda
4.		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif Jumlah seluruh organisasi pemuda	$\times 100 \%$ Dinas Olahraga dan Pemuda
5.	1.	Cakupan daerah rawan pangan	Jumlah Kabupaten/Kota yg rawan pangan	Dinas Tanaman Pangan, Holikultura dan Pangan

	2.	Pengeluaran PerKapita yang Disesuaikan	<u>Indeks harga yang dibayar petani</u> Indeks harga yang diterima petani	Dinas Tanaman Pangan, Holikultura dan Pangan
--	----	--	--	--

Misi 2 : Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

1.	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesiftas masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	<u>Konflik yang tertangani</u> Jumlah konflik	X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk	
2.	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1.	Nilai skor aspek kebebasan sipil	<u>Permohonan Ijin yang diberikan</u> Jumlah Permohonan Ijin yang masuk	X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
		2.	Nilai skor aspek hak-hak politik	Realisasi Hak-Hak Politik dalam UU OTSUS Papua		Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
		3.	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Jumlah Lembaga Demokrasi yanggmendapat Ijin / Jumlah Lembaga Demokrasi yang terdaftar.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politk

Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

1.	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Tingkat capaian realisasi program-program OTsus yang direncanakan	Rata-Rata Realisasi Program OTSUS (Fisik dan Keuangan) Rata-Rata Target Pencapaian Program OTSUS	X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
----	---	---	--	---------	---

2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Capaian Nilai SAKIP	Sesuai rumusan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KEMENPAN dan RB RI	Biro Organisasi
		2.	Capaian Implementasi e-Government terintegrasi (masuk ke e-planning dll ke program)		
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah.	1.	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program RKPD yang sesuai RPJMD Tahun berkenaan $\frac{\text{Jumlah program RPJMD yg hrs dilaksanakan Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yg hrs dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100 \%$	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		2.	Tingkat konsistensi KUAPPs terhadap RKPD	Jumlah program keg sub keg RKPD Tahun berkenaan $\frac{\text{Jumlah program keg sub keg KUPPAS Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Sub Keg Tahun berkenaan}} \times 100 \%$	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		3.	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP	$\frac{\text{Jumlah Sub Keg Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Sub Keg RKPD Tahun Berkenan}} \times 100 \%$	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4.	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Sesuai rumusan penilaian evaluasi LKPD oleh BPK RI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		2.	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$	Badan Pendapatan Daerah
		3.	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah (IPPD)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi IPPD}}{\text{Target IPPD}} \times 100 \%$	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Misi 4 : Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural dan Berkelanjutan

1. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1.	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	PDRB sektor Tanaman Pangan Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Tanaman Pangan, Holikultura dan Pangan
	2.	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	PDRB sub sektor perkebunan dan hasilnya tahun ybs Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	3.	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	PDRB sub sektor peternakan Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	1.	Indeks Kualitas Udara	IKU = $100 - [50/0,9 \times (Ieu - 0,1)]$ Keterangan: IKU = indeks kualitas udara Ieu = indeks European union 0 - 50 = Baik 51 - 100 = Sedang 101 - 199 = Tidak sehat 200 - 299 = Sangat tidak Sehat ≥ 300 = Berbahaya	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksinmitigasi perubahan iklim	2.	Indeks Kualitas Air	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{maksimum}}{2}}$	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

3.			Keterangan : Nilai relative = $\left(\frac{Ci}{\sum Li} \right)$ Ci = konsentrasi parameter air Li = konsentrasi $0 < Pj \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 \leq Pj \leq 5,0 \rightarrow$ cemara ringan $5,0 \leq Pj \leq 10,0 \rightarrow$ cemara sedang $Pj > 10,0 \rightarrow$ cemara berat	
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKTL = $100 - [(84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}]$ Keterangan : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		4.	Intensitas penurunan emisi $\frac{\text{Jumlah Emisi CO}_2 \text{ tahun ybs}}{\text{PDRB tln ybs}} \times 100 \%$	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		1.	Kontribusi sub Sektor perikanan terhadap PDRB $\frac{\text{PDRB sub sektor Perikanan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2.	Kontribusi (STC) SIL Teluk Cenderawasih terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM. $\frac{\text{Realisasi Jumlah Even Kegiatan}}{\text{Target Jumlah Even Kegiatan}} \times 100 \%$	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.	

4.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.		Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah Penduduk yang bekerja	X 100 %	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor dalam daerah.		Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Nilai investasi PMDN tahun ybs-Nilai investasi PMDN tahun lalu	X 100 %	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi baik/ Total Panjang Jalan Provinsi	X 100 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Jumlah Program RKKPD Jumlah Program Rencana Tata Ruang (RT)/ Rencana Wilayah (RW)	X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
8.	Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.		Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Jumlah sumber daya air yang dimanfaatkan Jumlah sumber daya air yang tersedia	X 100 %	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

9.	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan permukiman.	1.	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik.	Penduduk yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah Penduduk yang ada	X 100 %	Dinas Kesehatan
		2.	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Jumlah RT/KK yang mendapatkan layanan air bersih Jumlah RT/KK di Provinsi Papua	X 100 %	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 5 : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu						
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung.	Indeks Kampung Membangun	Jumlah Kampung Berkembang Total Jumlah Kampung	X 100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat	

2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Orang Asli Papua (OAP)	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan Dasar OAP yaitu pada Empat (4) Sektor Utama dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur).	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
3.	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.	1.	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	(jumlah siswa SD X 6 tahun) + (jumlah Siswa SMP X 9 tahun) + (jumlah Siswa SMA/SMK/SLB X 12 tahun)) jumlah Penduduk usia 9 tahun ke atas di wilayah perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
		2.	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua di wilayah perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
		3.	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	$Y = p/q$ Y = Pengeluaran Perkapita Wilayah Perbatasan p = Pengeluaran Rumah Tangga sebulan Wilayah Perbatasan q = Jumlah anggota Rumah Tangga Wilayah Perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
4.	Meningkatnya bantuan sosial PMKS.	1.	Cakupan Warga KAT (komunitas Adat Terpencil) yang menerima kesejahteraannya (diberdayakan)	Jumlah KAT yang mendapat <u>Pembinaan</u> Jumlah KAT yang belum tertangani $X 100 \%$	Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil

	2.	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil
5.		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ $\text{Risk} = \text{Indeks Resiko Bencana}$ $\text{Hazard} = \text{Bahaya}$ $\text{Vulnerability} = \text{Kerentanan}$ $\text{Capacity} = \text{Kapasitas}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG diukur dengan menggunakan rasio $\text{IPG} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}}$ Hasil IPG semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki (angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna, dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.		

	2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{I(par) + I(DM) + I(inc-dis))}{3}$ Menjumlahkan Indeks keterampilan perempuan dalam parlemen, indeks pengambilan keputusan dan indeks distribusi pendapatan dibagi 3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
--	----	-------------------------------------	---	---

PJ. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.I.P., M.Si
MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum
NIP. 19741205 200212 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si

Jabatan : Pj. GUBERNUR PAPUA

Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 15 Agustus 2024


RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Burn)

PERJANJIAN KINERJA (PK) PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.42
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.23
		3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	80.8
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	70.4
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	15
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	76.2
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.0
		2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7610
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78.68
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	95.0
		2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	50.0
		3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60.0

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>	<u>4</u>
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua		Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	%	100
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB
		2	Capaian implementasi e- government	%	95.00
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPD	Persen	95.0
		2	Tingkat konsistensi KUAPPAS terhadap RKPD	Persen	95.0
		3	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP	Persen	95.0
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
		2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	14.27
		3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Persen	66.1
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	5.5
		2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	6.0
		3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	6.0

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>	<u>4</u>
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95.0
		2	Indeks Kualitas Air	Indeks	80.0
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85.0
		4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/ Rupiah	63160.5
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	1	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	12.1
		2	Kontribusi Sail Teluk Cenderawasih (SIL) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM)	STC/Tahun	40
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91.62
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah		Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	64.93
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	60.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>	<u>4</u>
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten		Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	50.00
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah		Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	81.00
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	41.00
		2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	45.5
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung		Indeks Desa Membangun	Indeks	52.00
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	73.5
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	12.05
		2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	68.8
		3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	14.1
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	1	Cakupan Warga KAT yang meningkat Kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per Tahun	60
		2	Cakupan PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	ribu orang per tahun	60

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>	<u>4</u>
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	80.01
		2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65.01

Jayapura, 15 Agustus 2024

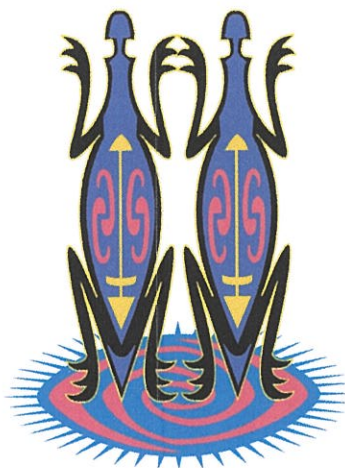

 GUBERNUR PAPUA
 RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
 MAYJEN (Burn)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura - Papua Kode Pos 99115,
Email : papuaitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com

LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA (LKJ) PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024



NOMOR : X.700/2/032/LHR-ITPROV/2025
TANGGAL : 13 MARET 2025



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua Kode Pos 99115
Email: papuitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
Website: <http://www.inspektorat.papua.go.id/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintahan Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Papua.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas atas Laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jayapura, 12 Maret 2025

Pt, INSPEKTUR

F. DANNY M.K KORWA, STP., MH

PEMBINA TK I

NIP. 19750115 200312 1 007

FORMULIR CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check list
I	Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah	✓

		sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua 99115,
Email: papuitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
<http://www.inspektorat.papua.go.id/>

Jayapura, 13 Maret 2025

Nomor : X.700/2/032/LHR-ITPROV/2025
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu
Laporan Kinerja Provinsi Papua
Tahun 2024

Yth. Gubernur Papua

di –

Jayapura

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024.

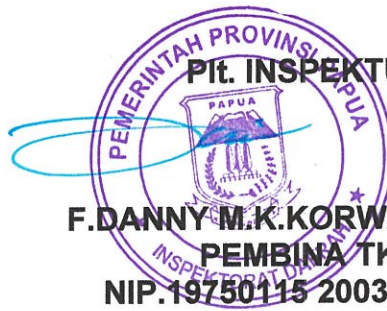
Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah :

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan revidu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil revidu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.

Demikian hasil revidu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.


Pt. INSPEKTUR
F.DANNY M.K.KORWA,STP.,MH
PEMBINA TK I
NIP.19750115 200312 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Papua di Jayapura;
2. Sekterariat Daerah Provinsi Papua di Jayapura.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua 99115,
Email: papuaitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
http://www.inspektorat.papua.go.id/

SURAT PERINTAH

Nomor : X.700/2/111/SP-ITPROV/2025

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 06 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua;
7. Nota Dinas Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Nomor 061/41/Ro.Orgs tanggal 10 Maret 2025, Perihal Permohonan Reviu Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua Tahun 2024;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. F. Danny M.K Korwa, STP., MH : Penanggung Jawab
2. Drs. Anggiat Situmorang, M.Si., Ak., CA., QIA., CFA : Pengendali Mutu
3. Kamaruddin, S.IP : Wakil Penanggung Jawab
4. Erma G. Listianty, SH : Pengendali Teknis
5. Novelia Pugu, SE., M.Si., CFA : Ketua Tim
6. Hermanus F. Werimon, S.A.P., M.M : Anggota
- Untuk : 1. Seterimanya Surat Perintah ini, segera melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Instansi (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 dengan ketentuan :
a. Lamanya Penugasan : 7 (tujuh) hari kerja;
b. Beban Biaya : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2025.
2. Segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur Papua;
3. Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Papua dilarang menerima gratifikasi;
4. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

Pt. INSPEKTUR PROVINSI PAPUA

F. DANNY M.K KORWA, STP., MH

PEMBINA TK. I

NIP. 19750115 200312 1 007

Nomor : B/43/RB.04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024**

26 Februari 2025

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian;
3. Sekretaris Kementerian;
4. Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Asisten Perencanaan Umum Mabes TNI;
6. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran POLRI;
7. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan RI;
8. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
9. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI;
10. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, kami bermaksud menyampaikan informasi Hasil Evaluasi Sementara atas Capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluator, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Hasil Evaluasi Sementara:
Hasil evaluasi sementara dapat diakses melalui laman www.portalrb.id mulai Rabu, 26 Februari 2025. Adapun catatan evaluasi yang belum muncul akan diperbarui, mohon untuk diperiksa secara berkala.
- Masa Sanggah:
Instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil evaluasi sementara dalam kurun waktu sepuluh (10) hari kerja, yaitu pada tanggal 27 Februari 2025 s.d. 12 Maret 2025. **Sanggahan disampaikan secara tertulis dengan bukti dukung yang valid kepada kementerian/lembaga meso/pengampu indikator.** Selanjutnya, kementerian/lembaga meso akan menyampaikan hasil sanggah kepada Kementerian PANRB selaku Tim Evaluator Nasional sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan.
- Ekspose Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Final:
Setelah masa sanggah selesai, akan dilakukan ekspose hasil evaluasi reformasi birokrasi final secara daring (waktu dan media penyampaian akan disampaikan kemudian). Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil akhir evaluasi serta rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah.

Kami mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh instansi dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi Nasional.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250224QABU



Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

NIP. 196808021998031001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250224QABU



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

 Beranda

 Dokumen

 Rencana Aksi ▾

 Evaluasi ▴

 Hasil Evaluasi

 Hasil Evaluasi 2023

 Profil

 Logout

Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua

RB General Awal	51.61
Koefisien	0
RB General	51.61
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	51.61
RB Tematik	4.25
Index RB	55.86
File Berkas	



PDF



Excel

Show 10 ▾ entries

Search:

No. +	Komponen ▾	Sub Komponen ▾	Indikator Penilaian ▾	Bobot	Skor ▾	Skor Index ▾	Catatan ▾	Rekomendasi ▾
-------	------------	-------------------	--------------------------	-------	--------	-----------------	-----------	---------------

Nomor : B/541/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Provinsi Papua**
Di
Jayapura

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Provinsi Papua, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dan PD telah menyampaikan laporan kinerja atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada esr.menpan.go.id secara tepat waktu;
- b. PD telah menyampaikan rencana aksi dan rencana kerjanya sebagai turunan dari dokumen perjanjian kinerja yang telah disusun pada esr.menpan.go.id.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan nilai **66,85** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"baik"**, yaitu implementasi **AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	21,30	21,30
2. Pengukuran Kinerja	30	16,96	17,50
3. Pelaporan Kinerja	15	10,25	10,29
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	17,76
Nilai Hasil Evaluasi	100	66,26	66,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun dokumen perencanaan kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah dan tingkat unit kerja di bawahnya. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya:

- a. Masih terdapat dokumen perencanaan kinerja (perjanjian kinerja dan RPD) pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah yang belum disampaikan pada esr.menpan.go.id, sebagai contoh PK

Gubernur 2024, dan PK Kepala Dinas Sosial 2024;

- b. Dokumen perjanjian kinerja pada sebagian PD masih belum sepenuhnya sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Masih terdapat sasaran strategis pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) pada level kinerjanya, contoh:
 - Pada Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur 2023 salah satu sasaran strategisnya yaitu meningkatnya bantuan sosial PMKS, sasaran strategis tersebut belum berorientasi hasil (*outcome*) untuk menjadi kinerja level Kepala Daerah, karena lebih tepat menjadi kinerja Perangkat Daerah teknis;
 - Pada PK Kepala Dinas kehutanan dan lingkungan hidup tahun 2024 dengan sasaran strategis tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD, Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD, sasaran-sasaran strategis tersebut belum berorientasi hasil karena masih fokus pada pelaksanaan kegiatan dan belum menggambarkan kondisi positif apa yang ingin diwujudkan.
- d. Belum seluruh rumusan indikator kinerja memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) serta cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis, contoh:
 - Pada sasaran strategis di PK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024, yaitu “meningkatnya pemanfaatan informasi untuk mendukung e-government, penyediaan data dan informasi bagi Pemerintah dan Informasi bagi pemerintah dan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik”, dengan indikator rata-rata persentase pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang layanan, indikator tersebut dinilai belum memenuhi kriteria SMART khususnya pada kriteria *relevant*;
 - Pada sasaran strategis PK Kepala Dinas Perhubungan meningkatnya aksesibilitas transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah dengan indikator persentase jumlah arus barang dan orang keluar masuk wilayah Papua, indikator tersebut belum memenuhi kriteria SMART dan cukup khususnya pada kriteria relevan dan cukup.

- e. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya berdasarkan *logical framework/prinsip* logis yang sebelumnya telah disusun menggambarkan hubungan kausalitas, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- f. Implementasi penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga mengakibatkan penetapan kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan level jabatannya;
- g. Penetapan rencana aksi PD belum menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan.

2) Pengukuran Kinerja

Provinsi Papua dan Perangkat Daerahnya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya:

- a. Ketidakselarasan antara dokumen Indikator Kinerja Utama PD dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- b. Masih terdapat rumusan formulasi perhitungan indikator kinerja utama yang tidak sesuai dengan indikator kinerja, contoh IKU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja pada indikator Jumlah UKM yang berkembang dengan formulasi perhitungan jumlah UMKM tahun n dikurangi jumlah UMKM tahun n-1, formulasi perhitungan tersebut dinilai kurang sesuai untuk menghitung indikator kinerja UKM yang berkembang;
- c. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
- d. Pemerintah daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai salah satu dasar pemberian *reward and punishment*.

3) Pelaporan Kinerja

Provinsi Papua telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat pemda maupun tingkat perangkat daerah (PD). Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya:

- a. Terdapat ketidakselarasan antara kinerja yang disampaikan realisasinya pada Lakin PD dengan kinerja yang ditetapkan pada PK PD tersebut, contoh pada Lakin Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 di mana realisasi kinerja yang disampaikan pada bab III adalah jumlah pengadaan multimedia, jumlah multimedia terpelihara, jumlah layanan transponder dan sebagainya, Namun demikian, kinerja yang ditetapkan di PK Kepala Dinas Kominfo tahun 2023 adalah Indeks SPBE, rata-rata persentase pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang layanan, persentase layanan data dan informasi kinerja;
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan target kinerja tahun berjalan yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya, contoh pada Dinas Ketahanan Pangan yang menetapkan target indikator kinerja penguatan cadangan pangan daerah pada tahun 2024 yaitu 40 ton, sedangkan capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sudah mencapai 43,40 ton;
- c. Lakin pada sebagian besar PD masih belum menyajikan analisis keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah (PD). Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya:

- a. Laporan hasil evaluasi dinilai belum memberikan rekomendasi yang cukup dan belum menyasar secara langsung akar permasalahan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;
- b. Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan seluruh dokumen perencanaan kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah hingga seluruh PD disampaikan pada esr.menpan.go.id;
- 2) Mereviu kembali dokumen perjanjian kinerja pada PD agar sesuai dengan

format pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Merevisi kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja sehingga strategisnya lebih berorientasi *outcome* pada level kinerjanya dan memastikan indikator kinerja yang digunakan relevan dan memberikan *continuous improvement* pada pencapaian kinerja;
- 4) Melakukan revidi dan perbaikan dokumen pohon kinerja (*cascading*) baik di level Pemerintah Daerah maupun di level PD untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam upaya menyelesaikan isu strategis daerah. Selanjutnya *cascading* yang telah disusun tersebut diimplementasikan pada dokumen perencanaan kinerja PD;
- 5) Merevisi kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD, dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan kegiatan-kegiatan/aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- 6) Memastikan kembali keselarasan pada perencanaan kinerja PD antara dokumen Renstra, PK dengan IKU;
- 7) Memastikan seluruh indikator kinerja utama telah dilengkapi dengan formulasi perhitungan dan sumber data untuk memastikan keandalan dan validitas pengukuran, serta memastikan seluruh formulasi perhitungan sudah tepat untuk menghitung indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- 8) Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja dan pengumpulan data kinerja yang terintegrasi;
- 9) Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan menyampaikan data capaian indikator kinerja utama sehingga bukan hanya capaian program dan realisasi anggaran saja;
- 10) Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja, dan menjadikan capaian indikator kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang, baik yang masih berada di bawah 75 % maupun yang sudah berada di atas kategori tersebut;
- 11) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemda maupun PD dengan menyajikan

updated data kinerja yang lengkap, analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi beserta solusinya, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;

- 12) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
- 13) Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil capaian kinerja PD dan evaluasi SAKIP internal sehingga dapat menjadi penyemangat setiap Perangkat Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Papua



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 659TAHUN 2024

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024;

b. bahwa hasil evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024, telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672);
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 238 tentang Penetapan Unit Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Lampiran
Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 659 Tahun 2024

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

A. PROVINSI

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
1.	Provinsi Jawa Barat	4,63	4,81	4,84	4,76	A
2.	Provinsi Jawa Timur	4,75	4,59	4,54	4,63	A
3.	Provinsi D.I. Yogyakarta	4,62	4,64	4,59	4,62	A
4.	Provinsi Sumatera Selatan	4,37	4,67	4,76	4,60	A
5.	Provinsi Kalimantan Selatan	4,52	4,61	4,54	4,56	A
6.	Provinsi Jawa Tengah	4,46	4,62	4,52	4,53	A

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
7.	Provinsi DKI Jakarta	4,63	4,59	4,37	4,53	A
8.	Provinsi Aceh	4,51	4,65	4,19	4,45	A-
9.	Provinsi NTB	4,33	4,63	4,3	4,42	A-
10.	Provinsi Bali	4,11	4,65	4,46	4,41	A-
11.	Provinsi Sulawesi Tengah	4,46	3,97	4,59	4,34	A-
12.	Provinsi Kalimantan Barat	4,11	4,35	4,33	3,89	A-
13.	Provinsi Kepulauan Riau	3,92	4,22	4,65	4,26	A-
14.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,52	4,31	3,86	4,23	A-
15.	Provinsi Kalimantan Utara	3,94	4,51	4,21	4,22	A-
16.	Provinsi Sulawesi Utara	3,72	4,52	4,37	4,20	A-
17.	Provinsi Lampung	4,04	4,11	4,26	4,14	A-
18.	Provinsi Riau	3,79	4,28	4,3	4,12	A-
19.	Provinsi Sulawesi Selatan	3,96	4,54	3,86	4,12	A-
20.	Provinsi Gorontalo	4,12	4,2	3,79	4,04	A-
21.	Provinsi Bengkulu	3,54	3,82	4,45	3,94	B
22.	Provinsi Sumatera Utara	4,07	3,72	3,9	3,90	B
23.	Provinsi Kalimantan Timur	3,08	4,24	3,93	3,75	B
24.	Provinsi Banten	3,63	4,22	3,35	3,73	B
25.	Provinsi Sumatera Barat	2,83	4,49	3,59	3,64	B

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
26.	Provinsi Jambi	3,24	4,21	3,57	3,67	B
27.	Provinsi NTT	3,33	4,07	3,28	3,56	B
28.	Provinsi Papua Barat	*NA	3,25	3,39	3,32	B-
29.	Provinsi Sulawesi Barat	3,23	3,92	2,81	3,32	B-
30.	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,32	3,91	2,25	2,83	C
31.	Provinsi Maluku Utara	2,49	3,7	2,22	2,80	C
32.	Provinsi Kalimantan Tengah	2,71	3,03	2,27	2,67	C
33.	Provinsi Maluku	4,63	2,34	1,36	2,18	C-

B. KOTA

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
1.	Kota Surakarta	4,77	4,51	4,51	4,69	A
2.	Kota Bandung	4,83	4,45	4,45	4,68	A
3.	Kota Madiun	4,63	4,63	4,73	4,67	A
4.	Kota Depok	4,64	4,73	4,63	4,67	A
5.	Kota Palembang	4,45	4,89	4,89	4,66	A
6.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4,61	4,76	4,76	4,66	A
7.	Kota Denpasar	4,52	4,71	4,71	4,66	A
8.	Kota Bogor	4,62	4,72	4,72	4,65	A
9.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4,59	4,67	4,67	4,65	A
10.	Kota Salatiga	4,71	4,51	4,51	4,62	A
11.	Kota Sukabumi	4,6	4,66	4,66	4,62	A
12.	Kota Magelang	4,73	4,68	4,68	4,61	A
13.	Kota Metro	4,32	4,70	4,70	4,60	A
14.	Kota Kotamobagu	4,42	4,74	4,74	4,59	A
15.	Kota Bekasi	4,56	4,55	4,55	4,58	A
16.	Kota Cimahi	4,76	4,36	4,36	4,58	A

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
17.	Kota Surabaya	4,4	4,44	4,69	4,57	A
18.	Kota Malang	4,55	4,69	4,44	4,57	A
19.	Kota Banjarmasin	4,58	4,49	4,49	4,54	A
20.	Kota Yogyakarta	4,02	4,83	4,83	4,53	A
21.	Kota Pasuruan	4,57	4,63	4,63	4,53	A
22.	Kota Blitar	4,6	4,28	4,28	4,52	A
23.	Kota Banjar	4,56	4,55	4,55	4,52	A
24.	Kota Medan	4,33	4,50	4,50	4,51	A
25.	Kota Banjarbaru	4,2	4,64	4,64	4,50	A-
26.	Kota Payakumbuh	4,51	4,48	4,48	4,50	A-
27.	Kota Tomohon	4,37	4,57	4,57	4,50	A-
28.	Kota Administrasi Jakarta Timur	4,42	4,64	4,64	4,49	A-
29.	Kota Tegal	4,26	4,68	4,68	4,49	A-
30.	Kota Mataram	4,42	4,55	4,55	4,48	A-
31.	Kota Bitung	4,39	4,51	4,51	4,47	A-
32.	Kota Manado	4,18	4,74	4,74	4,46	A-
33.	Kota Prabumulih	4,43	4,49	4,49	4,46	A-
34.	Kota Singkawang	4,46	4,51	4,51	4,46	A-
35.	Kota Lubuklinggau	4,25	4,55	4,55	4,44	A-
36.	Kota Semarang	4,17	4,74	4,74	4,43	A-

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
37.	Kota Tanjungpinang	4,21	4,50	4,50	4,40	A-
38.	Kota Gunungsitoli	4,65	*NA	4,13	4,39	A-
39.	Kota Administrasi Jakarta Utara	4,41	4,38	4,38	4,39	A-
40.	Kota Banda Aceh	3,93	4,48	4,48	4,38	A-
41.	Kota Tangerang	4,37	4,42	4,42	4,35	A-
42.	Kota Pontianak	4,09	4,49	4,49	4,35	A-
43.	Kota Bandar lampung	3,9	4,47	4,47	4,33	A-
44.	Kota Administrasi Jakarta Barat	4,56	3,93	3,93	4,32	A-
45.	Kota Pariaman	4,22	4,21	4,21	4,32	A-
46.	Kota Tasikmalaya	4,1	4,55	4,55	4,30	A-
47.	Kota Pekalongan	4,44	4,10	4,10	4,29	A-
48.	Kota Bontang	4,19	4,39	4,39	4,28	A-
49.	Kota Samarinda	3,71	4,52	4,52	4,26	A-
50.	Kota Pekanbaru	3,79	4,17	4,17	4,25	A-
51.	Kota Tangerang Selatan	4,17	4,39	4,39	4,25	A-
52.	Kota Cilegon	4,21	4,12	4,12	4,23	A-
53.	Kota Kediri	3,91	4,35	4,35	4,20	A-
54.	Kota Batam	4,22	4,37	4,37	4,20	A-
55.	Kota Mojokerto	3,8	4,24	4,24	4,19	A-

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
56.	Kota Balikpapan	4,23	3,91	3,91	4,19	A-
57.	Kota Padang Panjang	3,51	4,45	4,45	4,17	A-
58.	Kota Probolinggo	3,96	4,26	4,26	4,15	A-
59.	Kota Tebing Tinggi	3,95	3,95	3,95	4,15	A-
60.	Kota Pangkalpinang	4	4,08	4,08	4,15	A-
61.	Kota Kupang	3,8	4,35	4,35	4,15	A-
62.	Kota Bukittinggi	3,62	4,44	4,44	4,13	A-
63.	Kota Tarakan	3,76	4,43	4,43	4,08	A-
64.	Kota Solok	3,9	*NA	4,26	4,08	A-
65.	Kota Binjai	3,71	4,11	4,11	4,01	A-
66.	Kota Ambon	4,16	*NA	3,84	4,00	B
67.	Kota Serang	4,08	3,73	3,73	3,99	B
68.	Kota Pagar Alam	3,72	4,12	4,12	3,99	B
69.	Kota Cirebon	4,23	3,27	3,27	3,97	B
70.	Kota Jambi	3,89	3,45	3,45	3,96	B
71.	Kota Bengkulu	3,04	4,48	4,48	3,95	B
72.	Kota Lhokseumawe	3,8	*NA	4,07	3,94	B
73.	Kota Langsa	3,56	4,26	4,26	3,86	B
74.	Kota Padangsidempuan	3,91	3,73	3,73	3,86	B
75.	Kota Dumai	3,81	3,85	3,85	3,84	B

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
76.	Kota Subulussalam	3,67	4,21	4,12	3,82	B
77.	Kota Palu	3,08	3,73	3,92	3,78	B
78.	Kota Sabang	3,45	2,76	3,50	3,77	B
79.	Kota Batu	3,16	3,55	*NA	3,76	B
80.	Kota Sibolga	3,04	3,85	4,21	3,75	B
81.	Kota Palangkaraya	4,44	*NA	2,76	3,71	B
82.	Kota Bima	3,77	4,26	3,52	3,67	B
83.	Kota Padang	2,98	3,52	3,68	3,44	B-
84.	Kota Kendari	2,87	4,12	3,55	3,44	B-
85.	Kota Baubau	2,9	3,68	3,56	3,31	B-
86.	Kota Makassar	3,1	2,51	3,03	3,21	B-
87.	Kota Pare-Pare	2,88	3,03	2,21	3,16	B-
88.	Kota Tanjungbalai	3,26	3,56	2,69	3,14	B-
89.	Kota Gorontalo	2,99	2,69	3,76	3,13	B-
90.	Kota Sorong	3,06	2,78	3,06	2,90	C
91.	Kota Pematang Siantar	2,85	2,70	2,70	2,85	C
92.	Kota Tidore	2,5	1,30	2,78	2,77	C
93.	Kota Jayapura	1,21	1,84	2,51	2,42	C-
94.	Kota Ternate	NA	3,76	1,30	2,12	C-
95.	Kota Tual	1,38	3,06	1,84	1,97	D

No	DAFTAR KOTA	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KOTA	KATEGORI
96.	Kota Palopo	NA	1,10	1,10	1,64	D
97.	Kota Sungaipenuh	2,04	0,72	0,72	1,32	E

C. KABUPATEN

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
1.	Kabupaten Cilacap	4,64	4,64	4,68	4,65	A
2.	Kabupaten Sidoarjo	4,54	4,75	4,66	4,65	A
3.	Kabupaten Sleman	4,59	4,66	4,63	4,63	A
4.	Kabupaten Jember	4,59	4,75	4,51	4,62	A
5.	Kabupaten Banyumas	4,51	4,71	4,61	4,61	A
6.	Kabupaten Kudus	4,56	4,64	4,63	4,61	A
7.	Kabupaten Sampang	4,33	4,69	4,79	4,60	A
8.	Kabupaten Madiun	4,52	4,75	4,53	4,60	A
9.	Kabupaten Jombang	4,60	4,67	4,52	4,60	A
10.	Kabupaten Sukoharjo	4,43	4,78	4,58	4,60	A
11.	Kabupaten Banyuwangi	4,52	4,72	4,54	4,59	A
12.	Kabupaten Kebumen	4,56	4,68	4,54	4,59	A
13.	Kabupaten Sumedang	4,56	4,57	4,62	4,58	A
14.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4,52	4,70	4,52	4,58	A
15.	Kabupaten Purwakarta	4,65	4,47	4,62	4,58	A
16.	Kabupaten Wonogiri	4,44	4,61	4,68	4,58	A

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
17.	Kabupaten Jepara	4,49	4,55	4,67	4,57	A
18.	Kabupaten Nganjuk	4,53	4,56	4,62	4,57	A
19.	Kabupaten Magetan	4,55	4,58	4,57	4,57	A
20.	Kabupaten Musi Banyuasin	4,52	4,62	4,56	4,57	A
21.	Kabupaten Banjarnegara	4,67	4,49	4,53	4,56	A
22.	Kabupaten Kulonprogo	4,30	4,80	4,59	4,56	A
23.	Kabupaten Garut	4,66	4,28	4,73	4,56	A
24.	Kabupaten Muara Enim	4,51	4,65	4,51	4,56	A
25.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,41	4,65	4,59	4,55	A
26.	Kabupaten Kediri	4,42	4,59	4,64	4,55	A
27.	Kabupaten Pematang	4,50	4,55	4,57	4,54	A
28.	Kabupaten Tapin	4,42	4,51	4,69	4,54	A
29.	Kabupaten Minahasa Selatan	4,46	4,55	4,6	4,54	A
30.	Kabupaten Subang	4,27	4,75	4,58	4,53	A
31.	Kabupaten Deli Serdang	4,47	4,65	4,47	4,53	A
32.	Kabupaten Kuantan Singingi	4,56	4,59	4,44	4,53	A
33.	Kabupaten Wonosobo	4,48	4,67	4,42	4,52	A
34.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	4,35	4,70	4,51	4,52	A
35.	Kabupaten Pasuruan	4,38	4,60	4,57	4,52	A

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
36.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	4,57	4,40	4,57	4,51	A
37.	Kabupaten Boyolali	4,51	4,57	4,45	4,51	A
38.	Kabupaten Musi Rawas	4,41	4,51	4,6	4,51	A
39.	Kabupaten Semarang	4,30	4,56	4,63	4,50	A-
40.	Kabupaten Tulang Bawang	4,38	4,55	4,56	4,50	A-
41.	Kabupaten Banjar	4,32	4,65	4,51	4,49	A-
42.	Kabupaten Tabalong	4,44	4,44	4,59	4,49	A-
43.	Kabupaten Badung	4,44	4,39	4,64	4,49	A-
44.	Kabupaten Sukabumi	4,19	4,75	4,52	4,49	A-
45.	Kabupaten Demak	4,18	4,64	4,6	4,47	A-
46.	Kabupaten Rembang	4,54	4,42	4,44	4,47	A-
47.	Kabupaten Serdang Bedagai	4,29	4,45	4,66	4,47	A-
48.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,87	4,87	4,65	4,46	A
49.	Kabupaten Lampung Tengah	4,35	4,64	4,4	4,46	A-
50.	Kabupaten Pesisir Selatan	4,53	4,39	4,47	4,46	A-
51.	Kabupaten Natuna	4,45	4,45	4,48	4,46	A-
52.	Kabupaten Solok	4,51	4,32	4,55	4,46	A-
53.	Kabupaten Pringsewu	4,68	4,14	4,55	4,46	A-
54.	Kabupaten Banyuasin	4,44	4,51	4,42	4,46	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
55.	Kabupaten Tuban	4,30	4,68	4,36	4,45	A-
56.	Kabupaten Pangandaran	4,55	4,75	4,02	4,44	A-
57.	Kabupaten Purbalingga	3,94	4,60	4,78	4,44	A-
58.	Kabupaten Kendal	4,15	4,60	4,56	4,44	A-
59.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4,27	4,56	4,48	4,44	A-
60.	Kabupaten Karanganyar	4,41	4,53	4,35	4,43	A-
61.	Kabupaten Lampung Utara	4,33	4,47	4,47	4,42	A-
62.	Kabupaten Blora	4,55	4,57	4,13	4,42	A-
63.	Kabupaten Grobogan	4,00	4,61	4,62	4,41	A-
64.	Kabupaten Indramayu	4,23	4,72	4,26	4,40	A-
65.	Kabupaten Ogan Ilir	4,17	4,47	4,57	4,40	A
66.	Kabupaten Bengkalis	4,52	4,08	4,56	4,39	A
67.	Kabupaten Tasikmalaya	4,42	4,43	4,29	4,38	A-
68.	Kabupaten Lamongan	4,28	4,78	4,07	4,38	A-
69.	Kabupaten Way Kanan	4,08	4,66	4,38	4,37	A-
70.	Kabupaten Karimun	4,39	4,30	4,42	4,37	A-
71.	Kabupaten Kuningan	4,28	4,42	4,41	4,37	A-
72.	Kabupaten Batang	4,12	4,49	4,49	4,37	A-
73.	Kabupaten Sijunjung	4,41	4,42	4,25	4,36	A-
74.	Kabupaten Bekasi	4,13	4,51	4,43	4,36	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
75.	Kabupaten Bogor	4,10	4,52	4,44	4,35	A-
76.	Kabupaten Kutai Kartanegara	4,20	4,39	4,47	4,35	A-
77.	Kabupaten Tegal	4,22	4,68	4,14	4,35	A-
78.	Kabupaten Bandung	4,24	4,28	4,51	4,34	A
79.	Kabupaten Musi Rawas Utara	4,24	4,43	4,36	4,34	A-
80.	Kabupaten Langkat	4,33	4,26	4,44	4,34	A-
81.	Kabupaten Brebes	4,33	4,54	4,12	4,33	A
82.	Kabupaten Lumajang	4,14	4,50	4,35	4,33	A-
83.	Kabupaten Ketapang	4,11	4,39	4,48	4,33	A-
84.	Kabupaten Purworejo	3,70	4,53	4,75	4,33	A
85.	Kabupaten Majalengka	4,30	4,09	4,58	4,32	A-
86.	Kabupaten Indragiri Hilir	4,26	4,54	4,15	4,32	A-
87.	Kabupaten Pesawaran	4,05	4,47	4,43	4,32	A-
88.	Kabupaten Ponorogo	3,97	4,55	4,43	4,32	A-
89.	Kabupaten Minahasa Utara	4,71	4,19	4,03	4,31	A-
90.	Kabupaten Bolaang Mongondow	4,42	4,26	4,23	4,30	A-
91.	Kabupaten Mojokerto	4,33	4,14	4,43	4,30	A-
92.	Kabupaten Pacitan	4,00	4,66	4,23	4,30	A-
93.	Kabupaten Temanggung	4,05	4,10	4,73	4,29	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
94.	Kabupaten Ciamis	4,08	4,27	4,53	4,29	A-
95.	Kabupaten Aceh Tamiang	4,16	4,51	4,2	4,29	A-
96.	Kabupaten Padang Pariaman	4,23	4,47	4,17	4,29	A-
97.	Kabupaten Pekalongan	4,44	4,10	4,33	4,29	A-
98.	Kabupaten Tulungagung	4,00	4,34	4,53	4,29	A-
99.	Kabupaten Balangan	4,12	4,53	4,21	4,29	A-
100.	Kabupaten Barito Kuala	4,23	4,46	4,14	4,28	A-
101.	Kabupaten Tanggamus	4,32	4,15	4,35	4,27	A-
102.	Kabupaten Gunung Kidul	4,27	4,30	4,23	4,27	A-
103.	Kabupaten Lima Puluh Kota	4,52	4,32	3,96	4,27	A-
104.	Kabupaten Tanah Datar	3,86	4,40	4,53	4,26	A-
105.	Kabupaten Bangkalan	4,51	4,78	3,49	4,26	A-
106.	Kabupaten Karawang	3,36	4,68	4,74	4,26	A-
107.	Kabupaten Sambas	3,92	4,52	4,34	4,26	A-
108.	Kabupaten Aceh Singkil	4,04	4,48	4,22	4,25	A-
109.	Kabupaten Cirebon	4,30	4,61	3,8	4,24	A-
110.	Kabupaten Pati	4,17	4,21	4,33	4,24	A-
111.	Kabupaten Tanah Laut	3,62	4,43	4,64	4,23	A-
112.	Kabupaten Ngawi	4,41	4,70	3,57	4,23	A-
113.	Kabupaten Bintan	4,35	3,92	4,4	4,22	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
114.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	3,32	4,75	4,59	4,22	A-
115.	Kabupaten Bojonegoro	4,04	4,77	3,83	4,21	A-
116.	Kabupaten Kayong Utara	3,90	4,31	4,43	4,21	A-
117.	Kabupaten Nias Utara	4,13	4,31	4,2	4,21	A-
118.	Kabupaten Bone Bolango	3,53	4,52	4,57	4,21	A-
119.	Kabupaten Probolinggo	4,29	3,67	4,65	4,20	A-
120.	Kabupaten Bulungan	4,24	4,20	4,17	4,20	A-
121.	Kabupaten Konawe	4,17	4,53	3,91	4,20	A-
122.	Kabupaten Kepulauan Anambas	3,98	4,03	4,57	4,19	A-
123.	Kabupaten Bantul	4,36	4,1	4,09	4,18	A-
124.	Kabupaten Kubu Raya	3,57	4,34	4,63	4,18	A-
125.	Kabupaten Bireuen	4,30	4,11	4,12	4,18	A-
126.	Kabupaten Rokan Hulu	4,23	4,15	4,15	4,18	A-
127.	Kabupaten Boalemo	3,61	4,34	4,57	4,17	A-
128.	Kabupaten Tangerang	4,37	4,21	3,93	4,17	A-
129.	Kabupaten Klungkung	3,77	4,48	4,22	4,16	A-
130.	Kabupaten Pandeglang	4,11	4,16	4,2	4,16	A-
131.	Kabupaten Cianjur	4,07	4,46	3,94	4,16	A-
132.	Kabupaten Gresik	4,03	4,30	4,14	4,16	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
133.	Kabupaten Serang	4,16	4,20	4,1	4,15	A-
134.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	3,86	4,32	4,25	4,14	A-
135.	Kabupaten Siak	3,84	4,26	4,31	4,14	A-
136.	Kabupaten Klaten	4,18	4,14	4,08	4,13	A-
137.	Kabupaten Pasaman	3,68	4,16	4,54	4,13	A-
138.	Kabupaten Blitar	4,26	4,27	3,84	4,12	A-
139.	Kabupaten Bangka	3,92	4,09	4,33	4,11	A-
140.	Kabupaten Bangka Tengah	4,02	4,18	4,14	4,11	A-
141.	Kabupaten Simalungun	4,39	3,96	3,99	4,11	A-
142.	Kabupaten Kutai Barat	3,90	4,19	4,24	4,11	A-
143.	Kabupaten Padang Lawas Utara	3,70	4,15	4,48	4,11	A-
144.	Kabupaten Padang Lawas	4,35	4,08	3,88	4,10	A-
145.	Kabupaten Tabanan	3,81	4,32	4,17	4,10	A-
146.	Kabupaten Kampar	4,13	4,48	3,68	4,10	A-
147.	Kabupaten Pohuwato	4,02	4,09	4,18	4,10	A-
148.	Kabupaten Sanggau	4,07	4,11	4,08	4,09	A-
149.	Kabupaten Aceh Tenggara	4,00	4,04	4,22	4,09	A-
150.	Kabupaten Mesuji	4,06	4,09	4,1	4,08	A-
151.	Kabupaten Empat Lawang	3,80	4,66	3,76	4,07	A-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
152.	Kabupaten Nias	3,45	4,45	4,32	4,07	A-
153.	Kabupaten Gianyar	3,98	4,52	3,7	4,07	A-
154.	Kabupaten Pidie Jaya	4,23	3,42	4,52	4,06	A-
155.	Kabupaten Lebak	4,10	4,13	3,93	4,05	A-
156.	Kabupaten Landak	3,36	4,47	4,31	4,05	A-
157.	Kabupaten Malang	4,29	4,09	3,76	4,05	A-
158.	Kabupaten Paser	3,80	4,56	3,72	4,03	A-
159.	Kabupaten Belitung	4,11	3,97	3,97	4,02	A-
160.	Kabupaten Tojo Unauna	4,09	4,01	3,94	4,01	A-
161.	Kabupaten Minahasa Tenggara	4,28	3,22	4,53	4,01	A-
162.	Kabupaten Belitung Timur	3,92	4,09	4,02	4,01	A-
163.	Kabupaten Indragiri Hulu	4,49	3,55	3,96	4,00	B
164.	Kabupaten Buleleng	3,90	4,08	4	3,99	B
165.	Kabupaten Soppeng	3,72	4,29	3,97	3,99	B
166.	Kabupaten Bener Meriah	3,76	3,90	4,31	3,99	B
167.	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	4,27	3,46	4,24	3,99	B
168.	Kabupaten Lampung Timur	3,72	3,96	4,29	3,99	B
169.	Kabupaten Trenggalek	4,11	3,70	4,07	3,96	B
170.	Kabupaten Mempawah	3,17	4,36	4,34	3,96	B

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
171.	Kabupaten Aceh Tengah	3,79	3,51	4,55	3,95	B
172.	Kabupaten Pinrang	3,86	3,85	4,14	3,95	B
173.	Kabupaten Bengkulu Selatan	3,87	3,93	4,02	3,94	B
174.	Kabupaten Pamekasan	3,89	3,76	4,17	3,94	B
175.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3,82	3,91	4,05	3,93	B
176.	Kabupaten Polewali Mandar	3,51	4,58	3,68	3,92	B
177.	Kabupaten Aceh Barat	3,56	3,65	4,55	3,92	B
178.	Kabupaten Bangka Selatan	3,80	4,14	3,82	3,92	B
179.	Kabupaten Lampung Barat	3,78	4,10	3,83	3,90	B
180.	Kabupaten Morowali Utara	3,89	3,62	4,18	3,90	B
181.	Kabupaten Kotawaringin Barat	3,81	3,85	4,02	3,89	B
182.	Kabupaten Lahat	3,28	4,61	3,79	3,89	B
183.	Kabupaten Lampung Selatan	3,39	4,06	4,22	3,89	B
184.	Kabupaten Sragen	3,61	4,01	4,02	3,88	B
185.	Kabupaten Labuhan Batu	3,94	4,36	3,33	3,88	B
186.	Kabupaten Bondowoso	4,27	3,55	3,76	3,86	B
187.	Kabupaten Kepahiang	3,50	4,04	4	3,85	B
188.	Kabupaten Solok Selatan	3,52	4,22	3,77	3,84	B

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
189.	Kabupaten Dairi	3,40	3,70	4,38	3,83	B
190.	Kabupaten Lingga	3,29	4,00	4,19	3,83	B
191.	Kabupaten Kaur	3,44	4,15	3,88	3,82	B
192.	Kabupaten Manggarai Timur	4,18	3,84	3,43	3,82	B
193.	Kabupaten Toba	3,71	3,88	3,85	3,81	B
194.	Kabupaten Tana Tidung	3,44	4,06	3,93	3,81	B
195.	Kabupaten Magelang	3,81	4,04	3,57	3,81	B
196.	Kabupaten Simeulue	3,08	4,28	4,06	3,81	B
197.	Kabupaten Tanah Bumbu	3,34	3,89	4,15	3,79	B
198.	Kabupaten Aceh Jaya	3,51	3,86	4,01	3,79	B
199.	Kabupaten Gayo Lues	3,62	3,75	3,98	3,78	B
200.	Kabupaten Karangasem	3,47	3,89	3,92	3,76	B
201.	Kabupaten Nagan Raya	3,96	3,61	3,71	3,76	B
202.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	3,31	3,83	4,11	3,75	B
203.	Kabupaten Penajam Paser Utara	3,68	3,90	3,66	3,75	B
204.	Kabupaten Lombok Tengah	3,25	4,05	3,92	3,74	B
205.	Kabupaten Nunukan	3,74	3,90	3,57	3,74	B
206.	Kabupaten Aceh Utara	3,73	3,60	3,84	3,72	B
207.	Kabupaten Lombok Barat	3,03	3,99	4,13	3,72	B

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
208.	Kabupaten Bantaeng	2,84	4,46	3,85	3,72	B
209.	Kabupaten Berau	4,47	3,64	3,03	3,71	B
210.	Kabupaten Manggarai Barat	3,49	3,85	3,8	3,71	B
211.	Kabupaten Bangka Barat	3,70	3,93	3,48	3,70	B
212.	Kabupaten Aceh Barat Daya	3,15	4,08	3,84	3,69	B
213.	Kabupaten Bone	3,81	3,91	3,35	3,69	B
214.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,34	3,31	4,42	3,69	B
215.	Kabupaten Pidie	3,39	3,85	3,81	3,68	B
216.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3,23	4,16	3,63	3,67	B
217.	Kabupaten Samosir	3,66	3,53	3,81	3,67	B
218.	Kabupaten Pesisir Barat	3,95	2,96	4,08	3,66	B
219.	Kabupaten Gorontalo Utara	3,22	3,66	4,08	3,65	B
220.	Kabupaten Lebong	3,49	3,82	3,65	3,65	B
221.	Kabupaten Jembrana	3,82	3,98	3,15	3,65	B
222.	Kabupaten Bengkulu Utara	4,45	3,33	3,16	3,65	B
223.	Kabupaten Karo	3,95	2,96	3,98	3,63	B
224.	Kabupaten Kotawaringin Timur	3,47	4,67	2,74	3,63	B
225.	Kabupaten Aceh Selatan	3,06	3,98	3,83	3,62	B
226.	Kabupaten Morowali	3,26	3,69	3,92	3,62	B

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
227.	Kabupaten Bima	3,84	3,37	3,64	3,62	B
228.	Kabupaten Raja Ampat	3,74	3,77	3,34	3,62	B
229.	Kabupaten Jenepono	2,93	4,25	3,66	3,61	B
230.	Kabupaten Lombok Timur	3,08	3,82	3,93	3,61	B
231.	Kabupaten Sintang	3,35	3,53	3,94	3,61	B
232.	Kabupaten Katingan	2,88	3,70	4,22	3,60	B
233.	Kabupaten Dompu	3,33	3,22	4,23	3,59	B
234.	Kabupaten Aceh Besar	4,01	3,16	3,56	3,58	B
235.	Kabupaten Konawe Kepulauan	3,30	3,63	3,8	3,58	B
236.	Kabupaten Pakpak Bharat	2,98	3,70	3,97	3,55	B
237.	Kabupaten Seluma	2,91	3,19	4,55	3,55	B
238.	Kabupaten Gowa	3,22	3,64	3,78	3,55	B
239.	Kabupaten Sigi	3,25	3,85	3,52	3,54	B
240.	Kabupaten Pasaman Barat	3,57	3,16	3,77	3,50	B-
241.	Kabupaten Bangli	3,72	3,37	3,39	3,49	B-
242.	Kabupaten Gorontalo	2,83	4,11	3,51	3,48	B-
243.	Kabupaten Konawe Selatan	3,09	3,61	3,75	3,48	B-
244.	Kabupaten Barru	2,92	3,38	4,14	3,48	B-
245.	Kabupaten Banggai Laut	2,98	3,48	3,96	3,47	B-
246.	Kabupaten Tapanuli Utara	3,08	3,92	3,4	3,47	B-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
247.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2,60	3,71	4,02	3,44	B-
248.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	2,99	3,35	3,93	3,42	B-
249.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,89	3,09	4,29	3,42	B-
250.	Kabupaten Sumenep	2,64	3,50	4,12	3,42	B-
251.	Kabupaten Kapuas	2,71	3,87	3,67	3,42	B-
252.	Kabupaten Sinjai	3,09	4,11	3,04	3,41	B-
253.	Kabupaten Kolaka	3,43	3,04	3,76	3,41	B-
254.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3,13	3,53	3,55	3,40	B-
255.	Kabupaten Aceh Timur	3,28	3,54	3,35	3,39	B-
256.	Kabupaten Buton Utara	3,67	3,53	2,92	3,37	B-
257.	Kabupaten Bulukumba	3,67	3,19	3,22	3,36	B-
258.	Kabupaten Muna	3,27	3,03	3,75	3,35	B-
259.	Kabupaten Lembata	3,13	3,94	2,91	3,33	B-
260.	Kabupaten Pulang Pisau	2,76	3,45	3,77	3,33	B-
261.	Kabupaten Bombana	3,25	3,12	3,6	3,32	B-
262.	Kabupaten Situbondo	3,08	3,35	3,51	3,31	B-
263.	Kabupaten Rokan Hilir	3,24	3,20	3,43	3,29	B-
264.	Kabupaten Banggai	3,02	3,71	3,12	3,28	B-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
265.	Kabupaten Kolaka Timur	3,21	3,01	3,62	3,28	B-
266.	Kabupaten Merangin	2,92	3,45	3,47	3,28	B-
267.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3,41	3,49	2,9	3,27	B-
268.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3,11	3,33	3,36	3,27	B-
269.	Kabupaten Sumba Timur	2,67	3,28	3,85	3,27	B-
270.	Kabupaten Agam	3,26	3,82	2,66	3,25	B-
271.	Kabupaten Muaro Jambi	3,28	2,84	3,57	3,23	B-
272.	Kabupaten Wakatobi	3,27	3,37	3,04	3,23	B-
273.	Kabupaten Bengkayang	3,11	3,85	2,7	3,22	B-
274.	Kabupaten Dharmasraya	4,20	2,41	3,03	3,21	B-
275.	Kabupaten Sekadau	3,48	3,02	3,12	3,21	B-
276.	Kabupaten Pelalawan	2,89	3,46	3,25	3,20	B-
277.	Kabupaten Halmahera Utara	3,29	3,35	2,95	3,20	B-
278.	Kabupaten Malinau	3,27	3,07	3,22	3,19	B-
279.	Kabupaten Konawe Utara	3,08	3,29	3,18	3,18	B-
280.	Kabupaten Asahan	2,90	2,46	4,16	3,17	B-
281.	Kabupaten Kepulauan Meranti	2,71	3,05	3,76	3,17	B-
282.	Kabupaten Parigi Moutong	3,10	3,19	3,23	3,17	B-
283.	Kabupaten Murung Raya	3,05	2,83	3,53	3,14	B-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
284.	Kabupaten Nias Selatan	3,60	1,91	3,88	3,13	B-
285.	Kabupaten Tana Toraja	3,41	2,91	3,05	3,12	B-
286.	Kabupaten Sumbawa	3,05	3,13	3,17	3,12	B-
287.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2,96	2,86	3,52	3,11	B-
288.	Kabupaten Barito Utara	1,55	3,98	3,76	3,10	B-
289.	Kabupaten Banggai Kepulauan	3,00	3,10	3,14	3,08	B-
290.	Kabupaten Tolitoli	2,48	2,80	3,95	3,08	B-
291.	Kabupaten Nias Barat	3,21	2,82	3,18	3,07	B-
292.	Kabupaten Majene	3,13	3,23	2,75	3,04	B-
293.	Kabupaten Lamandau	2,25	3,11	3,72	3,03	B-
294.	Kabupaten Buol	3,66	1,56	3,83	3,02	B-
295.	Kabupaten Sukamara	2,83	3,08	3,13	3,01	B-
296.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2,91	2,93	3,17	3,00	B-
297.	Kabupaten Sarolangun	2,47	3,01	3,48	2,99	B-
298.	Kabupaten Lombok Utara	2,79	2,11	4,06	2,99	B-
299.	Kabupaten Bungo	2,79	2,95	3,16	2,97	B-
300.	Kabupaten Bandung Barat	3,13	3,26	2,5	2,96	B-
301.	Kabupaten Batu Bara	2,55	3,54	2,79	2,96	B-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
302.	Kabupaten Bengkulu Tengah	3,51	1,95	3,41	2,96	B-
303.	Kabupaten Biak Numfor	2,94	3,05	2,86	2,95	C
304.	Kabupaten Halmahera Timur	2,52	3,19	3,05	2,92	C
305.	Kabupaten Kutai Timur	1,89	3,30	3,52	2,90	C
306.	Kabupaten Takalar	1,89	3,22	3,51	2,87	C
307.	Kabupaten Mamuju	1,73	3,93	2,95	2,87	C
308.	Kabupaten Maluku Barat Daya	2,61	2,58	3,4	2,86	C
309.	Kabupaten Mandailing Natal	2,79	2,44	3,16	2,80	C
310.	Kabupaten Seruyan	2,09	2,19	4,08	2,79	C
311.	Kabupaten Buton Tengah	2,90	2,94	2,46	2,77	C
312.	Kabupaten Tanimbar	2,94	2,36	2,97	2,76	C
313.	Kabupaten Muna Barat	2,59	2,93	2,73	2,75	C
314.	Kabupaten Sabu Raijua	2,97	3,35	1,93	2,75	C
315.	Kabupaten Kolaka Utara	1,61	3,25	3,37	2,74	C
316.	Kabupaten Mamuju Tengah	1,64	3,38	3,18	2,73	C
317.	Kabupaten Melawi	2,45	3,29	2,4	2,71	C
318.	Kabupaten Mappi	2,40	1,83	3,86	2,70	C
319.	Kabupaten Wajo	2,28	2,92	2,89	2,70	C
320.	Kabupaten Merauke	2,86	2,48	2,74	2,69	C

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
321.	Kabupaten Kepulauan Talaud	3,21	-	2,17	2,69	C
322.	Kabupaten Teluk Wondama	2,70	2,69	2,62	2,67	C
323.	Kabupaten Buton Selatan	2,90	2,85	2,22	2,66	C
324.	Kabupaten Pasangkayu	1,91	3,49	2,47	2,62	C
325.	Kabupaten Barito Selatan	1,97	2,94	2,92	2,61	C
326.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2,52	1,40	3,88	2,60	C
327.	Kabupaten Kaimana	2,09	2,62	3,07	2,59	C
328.	Kabupaten Kepulauan Selayar	3,00	2,19	2,56	2,58	C
329.	Kabupaten Rote Ndao	2,45	2,61	2,66	2,57	C
330.	Kabupaten Kotabaru	2,26	2,56	2,82	2,55	C
331.	Kabupaten Maros	2,29	2,35	2,99	2,54	C
332.	Kabupaten Tapanuli Selatan	1,66	2,54	3,42	2,54	C
333.	Kabupaten Tebo	1,39	2,98	3,24	2,54	C
334.	Kabupaten Buru Selatan	2,19	2,38	2,91	2,49	C-
335.	Kabupaten Minahasa	2,61	2,22	2,63	2,49	C-
336.	Kabupaten Sorong	2,27	2,54	2,65	2,49	C-
337.	Kabupaten Batanghari	1,90	3,76	1,66	2,44	C-
338.	Kabupaten Donggala	2,85	2,97	1,48	2,43	C-
339.	Kabupaten Toraja Utara	1,50	2,39	3,41	2,43	C-

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
340.	Kabupaten Luwu	2,00	3,19	2	2,40	C-
341.	Kabupaten Mamasa	2,34	2,89	1,93	2,39	C-
342.	Kabupaten Luwu Utara	1,76	1,85	3,53	2,38	C-
343.	Kabupaten Pulau Taliabu	2,10	1,98	3,03	2,37	C-
344.	Kabupaten Kepulauan Aru	2,19	2,83	2,04	2,35	C-
345.	Kabupaten Jayapura	1,14	2,64	3,08	2,29	C-
346.	Kabupaten Sikka	1,48	2,60	2,77	2,28	C-
347.	Kabupaten Tapanuli Tengah	2,02	2,01	2,75	2,26	C-
348.	Kabupaten Halmahera Tengah	1,91	2,08	2,77	2,25	C-
349.	Kabupaten Halmahera Selatan	1,28	2,36	3,06	2,23	C-
350.	Kabupaten Maluku Tenggara	2,25	2,32	2,08	2,22	C-
351.	Kabupaten Alor	1,97	2,57	2,09	2,21	C-
352.	Kabupaten Asmat	1,72	2,45	2	2,06	C-
353.	Kabupaten Halmahera Barat	1,71	2,51	1,66	1,96	D
354.	Kabupaten Ngada	1,67	1,89	2,12	1,89	D
355.	Kabupaten Yahukimo	1,96	2,12	1,56	1,88	D
356.	Kabupaten Belu	1,01	3,48	1,04	1,84	D
357.	Kabupaten Buru	1,00	2,11	2,25	1,79	D
358.	Kabupaten Sidenreng Rappang	2,17	1,65	1,37	1,73	D

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
359.	Kabupaten Sumba Tengah	1,87	1,92	1,38	1,72	D
360.	Kabupaten Enrekang	1,57	1,72	1,72	1,67	D

D. PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK DAPAT DIEVALUASI

No	DAFTAR INSTANSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
1.	Pemerintah Provinsi Papua	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Kota Sawahlunto	NA	NA	NA	NA	NA
3.	Kabupaten Manggarai	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Kabupaten Ende	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Kabupaten Kupang	NA	NA	NA	NA	NA
6.	Kabupaten Malaka	NA	NA	NA	NA	NA
7.	Kabupaten Sumba Barat	NA	NA	NA	NA	NA
8.	Kab, Seram Bagian Barat	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Kabupaten Rejang Lebong	NA	NA	NA	NA	NA
10.	Kabupaten Mukomuko	NA	NA	NA	NA	NA
11.	Kabupaten Supiori	NA	NA	NA	NA	NA
12.	Kabupaten Deiyai	NA	NA	NA	NA	NA
13.	Kabupaten Mimika	NA	NA	NA	NA	NA
14.	Kabupaten Paniai	NA	NA	NA	NA	NA
15.	Kabupaten Puncak Jaya	NA	NA	NA	NA	NA
16.	Kabupaten Keerom	NA	NA	NA	NA	NA
17.	Kabupaten Pegunungan Bintang	NA	NA	NA	NA	NA

No	DAFTAR INSTANSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
18.	Kabupaten Tolikara	NA	NA	NA	NA	NA
19.	Kabupaten Waropen	NA	NA	NA	NA	NA
20.	Kabupaten Mamberamo Raya	NA	NA	NA	NA	NA
21.	Kabupaten Mamberamo Tengah	NA	NA	NA	NA	NA
22.	Kabupaten Yalimo	NA	NA	NA	NA	NA
23.	Kabupaten Lanny Jaya	NA	NA	NA	NA	NA
24.	Kabupaten Nduga	NA	NA	NA	NA	NA
25.	Kabupaten Puncak	NA	NA	NA	NA	NA
26.	Kabupaten Dogiyai	NA	NA	NA	NA	NA
27.	Kabupaten Intan Jaya	NA	NA	NA	NA	NA
28.	Kabupaten Manokwari	NA	NA	NA	NA	NA
29.	Kabupaten Teluk Bintuni	NA	NA	NA	NA	NA
30.	Kabupaten Sorong Selatan	NA	NA	NA	NA	NA
31.	Kabupaten Tamberauw	NA	NA	NA	NA	NA
32.	Kabupaten Maybrat	NA	NA	NA	NA	NA
33.	Kabupaten Manokwari Selatan	NA	NA	NA	NA	NA
34.	Kabupaten Pegunungan Arfak	NA	NA	NA	NA	NA
35.	Kabupaten Boven Digoel	NA	NA	NA	NA	NA
36.	Kabupaten Sarmi	NA	NA	NA	NA	NA
37.	Kabupaten Fak-fak	NA	NA	NA	NA	NA

Lampiran
Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 659 Tahun 2024

KATEGORI PENILAIAN HASIL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

INDEKS	KATEGORI
4,51-5,00	A
4,01-4,50	A-
3,51-4,00	B
3,01-3,50	B-
2,51-3,00	C
2,00-2,51	C-
1,51-2,00	D
1,01-1,50	E
0,10-1,00	F

Keterangan:

1. ULE adalah singkatan dari Unit Lokus Evaluasi, yaitu Organisasi Penyelenggara yang ditunjuk untuk dilaksanakan PEKPPP.
2. NA adalah singkatan dari Not Available, yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kalkulasi nilai sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi, sehingga tidak mendapatkan nilai indeks dan tidak masuk dalam kategori yang ada.
3. *NA adalah Not Available yang dikarenakan tidak adanya lokus atau merupakan daerah yang terdampak bencana alam atau kondisi kahar.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,



